



**PEMERINTAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
2020**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019**

**IKIP**

## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pangandaran, Maret 2020.

BUPATI PANGANDARAN,



# Ihtisar Eksekutif

Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Pada tahun 2019 Kabupaten Pangandaran memasuki usia yang ke-6. Namun Pemerintah Kabupaten Pangandaran bertekad untuk mensejajarkan diri dengan kabupaten/kota lain yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dengan 12 (dua belas) tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

| NO     | MISI    | JUMLAH TUJUAN | JUMLAH SASARAN | JUMLAH INDIKATOR KINERJA | PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN  |
|--------|---------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Kesatu  | 1             | 3              | 10                       | BS = 5, B = 4 , C = 0, K = 0  |
| 2.     | Kedua   | 1             | 2              | 2                        | BS = 1, B = 1, C = 0, K = 0   |
| 3.     | Ketiga  | 3             | 3              | 7                        | BS = 5 , B = 0 , C = 0, K = 2 |
| 4.     | Keempat | 1             | 3              | 4                        | BS = 4, B = 0, C = 0, K = 0   |
| 5.     | Kelima  | 5             | 5              | 6                        | BS = 5, B = 1, C = 0, K = 0   |
| 6.     | Keenam  | 1             | 3              | 8                        | BS = 2, B = 4, C = 0, K = 0   |
| JUMLAH |         | 12            | 19             | 37                       | BS = 23, B = 10, C = 0, K = 1 |

**Keterangan : 2 indikator kinerja belum ada data dan 1 indikator kinerja belum ada target**

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, diketahui bahwa **23 indikator sasaran** atau 67,65% bermakna **Baik Sekali**, **10 indikator sasaran** atau 29,41% bermakna **Baik**, **1 indikator sasaran** atau 2,94% bermakna **Kurang**, **2 indikator sasaran** atau 5,88% **belum tersedia data**, dan **1 indikator sasaran** atau **2,94% belum memiliki target**. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 110,87%. dikategorikan **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 bermakna **Baik Sekali**.

Berdasarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategis secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran berada pada angka 99,25% sementara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 87,11% sehingga terdapat efisiensi sebesar 12,15%. Maka Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No.       | Sasaran | Capaian Kinerja Indikator Sasaran | Anggaran             |                      |       | Keterangan               |
|-----------|---------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------|--------------------------|
|           |         |                                   | Pagu (Rp.)           | Realisasi (Rp.)      | %     |                          |
| 1         | Kesatu  | 102,03                            | 112.710.612.354,05   | 106.613.027.351,00   | 94,35 | Efektif & Efisien        |
| 2         | Kedua   | 101,12                            | 2.595.362.450,00     | 2.302.648.692,00     | 73,39 | Efektif & Efisien        |
| 3         | Ketiga  | 65,52                             | 244.847.685.250,00   | 192.135.183.902,00   | 74,76 | Kurang Efektif & Efisien |
| 4         | Keempat | 149,23                            | 14.382.101.250,00    | 5.847.431.982,00     | 82,17 | Efektif & Efisien        |
| 5         | Kelima  | 105,99                            | 200.389.092.830,00   | 188.933.644.287,00   | 92,42 | Efektif & Efisien        |
| 6         | Keenam  | 54,48                             | 68.947.130.141,00    | 65.014.422.355,00    | 90,08 | Kurang Efektif & Efisien |
| RATA-RATA |         | 99,25                             | 1.540.450.278.445,05 | 1.315.478.733.842,00 | 87,11 | Efektif & Efisien        |

Meskipun secara umum berada pada kategori **Baik Sekali** serta **Efektif dan Efisien**, namun masih perlu upaya-upaya untuk meningkatkan capaian 6 (enam) indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu :

1. Indeks Profesionalisme ASN, dengan cara :
  - a. Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja dan kompensasi terhadap pegawai melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  - b. Adanya Komitmen dari seluruh ASN untuk memiliki kinerja dan disiplin yang baik sehingga capaian indeks profesionalitas ASN khususnya komponen kinerja dan disiplin dapat memenuhi target.
  - c. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2020;
  - d. Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaporkan data terkait dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin aparatur secara lengkap;
  - e. Menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar skor komponen kualifikasi dapat ditingkatkan.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan cara :
  - a. Pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan air limbah cair;
  - b. Dilaksanakan penanaman lahan kritis terutama di wilayah hulu sungai;
  - c. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mulai dari hulu sungai sampai dengan hilir sungai, mengadakan program pengelolaan sampah di sumber sampah dan mengadakan pembangunan TPST 3 R di tiap Desa.
3. Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik, dengan cara :
  - a. Merubah dan menyesuaikan dengan data dasar terbaru sebagaimana dituangkan dalam Permen PU tentang Penetapan Daerah Irigasi;
  - b. Merubah dan menyesuaikan kembali perencanaan rehabilitasi jaringan pada Jaringan Irigasi Teknis sesuai data terbaru.
4. Indeks Risiko Sanitasi, dengan cara :
  - a. Penanganan terpadu dalam pembangunan permukiman (keterpaduan dalam penanganan kawasan kumuh dan sanitasi) yaitu pembangunan RUTILAHU yang dilengkapi dengan akses rumah tangga bersanitasi.
  - b. Meningkatkan peran masyarakat yang ikut aktif dalam pemanfaatan limbah organik untuk mengurangi pencemaran lingkungan setempat.
  - c. Penambahan anggaran untuk pembuatan drainase guna mengurangi risiko genangan air
5. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan cara :
  - a. Menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran berkurang agar pencari kerja dapat tertampung;
  - b. Mengefektifkan program padat karya tunai di desa-desa di wilayah Kabupaten Pangandaran yang dibiayai dari anggaran Dana Desa agar mampu mengurangi angka pengangguran terbuka.
6. Jumlah kunjungan wisata, dengan cara :
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, dengan cara menciptakan dan meningkatkan kualitas produk, pelayanan kepariwisataan, kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata (pilihan dan sistem transportasi) dan pembangunan sarana dan prasarana;
  - b. Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
  - c. Menciptakan destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan PAD dan ekonomi masyarakat;
  - d. Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan sehingga kemungkinan besar wisatawan akan berkunjung kembali dan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain.
  - e. Mengembangkan penyelenggaraan event-event yang dapat menarik wisatawan untuk datang dengan berbagai strategi .
  - f. Mengembangkan sistem informasi terpadu agar memudahkan dalam mengakses informasi seputar kepariwisataan Pangandaran sehingga sehingga dapat menangkal isu-isu negative dan informasi yang tidak benar (berita *hoax*)

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

## DAFTAR ISI

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar                                                                  |         |
| Ihtisar Eksekutif                                                               |         |
| Daftar Isi .....                                                                | i       |
| Daftar Tabel .....                                                              | iv      |
| Daftar Gambar .....                                                             | viii    |
| Bab I Pendahuluan .....                                                         | I-1     |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                        | I-1     |
| 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran .....                                   | I-2     |
| 1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....                                 | I-2     |
| 1.2.2 Potensi Pengembangan Sektor Pariwisata .....                              | I-5     |
| 1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                                        | I-7     |
| 1.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....                                | I-7     |
| 1.4 Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran .....                                | I-16    |
| 1.4.1 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .....                            | I-16    |
| 1.4.2 Sumber Daya Manusia (SDM) .....                                           | I-18    |
| 1.5 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pangandaran .....                        | I-21    |
| Bab II Perencanaan Kinerja .....                                                | II-1    |
| 2.1 Rencana Strategis 2016-2021 .....                                           | II-1    |
| 2.1.1 Visi .....                                                                | II-2    |
| 2.1.2 Misi .....                                                                | II-3    |
| 2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....                               | II-3    |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                                         | II-4    |
| 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) .....                                           | II-6    |
| 2.4 Rencana Kerja (PK) .....                                                    | II-7    |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja .....                                             | III-1   |
| 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 .....           | III-1   |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran .....             | III-4   |
| 3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran<br>Tahun 2019 ..... | III-102 |
| 3.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah .....                                       | III-103 |
| 3.3.2 Efektivitas dan Efisiensi Keuangan .....                                  | III-116 |
| Bab IV Penutup .....                                                            | IV-1    |
| Lampiran                                                                        |         |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                                  |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 1.1  | Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran .....                                                                                                      | I-2   |
| Tabel 1.2  | Jumlah Penduduk Menurut Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 .....                                             | I-4   |
| Tabel 1.3  | Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 .....                                                                | I-5   |
| Tabel 1.4  | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pangandaran (Dalam Juta Rupiah) .....                       | I-8   |
| Tabel 1.5  | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-20212 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pangandaran (Dalam Juta Rupiah) .....                                 | I-10  |
| Tabel 1.6  | Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pangandaran .....                       | I-11  |
| Tabel 1.7  | Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012-20213 Kabupaten Pangandaran .....               | I-12  |
| Tabel 1.8  | Perkembangan PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2021 .....                                        | I-13  |
| Tabel 1.9  | Tren dan Proyeksi Pendapatan Per Kapita Menggunakan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangandaran Harga Berlaku dan Harga Konstan Periode 2012-2021 ..... | I-13  |
| Tabel 1.10 | Simulasi Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Pangandaran Tahun 2014-2021 .....                                                   | I-14  |
| Tabel 1.11 | Simulasi Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Pangandaran Tahun 2014-2021 .....                                                               | I-15  |
| Tabel 1.12 | Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2017 .....                                                                                    | I-15  |
| Tabel 1.13 | Data Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) dan Fungsi/SKPD Kabupaten Pangandaran .....                                                                               | II-20 |
| Tabel 1.14 | Data Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) dan Fungsi/SKPD Berdasarkan Eselonering Kabupaten Pangandaran .....                                                       | II-20 |
| Tabel 2.1  | Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran .....                                                                                          | II-3  |
| Tabel 2.2  | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 .....                                                                                             | II-4  |
| Tabel 2.3  | Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 .....                                                                                             | II-6  |
| Tabel 3.1  | Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasara .....                                                                                   | III-1 |



|            |                                                                                                                          |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 3.2  | Pencapaian Indikator Sasaran .....                                                                                       | III-2  |
| Tabel 3.3  | Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....                                                                   | III-2  |
| Tabel 3.1  | Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja<br>Sasara .....                                        | III-1  |
| Tabel 3.2  | Pencapaian Indikator Sasaran .....                                                                                       | III-2  |
| Tabel 3.3  | Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....                                                                   | III-2  |
| Tabel 3.4  | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Birokrasi yang bersih dan<br>akuntabel .....                                     | III-4  |
| Tabel 3.5  | Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat .....                                                           | III-7  |
| Tabel 3.6  | Perbandingan <i>Quality Assurance (QA)</i> BPKP tahun 2018 dan 2019 .....                                                | III-8  |
| Tabel 3.7  | Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota Lain .....                                                          | III-8  |
| Tabel 3.8  | Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019 .....                                                    | III-9  |
| Tabel 3.9  | Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2018 .....                                                    | III-9  |
| Tabel 3.10 | Perbandingan Realisasi SPIP Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar .....                                                  | III-10 |
| Tabel 3.11 | Kondisi Kematangan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Hasil<br>Penilaian Mandiri .....                                | III-11 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kabupaten<br>Pangandaran dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar ..... | III-12 |
| Tabel 3.13 | Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019 ....                                                     | III-12 |
| Tabel 3.14 | Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2018 ...                                                      | III-13 |
| Tabel 3.15 | Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 .....                                                               | III-14 |
| Tabel 3.16 | Perbandingan Realisasi Kinerja AKIP dengan Tahun Lalu .....                                                              | III-14 |
| Tabel 3.17 | Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pangandaran Tahun<br>2019 .....                                            | III-14 |
| Tabel 3.18 | Hasil Capaian Kinerja AKIP Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD<br>Kabupaten Pangandaran 2016-2021 .....               | III-17 |
| Tabel 3.19 | Perbandingan Realisasi Persentase Penggunaan E-Procurement<br>terhadap Belanja Pengadaan Dengan Tahun Lalu .....         | III-19 |
| Tabel 3.20 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Birokrasi yang Efektif dan Efisien ...                                           | III-20 |
| Tabel 3.21 | Skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 .....                                                   | III-22 |
| Tabel 3.22 | Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dengan Tahun<br>Lalu .....                                             | III-22 |
| Tabel 3.23 | Perbandingan Realisasi Indeks SPBE Dengan Tahun Lalu .....                                                               | III-24 |
| Tabel 3.24 | Pengukuran Indeks SPBE .....                                                                                             | III-25 |
| Tabel 3.25 | Pembagian Bobot Penilaian Indeks SPBE .....                                                                              | III-26 |
| Tabel 3.26 | Level Nilai Indikator Indeks SPBE .....                                                                                  | III-27 |
| Tabel 3.27 | Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangandaran<br>Tahun 2019 .....                                       | III-28 |
| Tabel 3.28 | Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Dengan Tahun<br>Lalu .....                                             | III-29 |

|            |                                                                                                                        |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 3.29 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas .....                | III-30 |
| Tabel 3.30 | Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan .....                  | III-32 |
| Tabel 3.31 | Rekapitulasi Hasil Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Dengan Berbagai Metode.....                                   | III-32 |
| Tabel 3.32 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kesesuaian Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah .....  | III-36 |
| Tabel 3.33 | Perbandingan Realisasi Ketaatan Terhadap RTRW Dengan Tahun Lalu ....                                                   | III-37 |
| Tabel 3.34 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup .....                                   | III-37 |
| Tabel 3.35 | Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Tahun Lalu .....                                        | III-38 |
| Tabel 3.36 | Pemantauan Titik Sampel Air di Kabupaten Pangandaran .....                                                             | III-39 |
| Tabel 3.37 | Penghitungan Indeks Kualitas Air .....                                                                                 | III-40 |
| Tabel 3.38 | Hasil Pengambilan Sample Udara Dengan Metode Passive Sampler .....                                                     | III-40 |
| Tabel 3.39 | Pengambilan Sampel Udara Dengan Metode Passive Sampler .....                                                           | III-41 |
| Tabel 3.40 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualias .....                  | III-42 |
| Tabel 3.41 | Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Tahun Lalu .....                                        | III-43 |
| Tabel 3.42 | Perbandingan Realisasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Tahun Lalu .....                                          | III-44 |
| Tabel 3.43 | Perbandingan Realisasi Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik Dengan Tahun Lalu .....                        | III-46 |
| Tabel 3.44 | Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Dengan Tahun Lalu .....                              | III-47 |
| Tabel 3.45 | Nilai IRS- Input Instrumental .....                                                                                    | III-48 |
| Tabel 3.46 | Perbandingan Realisasi Indeks Resiko Sanitasi Dengan Tahun Lalu .....                                                  | III-49 |
| Tabel 3.47 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana .....                        | III-50 |
| Tabel 3.48 | Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Dengan Tahun Lalu .....                                                   | III-51 |
| Tabel 3.49 | Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 .....                                           | III-52 |
| Tabel 3.50 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan .....                         | III-54 |
| Tabel 3.51 | Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Dan Prasarana Pusat Pemerintahan Dengan Tahun Lalu .....                      | III-54 |
| Tabel 3.52 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaa ..... | III-55 |



|            |                                                                                                                       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 3.53 | Perbandingan Realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal Dengan Tahun Lalu .....                                   | III-57 |
| Tabel 3.54 | Rekap Data Nilai Sikap Peserta Didik .....                                                                            | III-59 |
| Tabel 3.55 | Perbandingan Realisasi Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik Dengan Tahun Lalu .....          | III-60 |
| Tabel 3.56 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD .....                                       | III-60 |
| Tabel 3.57 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Kesatuan Bangsa .....                                           | III-62 |
| Tabel 3.58 | Perbandingan Realisasi Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Dengan Tahun Lalu .....                      | III-63 |
| Tabel 3.59 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi ..... | III-64 |
| Tabel 3.60 | Rekapitulasi Perolehan Suara dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 .....                         | III-65 |
| Tabel 3.61 | Perbandingan Realisasi Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dengan Tahun Lalu .....                         | III-65 |
| Tabel 3.62 | Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu .....                                                                | III-66 |
| Tabel 3.63 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat .....    | III-66 |
| Tabel 3.64 | Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Tahun Lalu .....                                       | III-67 |
| Tabel 3.65 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk .....                                | III-68 |
| Tabel 3.66 | Perbandingan Realisasi Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Dengan Tahun Lalu .....                             | III-69 |
| Tabel 3.67 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender .....                       | III-70 |
| Tabel 3.68 | Perbandingan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender Dengan Tahun Lalu .....                                             | III-70 |
| Tabel 3.69 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga .....                              | III-71 |
| Tabel 3.70 | Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019                                                      | III-73 |
| Tabel 3.71 | Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Usia .....                                                                 | III-73 |
| Tabel 3.72 | Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Usia .....                                                                   | III-74 |
| Tabel 3.73 | Data Pemuda yang Aktif Berorganisasi .....                                                                            | III-75 |
| Tabel 3.74 | Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) Dengan Tahun Lalu .....                                    | III-76 |
| Tabel 3.75 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD .....                                       | III-77 |

|             |                                                                                                         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.76  | Pemuda yang Aktif Berolahraga .....                                                                     | III-79  |
| Tabel 3.77  | Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Keolahragaan (IPK)<br>Dengan Tahun .....                      | III-82  |
| Tabel 3.78  | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode<br>akhir RPJMD.....                       | III-82  |
| Tabel 3.79  | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Menurunnya angka kemiskinan ....                               | III-84  |
| Tabel 3.80  | Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Angka Kemiskinan<br>Dengan Tahun Lalu .....                 | III-84  |
| Tabel 3.81  | Angka Kemiskinan Di Kabupaten Pangandaran (2018 – 2019) .....                                           | III-85  |
| Tabel 3.82  | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 Menurunnya kesenjangan<br>antar wilayah.....                   | III-86  |
| Tabel 3.83  | Nilai Indeks Gini Ratio Kabupaten Pangandaran Periode Tahun 2016-<br>2018 .....                         | III-87  |
| Tabel 3.84  | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Menurunnya tingkat<br>pengangguran .....                       | III-88  |
| Tabel 3.85  | Perbandingan Realisasi Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka<br>Dengan Tahun Lalu .....               | III-89  |
| Tabel 3.86  | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Laju<br>Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan ..... | III-89  |
| Tabel 3.87  | Perbandingan Realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB Dengan Tahun<br>Lalu .....                           | III-90  |
| Tabel 3.88  | Perbandingan Realisasi Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM<br>Dengan Tahun Lalu .....                  | III-92  |
| Tabel 3.89  | Perbandingan Usaha Mikro Baru terhadap UMKM Dengan Tahun Lalu ..                                        | III-92  |
| Tabel 3.90  | Hasil Pengukuran Kesehatan Koperasi .....                                                               | III-93  |
| Tabel 3.91  | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) .....                                                        | III-95  |
| Tabel 3.92  | Perbandingan Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Dengan Tahun<br>Lalu .....                              | III-95  |
| Tabel 3.93  | Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016 – 2019 .....                                                        | III-96  |
| Tabel 3.94  | Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Kabupaten<br>Pangandaran Tahun 2018-2019.....                | III-98  |
| Tabel 3.95  | Perbandingan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisata Dengan Tahun Lalu ....                                   | III-98  |
| Tabel 3.96  | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran<br>2019 .....                          | III-104 |
| Tabel 3.97  | Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 .....                                         | III-106 |
| Tabel 3.98  | Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun<br>Anggaran 2019 .....                  | III-107 |
| Tabel 3.99  | Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 .....                                        | III-110 |
| Tabel 3.100 | Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2018 .....                                        | III-110 |

|             |                                                                                                                            |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.101 | Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 .....                                                             | III-111 |
| Tabel 3.102 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 ..                                                       | III-111 |
| Tabel 3.103 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada<br>Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019.....                | III-112 |
| Tabel 3.104 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada<br>Pemerintahan Desa TA 2019 .....                       | III-112 |
| Tabel 3.105 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada<br>Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 .....                      | III-112 |
| Tabel 3.106 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Tahun<br>Anggaran 2019 .....                                  | III-113 |
| Tabel 3.107 | Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 .                                                         | III-113 |
| Tabel 3.108 | Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 .....                                                           | III-114 |
| Tabel 3.109 | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran<br>2019 .....                                                | III-114 |
| Tabel 3.110 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 .....                                                             | III-114 |
| Tabel 3.111 | Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun<br>Anggaran 2019 .....                                           | III-116 |
| Tabel 3.112 | Perbandingan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun<br>Anggaran 2019 .....                                           | III-116 |
| Tabel 3.113 | Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran<br>Strategis pada Misi ke-1 RPJMD Tahun 2019 .....       | III-117 |
| Tabel 3.114 | Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran<br>Strategis pada Misi ke-2 RPJMD RPJMD Tahun 2019 ..... | III-119 |
| Tabel 3.115 | Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran<br>Strategis pada Misi ke-3 RPJMD RPJMD Tahun 2019 ..... | III-120 |
| Tabel 3.116 | Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran<br>Strategis pada Misi ke-4 RPJMD Tahun 2019 .....       | III-122 |
| Tabel 3.117 | Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran<br>Strategis pada Misi ke-5 RPJMD Tahun 2019 .....       | III-123 |
| Tabel 3.118 | Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran<br>Strategis pada Misi ke-6 RPJMD Tahun 2019 .....       | III-125 |
| Tabel 3.119 | Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten<br>Pangandaran Tahun 2019 .....                      | III-127 |
| Tabel 4.1   | Analisis Efektifitas dan Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis<br>RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 .....      | IV-1    |
| Tabel 4.2   | Analisis Efektifitas dan Efisiensi per MisiRPJMD Kabupaten<br>Pangandaran Tahun 2018 .....                                 | IV-3    |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                                                                     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 1.1  | Orientasi Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat .....                                                                                        | I-2    |
| Gambar 1.2  | Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran .....                                                                                                | I-3    |
| Gambar 1.3  | Lokasi Tempat Wisata dan Jenis Daerah Tujuan WisataPangandaran .....                                                                                | I-6    |
| Gambar 1.4  | Grafik Tren dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan<br>Pendapatan Perkapita Kab. Pangandaran Periode 2012-2021 .....                                   | I-14   |
| Gambar 3.1  | Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD TA 2011 – 2018 Di<br>Jawa Barat .....                                                                           | III-6  |
| Gambar 3.2  | Capaian Nilai AKIP .....                                                                                                                            | III-18 |
| Gambar 3.3  | Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat<br>daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten PangandaranTahun<br>2017,2018, dan 2019 ..... | III-35 |
| Gambar 3.4  | Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Bara .....                                                                                    | III-51 |
| Gambar 3.5  | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun<br>2019 .....                                                                         | III-68 |
| Gambar 3.6  | Indek Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Jawa Barat .....                                                                                  | III-71 |
| Gambar 3.7  | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun<br>2019 .....                                                                         | III-85 |
| Gambar 3.8  | Perkembangan Gini Rasio Provinsi Jabar, Maret 2015 – September<br>2019 .....                                                                        | III-87 |
| Gambar 3.9  | Perkembangan Gini Rasio Nasional, September 2012 – September<br>2019 .....                                                                          | III-87 |
| Gambar 3.10 | Pertumbuhan Eknomi Jawa Barat Tahun 2019.....                                                                                                       | III-91 |
| Gambar 3.11 | Time Series Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pangandaran,<br>Provinsi Jawa Barat dan Nasional .....                                               | III-96 |



## 1.1

### *Latar Belakang*

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Guna melaksanakan ketentuan tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

### 1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

**Gambar 1.1**  
**Orientasi Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat**



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, tahun 2010

Kabupaten Pangandaran memiliki ibukota kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan luas wilayah kurang lebih 1.010,92 km<sup>2</sup> terdiri atas 10 kecamatan dengan distribusi luasan untuk masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran**

| No  | Kecamatan     | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Jumlah Desa | Jumlah Dusun | Jumlah RW  | Jumlah RT    |
|-----|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| (1) | (2)           | (3)                             | (4)         | (5)          | (6)        | (7)          |
| 1   | Parigi        | 98,04                           | 10          | 53           | 122        | 399          |
| 2   | Cijulang      | 93,16                           | 7           | 38           | 90         | 253          |
| 3   | Cimerak       | 118,18                          | 11          | 51           | 99         | 357          |
| 4   | Cigugur       | 97,29                           | 7           | 39           | 64         | 200          |
| 5   | Langkaplancar | 177,19                          | 15          | 66           | 115        | 413          |
| 6   | Mangunjaya    | 32,78                           | 5           | 28           | 47         | 233          |
| 7   | Padaherang    | 118,87                          | 14          | 60           | 142        | 442          |
| 8   | Kalipucang    | 136,78                          | 9           | 29           | 80         | 290          |
| 9   | Pangandaran   | 60,77                           | 8           | 33           | 89         | 343          |
| 10  | Sidamulih     | 77,98                           | 7           | 33           | 67         | 258          |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>1.011,04</b>                 | <b>93</b>   | <b>430</b>   | <b>915</b> | <b>3.188</b> |

Sumber: Dinas Sosial dan PMD Kab. Pangandaran, 2019

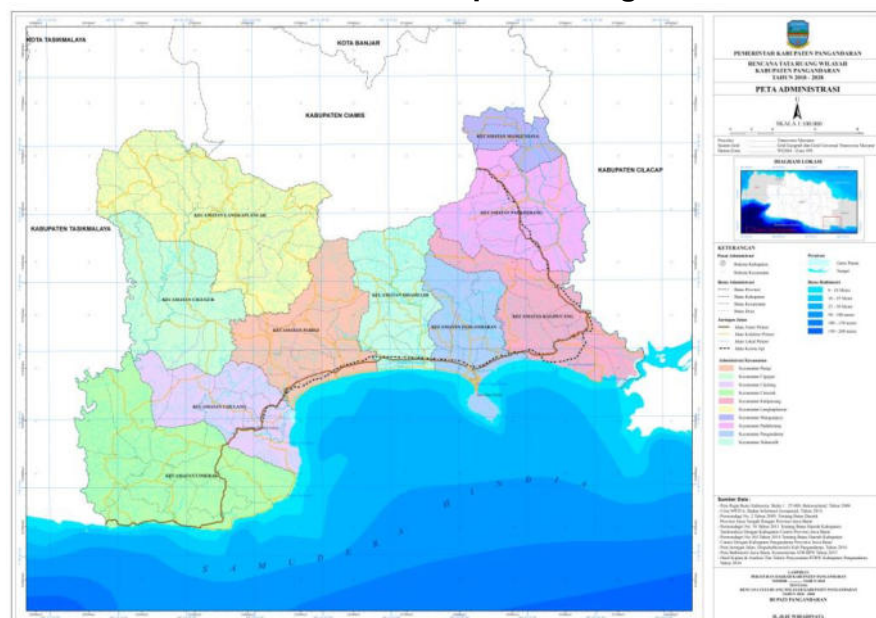
Menurut data tahun 2019 Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan, 93 desa, 430 dusun, 915 Rukun Warga dan 3.188 Rukun Tetangga. Kecamatan Padaherang memiliki jumlah RT dan RW terbanyak namun jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Langkaplancar. Kecamatan Cimerak terdiri dari 11 desa, Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cigugur terdiri dari 7 desa, Kecamatan Langkaplancar terdiri dari 15 desa, Kecamatan Parigi terdiri 10 desa, Kecamatan Sidamulih terdiri dari 7 desa, Kecamatan Pangandaran terdiri dari 8 desa, Kecamatan Kalipucang terdiri dari 9 desa, Kecamatan Padaherang terdiri dari 14 desa dan Kecamatan Mangunjaya terdiri dari 5 desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas kabupaten dan batas kecamatan.

**Gambar 1.2**  
**Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran**



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038, tahun 2018



a) **Perkembangan Kependudukan**

Berdasarkan data jumlah penduduk hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 yaitu sebanyak 422.615 orang. Dari segi komposisi jumlah penduduk, laki-laki sebanyak 211.220 orang dan perempuan sebanyak 211.395 orang, dengan demikian maka jumlah penduduk laki- laki relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan hal ini pun jelas tergambar dari nilai *sex ratio* sebesar 99,92 %.

Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.011,04 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 422.615 orang menyebabkan kepadatan penduduk pada Tahun 2019 mencapai 418,00 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Pangandaran sebesar 941,90 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Cigugur dengan kepadatan penduduk sebesar 233,53 orang per km<sup>2</sup>.

Dari segi penyebarannya, 16,49% penduduk Kabupaten Pangandaran bertempat tinggal di Kecamatan Padaherang. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Mangunjaya dapat dimengerti karena Kecamatan Mangunjaya mempunyai luas wilayah yang relatif luas. *Sex ratio* Kabupaten pangandaran adalah 100,17% yang berarti penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih banyak dengan penduduk yang berkelamin perempuan. Angka *sex ratio* di atas seratus atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan terdapat di Kecamatan Cimerak, Cigugur, Langkaplancar, Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Pangandaran.

Dilihat dari jumlah keluarga Kecamatan Padaherang berada urutan paling teratas dengan jumlah keluarga sebesar 23.821 keluarga. Sementara itu, dilihat dari rata-rata anggota keluarga tertingi terdapat di Kecamatan Pangandaran sebesar 2,97 dan rata-rata anggota keluarga terendah terdapat di Kecamatan Cijulang sebesar 2,63. Angka beban tanggungan tertinggi terdapat di kecamatan Cijulang yang mencapai 47,6.

Gambaran secara lebih detail mengenai keadaan kependudukan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| No     | Kecamatan     | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk |
|--------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
|        |               |                                 | (Jiwa)          | (Jiwa)             |
| (1)    | (2)           | (3)                             | (4)             | (5)                |
| 1      | Parigi        | 98,04                           | 45.165          | 460,68             |
| 2      | Cijulang      | 93,16                           | 28.001          | 300,57             |
| 3      | Cimerak       | 118,18                          | 48.461          | 410,06             |
| 4      | Cigugur       | 97,29                           | 22.720          | 233,53             |
| 5      | Langkaplancar | 177,19                          | 51.160          | 288,73             |
| 6      | Mangunjaya    | 63,03                           | 32.986          | 523,34             |
| 7      | Padaherang    | 89,27                           | 69.104          | 774,10             |
| 8      | Kalipucang    | 136,78                          | 38.635          | 282,46             |
| 9      | Pangandaran   | 60,77                           | 57.239          | 941,90             |
| 10     | Sidamulih     | 77,98                           | 29.144          | 373,74             |
| Jumlah |               | 1.011,04                        | 422.615         | 418,00             |

Sumber: DISDUKAPIL Kab. Pangandaran, 2019

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pangandaran secara umum menggambarkan bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki modal pembangunan berupa SDM produktif yang menjanjikan. Hal ini diindikasikan oleh persentase penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang sangat tinggi di struktur penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 69,74 persen dari total penduduk, sementara jumlah penduduk usia belum produktif adalah sebesar 20,84 persen yang pada saatnya akan tumbuh menjadi penduduk usia produktif.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| Umur   | Jumlah Penduduk |       |         |       |         |        |
|--------|-----------------|-------|---------|-------|---------|--------|
|        | L               | %     | P       | %     | Jumlah  | %      |
| 00-04  | 12,583          | 3.01  | 11,741  | 2.81  | 24,324  | 5.83   |
| 05-09  | 16,208          | 3.88  | 15,008  | 3.59  | 31,216  | 7.48   |
| 10-14  | 16,286          | 3.90  | 15,170  | 3.63  | 31,456  | 7.53   |
| 15-19  | 15,791          | 3.78  | 15,170  | 3.86  | 31,095  | 7.45   |
| 20-24  | 16,902          | 4.05  | 16,117  | 3.86  | 33,019  | 7.91   |
| 25-29  | 15,354          | 3.68  | 14,745  | 3.53  | 30,099  | 7.21   |
| 30-34  | 14,487          | 3.47  | 14,297  | 3.42  | 28,784  | 6.89   |
| 35-39  | 14,810          | 3.55  | 15,095  | 3.62  | 29,905  | 7.16   |
| 40-44  | 14,206          | 3.40  | 15,582  | 3.73  | 29,788  | 7.13   |
| 45-49  | 15,566          | 3.73  | 16,613  | 3.98  | 32,179  | 7.71   |
| 50-54  | 14,008          | 3.35  | 15,325  | 3.67  | 29,333  | 7.02   |
| 55-59  | 13,038          | 3.12  | 13,603  | 3.26  | 26,641  | 6.38   |
| 60-64  | 10,352          | 2.48  | 10,042  | 2.41  | 20,396  | 4.88   |
| 65-69  | 7,920           | 1.90  | 7,574   | 1.81  | 15,494  | 3.71   |
| 70-74  | 4,683           | 1.12  | 5,085   | 1.22  | 9,766   | 2.34   |
| >75    | 6,766           | 1.64  | 7,305   | 1.75  | 14,068  | 3.37   |
| Jumlah | 208,962         | 50.04 | 208,601 | 49.96 | 417,563 | 100.00 |

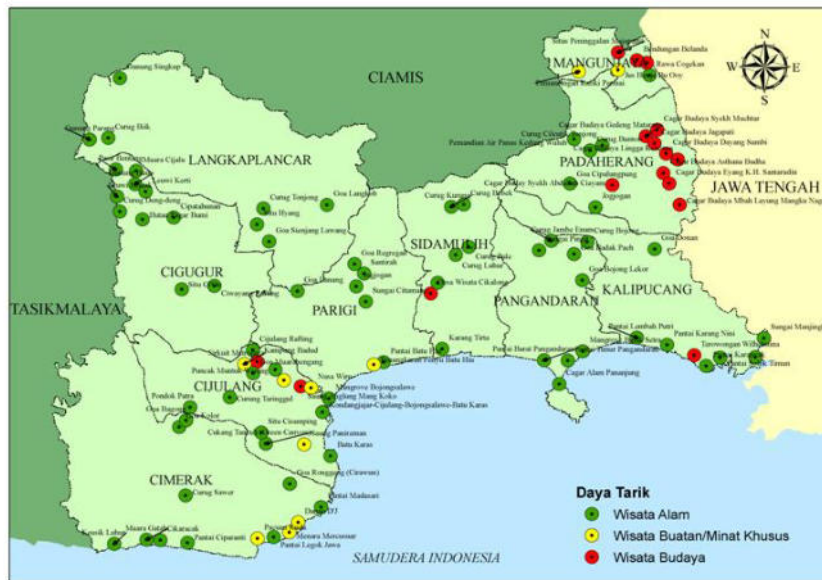
Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2019 Semester II Kabupaten Pangandaran Disdukcapil.

**1.2.2 Potensi Pengembangan Sektor Pariwisata**

Pariwisata di Pangandaran merupakan salahsatu tujuan utama dari destinasi wisata di Indonesia, hal ini termaktub dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPPARNAS 2010-2025 yang menetapkan Kabupaten Pangandaran sebagai salahsatu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Meskipun merupakan kabupaten yang memiliki daerah pesisir dengan potensi wisata alam pantainya, Kabupaten Pangandaran memiliki potensi wisata alam lainnya, yaitu wisata cagar alam, wisata rawa dan wisata sungai. Jenis potensi wisata lainnya yang dimiliki adalah wisata budaya dan wisata buatan/minat khusus. Gambar di bawah ini memperlihatkan sebaran titik-titik tempat wisata di Kabupaten Pangandaran, terlihat bahwa mayoritas jenis wisata yang ada merupakan wisata alam yang tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pangandaran.

**Gambar 1.3**  
**Lokasi Tempat Wisata dan Jenis Daerah Tujuan Wisata Pangandaran**



Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata  
Kabupaten Pangandara, diolah

Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dibagi kedalam tiga kategori :

- Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya yang memperlihatkan kekhasan lokal dari kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang diantaranya adalah Batu kalde yang bertempat di Cagar Alam Pangandaran, Gua Panggung berada di obyek wisata Cagar Alam Pangandaran dan Sembah Agung di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang.
- Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang merupakan obyek wisata berbasis pantai dan cagar alam yang diantaranya adalah Karang Nini, Lembah Putri, Karapyak, Palatar Agung, Pangandaran, Karang Tirta, Batu Hiu, Batu Karas, Madasari dan Keusik Luhur.
- Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus yang merupakan objek wisata yang dibuat secara khusus untuk menunjang minat-minat tertentu yang diantaranya adalah objek wisata sungai Citumang, Karang Nini, Gua Donan, Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon dan Curug Jambe dan Cagar Alam Pananjung.

Aktivitas wisata yang diselenggarakan di Kabupaten Pangandaran cukup beragam, dimana diagendakan berbagai even kepariwisataan seperti Nyuguh, Hajat Bumi Selamintuna, Prosesi Seni Milangkala Kabupaten Pangandaran, Upacara Adat, Gelar Budaya Tatar, Pentas Wayang Golek, Kreatifitas Seni, Upacara Adat Merlawu, Pentas Seni Hiburan Hari Raya, Hajat Laut, Ronggeng Gunung dan Kontes Burung Berkicau serta kontes Surfing di Pantai Batukaras dan Pangandaran.

Untuk menunjang kepariwisataan, di Kabupaten Pangandaran cukup tersedia sarana akomodasi atau penginapan yang tersebar sejak memasuki Kota Pangandaran. Berdasarkan hasil pendataan PHRI, pada Tahun 2016 di Kabupaten Pangandaran terdapat 311 hotel, diantaranya Hotel berbintang ada 5 buah, Hotel non bintang 306 buah. Namun ketersediaan sarana dan akomodasi ini masih banyak berpusat di Kecamatan Pangandaran yang memang sudah sangat terkenal di Indonesia.

### 1.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 1.4 merupakan nilai dan kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB tahun 2012-2015 beserta proyeksinya hingga tahun 2021 berdasarkan harga konstan. Secara umum, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kab. Pangandaran pada periode 2012-2014. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami penurunan dan akhirnya pada tahun 2015, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bukan lagi sektor yang memiliki kontribusi terbesar karena kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berhasil melampaui kontribusi sektor tersebut dengan kontribusi sebesar 24,28%. Sektor lain yang memiliki kontribusi yang cukup potensial ialah sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, industri pengolahan, jasa pendidikan dan jasa lainnya dengan masing-masing kontribusi sebesar 10,72%; 8,98%; 7,97%; 5,70%; 5,07% dan 2,92%.

Hasil proyeksi kontribusi untuk masing-masing sektor pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perubahan secara struktural dari perekonomian Kabupaten Pangandaran terus terjadi. Perubahan struktural perekonomian yang dimaksud merupakan perubahan dari struktur perekonomian yang lebih menitikberatkan pada sumber daya alam (seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) menjadi struktur perekonomian yang lebih menitikberatkan pada industri terutama industri jasa yang dapat terkait dengan pariwisata. Sebagai contoh, kontribusi sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata seperti sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan minuman, dan jasa lainnya mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Pangandaran. Kontribusi ke-4 sektor tersebut jika dijumlahkan mencapai hingga 46,41% pada proyeksi tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,92% jika dibandingkan pada tahun 2015.

Kemudian untuk proyeksi tahun 2021, kontribusi industri pengolahan dan industri-industri yang dapat berkaitan dengan pariwisata memiliki kontribusi yang dominan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan struktural dalam perekonomian pangandaran ke arah sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah dan jasa terutama yang dapat berkaitan dengan pariwisata. Sebagai contoh, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan mengalami penurunan kontribusi yang signifikan dari sekitar 23,13% pada tahun 2015 menjadi sekitar 16,74% pada tahun 2021. Sektor Kontribusi dari masing-masing sektor tersebut sangat dipengaruhi juga oleh inflasi di sektor tersebut. Semakin besar inflasi, kontribusi sektor tersebut akan semakin kecil, *ceteris paribus*.

**Tabel 1.4**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2021<sup>1</sup>**  
**atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pangandaran (Dalam Juta Rupiah)**

| No | Sektor                                                         | 2015         |       | 2016         |       | 2017         |       | 2018         |        | 2019         |        | 2021         |       |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|
|    |                                                                | (Rp)         | %     | (Rp)         | %     | (Rp)         | %     | (Rp)         | %      | (Rp)         | %      | (Rp)         | %     |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1.614.532,02 | 28,13 | 1.673.506,65 | 28,16 | 1.708.073,40 | 27,28 | 1.756.167,48 | 27,36  | 1.814.827,54 | 27,07  | 1.556.736,88 | 16,74 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 47.775,95    | 0,78  | 47.768,26    | 0,72  | 47.838,89    | 0,65  | 49.262,60    | 0,61   | 47.985,14    | 0,55   | 54.790,98    | 0,59  |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 301.282,69   | 4,82  | 319.440,01   | 4,90  | 334.658,36   | 4,85  | 359.440,30   | 4,84   | 382.886,81   | 4,78   | 618.061,77   | 6,65  |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 4.819,20     | 0,07  | 5.063,21     | 0,07  | 5.034,94     | 0,08  | 5.203,35     | 0,07   | 5.385,28     | 0,07   | 6.822,23     | 0,07  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 747,17       | 0,01  | 792,70       | 0,01  | 848,55       | 0,01  | 927,57       | 0,01   | 1.015,78     | 0,01   | 931,37       | 0,01  |
| 6  | Konstruksi                                                     | 564.587,49   | 8,55  | 590.714,90   | 8,38  | 633.461,23   | 8,52  | 686.539,60   | 8,62   | 748.300,10   | 8,87   | 778.464,12   | 8,37  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.439.969,59 | 20,65 | 1.508.278,65 | 20,35 | 1.582.035,47 | 20,42 | 1.659.822,40 | 20,12  | 1.761.761,54 | 20,17  | 2.349.777,71 | 25,27 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 667.608,91   | 11,98 | 713.780,98   | 12,12 | 753.014,05   | 12,17 | 792.580,72   | 11,91  | 847.203,25   | 11,64  | 1.268.481,78 | 13,64 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 505.115,00   | 8,14  | 550.439,17   | 8,44  | 597.494,33   | 8,76  | 646.846,00   | 8,99   | 706.084,90   | 9,36   | 811.897,05   | 8,73  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 113.721,64   | 1,46  | 124.673,85   | 1,48  | 139.436,59   | 1,56  | 152.124,70   | 1,53   | 166.235,40   | 1,47   | 207.606,95   | 2,23  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 126.794,97   | 1,94  | 135.917,20   | 1,98  | 140.246,91   | 1,97  | 146.516,80   | 1,95   | 147.995,66   | 1,84   | 188.245,50   | 2,02  |
| 12 | Real Estate                                                    | 173.091,10   | 2,57  | 181.243,67   | 2,52  | 198.090,22   | 2,58  | 217.208,60   | 2,60   | 238.268,97   | 2,64   | 265.605,09   | 2,86  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 58.536,85    | 0,92  | 63.266,60    | 0,93  | 68.585,44    | 0,95  | 74.774,70    | 0,97   | 81.706,32    | 1,10   | 90.339,90    | 0,97  |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 226.776,59   | 3,45  | 229.507,19   | 3,29  | 231.680,49   | 3,16  | 231.860,80   | 3,03   | 231.985,70   | 2,79   | 162.452,83   | 1,75  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 309.712,19   | 4,96  | 332.155,86   | 5,02  | 360.851,17   | 5,34  | 385.327,60   | 5,64   | 404.745,11   | 5,82   | 654.478,68   | 7,04  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 13.966,67    | 0,21  | 15.288,27    | 0,22  | 16.567,67    | 0,22  | 17.922,30    | 0,22   | 19.402,16    | 0,23   | 21.017,98    | 0,23  |
| 17 | Jasa lainnya                                                   | 102.058,19   | 1,35  | 110.895,80   | 1,42  | 121.719,10   | 1,49  | 132.737,90   | 1,52   | 145.134,58   | 1,60   | 261.886,46   | 2,82  |
| 18 | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO                                 | 6.271.096,71 | 100   | 6.602.732,97 | 100   | 6.929.636,80 | 100   | 7.315.263,42 | 100,00 | 7.750.924,24 | 100,00 | 9.297.597,28 | 16,74 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Tahun 2019

<sup>1</sup>Nilai dan Kontribusi sektor dalam PDRB pada tahun 2016 diproyeksi dengan menggunakan metode moving average menggunakan 2 periode dengan dasar periode 2012-2015. Untuk proyeksi tahun 2021 menggunakan annually growth rate yang sama setiap tahunnya menggunakan dasar pertumbuhan tahun 2016.

Tabel diatas merupakan nilai dan kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB tahun 2015-2019 beserta proyeksinya pada tahun 2016 hingga 2021 berdasarkan harga berlaku. Sama dengan nilai dan kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB berdasarkan harga konstan, secara umum, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan



sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran pada periode 2015-2019. Walaupun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan yang sistematis dari tahun 2015. Ranking kontribusi yang berbeda jika dibandingkan dengan kontribusi sektoral berdasarkan PDRB harga konstan disebabkan perbedaan

faktor inflasi antara sektor. Kemudian sektor dengan kontribusi yang cukup potensial ialah sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, industri pengolahan, jasa pendidikan dan jasa lainnya dengan masing-masing kontribusi sebesar 11,46%; 8,53%; 8,16%; 5,71%; 5,18% dan 2,15%.

Sama halnya dengan kondisi pada PDRB berdasarkan harga konstan, hasil proyeksi kontribusi sektoral PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa perubahan secara struktural dari perekonomian Kabupaten Pangandaran terus terjadi. Perubahan struktural perekonomian tersebut merupakan perubahan dari struktur perekonomian yang lebih menitikberatkan pada bahan mentah dari hasil sumber daya alam (seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)

menjadi struktur perekonomian yang lebih menitikberatkan pada nilai tambah seperti industri terutama industri jasa yang dapat terkait dengan pariwisata. Sebagai contoh, kontribusi sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata seperti sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi



dan minuman, dan jasa lainnya mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran. Kontribusi ke-4 sektor tersebut jika dijumlahkan mencapai hingga 45,83% pada proyeksi tahun 2016 atau meningkat sebesar 1,91% jika dibandingkan pada tahun 2015.

Kemudian sektor jasa lainnya yang merupakan jasa-jasa yang terkait dengan pelayanan pariwisata akan mendominasi perekonomian Kabupaten Pangandaran dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB-nya (kontribusi jasa lainnya diproyeksikan mencapai sekitar 9,53% pada tahun 2021)<sup>2</sup>. Oleh karena itu, perlu suatu perencanaan pembangunan pariwisata yang terintegrasi di Kabupaten Pangandaran tersebut.

<sup>2</sup>Walaupun demikian, agar sektor ini semakin berkontribusi bagi perekonomian Kab. Pangandaran, inflasi di sektor jasa lainnya harus dikendalikan.



**Tabel 1.5**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2021<sup>3</sup>**  
**atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pangandaran (Dalam Juta Rupiah)**

| No | Sektor                                                         | 2015         |       | 2016         |       | 2017         |      | 2018          |       | 2019          |       | 2021          |       |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|    |                                                                | (Rp)         | %     | (Rp)         | %     | (Rp)         | %    | (Rp)          | %     | (Rp)          | %     | (Rp)          | %     |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2.255.376,23 | 30,88 | 2.445.301,64 | 30,78 | 2.564.116,09 | 30   | 2.836.506,50  | 25,55 | 3.065.084,73  | 23.05 | 2.684.708,71  | 12.46 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 62.308,41    | 0,83  | 62.840,84    | 0,81  | 60.725,16    | 0,8  | 62.738,50     | 0,73  | 62.336,53     | 0.69  | 101.963,21    | 0.47  |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 386.656,91   | 4,53  | 425.185,31   | 4,59  | 455.736,42   | 4,72 | 501.953,75    | 5,71  | 540.706,07    | 6.35  | 2.096.358,91  | 9.73  |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 5.606,90     | 0,08  | 6.403,63     | 0,06  | 7.143,72     | 0,07 | 7.577,50      | 0,06  | 7.973,87      | 0.06  | 11.125,86     | 0.05  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 902,86       | 0,01  | 1.054,72     | 0,01  | 1.241,62     | 0,01 | 1.453,65      | 0,01  | 1.671,50      | 0.01  | 2.163,03      | 0.01  |
| 6  | Konstruksi                                                     | 685.579,06   | 8,91  | 727.323,25   | 8,6   | 800.970,53   | 8,52 | 893.884,10    | 8,53  | 1.004.704,87  | 8.41  | 1.526.741,01  | 7.08  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.655.045,94 | 21,53 | 1.767.241,28 | 21,04 | 1.919.316,14 | 20,9 | 2.085.532,10  | 22,14 | 2.283.410,53  | 22.53 | 4.788.414,65  | 22.22 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 960.752,28   | 9,17  | 1.052.909,85 | 9,85  | 1.144.391,53 | 10,8 | 1.234.672,00  | 11,46 | 1.318.347,07  | 12.24 | 3.309.752,00  | 15.36 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 652.915,67   | 7,53  | 732.513,85   | 7,82  | 823.303,32   | 7,92 | 932.137,30    | 8,16  | 1.060.116,39  | 8.26  | 1.705.686,51  | 7.92  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 117.269,03   | 1,51  | 128.750,15   | 1,43  | 146.719,49   | 1,42 | 158.387,80    | 1,52  | 166.214,79    | 1.55% | 337.979,35    | 1.57  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 155.759,21   | 1,94  | 171.697,37   | 1,98  | 185.383,36   | 1,94 | 201.704,20    | 1,89  | 208.116,75    | 1.82% | 296.326,29    | 1.38  |
| 12 | Real Estate                                                    | 206.022,05   | 2,77  | 218.519,14   | 2,66  | 242.240,22   | 2,62 | 269.483,80    | 2,89  | 298.425,31    | 2.99% | 689.657,40    | 3.20  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 73.900,58    | 0,84  | 80.727,57    | 0,87  | 89.165,02    | 0,92 | 100.791,00    | 0,86  | 124.320,39    | 0.85% | 155.232,31    | 0.72  |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 276.282,28   | 3,67  | 285.632,30   | 3,42  | 297.238,41   | 3,12 | 314.157,00    | 2,97  | 316.297,03    | 2.74% | 358.964,15    | 1.67  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 397.408,71   | 4,2   | 435.910,91   | 4,56  | 501.889,01   | 4,77 | 584.416,30    | 5,18  | 658.673,62    | 5.47% | 1.399.872,96  | 6.50  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 16.437,03    | 0,19  | 18.716,32    | 0,18  | 20.887,63    | 0,19 | 23.070,40     | 0,18  | 25.668,68     | 0.17% | 29.839,93     | 0.14  |
| 17 | Jasa lainnya                                                   | 108.273,63   | 1,4   | 123.170,45   | 1,34  | 140.312,46   | 1,32 | 157.553,50    | 2,15  | 180.733,47    | 2.81% | 2.054.163,71  | 9.53  |
| 18 | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO                                 | 8.016.496,78 | 100   | 8.683.898,59 | 100   | 9.400.780,12 | 100  | 10.366.091,40 | 100   | 11,322,801.61 | 100%  | 21.548.949,98 | 100   |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Tahun 2019

<sup>3</sup>PDRB harga berlaku pada tahun 2016 diproyeksi menggunakan metode moving average selama 4 (empat) tahun dari periode 2012-2015.



Tabel diatas merupakan perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2012-2021 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Dari 17 sektor yang ada, hanya kontribusi dari industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman, dan jasa pendidikan yang memiliki kenaikan setiap tahunnya. Sektor lainnya ada yang mengalami penurunan dan stagnasi pada satu atau beberapa tahun.

Kemudian pada tabel di bawah menunjukan secara lebih jelas bagaimana perubahan struktural perekonomian terjadi di Kabupaten Pangandaran. Selain itu, dari hasil proyeksi sangat terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan terus tergantikan. Sektor-sektor yang diproyeksi menggantikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut merupakan sektor industri dan jasa yang dapat terkait dengan industri pariwisata seperti sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan makanan dan minuman, dan sektor lainnya.

**Tabel 1.6**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2021**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)Kabupaten Pangandaran**

| No | Sektor                                                         | 2015 |      | 2016 |      | 2017 |      | 2018 |      | 2019  |       | 2021  |       |
|----|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                | Hb   | Hk   | Hb   | Hk   | Hb   | Hk   | Hb   | Hk   | Hb    | Hk    | Hb    | Hk    |
|    |                                                                | %    | %    | %    | %    | %    | %    | %    | %    | %     | %     | %     | %     |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 30,9 | 29,9 | 30,8 | 29   | 30   | 27,3 | 25,6 | 23,1 | 23.05 | 21.99 | 12.46 | 16.74 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,8  | 0,8  | 0,73 | 0,72 | 0,69  | 0,70  | 0,47  | 0,59  |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 4,53 | 4,43 | 4,59 | 4,65 | 4,72 | 4,74 | 5,71 | 5,7  | 6,35  | 5,86  | 9,73  | 6,65  |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06  | 0,07  | 0,05  | 0,07  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| 6  | Konstruksi                                                     | 8,91 | 9,1  | 8,6  | 9,04 | 8,52 | 9,05 | 8,53 | 8,98 | 8,41  | 8,91  | 7,08  | 8,37  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 21,5 | 22,3 | 21   | 22,4 | 20,9 | 23   | 22,1 | 24,3 | 22,53 | 24,52 | 22,22 | 25,27 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 9,17 | 9,22 | 9,85 | 9,65 | 10,8 | 10,2 | 11,5 | 10,7 | 12,24 | 11,19 | 15,36 | 13,64 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 7,53 | 7,4  | 7,82 | 7,55 | 7,92 | 7,77 | 8,16 | 7,97 | 8,26  | 8,12  | 7,92  | 8,73  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 1,51 | 1,56 | 1,43 | 1,58 | 1,42 | 1,7  | 1,52 | 1,81 | 1,55  | 1,88  | 1,57  | 2,23  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1,94 | 1,92 | 1,98 | 2,01 | 1,94 | 1,98 | 1,89 | 1,91 | 1,82  | 1,94  | 1,38  | 2,02  |
| 12 | Real Estate                                                    | 2,77 | 2,77 | 2,66 | 2,76 | 2,62 | 2,77 | 2,89 | 3,01 | 2,99  | 3,00  | 3,20  | 2,86  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 0,85 | 0,85  | 0,87  | 0,72  | 0,97  |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,67 | 3,8  | 3,42 | 3,47 | 3,12 | 3,21 | 2,97 | 3,05 | 2,74  | 2,79  | 1,67  | 1,75  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 4,2  | 4,15 | 4,56 | 4,4  | 4,77 | 4,71 | 5,18 | 5,07 | 5,47  | 5,38  | 6,50  | 7,04  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,17  | 0,20  | 0,14  | 0,23  |
| 17 | Jasa lainnya                                                   | 1,4  | 1,49 | 1,34 | 1,51 | 1,32 | 1,57 | 2,15 | 2,52 | 2,81  | 2,58  | 9,53  | 2,82  |
| 18 | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO                                 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber : Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pangandaran 2012-2015

Tabel di bawah menunjukkan pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama periode 2012-2021. Selama periode 2015 hingga proyeksi tahun 2021, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang positif dari kontribusinya terhadap PDRB di antaranya industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran (harga konstan), transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran (harga konstan), penyediaan akomodasi dan makanan-minuman (harga konstan), jasa perusahaan (harga konstan), jasa pendidikan dan jasa lainnya. Lebih jauh, jasa lainnya yang spesifik terkait dengan pariwisata memiliki pertumbuhan kontribusi yang sangat besar

bagi PDRB Kabupaten Pangandaran. Jasa lainnya memiliki pertumbuhan rata-rata dari kontribusinya terhadap PDRB masing-masing diproyeksikan sekitar 75,83% dan 13,81% untuk harga berlaku dan harga konstan.

Dalam tabel di bawah juga menunjukkan kembali bagaimana sektor-sektor yang lebih berbasis pada jasa dan produksi menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan menggantikan sektor-sektor yang berbasis pada sumber daya alam. Kabupaten Pangandaran sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan menjadi sangat strategis untuk mendorong jasa dan produksi yang diarahkan memajukan sektor pariwisata tersebut.

**Tabel 1.7**  
**Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012-2021<sup>4</sup>**  
**Kabupaten Pangandaran**

| No | Sektor                                                         | Pertumbuhan (%) |        |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|    |                                                                | Hb              | Hk     |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | -20.17          | -12.36 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | -14.21          | -8.03  |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 18.36           | 8.59   |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | -9.82           | -1.59  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | -4.07           | -4.11  |
| 6  | Konstruksi                                                     | -7.80           | -2.50  |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | -1.98           | 2.17   |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 9.71            | 9.40   |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | -1.98           | 3.44   |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | -1.64           | 8.33   |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | -10.36          | 1.18   |
| 12 | Real Estate                                                    | 1.01            | -0.38  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | -6.54           | 3.52   |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -18.29          | -16.58 |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 7.43            | 13.20  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | -9.57           | 4.71   |
| 17 | Jasa lainnya                                                   | 75.83           | 13.81  |

Sumber : Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pangandaran 2012-2015 dan pengolahan data

Sementara Tabel 1.8 menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Pangandaran dari tahun 2015 hingga proyeksi pada tahun 2021 yang dihitung untuk 10 Kecamatan yang saat ini ada di Kabupaten Pangandaran. Secara umum, PDRB setiap kecamatan di Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini tentunya didorong berbagai sektor ekonomi seperti dijelaskan pada tabel sebelumnya. Perubahan struktural dari perekonomian di Pangandaran ternyata berdampak sangat baik pada perekonomian Kabupaten Pangandaran dengan terus mendorong PDRB di masing-masing kecamatan. Dengan kata lain, perubahan struktural perekonomian yang disarankan untuk mendorong sektor pariwisata akan berdampak positif bagi perekonomian di seluruh wilayah di Kabupaten pangandaran.

<sup>4</sup>Untuk Tahun 2014-2016, PDRB masing-masing kecamatan dihitung dengan menggunakan metode moving average sederhana dengan periode 2 (dua) tahunan.

**Tabel 1.8**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Pangandaran**  
**Atas Dasar Harga Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Kecamatan**  
**Tahun 2011-2021**

| No | Kecamatan     | 2011       | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2021         |
|----|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Cimerak       | 370.255,59 | 400.604,28   | 457.862,52   | 523.304,66   | 582.149,37   | 1.103.350,21 |
| 2  | Cijulang      | 449.291,02 | 489.238,27   | 563.184,84   | 648.308,16   | 726.123,97   | 1.433.462,95 |
| 3  | Cigugur       | 312.728,32 | 326.111,69   | 381.533,97   | 446.375,2    | 493.857,08   | 905.750,70   |
| 4  | Parigi        | 578.584,71 | 628.618,59   | 728.888,00   | 845.151,14   | 949.097,91   | 1.903.578,75 |
| 5  | Sidamulih     | 390.423,24 | 420.453,83   | 492.718,56   | 577.403,66   | 649.230,13   | 1.311.938,56 |
| 6  | Pangandaran   | 937.331,34 | 1.053.599,91 | 1.166.209,22 | 1.290.854,30 | 1.439.898,02 | 2.773.695,82 |
| 7  | Kalipucang    | 417.828,27 | 454.403,70   | 525.862,48   | 608.558,75   | 683.044,93   | 1.365.619,85 |
| 8  | Padaherang    | 886.997,21 | 944.257,98   | 1.083.633,10 | 1.243.580,40 | 1.375.498,48 | 2.518.706,96 |
| 9  | Mangunjaya    | 338.869,83 | 363.079,25   | 411.713,24   | 466.861,69   | 514.806,13   | 925.500,26   |
| 10 | Langkaplancar | 440.522,46 | 487.509,44   | 563.319,08   | 650.917,42   | 736.241,59   | 1.541.654,52 |

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran (2015)

Tabel 1.9 menunjukkan tren dan proyeksi pendapatan per kapita dengan menggunakan produk domestik bruto baik harga berlaku maupun harga konstan. Dari tren dan proyeksi produk domestik regional bruto terlihat bahwa dengan tren dan proyeksi pertumbuhan penduduk yang ada, pendapatan perkapita naik secara signifikan. Sebagai contoh, pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan pada tahun 2012 ialah sebesar Rp. 12.333.000,- dan kemudian diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp. 20.804.000,- pada tahun 2021. Peningkatan tersebut diproyeksikan akibat kinerja sektor jasa pariwisata yang semakin baik.

**Tabel 1.9**  
**Tren dan Proyeksi Pendapatan Per Kapita Menggunakan Produk Domestik Regional**  
**Bruto Kabupaten Pangandaran Harga Berlaku dan Harga Konstan Periode 2012-2021**

| Tahun | PDRB Harga Berlaku (PDRBN) | PDRB Harga Konstan (PDRBR) | PDRBN/kapita | PDRBR/Kapita |
|-------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 2012  | 5,984,69                   | 5,463,15                   | 13,510       | 12,333       |
| 2013  | 6,716,23                   | 5,735,15                   | 16,701.39    | 13,328       |
| 2014  | 7,382,26                   | 5,971,35                   | 17,532.17    | 13,423       |
| 2015  | 8,628,81                   | 6,751,59                   | 21,892.11    | 16,567       |
| 2016  | 9,883,79                   | 7,098,27                   | 24,453.86    | 16,113       |
| 2021  | 21,548,95                  | 9,297,60                   | 56,158.83    | 20,804       |

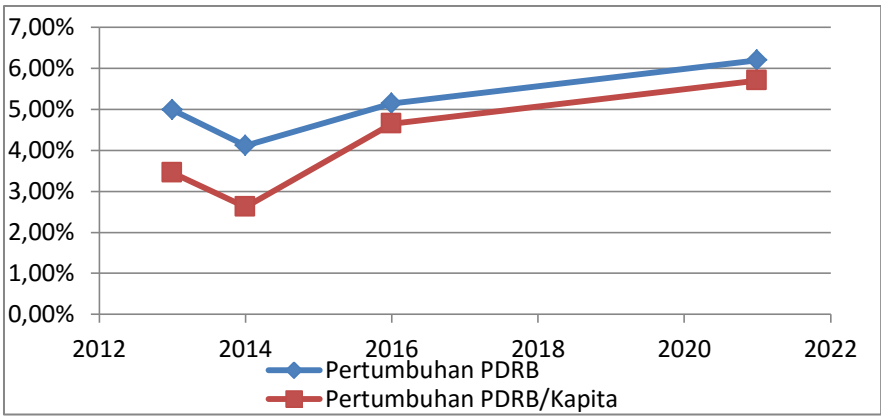
Sumber : Pengolahan data, 2016

Gambar 1.4 menunjukkan tren dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran selama periode 2012-2021<sup>5</sup>. Dari Gambar 1.10 tersebut terlihat bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kabupaten Pangandaran. Pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Pangandaran mengikuti pertumbuhan PDRB dengan koreksi dari pertumbuhan penduduk berdasarkan tren dan proyeksi penduduk yang telah dibuat. Sebagai contoh, pendapatan per kapita yang pada tahun 2013 memiliki pertumbuhan sebesar 3.45%, diproyeksikan pertumbuhannya meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 5.81%.

<sup>5</sup>Pertumbuhan pendapatan per kapita dihitung dengan rumus pertumbuhan PDRB dikurangi pertumbuhan penduduk. Data pertumbuhan ekonomi aktual Tahun 2015 tidak dimasukkan karena memberikan tren yang outlier dibandingkan dengan proyeksi yang ada. Walaupun demikian, tren dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tetap sama yaitu meningkat.

Peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita yang sangat signifikan tersebut bisa terjadi jika pemerintah Kabupaten Pangandaran konsisten di dalam mengembangkan industri jasa pariwisata sebagai sektor ekonomi yang kontribusinya terus meningkat.

**Gambar 1.4**  
**Grafik Tren dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per kapita Kab. Pangandaran Periode 2012-2021**



Sumber : Hasil pengolahan

Peningkatan PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran tidak terlepas dari peningkatan realisasi pendapatan pajak dari hotel dan restoran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah realisasi pendapatan pajak pada tahun 2015 sampai dengan bulan September adalah sebesar Rp. 3.636.459.282,00 untuk realisasi pendapatan pajak hotel dan untuk realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 1.110.730.660,00.

Tabel 1.10 memberikan simulasi realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran dimulai dari 2016 sampai dengan 2021. Simulasi realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran dilakukan sama dengan simulasi PDRB Kabupaten Pangandaran. Realisasi pajak hotel dan restoran merupakan salah satu variabel penyusun dari PDRB sehingga dengan besaran pertumbuhan yang sama dengan PDRB akan dapat dihitung estimasi target realisasi dari pajak hotel dan restoran. Berikut dibawah ini menjelaskan secara detil besaran target pajak hotel dan restoran baik untuk *business as usual*, simulasi 1 dan simulasi 2.

**Tabel 1.10**  
**Simulasi Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Pangandaran Tahun 2014-2021**

| Tahun | BAU         |                | SIM1        |                | SIM2        |                |
|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|       | Pajak Hotel | Pajak Restoran | Pajak Hotel | Pajak Restoran | Pajak Hotel | Pajak Restoran |
| 2014  | 3.81        | 0.83           | 3.81        | 0.83           | 3.81        | 0.83           |
| 2015  | 4.85        | 1.48           | 4.85        | 1.48           | 4.85        | 1.48           |
| 2016  | 5.56        | 1.62           | 5.66        | 1.65           | 5.76        | 1.68           |
| 2017  | 6.39        | 1.78           | 6.61        | 1.84           | 6.84        | 1.91           |
| 2018  | 7.33        | 1.94           | 7.72        | 2.05           | 8.12        | 2.17           |
| 2019  | 8.41        | 2.13           | 9.01        | 2.29           | 9.65        | 2.46           |
| 2020  | 9.65        | 2.33           | 10.53       | 2.55           | 11.46       | 2.79           |
| 2021  | 11.08       | 2.55           | 12.29       | 2.84           | 13.61       | 3.17           |

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pangandaran (2015)

Kemudian Tabel 1.11 menunjukkan angka nominal besaran target realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran untuk Kabupaten Pangandaran berdasarkan pertumbuhan pada Tabel 1.23. Tabel 1.24 menjelaskan besaran target realisasi pendapatan pajak Kabupaten Pangandaran selama periode 2014 – 2021. Berdasarkan simulasi tersebut, terlihat bahwa adanya kenaikan yang cukup signifikan dari pajak hotel dan restoran untuk seluruh data baik data dari kondisi *business as usual* dan berbagai simulasi yang dilakukan. Sebagai contoh, pada simulasi 1, penerimaan pajak hotel meningkat dari sekitar Rp. 3.812.378.845,00 pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp. 12.290.938.444,00 Pada tahun 2021.

**Tabel 1.11**  
**Simulasi Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Pangandaran Tahun 2014-2021**

| Tahun | BAU               |                  | SIM1              |                  | SIM2              |                  |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | Pajak Hotel       | Pajak Restoran   | Pajak Hotel       | Pajak Restoran   | Pajak Hotel       | Pajak Restoran   |
| 2014  | 3,812,378,845.00  | 832,564,125.00   | 3,812,378,845.00  | 832,564,125.00   | 3,812,378,845.00  | 832,564,125.00   |
| 2015  | 4,848,612,376.00  | 1,480,974,213.33 | 4,848,612,376.00  | 1,480,974,213.33 | 4,848,612,376.00  | 1,480,974,213.33 |
| 2016  | 5,564,708,744.33  | 1,621,579,455.53 | 5,661,680,991.85  | 1,651,198,939.80 | 5,758,653,239.37  | 1,680,818,424.06 |
| 2017  | 6,386,566,095.18  | 1,775,533,906.62 | 6,611,093,889.90  | 1,840,989,474.52 | 6,839,500,574.53  | 1,907,629,821.80 |
| 2018  | 7,329,804,372.90  | 1,944,104,954.46 | 7,719,714,778.00  | 2,052,594,731.99 | 8,123,213,217.48  | 2,165,047,386.99 |
| 2019  | 8,412,350,446.90  | 2,128,680,314.05 | 9,014,241,401.82  | 2,288,522,119.28 | 9,647,867,158.97  | 2,457,201,147.90 |
| 2020  | 9,654,778,823.72  | 2,330,779,451.51 | 10,525,848,478.48 | 2,551,567,247.45 | 11,458,684,910.14 | 2,788,778,443.16 |
| 2021  | 11,080,702,679.16 | 2,552,066,092.65 | 12,290,938,444.30 | 2,844,847,058.02 | 13,609,376,840.13 | 3,165,099,125.76 |

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pangandaran (2015)

Kemudian berdasarkan Tabel 1.11, target pendapatan pajak untuk Simulasi 1 pada tahun 2020 adalah 10,53 milyar untuk pajak hotel dan 2,55 milyar untuk pajak restoran. Sedangkan untuk tahun 2021 target realiasasi pendapatan pajak adalah sebesar 12,29 milyar untuk pajak restoran dan 2,84 milyar untuk pajak restoran. Pada simulasi 2 target pendapatan pajak pada tahun 2020 adalah 11,46 milyar untuk pajak hotel dan 2,79 milyar untuk pajak restoran.

Adapun Tabel 1.12 merupakan deskripsi mengenai jumlah wisatawan yang datang ke berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran selama periode 2015-2017. Jumlah wisatawan yang datang ke berbagai objek wisata di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun sesudahnya. Namun demikian jumlah kunjungan wisata dapat meningkat kembali pada tahun 2017.

Jumlah pengunjung wisata tersebut akan berfluktuatif tergantung dari bagaimana Kabupaten Pangandaran mengembangkan dan mempromosikan objek wisatanya.

**Tabel 1.12**  
**Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2017**

| No | Objek Wisata                     | 2018   |           | 2019   |           |
|----|----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
|    |                                  | Wisman | Wisnus    | Wisman | Wisnus    |
| 1  | OW Pangandaran                   | 2.138  | 2.787.767 | 1.231  | 2.663.980 |
| 2  | OW Taman Wisata Alam Pangandaran | -      | -         | 68     | 258.459   |
| 3  | OW Batu Hiu                      | 113    | 217.963   | 188    | 180.316   |
| 4  | OW Citumang                      | -      | -         | 242    | 26.379    |
| 5  | OW Green Canyon                  | 3.320  | 162.576   | 2.880  | 136.750   |
| 6  | OW Santirah                      | -      | -         | -      | 7.991     |
| 7  | OW Curug Bojong                  | -      | -         | -      | 268       |

|               |                      |                  |                  |                  |                  |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8             | OW Ciwayang          | -                | -                | -                | 3.254            |
| 9             | OW Batu Karas        | 2.265            | 592.980          | 1.456            | 519.468          |
| 10            | OW Pantai Madasari   | -                | -                | -                | 44.964           |
| 11            | OW Karapyak          | -                | 276.582          | 15               | 268.989          |
| 12            | OW Pantai Karangnini | -                | -                | 41               | 9.169            |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>7.836</b>     | <b>4.037.868</b> | <b>6.121</b>     | <b>4.119.987</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                      | <b>4.045.704</b> |                  | <b>4.126.108</b> |                  |

Sumber: Disparbud Kab. Pangandaran 2019

| No | Objek Wisata    | 2018              |                   | 2019              |                   |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                 | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)    | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)    |
| 1  | OW Pangandaran  | 17.563.296.120,00 | 13.949.525.000,00 | 19.431.594.082,00 | 13.326.055.000,00 |
| 2  | OW Batu Hiu     | 1.350.664.335,00  | 1.090.380.000,00  | 1.501.821.479,00  | 902.520.000,00    |
| 3  | OW Green Canyon | 1.366.610.813,00  | 829.480.250,00    | 1.140.126.993,00  | 698.150.000,00    |
| 4  | OW Batu Karas   | 3.953.009.830,00  | 2.976.225.000,00  | 4.090.844.188,00  | 2.604.620.000,00  |
| 5  | OW Karapyak     | 766.418.902,00    | 968.037.000,00    | 1.335.613.258,00  | 941.513.000,00    |
|    | Jumlah          | 25.000.000.000,00 | 19.813.647.250,00 | 27.500.000.000,00 | 18.472.858.000,00 |

Sumber: Disparbud Kab. Pangandaran 2019

## 1.4 Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

### 1.4.1 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, di Kabupaten Pangandaran dibentuk dan disusun perangkat daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe B
2. Sekretariat DPRD Tipe B
3. Inspektorat Tipe B
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
  - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, menyelenggarakan sebagian urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub urusan Persampahan dan menyelenggarakan sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman;
  - k. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  - l. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Kelautan, bidang Perikanan dan bidang Pangan;
  - m. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - n. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
  - p. Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  - q. Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan bidang koperasi sebagian urusan usaha mikro.
5. Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Selain perangkat daerah di atas, dibentuk pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A guna menyelenggarakan urusan pemerintahan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengisi perangkat daerah tersebut, telah ditetapkan ketentuan eselonering sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli dan Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
4. Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris pada Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
5. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Seksi pada Dinas dan Kecamatan, Sekretaris pada Kecamatan Tipe B, Kepala Sub Bidang pada Badan dan UPTD tipe A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
6. Kepala UPTD tipe B, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD tipe A dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

Perlu diketahui terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baru dilaksanakan mulai Tahun 2019, yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Kedua perangkat daerah tersebut semula disatukan dalam perangkat daerah yang bernama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi UMKM.

#### 1.4.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Beberapa kendala dari pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pangandaran sangat terbatas. Dilihat dari jumlah/kuantitas ASN, semua perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran kekurangan pegawai. Hal ini terlihat dari setiap eselon IV (kasubid/kasubag), paling banyak memiliki fungsional umum/staf 1 sampai 2 orang, bahkan sebagian besar tidak memiliki fungsional umum/staf. Demikian pula beberapa jabatan tidak diisi karena belum ada SDM yang memenuhi kriteria minimal untuk menduduki jabatan tersebut.

Apalagi apabila dilihat dari sisi kualitas SDM di Kabupaten Pangandaran sangat jauh dari kata profesional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ASN yang menduduki jabatan tertentu belum



didukung sepenuhnya oleh kompetensi yang sesuai. Kondisi tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal lain, dengan keterbatasan anggaran sangat sulit untuk meningkatkan kapasitas ASN yang ada di Kabupaten Pangandaran. Apabila hal ini tidak segera ditangani, akan menjadi permasalahan besar di kemudian hari. Demikian pula banyaknya ASN yang memasuki masa usia pensiun dibandingkan dengan penerimaan ASN masih belum seimbang untuk memenuhi kekurangan tersebut.

TABEL 1.13  
DATA PEGAWAI APARAT SIPIL NEGARA (ASN) DAN FUNGSIONAL/SKPD  
KABUPATEN PANGANDARAN

| NO     | SKPD                                                 | PANGKAT DAN GOLONGAN |     |      |      |      |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|------|------|
|        |                                                      | I                    | II  | III  | IV   | JML  |
| 1      | SEKRETATIAAT DAERAH                                  | 0                    | 29  | 39   | 20   | 88   |
| 2      | SEKRETARIAT DPRD                                     | 0                    | 8   | 11   | 6    | 25   |
| 3      | INSPEKTORAT                                          | 0                    | 4   | 22   | 9    | 35   |
| 4      | DINAS KESEHATAN                                      | 0                    | 203 | 340  | 22   | 565  |
| 5      | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA                | 2                    | 53  | 872  | 1367 | 2294 |
| 6      | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA       | 0                    | 1   | 12   | 5    | 18   |
| 7      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL              | 0                    | 1   | 12   | 4    | 17   |
| 8      | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,PRKP                | 5                    | 25  | 27   | 3    | 60   |
| 9      | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                      | 0                    | 10  | 17   | 4    | 31   |
| 10     | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN       | 0                    | 2   | 16   | 4    | 22   |
| 11     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN                | 3                    | 15  | 15   | 4    | 37   |
| 12     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                  | 0                    | 3   | 7    | 4    | 14   |
| 13     | DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   | 0                    | 4   | 9    | 4    | 17   |
| 14     | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM                  | 0                    | 1   | 11   | 3    | 15   |
| 15     | DINAS PERHUBUNGAN                                    | 0                    | 6   | 9    | 3    | 18   |
| 16     | DINAS PERTANIAN                                      | 0                    | 7   | 35   | 8    | 50   |
| 17     | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,PERSANDIAN & STATISTIK | 1                    | 5   | 9    | 5    | 20   |
| 18     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                     | 0                    | 2   | 8    | 6    | 16   |
| 19     | DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | 0                    | 1   | 14   | 4    | 19   |
| 20     | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN & TRANSMIGRASI     | 0                    | 4   | 5    | 5    | 14   |
| 21     | BADAN KEPEGAWAIAAN & PENGEMBANGAN SDM                | 0                    | 1   | 21   | 4    | 26   |
| 22     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                 | 0                    | 3   | 20   | 4    | 27   |
| 23     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                    | 0                    | 9   | 27   | 5    | 41   |
| 24     | BADAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK                | 0                    | 2   | 5    | 1    | 8    |
| 25     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                           | 0                    | 8   | 6    | 4    | 18   |
| 26     | KECAMATAN CIGUGUR                                    | 0                    | 3   | 3    | 2    | 8    |
| 27     | KECAMATAN CIJULANG                                   | 0                    | 2   | 4    | 3    | 9    |
| 28     | KECAMATAN CIMERAK                                    | 0                    | 3   | 5    | 2    | 10   |
| 29     | KECAMATAN KALIPUCANG                                 | 0                    | 4   | 5    | 2    | 11   |
| 30     | KECAMATAN LANGKAPLANCAR                              | 0                    | 4   | 3    | 2    | 9    |
| 31     | KECAMATAN MANGUNJAYA                                 | 0                    | 2   | 5    | 3    | 10   |
| 32     | KECAMATAN PADAHERANG                                 | 0                    | 3   | 7    | 2    | 12   |
| 33     | KECAMATAN PANGANDARAN                                | 0                    | 3   | 5    | 1    | 9    |
| 34     | KECAMATAN PARIGI                                     | 0                    | 2   | 4    | 4    | 10   |
| 35     | KECAMATAN SIDAMULIH                                  | 0                    | 3   | 4    | 2    | 9    |
| JUMLAH |                                                      | 11                   | 437 | 1613 | 1531 | 3592 |

**TABEL 1.14**  
**DATA PEGAWAI APARAT SIPIL NEGARA (ASN) DAN FUNGSIONAL/SKPD**  
**BERDASARKAN ESELONERING KABUPATEN PANGANDARAN**

| NO     | DINAS / INSTANSI                                     | JML | ESELON TERISI |      |       |       |      |      |     | JUMLAH TERISI | BELUM TERISI |
|--------|------------------------------------------------------|-----|---------------|------|-------|-------|------|------|-----|---------------|--------------|
|        |                                                      |     | II.a          | II.b | III.a | III.b | IV.a | IV.b | V.a |               |              |
| 1      | SEKRETATIAAT DAERAH                                  | 43  | 1             | 6    | 9     | -     | 24   | -    | -   | 40            | 3            |
| 2      | SEKRETARIAT DPRD                                     | 13  | -             | 1    | 3     | -     | 9    | -    | -   | 13            | -            |
| 3      | INSPEKTORAT                                          | 7   | -             | 1    | 4     | -     | 2    | -    | -   | 7             | -            |
| 4      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                    | 24  | -             | 1    | 1     | 5     | 17   | -    | -   | 24            | -            |
| 5      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL              | 16  | -             | 1    | 1     | 3     | 9    | -    | -   | 14            | 2            |
| 6      | DINAS PERHUBUNGAN                                    | 11  | -             | -    | 1     | 1     | 6    | -    | -   | 8             | 3            |
| 7      | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                      | 21  | -             | -    | 1     | 4     | 12   | 1    | -   | 18            | 3            |
| 8      | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN       | 13  | -             | 1    | 1     | 3     | 8    | -    | -   | 13            | -            |
| 9      | DINAS KESEHATAN                                      | 52  | -             | 1    | 1     | 6     | 24   | 16   | -   | 48            | 4            |
| 10     | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA                 | 19  | -             | 1    | 1     | 4     | 13   | -    | -   | 19            | -            |
| 11     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                 | 18  | -             | 1    | 1     | 4     | 11   | -    | -   | 17            | 1            |
| 12     | DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   | 13  | -             | 1    | 1     | 3     | 8    | -    | -   | 13            | -            |
| 13     | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM                  | 13  | -             | 1    | 1     | 3     | 6    | -    | -   | 11            | 2            |
| 14     | DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | 17  | -             | -    | 1     | 3     | 9    | 2    | -   | 15            | 2            |
| 15     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN                | 19  | -             | -    | 1     | 2     | 9    | -    | -   | 12            | 7            |
| 16     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                  | 13  | -             | 1    | 1     | 3     | 6    | -    | -   | 11            | 2            |
| 17     | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,PRKP                | 18  | -             | 1    | 1     | 3     | 10   | 1    | -   | 16            | 2            |
| 18     | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,PERSANDIAN & STATISTIK | 10  | -             | 1    | 1     | 2     | 6    | -    | -   | 10            | -            |
| 19     | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN & TRANSMIGRASI     | 10  | -             | 1    | 1     | 2     | 6    | -    | -   | 10            | -            |
| 20     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                     | 13  | -             | 1    | 1     | 3     | 8    | -    | -   | 13            | -            |
| 21     | DINAS PERTANIAN                                      | 20  | -             | 1    | 1     | 4     | 12   | -    | -   | 18            | 2            |
| 22     | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA       | 13  | -             | -    | 1     | 2     | 8    | -    | -   | 11            | 2            |
| 23     | BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM                 | 12  | -             | 1    | 1     | 1     | 8    | -    | -   | 11            | 1            |
| 24     | BADAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK                | 4   | -             | -    | 1     | -     | 3    | -    | -   | 4             | -            |
| 25     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                           | 10  | -             | 1    | 1     | 2     | 5    | -    | -   | 9             | 1            |
| 26     | KECAMATAN CIGUGUR                                    | 6   | -             | -    | 1     | 1     | 3    | -    | -   | 5             | 1            |
| 27     | KECAMATAN CIJULANG                                   | 7   | -             | -    | 1     | 1     | 3    | 2    | -   | 7             | -            |
| 28     | KECAMATAN CIMERAK                                    | 7   | -             | -    | 1     | 1     | 3    | 2    | -   | 7             | -            |
| 29     | KECAMATAN KALIPUCANG                                 | 7   | -             | -    | 1     | 1     | 2    | 2    | -   | 6             | 1            |
| 30     | KECAMATAN LANGKAPLANCAR                              | 7   | -             | -    | 1     | 1     | 2    | 1    | -   | 5             | 2            |
| 31     | KECAMATAN MANGUNJAYA                                 | 7   | -             | -    | 1     | -     | 3    | 2    | -   | 6             | 1            |
| 32     | KECAMATAN PADAHERANG                                 | 7   | -             | -    | 1     | 1     | 3    | 1    | -   | 6             | 1            |
| 33     | KECAMATAN PANGANDARAN                                | 7   | -             | -    | 1     | -     | 3    | 2    | -   | 6             | 1            |
| 34     | KECAMATAN PARIGI                                     | 7   | -             | -    | 1     | 1     | 3    | 2    | -   | 7             | -            |
| 35     | KECAMATAN SIDAMULIH                                  | 7   | -             | -    | 1     | 1     | 2    | 2    | -   | 6             | 1            |
| JUMLAH |                                                      | 491 | 1             | 24   | 48    | 71    | 266  | 36   | -   | 446           | 45           |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, 2019.

Penyelenggaraan pembangunan selama Kabupaten Pangandaran masih merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis telah memberikan beberapa capaian pembangunan yang diharapkan oleh kabupaten induknya. Akan tetapi pembangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya masih menyisakan beberapa permasalahan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan *gap* yang terjadi antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Permasalahan pembangunan ditandai dengan suatu keadaan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena hasilnya belum optimal.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran 2016 – 2021 menghadapi beberapa permasalahan baik yang terkait dengan masalah sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan permasalahan pemerintahan secara umum. Adapun beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut :

**1) *Belum optimalnya koordinasi kelembagaan di Kabupaten Pangandaran***

Berbagai permasalahan tentang penegakan sistem birokrasi masih belum ideal, adanya kesenjangan antara aparatur dan kewenangan masih menjadi masalah utama bagi berjalannya sistem pemerintahan. Sehingga dengan itu semua maka roda pemerintahan menjadi sedikit terhambat untuk dapat menyesuaikan dengan Kabupaten lainnya.

**2) *Masih lemahnya penanganan limbah akibat aktivitas pariwisata***

Pembangunan pariwisata tidak berarti hanya membangun daerah tujuan wisata (DTW) dari sisi fisik saja, akan tetapi juga membangun bidang sosial dan ekonomi juga. Aktivitas pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan tidak hanya kelayakan dari aspek ekonomi, akan tetapi bagaimana agar aktivitas pariwisata tersebut dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat – karena masyarakat mendapatkan insentif dari keberadaan lokasi pariwisata tersebut – dan juga tidak merusak lingkungan. Survey Ripparda tahun 2015 menunjukkan adanya kecenderungan bahwa lokasi pariwisata yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan, cenderung akan meningkatkan aktivitas ekonomi informal di DTW tersebut, yang pada akhirnya berpotensi untuk mengurangi daya tarik wisata melalui penurunan kualitas lingkungan. Oleh sebab itu penanganan limbah akibat aktivitas wisata diharapkan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan wisatawan.

**3) *Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan***

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam sering terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten

Pangandaran antara lain tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Hingga saat ini masih banyak pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang belum disesuaikan dengan peruntukan tata ruang. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan kedepan harus mempertimbangan aspek tata ruang dan juga aspek daya tampung dan daya dukung lingkungan.

#### **4) *Kurangnya Infrastruktur pengembangan wilayah***

Kemajuan suatu wilayah sangat bergantung kepada ketersediaan dari infrastruktur yang ada di wilayahnya. Laporan PBB dalam World Development Report (WDR) tahun 1994 menggambarkan pentingnya infrastruktur – yang disebut sebagai *social overhead capital* – dalam peningkatan pembangunan. Infrastruktur bisa dibagi ke dalam 2 bidang, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Yang dimaksud dengan infrastruktur pengembangan wilayah lebih memfokuskan pada infrastruktur ekonomi, yang terdiri atas; (1) utilitas publik seperti telekomunikasi, sistem air perpipaan, saluran air/drainase; (2) jaringan jalan; dan (3) prasarana transportasi lainnya seperti jalur kereta api, bandara dan pelabuhan.

Hubungan antara ketersediaan infrastruktur dan kemajuan pembangunan sangat erat. Teori *Infrastructure Led Growth* menyatakan bahwa daerah-daerah dengan kelengkapan infrastruktur yang lebih baik akan bisa menikmati keberhasilan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang memiliki infrastruktur ekonomi. Minimnya ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan produktivitas modal menjadi rendah sehingga dibutuhkan modal yang sangat besar untuk menciptakan *output* pembangunan dalam jumlah tertentu. Rendahnya produktivitas modal ditandai dengan nilai ICOR (*incremental capital output ratio*) yang tinggi, angka ini biasa ditemui pada daerah-daerah yang sedang berkembang.

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran hingga saat ini masih relatif terbatas. Prasarana jalan, listrik, air bersih sistem perpipaan dan saluran drainase masih belum tersebar merata di seluruh wilayah. Sehingga potensi ekonomi yang besar belum dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

#### **5) *Belum optimalnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan daerah tujuan wisata***

Pengembangan pariwisata membutuhkan konektivitas yang baik antar satu daerah tujuan wisata dengan yang lainnya. Oleh sebab itu peningkatan aksesibilitas antar daerah tujuan wisata menjadi prasyarat penting pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Hingga saat ini akses pariwisata ke lokasi-lokasi tujuan wisata di pangandaran hanya terfokus pada aksesibilitas darat saja – yaitu jalan raya. Untuk pengembangan pariwisata ke depan Kabupaten Pangandaran membutuhkan aksesibilitas lain, seperti bandara, jalur rel kereta api, jalan tol dan pelabuhan. Oleh sebab itu kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pangandaran sebagai salah satu tujuan wisata bertaraf internasional.



**6) *Belum efektifnya kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata***

Adanya kolaborasi pengembangan pariwisata Kabupaten Pangandaran dengan nilai-nilai budaya yang masih melekat di masyarakat. Tarian ronggeng ataupun jenis kesenian lain dapat dijadikan motor penggerak promosi pariwisata Kabupaten Pangandaran. selain itu, pengembangan desa-desa wisata bisa menjadi jalan lain dari terjadinya kolaborasi kesenian daerah dengan industri pariwisata.

**7) *Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia***

Beberapa kendala dari pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti diantaranya adalah hambatan kelembagaan, sikap dan sumber daya. Hambatan kelembagaan dimaksudkan adalah dominasi pendekatan *top-down* yang mekanistik membuat pengembangan partisipatif sulit untuk dilakukan, meskipun pendekatan dengan konsep yang berpusat pada manusia dan bersifat partisipatif sudah mulai mendapat perhatian. Kendala sikap dimaksudkan masih belum kuatnya struktur hirarkis Pemerintah dan masih terdapat sikap-sikap Pegawai Negeri cenderung dilayani ketimbang melayani masyarakat. Keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah disatu sisi, serta kualitas sumber daya manusia yang masih rendah di sisi lain juga merupakan hambatan besar bagi pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pangandaran sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan kualitas SDM masih sangat rendah. Rendahnya kualitas SDM berkorelasi juga dengan masih rendahnya sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tersebut, seperti sarana pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas.



**8) *Belum tergalinya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran secara merata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.***

Salah satu keunggulan Kabupaten Pangandaran adalah bervariasinya jenis potensi wisata yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran. Aktivitas Pariwisata yang tersebar merata di seluruh kecamatan dan bisa menjadi *leading sector* karena memiliki keterkaitan ekonomi kebelakang maupun kedepan yang besar. Selain itu, memadukan sektor pariwisata sebagai unggulan utama dengan didukung oleh sektor ekonomi lainnya akan menambah kuat dan tangguhnya sektor perekonomian Kabupaten Pangandaran.



## 2.1 Rencana Strategis 2016 - 2021

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Pada tahun 2019, Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang merupakan proses *re-focussing* tujuan, sasaran dan indikator dalam RPJMD yang semula berjumlah 27 (dua puluh tujuh) tujuan, 59 (lima puluh sembilan) sasaran dan 107 (seratus tujuh) indikator sasaran diubah dan di *re-focussing* menjadi 12 (dua belas) tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran.

*Re-focussing* didasarkan pada hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 melalui Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/161/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, bahwa salah satu rekomendasinya adalah untuk meninjau kembali dokumen RPJMD guna memastikan bahwa dokumen tersebut

terdapat tujuan dan sasaran serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur.

### 2.1.1. Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran adalah :

## “KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Kabupaten Pangandaran” | Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang.                                                                                                                       |
| “Tujuan Wisata”         | Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata secara terpadu membentuk suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing. |
| “Berkelas Dunia”        | Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC).                                                                                                                                                                                    |

### 2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

2.1.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, mengandung 12 (dua belas) tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran yaitu sebagai berikut :

TABEL 2.1  
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KABUPATEN PANGANDARAN

| TUJUAN                                                                                               | SASARAN                                                                      | INDIKATOR SASARAN                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                            | 3                                                                 |
| 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi                                                                   | 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel                                       | Opini BPK terhadap LKPD                                           |
|                                                                                                      |                                                                              | Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)                               |
|                                                                                                      |                                                                              | Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5)                   |
|                                                                                                      |                                                                              | Nilai AKIP                                                        |
|                                                                                                      |                                                                              | Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan         |
|                                                                                                      | 2. Birokrasi yang efektif dan efisien                                        | Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)                            |
|                                                                                                      |                                                                              | Tingkat Kematangan E-Goverment (0 s/d 5)                          |
|                                                                                                      |                                                                              | Indeks Reformasi Birokrasi                                        |
|                                                                                                      | 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas                 | Cakupan Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10)                        |
|                                                                                                      |                                                                              | Survey Kepuasan Masyarakat                                        |
| 2. Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan                       | 4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah   | Ketaatan terhadap RTRW                                            |
|                                                                                                      | 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                  |
| 3. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas                                       | 6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas                  | Persentase jalan dalam kondisi mantap                             |
|                                                                                                      |                                                                              | Tingkat kecelakaan lalu lintas                                    |
|                                                                                                      |                                                                              | Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik                  |
|                                                                                                      |                                                                              | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum                    |
|                                                                                                      |                                                                              | Persentase Rumah Tangga bersanitasi                               |
| 4. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.                                                  | 7. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana                         | Indeks Risiko Bencana                                             |
| 5. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan                                               | 8. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan                          | Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi |
| 6. Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan              | 9. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan | Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal                              |
|                                                                                                      |                                                                              | Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik     |
|                                                                                                      | 10.Meningkatnya Kesatuan Bangsa                                              | Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan                 |
|                                                                                                      | 11.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi    | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu                    |
| 7. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan | 12.Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat       | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                  |
|                                                                                                      |                                                                              |                                                                   |
| 8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk                                                                | 13.Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk                                   | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                        |
| 9. Meningkatnya pengarusutamaan Gender                                                               | 14.Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender                           | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)                                  |
| 10. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga                                                        | 15.Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga                                 | Indeks Pembangunan Kepemudaan                                     |
|                                                                                                      |                                                                              | Indeks Pembangunan Keolahragaan                                   |
| 11. Menurunnya tingkat kemiskinan                                                                    | 16.Menurunnya angka kemiskinan                                               | Persentase penurunan angka kemiskinan                             |

|                                                                          |                                                           |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. | 17. Menurunnya kesenjangan antar wilayah                  | Indek Gini                                                                                              |
|                                                                          | 18. Menurunnya tingkat pengangguran                       | Persentase Tingkat pengangguran terbuka                                                                 |
|                                                                          | 19. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan | Persentase pertumbuhan PDRB                                                                             |
|                                                                          |                                                           | Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM                                                                    |
|                                                                          |                                                           | Jumlah Koperasi yang sehat                                                                              |
|                                                                          |                                                           | Pola Pangan Harapan                                                                                     |
|                                                                          |                                                           | Jumlah kunjungan wisata                                                                                 |
|                                                                          |                                                           | Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourist Council</i> (GSTC) |

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Pangandaran diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| TUJUAN                             | SASARAN                                | INDIKATOR SASARAN                                  | SATUAN         |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1                                  | 2                                      | 3                                                  | 4              |
| 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi | 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1. Opini BPK terhadap LKPD                         | Status Laporan |
|                                    |                                        | 2. Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)             | Skor           |
|                                    |                                        | 3. Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5) | Skor           |

|                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                             |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                              | 4. Nilai AKIP                                                                                               | Nilai                               |
|                                                                                                      |                                                                              | 5. Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan                                                | Persen                              |
|                                                                                                      | 2. Birokrasi yang efektif dan efisien                                        | 6. Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)                                                                   | Skor                                |
|                                                                                                      |                                                                              | 7. Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)                                                                | Indeks                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 8. Indeks Reformasi Birokrasi                                                                               | Indeks                              |
|                                                                                                      | 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas                 | 9. Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10)                                                                | Persen                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 10. Survey Kepuasan Masyarakat                                                                              | Predikat                            |
| 2. Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan                       | 4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah   | 11. Ketaatan terhadap RTRW                                                                                  | persen                              |
|                                                                                                      | 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                    | 12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                        | Indeks                              |
| 3. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas                                       | 6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas                  | 13. Persentase jalan dalam kondisi mantap                                                                   | Persen                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 14. Tingkat kecelakaan lalu lintas                                                                          | Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun |
|                                                                                                      |                                                                              | 15. Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik                                                        | Rasio                               |
|                                                                                                      |                                                                              | 16. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum                                                          | Persen                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 17. Persentase Rumah Tangga bersanitasi                                                                     | Persen                              |
| 4. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.                                                  | 7. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana                         | 18. Indeks Risiko Bencana                                                                                   | Indeks                              |
| 5. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan                                               | 8. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan                          | 19. Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi                                       | Persen                              |
| 6. Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan              | 9. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan | 20. Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal                                                                    | Persen                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 21. Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik                                           | Persen                              |
|                                                                                                      | 10. Meningkatnya Kesatuan Bangsa                                             | 22. Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan                                                       | Angka                               |
|                                                                                                      | 11. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi   | 23. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu                                                          | Persen                              |
| 7. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan | 12. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat      | 24. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                                        | Indeks                              |
| 8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk                                                                | 13. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk                                  | 25. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                                              | Persen                              |
| 9. Meningkatnya pengarusutamaan Gender                                                               | 14. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender                          | 26. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                        | Indeks                              |
| 10. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga                                                        | 15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga                                | 27. Indeks Pembangunan Kepemudaan                                                                           | Indeks                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 28. Indeks Pembangunan Keolahragaan                                                                         | Indeks                              |
| 11. Menurunnya tingkat kemiskinan                                                                    | 16. Menurunnya angka kemiskinan                                              | 29. Persentase penurunan angka kemiskinan                                                                   | Persen                              |
| 12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.                             | 17. Menurunnya kesenjangan antar wilayah                                     | 30. Indek Gini                                                                                              | Indeks                              |
|                                                                                                      | 18. Menurunnya tingkat pengangguran                                          | 31. Persentase Tingkat pengangguran terbuka                                                                 | persen                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 32. Persentase pertumbuhan PDRB                                                                             | persen                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 33. Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM                                                                    | persen                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 34. Jumlah Koperasi yang sehat                                                                              | Jumlah                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 35. Pola Pangan Harapan                                                                                     | Poin                                |
|                                                                                                      |                                                                              | 36. Jumlah kunjungan wisata                                                                                 | Jumlah                              |
|                                                                                                      |                                                                              | 37. Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourist Council</i> (GSTC) | Jumlah                              |

### 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 tercantum dalam lampiran.

### 2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| SASARAN                                | INDIKATOR SASARAN                                         | SATUAN         | TARGET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                        |                                                           |                | 2019   |
| 1                                      | 2                                                         | 3              | 4      |
| 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Opini BPK terhadap LKPD                                   | Status Laporan | WTP    |
|                                        | Tingkat Kapabilitas APIP<br>( 1 s/d 5)                    | Skor           | 2      |
|                                        | Tingkat Kematangan implementasi SPIP<br>( 1 s/d 5)        | Skor           | 2      |
|                                        | Nilai AKIP                                                | Nilai          | B      |
|                                        | Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan | Persen         | 87     |



| 1                                                                            | 2                                                                                                       | 3                                   | 4      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 2. Birokrasi yang efektif dan efisien                                        | Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)                                                                  | Skor                                | 60     |
|                                                                              | Tingkat Kematangan E-Goverment (0 s/d 5)                                                                | Indeks                              | 2      |
|                                                                              | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                              | Indeks                              | 45     |
| 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas                 | Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10)                                                               | Persen                              | 30     |
|                                                                              | Survey Kepuasan Masyarakat                                                                              | Predikat                            | Baik   |
| 4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah   | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                  | persen                              | 20     |
| 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                        | Indeks                              | 62,46  |
| 6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas                  | Persentase jalan dalam kondisi mantap                                                                   | Persen                              | 65     |
|                                                                              | Tingkat kecelakaan lalu lintas                                                                          | Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun | 0,032  |
|                                                                              | Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik                                                        | Rasio                               | 60     |
|                                                                              | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum                                                          | Persen                              | 55     |
|                                                                              | Indeks Resiko Sanitasi                                                                                  | Indeks                              | 40     |
| 7. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana                         | Indeks Risiko Bencana                                                                                   | Indeks                              | 150,6  |
| 8. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan                          | Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi                                       | Persen                              | 18     |
| 9. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan | Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal                                                                    | Persen                              | 35     |
|                                                                              | Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik                                           | Persen                              | 75     |
| 10. Meningkatnya Kesatuan Bangsa                                             | Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan                                                       | Angka                               | 11     |
| 11. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi   | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu                                                          | Persen                              | 81     |
| 12. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat      | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                                        | Indeks                              | 66.82  |
| 13. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk                                  | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                                              | Persen                              | 0,57   |
| 14. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender                         | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)                                                                        | Indeks                              | 65,67  |
| 15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga                                | Indeks Pembangunan Kepemudaan                                                                           | Indeks                              | 0,25   |
|                                                                              | Indeks Pembangunan Keolahragaan                                                                         | Indeks                              | 0,75   |
| 16. Menurunnya angka kemiskinan                                              | Persentase penurunan angka kemiskinan                                                                   | Persen                              | 0,25   |
| 17. Menurunnya kesenjangan antar wilayah                                     | Indek Gini                                                                                              | Indeks                              | 0,337  |
| 18. Menurunnya tingkat pengangguran                                          | Persentase Tingkat pengangguran terbuka                                                                 | persen                              | 3,46   |
| 19. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan                    | Persentase pertumbuhan PDRB                                                                             | persen                              | 4,28   |
|                                                                              | Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM                                                                    | persen                              | 87     |
|                                                                              | Jumlah Koperasi yang sehat                                                                              | Jumlah                              | 1      |
|                                                                              | Pola Pangan Harapan                                                                                     | Poin                                | 91     |
|                                                                              | Jumlah kunjungan wisata                                                                                 | Jumlah                              | 5 Juta |
|                                                                              | Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourist Council</i> (GSTC) | Jumlah                              | 0      |



Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangadaran tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

### 3.1 *Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangadaran Tahun 2019*

Pemerintah Kabupaten Pangandaran selaku pengemban amanah masyarakat Pangandaran melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Untuk mempermudah dalam interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

| No. | Rentang Capaian            | Kategori Capaian |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1   | Lebih dari 100 %           | Baik Sekali (BS) |
| 2   | Lebih dari 75 % s.d. 100 % | Baik (B)         |
| 3   | 55 % s.d.75 %              | Cukup (C)        |
| 4   | Kurang dari 55 %           | Kurang (K)       |

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Sasaran melalui pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, terdapat 12 (dua belas) tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut :

- a. Misi Kesatu terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator kinerja;
- b. Misi Kedua terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja;
- c. Misi Ketiga terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja;
- d. Misi Keempat terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja;
- e. Misi Kelima terdapat 5 tujuan, 5 sasaran dan 6 indikator kinerja;
- f. Misi Keenam terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 8 indikator kinerja.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Indikator Sasaran**

| NO     | MISI    | JUMLAH TUJUAN | JUMLAH SASARAN | JUMLAH INDIKATOR KINERJA | PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN  |
|--------|---------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Kesatu  | 1             | 3              | 10                       | BS = 5, B = 4 , C = 0, K = 0  |
| 2.     | Kedua   | 1             | 2              | 2                        | BS = 1, B = 1, C = 0, K = 0   |
| 3.     | Ketiga  | 3             | 3              | 7                        | BS = 5 , B = 0 , C = 0, K = 2 |
| 4.     | Keempat | 1             | 3              | 4                        | BS = 4, B = 0, C = 0, K = 0   |
| 5.     | Kelima  | 5             | 5              | 6                        | BS = 5, B = 1, C = 0, K = 0   |
| 6.     | Keenam  | 1             | 3              | 8                        | BS = 2, B = 4, C = 0, K = 0   |
| JUMLAH |         | 12            | 19             | 37                       | BS = 23, B = 10, C = 0, K = 1 |

**Keterangan : 2 indikator kinerja belum ada data dan 1 indikator kinerja belum ada target**

Dari 19 (sembilan belas) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja sasaran dapat diuraikan kembali hasil pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

| No.                                                         | Kategori      | Jumlah Indikator Sasaran | Persentase    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Misi Kesatu ( 10 Indikator Sasaran )</b>                 |               |                          |               |
| 1                                                           | Baik Sekali   | 5                        | 55,56         |
| 2                                                           | Baik          | 4                        | 44,44         |
| 3                                                           | Cukup         | 0                        | 0,00          |
| 4                                                           | Kurang        | 0                        | 0,00          |
|                                                             | <b>Jumlah</b> | <b>9</b>                 | <b>100,00</b> |
| <b>Keterangan : 1 Indikator kinerja belum tersedia data</b> |               |                          |               |

| Misi Kedua ( 2 Indikator Sasaran )   |               |          |               |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 1                                    | Baik Sekali   | 1        | 50,00         |
| 2                                    | Baik          | 1        | 50,00         |
| 3                                    | Cukup         | 0        | 0,00          |
| 4                                    | Kurang        | 0        | 0,00          |
|                                      | <b>Jumlah</b> | <b>2</b> | <b>100,00</b> |
| Misi Ketiga ( 7 Indikator Sasaran )  |               |          |               |
| 1                                    | Baik Sekali   | 5        | 71,43         |
| 2                                    | Baik          | 0        | 0,00          |
| 3                                    | Cukup         | 0        | 0,00          |
| 4                                    | Kurang        | 2        | 28,57         |
|                                      | <b>Jumlah</b> | <b>7</b> | <b>100,00</b> |
| Misi Keempat ( 4 Indikator Sasaran ) |               |          |               |
| 1                                    | Baik Sekali   | 4        | 100           |
| 2                                    | Baik          | 0        | 0,00          |
| 3                                    | Cukup         | 0        | 0,00          |
| 4                                    | Kurang        | 0        | 0,00          |
|                                      | <b>Jumlah</b> | <b>4</b> | <b>100,00</b> |
| Misi Kelima ( 6 Indikator Sasaran )  |               |          |               |
| 1                                    | Baik Sekali   | 5        | 83,33         |
| 2                                    | Baik          | 1        | 16,67         |
| 3                                    | Cukup         | 0        | 0,00          |
| 4                                    | Kurang        | 0        | 0,00          |
|                                      | <b>Jumlah</b> | <b>6</b> | <b>100,00</b> |
| Misi Keenam ( 8 Indikator Sasaran )  |               |          |               |
| 1                                    | Baik Sekali   | 2        | 28,57         |
| 2                                    | Baik          | 4        | 57,14         |
| 3                                    | Cukup         | 0        | 0,00          |
| 4                                    | Kurang        | 0        | 0,00          |
|                                      | <b>Jumlah</b> | <b>7</b> | <b>100,00</b> |

Keterangan : 1 indikator belum ada data & 1 indikator belum ada target pada tahun 2019

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, diketahui bahwa **23 indikator sasaran** atau 67,65% bermakna **Baik Sekali**, **10 indikator sasaran** atau 29,41% bermakna **Baik**, **1 indikator sasaran** atau 2,94% bermakna **Kurang**, **2 indikator sasaran** atau 5,88% **belum tersedia data**, dan **1 indikator sasaran** atau 2,94% **belum memiliki target**. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 110,87%. dikategorikan **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 bermakna **Baik Sekali**.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1**  
**Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

| INDIKATOR SASARAN             |                                                           | SATUAN         | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) TARGET |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------------------|
|                               |                                                           |                | TARGET     | REALISASI |                            |
| 1                             | Opini BPK terhadap LKPD                                   | Status Laporan | WTP        | -         | -                          |
| 2                             | Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)                       | Skor           | 2          | 2         | 100,00                     |
| 3                             | Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5)           | Skor           | 2          | 3         | 150                        |
| 4                             | Nilai AKIP                                                | Nilai          | B          | B         | 100                        |
| 5                             | Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan | Persen         | 87         | 94,15     | 108,22                     |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                           |                |            |           | 114,56                     |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Birokrasi yang bersih dan akuntabel** memiliki 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan rincian : 2 (dua) indikator sasaran mencapai melebihi target, 2 (dua) indikator sasaran mencapai target dan 1 (satu) indikator sasaran belum tersedia data. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 114,56%. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Opini BPK terhadap LKPD

Sampai laporan ini disusun, BPK masih dalam proses pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019. Namun demikian apabila merujuk pada hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Tahun sebelumnya dapat mencapai target dikarenakan berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2018 mendapatkan Nilai WTP dengan indikator capaiannya baik yaitu “Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten”, dan “Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersertifikat”. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset yang di aplikasikan pada sistem aplikasi SIMDA BMD.

Adanya manajemen aset meliputi : penertiban, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah mendorong percepatan penguatan APBD termasuk perencanaan penerimaan dan pendapatan daerah (PAD). Penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendorong pencapaian pemberian opini/pendapat

pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi :

- 1) pengamanan fisik,
- 2) pengamanan administratif dan
- 3) pengamanan hukum.

Opini BPK terhadap LKPD mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya :

- a. Langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan WTP ini adalah dengan membuat terobosan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu dengan membangun sistem elektronik diantaranya adalah SIMDA online artinya pengelola SIMDA di seluruh Perangkat Daerah dapat mengakses SIMDA dari manapun mereka berada asal tersedia koneksi internet, selain itu dengan dilaksanakannya sistem SP2D online, serta dengan mengintegrasikan seluruh sistem pengelolaan keuangan (SIMDA Pengelolaan Keuangan, SP2D online). Dengan integrasi ini diharapkan semua sistem informasi yang ada akan memungkinkan data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan validitas yang baik, sehingga memudahkan dalam penyampaian laporan keuangan.
- b. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah harus lebih cermat karena belum memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- c. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrua (*Accrual Basis*) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
- d. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;
- e. Ditetapkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2015 yang merupakan dokumen Kebijakan Akuntansi yang wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana Termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
- f. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah disusun berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

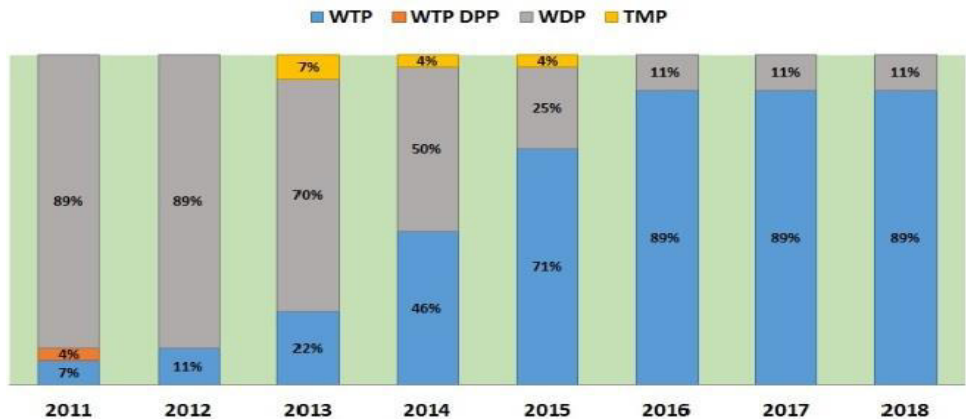
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali Laporan Keuangan. Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

- g. Ditetapkannya Kebijakan Pendapatan Daerah, diantaranya :
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan
  - 2) Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi telah disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat dan Provinsi
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, mendapatkan Nilai WTP dengan indikator capaiannya baik yaitu “Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten”, dan “Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersertifikat “.Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset yang di aplikasikan pada sistem aplikasi SIMDA BMD. Meskipun dalam penatusahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum tertib dengan harus melakukan inventarisasi aset yang menghasilkan data aset yang andal.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapatkan penilaian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI yaitu Tahun 2016, 2017 dan dan 2018. WTP memang bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam LKPD. Namun, WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar.

**Gambar 3.1**  
**Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD TA 2011 - TA 2018**  
**di Jawa Barat**



Sumber : BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT



Tabel 3.5  
Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat

| No. | Entitas Pemda      | TA 2011    | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
|-----|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Prov Jawa Barat    | WTP        | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 2   | Kab. Bandung       | WDP        | WDP     | TMP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 3   | Kab. Bandung Barat | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     |
| 4   | Kab. Bekasi        | WDP        | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 5   | Kab. Bogor         | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 6   | Kab. Ciamis        | WDP        | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 7   | Kab. Cianjur       | WDP        | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WDP     |
| 8   | Kab. Cirebon       | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 9   | Kab. Garut         | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 10  | Kab. Indramayu     | WDP        | WDP     | TMP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 11  | Kab. Karawang      | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 12  | Kab. Kuningan      | WDP        | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 13  | Kab. Majalengka    | WDP        | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 14  | Kab. Pangandaran   | –          | –       | –       | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 15  | Kab. Purwakarta    | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 16  | Kab. Subang        | WDP        | WDP     | WDP     | TMP     | TMP     | WDP     | WDP     | WDP     |
| 17  | Kab. Sukabumi      | WDP        | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 18  | Kab. Sumedang      | WDP        | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 19  | Kab. Tasikmalaya   | WDP        | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WDP     |
| 20  | Kota Bandung       | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     |
| 21  | Kota Banjar        | WTP        | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 22  | Kota Bekasi        | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 23  | Kota Bogor         | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 24  | Kota Cimahi        | WDP        | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 25  | Kota Cirebon       | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 26  | Kota Depok         | WTP<br>DPP | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 27  | Kota Sukabumi      | WDP        | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 28  | Kota Tasikmalaya   | WDP        | WDP     | WDP     | WDP     | WDP     | WTP     | WTP     | WTP     |

Sumber : BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT

Sesuai dengan target di akhir periode RPJMD, indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah WTP maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupaya untuk mempertahankan opini tersebut sebagaimana telah diraih berturut-turut selama 3 (tiga) tahun ke belakang.

2. Tingkat Kapabilitas APIP

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kabupaten Pangandaran sesuai surat dari Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor LQAPIP-1073/PW10/6/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 2 Inspektorat Kabupaten Pangandaran menunjukkan Kabupaten Pangandaran telah mencapai Kapabilitas APIP Level 2, sehingga capaian untuk indikator ini sampai dengan Tahun 2019 adalah 100%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100 = \frac{2}{2} \times 100 = 100\%$$

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu menunjukan hasil yang sama yaitu berada pada Level 2. Namun capaian Level 2 di tahun 2018 dikategorikan masih terdapat catatan, sedangkan pada tahun 2019 sudah mencapai Level 2 penuh. Adapun rincian hasil *Quality Assurance* (QA) perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dan 2019 terhadap 6 elemen sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6  
Perbandingan *Quality Assurance* (QA) BPKP tahun 2018 dan 2019

| No | Elemen                              | Level      |            |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
|    |                                     | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
| 1. | Peran dan Layanan                   | 1          | 2          |
| 2. | Manajemen Sumber Daya Manusia       | 2          | 2          |
| 3. | Praktik Profesional                 | 1          | 2          |
| 4. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 2          | 2          |
| 5. | Budaya dan Hubungan Organisasi      | 2          | 2          |
| 6. | Struktur Tata Kelola                | 2          | 2          |

Sumber : BPKP Perwakilan Jawa Barat, 2019

Level Kapabilitas APIP di mulai dari level 1 s.d. level 5. Sesuai dengan target RPJMD target kapabilitas APIP pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021) adalah level 3, sehingga capaian Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru sebesar 66,67%, perlu capaian sebesar 33,33% untuk mencapai target RPJMD. Perhitungan capaian diperoleh dari Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi tahun 2019}}{\text{Target Akhir RPJMD}} \times 100 = \frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$$

Kapabilitas APIP ini terkait dengan 6 (enam) elemen dan kesemuanya berjumlah 41 KPA (Key Proces Area atau indikator-indikator kunci pencapaian tahapan kapabilitas) untuk sampai dengan level 5, level 1 tidak ada KPA, level 2 sebanyak 10 KPA, level 3 sebanyak 14 KPA, level 4 sebanyak 9 KPA, dan level 5 sebanyak 8 KPA. Adapun tahapannya berupa pembangunan infrastruktur (berupa pedoman, petunjuk teknis, SOP, rencana aksi, rencana tindak pengendalian, dan lain sebagainya) dan implementasi dari infrastruktur yang sudah dibangun tersebut.

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota Lain

| Indikator Kinerja Utama            | Realisasi Kab. Pangandaran | Realisasi Kota Banjar | Keterangan                                        |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5) | 2                          | 3                     | Realisasi lebih kecil dari realisasi Kota Banjar. |

Jika dibandingkan dengan Kota Banjar, realisasinya lebih kecil dari Kota Banjar dikarenakan *Key Proccess Area* (KPA) untuk Kapabilitas APIP Level 3 sudah terpenuhi.

Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya Komitmen Pimpinan Daerah (Bupati) untuk meningkatkan Kapabilitas APIP;
2. Adanya kebijakan untuk meningkatkan Kapabilitas APIP melalui dibentuknya Satuan Tugas Khusus (Satgas) dengan Keputusan Inspektur WAS.05/Kpts.009-Insp/2019

- tentang Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
3. Sinergitas yang baik antara Inspektorat Kabupaten Pangandaran dengan BPKP melalui kegiatan workshop, Bimtek dan Pembinaan terkait Kapabilitas APIP;
  4. Bimtek dan Diklat Substantif untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan dalam mendukung paradigma APIP selaku Consulting Partner dan Quality Assurance.

Untuk meningkatkan percepatan menuju Level 3 sesuai dengan target akhir RPJMD diperlukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan infrastruktur-infrastruktur yang sesuai dengan hasil *benchmarking* dan meningkatkan pertemuan dengan BPKP selaku intansi pembina;
2. Mengupayakan peningkatan kompetensi aparaturnya melalui Diklat, Bimtek dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
3. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kepabilitas APIP dengan melakukan penilaian efektivitas manajemen risiko pemerintah daerah;
4. Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan *Key Process Area (KPA)* secara baik dan terus menerus (*Institutionalized*), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi;
5. Melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019**

| Indikator Sasaran                   | Satuan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Anggaran        |       | Tingkat Efisiensi |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|
|                                     |        |                                              | Realisasi (Rp.) | %     |                   |
| Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5) | Skor   | 100%                                         | 468.290.174,00  | 98,44 | 1,56              |

Indikator sasaran Tingkat Kapabilitas APIP menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 98,44% berdasarkan perhitungan dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \% = \frac{468.290.174,00}{475.730.500,00} \times 100 \% = 98,44\%$$

dimana sisa pagu anggaran sebesar Rp7.440.326,00. Jika dibandingkan dengan tahun lalu analisis efektivitas dan efisiensi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2018**

| Indikator Sasaran                  | Satuan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Realisasi (Rp) | Persentase Penyerapan% | Tingkat Efisiensi |
|------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5) | Skor   | 100%                                         | 731.633.000,00 | 99,06                  | 0,94              |

Tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 lebih tinggi. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 99,06% berdasarkan perhitungan dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \% = \frac{731.633.000,00}{738.542.500,00} \times 100 \% = 99,06 \%$$

Berdasarkan perbandingan tersebut, efektivitas dan efisiensi pada tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018 sebesar 1,56% karena dengan indikator sasaran yang sama dan capaian kinerja sasaran yang sama dapat meminimalkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,44%. Efektivitas dan efisiensi terjadi sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

3. Tingkat Kematangan implementasi SPIP

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP bersumber dari hasil *Quality Assurance* oleh BPKP terhadap laporan hasil penilaian mandiri masing-masing Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementrian/Lembaga Negara. Tingkat kematangan Implementasi SPIP dimulai dari 0 sampai dengan 5, dinilai berdasarkan 125 (seratus dua puluh lima) indikator yang terbagi ke dalam 5 (lima) unsur. Berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP bahwa tingkat Kematangan Implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berada pada level 3, sehingga pada Tahun 2019 capaiannya 150%, Kondisi tersebut diperoleh dari rumus =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{3}{2} \times 100 \% = 150 \%$ .

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP evaluasinya dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan level 1 s.d level 5. Sesuai dengan target RPJMD target kapabilitas APIP pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021) adalah level 3, sehingga capaian Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100,00 % yang diperoleh dari rumus =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{3}{3} \times 100 \% = 100 \%$ .

Tingkat Implementasi SPIP jika dibandingkan dengan Inspektorat Kota Banjar realisasinya telah sama yaitu berada pada level 3 berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP dengan hasil perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi SPIP Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar**

| Unsur SPIP              | Inspektorat Kabupaten Pangandaran |        | Inspektorat Kota Banjar |        |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|--------|
|                         | Skor                              | Nilai  | Skor                    | Nilai  |
| Lingkungan Pengendalian | 3,1250                            | 0,9375 | 3,000                   | 0,9000 |
| Penilaian Risiko        | 3,0000                            | 0,6000 | 3,000                   | 0,600  |
| Kegiatan Pengendalian   | 3,0000                            | 0,7500 | 3,091                   | 0,773  |
| Pemantauan              | 3,0000                            | 0,300  | 3,000                   | 0,300  |
| Jumlah                  | 3,0000                            | 0,4500 | 3,000                   | 0,450  |
| Keterangan              | Level 3 (Terdefinisi)             |        | Level 3 (Terdefinisi)   |        |

Secara rinci kondisi kematangan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil QA sesuai Laporan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor : Lap-163/PW10/3/2019 tanggal 16 April 2019 bahwa tingkat kematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berada pada level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,0375.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran bahwa tingkat Kematangan Implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berada pada level 3, sehingga pada Tahun 2019 capaiannya 150%, Kondisi tersebut diperoleh dari rumus =  $\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \% = \frac{3}{2} \times 100 \% = 150 \%$ . Secara rinci hasil Penilaian Mandiri terhadap 21 Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Kondisi Kematangan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran**  
**Hasil Penilaian Mandiri**

| No  | Nama SKPD                                                             | Skor  | Level                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1.  | Sekretariat Daerah                                                    | 3,652 | Terdefinisi           |
| 2.  | Inspektorat                                                           | 3,744 | Terdefinisi           |
| 3.  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | 3,624 | Terdefinisi           |
| 4.  | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                     | 4,198 | Terkelola dan Terukur |
| 5.  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                | 3,667 | Terdefinisi           |
| 6.  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                               | 3,829 | Terdefinisi           |
| 7.  | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu                    | 3,700 | Terdefinisi           |
| 8.  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                        | 3,749 | Terdefinisi           |
| 9.  | Dinas Kesehatan                                                       | 4,092 | Terkelola dan Terukur |
| 10. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian               | 3,659 | Terdefinisi           |
| 11. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga                                 | 3,777 | Terdefinisi           |
| 12. | Dinas Pertanian                                                       | 4,100 | Terkelola dan Terukur |
| 13. | Kecamatan Pangandaran                                                 | 3,500 | Terdefinisi           |
| 14. | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan                       | 4,300 | Terkelola dan Terukur |
| 15. | Kecamatan Cijulang                                                    | 3,700 | Terdefinisi           |
| 16. | Kecamatan Sidamulih                                                   | 3,300 | Terdefinisi           |
| 17. | Kecamatan Cigugur                                                     | 3,400 | Terdefinisi           |
| 18. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                       | 4,00  | Terkelola dan Terukur |
| 19. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                                 | 3,800 | Terdefinisi           |
| 20. | Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3,400 | Terdefinisi           |
| 21. | Kecamatan Mangunjaya                                                  | 3,500 | Terdefinisi           |
|     | <b>Nilai Tingkat Kabupaten</b>                                        |       | <b>Terdefinisi</b>    |

Jika dibandingkan dengan Kota Banjar hasil *Quality Assurance* (QA) BPKP Kabupaten Pangandaran capaiannya sama di Level 3, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kabupaten Pangandaran**  
**dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar**

| Indikator Kinerja Utama                        | Realisasi Kab. Pangandaran | Realisasi Kota Banjar | Keterangan |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (1 s/d 5) | 3                          | 3                     | -          |

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya Komitmen Pimpinan Daerah (Bupati) untuk meningkatkan Maturitas SPIP baik di level Kabupaten maupun di SKPD;
2. Adanya kebijakan untuk meningkatkan Level SPIP melalui dibentuknya Satuan Tugas Khusus (Satgas) dengan Keputusan Inspektur Nomor 700/Kpts.007-Insp/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
3. Adanya sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) tentang manajemen risiko khususnya dalam hal identifikasi dan pemetaan risiko dengan menggunakan bantuan aplikasi *Risk Application Tools* (RAT) terhadap seluruh SKPD;
4. Adanya pembinaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk mendorong percepatan peningkatan Maturitas SPIP di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran melalui Bimtek dan Pendampingan.

Meskipun sudah mencapai target akhir RPJMD, tetapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya untuk senantiasa meningkatkan dari sisi kualitasnya, diantaranya :

1. telah dilakukan sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) tentang manajemen risiko khususnya dalam hal identifikasi dan pemetaan risiko dengan menggunakan bantuan aplikasi *Risk Application Tools* (RAT) terhadap seluruh SKPD, sehingga diharapkan seluruh SKPD pada Tahun 2019 sudah memiliki Profil Risiko berikut Rencana Tindak Pengendaliannya. Tata kelola risiko ini menjadi salah satu prioritas yang perlu dilakukan karena merupakan unsur penting dan penyumbang terbesar dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;
2. Menyusun Komite Pengendali Risiko Tingkat Kabupaten Pangandaran yang bertugas mengendalikan risiko strategis;
3. Menyusun Unit Pengendali risiko (UPR) yang bertugas mengendalikan risiko organisasi;
4. Mengkoordinasikan hasil Profil Risiko dan RTP yang telah disusun oleh masing-masing OPD dan mereviu serta memantau pelaksanaannya.

**Tabel 3.13**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019**

| No. | Indikator Sasaran                    | Satuan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Anggaran        |       | Tingkat Efisiensi |
|-----|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|
|     |                                      |        |                                              | Realisasi (Rp.) | %     |                   |
| 1   | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP | Skor   | 150%                                         | 294.825.645     | 98,46 | 51,54%            |



Indikator sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 98,46% berdasarkan perhitungan dari rumus =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \% = \frac{294.825.645}{299.435.000} \times 100 \% = 98,46\%$  dimana sisa pagu anggaran sebesar Rp4.609.355,00. Jika dibandingkan dengan tahun lalu analisis efektivitas dan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2018

| No. | Indikator Sasaran                    | Satuan | Persentase Rata-rata<br>Capaian Kinerja Sasaran | Anggaran        |       | Tingkat Efisiensi |
|-----|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|
|     |                                      |        |                                                 | Realisasi (Rp.) | %     |                   |
| 1   | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP | Skor   | 150%                                            | 133.870.479,00  | 99,57 | 50,43%            |

Efektivitas dan efisiensi anggaran pada tahun 2018 mencapai tingkat yang tinggi. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 99,57% berdasarkan perhitungan dari rumus =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \% = \frac{133.870.479,00}{134.454.000,00} \times 100 \% = 99,57 \%$ . Berdasarkan perbandingan tersebut, efektivitas dan efisiensi pada tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018 sebesar 51,54% karena dengan indikator sasaran yang sama dan capaian kinerja sasaran yang sama dapat meminimalkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,46%. Efektivitas dan efisiensi terjadi sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

#### 4. Nilai capaian AKIP

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangadaran tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Untuk menghitung nilai capaian AKIP diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{Realisasi score perolehan nilai AKIP}}{\text{Target Score Nilai capaian}} \times 100$$

Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangadaran Tahun 2019 yang dilakukan Inspektur Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangadaran Tahun Anggaran 2019 memperoleh nilai sebesar 65,90 atau mendapat predikat B (Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian :



**Tabel 3.15**  
**Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| NO          | KOMPONEN                               | BOBOT (%) | HASIL EVALUASI (%) |       |
|-------------|----------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
|             |                                        |           | 2018               | 2019  |
| 1           | Perencanaan Kinerja                    | 30%       | 20,57              | 22,09 |
| 2           | Pengukuran Kinerja                     | 25%       | 15,02              | 15,42 |
| 3           | Pelaporan Kinerja                      | 15%       | 9,23               | 9,81  |
| 4           | Evaluasi Internal                      | 10%       | 5,67               | 7,15  |
| 5           | Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi | 20%       | 10,33              | 11,43 |
| J u m l a h |                                        | 100 %     | 60,82              | 65,90 |

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Pangandaran

Berdasarkan target di RPJMD, pada tahun 2019 nilai AKIP adalah B atau dengan skor minimal 60. Dari informasi di atas dihitung capaian indikator sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian skor AKIP} &= \frac{65,90}{60} \times 100 \\ &= 109,9\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas, memberikan gambaran bahwa meskipun pada kategori sama, yaitu B, namun secara skor telah mencapai melebihi target.

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja AKIP dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target  | Realisasi | Capaian | Percepatan |
|-------|---------|-----------|---------|------------|
| 2018  | CC (50) | B (60,82) | 121,64% | 10,82      |
| 2019  | B (60)  | B (65,90) | 109,9%  | 5,90       |

Dibandingkan dengan tahun 2018, percepatan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 4,92 atau bila ditinjau dari capaiannya terjadi penurunan sebesar 11,74%. Hal ini diakibatkan masih adanya indikator yang mengarah pada proses, dan beberapa kegiatan outputnya masih belum jelas. Selain itu, masih perlu penajaman dalam analisa indikator sasaran LKIP. Meskipun dari sisi capaian terdapat penurunan, namun dilihat dari sisi score yang diperoleh pada tahun 2019 terdapat kenaikan dibandingkan score yang diperoleh pada tahun sebelumnya (2018).

**Tabel 3.17**  
**Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| No                                  | Komponen/Sub Komponen                         | Bobot        | Score 2018   | Score 2019   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Perencanaan Kinerja (30%)</b> |                                               | <b>30,00</b> | <b>20,57</b> | <b>22,09</b> |
| I.                                  | Perencanaan Strategis (10%)                   | 10,00        | 7,27         | 7,82         |
| a.                                  | Pemenuhan Renstra (2%)                        | 2,00         | 1,63         | 1,85         |
| b.                                  | Kualitas Renstra (5%)                         | 5,00         | 3,75         | 4,22         |
| c.                                  | Implementasi Renstra (3%)                     | 3,00         | 1,89         | 1,75         |
| II.                                 | Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)             | 20,00        | 13,30        | 14,27        |
| a.                                  | Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)    | 4,00         | 3,70         | 3,78         |
| b.                                  | Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)    | 10,00        | 6,41         | 7,08         |
| c.                                  | Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) | 6,00         | 3,19         | 3,41         |

| No                                                    | Komponen/Sub Komponen                  | Bobot         | Score 2018   | Score 2019   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>B. Pengukuran Kinerja (25%)</b>                    |                                        | <b>25,00</b>  | <b>15,02</b> | <b>15,42</b> |
| I.                                                    | Pemenuhan Pengukuran (5%)              | 5,00          | 3,96         | 4,35         |
| II.                                                   | Kualitas Pengukuran (12,5%)            | 12,50         | 7,31         | 7,55         |
| III.                                                  | Implementasi Pengukuran (7,5%)         | 7,50          | 3,75         | 3,52         |
| <b>C. Pelaporan Kinerja (15%)</b>                     |                                        | <b>15,00</b>  | <b>9,23</b>  | <b>9,81</b>  |
| I.                                                    | Pemenuhan Pelaporan (3%)               | 3,00          | 2,67         | 2,81         |
| II.                                                   | Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)     | 7,50          | 3,75         | 4,19         |
| III.                                                  | Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)   | 4,50          | 2,81         | 2,81         |
| <b>D. Evaluasi Internal (10%)</b>                     |                                        | <b>10,00</b>  | <b>5,67</b>  | <b>7,15</b>  |
| I.                                                    | Pemenuhan Evaluasi (2%)                | 2,00          | 1,67         | 1,90         |
| II.                                                   | Kualitas Evaluasi (5%)                 | 5,00          | 2,50         | 3,75         |
| III.                                                  | Pemanfaatan Evaluasi (3%)              | 3,00          | 1,50         | 1,50         |
| <b>E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)</b> |                                        | <b>20,00</b>  | <b>10,33</b> | <b>11,43</b> |
| I.                                                    | Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (5%)  | 5,00          | 2,50         | 3,25         |
| II.                                                   | Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (5%) | 5,00          | 3,25         | 4,44         |
| III.                                                  | Benchmark Kinerja (5%)                 | 5,00          | 2,91         | 2,91         |
| IV.                                                   | Kinerja Lainnya (5%)                   | 5,00          | 1,67         | 0,83         |
| <b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>    |                                        | <b>100,00</b> | <b>60,82</b> | <b>65,90</b> |

Dapat dilihat dari tabel diatas terdapat peningkatan dari setiap komponen walaupun terdapat penurunan dalam sub komponen Implementasi Renstra. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja**

Nilai yang diperoleh atas Perencanaan Kinerja adalah sebesar 22,09 dari bobot 30,00. Kabupaten Pangandaran telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Perencanaan Kinerja Tahunan, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut :

- 1) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
- 2) Dokumen Renstra belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 3) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
- 4) Kegiatan belum sepenuhnya relevan sebagai cara untuk mencapai sasaran.
- 5) Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang memadai
- 6) Dokumen PK belum sepenuhnya selaras dengan Renstra
- 7) Dokumen PK belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).
- 8) Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya mencantumkan target secara periodik
- 9) Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

**b. Pengukuran Kinerja.**

Nilai yang diperoleh atas Pengukuran Kinerja adalah sebesar 15,42 dari bobot 25,00. Kabupaten Pangandaran telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut :

- 1) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan.
- 2) Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV belum memenuhi Kriteria Indikator Kinerja yang baik
- 3) Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV belum selaras dengan Indikator Kinerja atasannya
- 4) Hanya sebagian terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
- 5) Pengukuran kinerja hanya sebagian dilakukan secara berjenjang
- 6) Pengumpulan data kinerja hanya sebagian dapat diandalkan.
- 7) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala
- 8) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- 9) IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- 10) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- 11) Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya
- 12) Hasil Pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan dengan pemberian *reward and punishment* dan belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian.
- 13) IKU belum seluruhnya direviu secara berkala
- 14) Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum seluruhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Nilai yang diperoleh atas Pelaporan Kinerja adalah sebesar 9,81 dari bobot penilaian 15,00. Kabupaten Pangandaran telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Namun terdapat kelemahan dalam Komponen Pelaporan Kinerja, yaitu :

- 1) Laporan kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.
- 2) Laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.
- 3) Laporan kinerja dengan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
- 4) Meningkatkan Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
- 5) Meningkatkan Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 6) Meningkatkan Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- 7) Meningkatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan.
- 8) Meningkatkan Informasi yang disajikan agar dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan.

- 9) Meningkatkan Informasi yang disajikan agar dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- 10) Meningkatkan Informasi yang disajikan agar dapat digunakan untuk peningkatan kinerja.

**d. Evaluasi Internal**

Nilai yang diperoleh atas Perencanaan Kinerja adalah sebesar 7,15 dari bobot penilaian 10,00. Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan evaluasi internal. Namun masih terdapat kelemahan, khususnya pada pemanfaatan evaluasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja yaitu :

- 1) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja hanya sebagian ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan.
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja hanya sebagian ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja hanya sebagian ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
- 4) Hasil evaluasi program hanya sebagian ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang.
- 5) Hasil evaluasi program hanya sebagian ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang

**e. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi**

Nilai yang diperoleh atas pencapaian sasaran/ kinerja organisasi adalah sebesar 11,43 dari bobot penilaian 20,00. Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengukuran pencapaian sasaran/ kinerja organisasi. Namun masih terdapat kelemahan dimana Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**Tabel 3.18**  
**Hasil Capaian Kinerja AKIP Tahun 2019**  
**Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021**

| Indikator Kinerja                                            | Satuan | Tahun 2018 |           |        | Tahun 2019 |           |       | Target Tahun 2021 (Akhir RPJMD) | %   |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|---------------------------------|-----|
|                                                              |        | Target     | Realisasi | %      | Target     | Realisasi | %     |                                 |     |
| Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'Baik' |        | CC         | B (60,82) | 121,64 | B          | B (65,90) | 109,9 | BB                              | 100 |

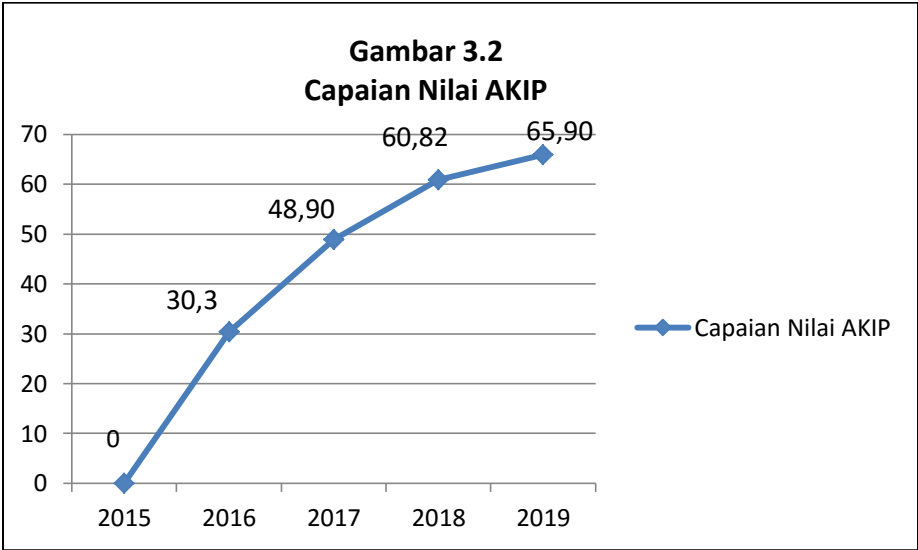
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2019 sebesar 65,90 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD (Nilai BB = minimal 70) pada Tahun 2021 bisa dihitung sebagai berikut :

Sisa Target = Target akhir periode RPJMD – Realisasi Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Sisa Target} &= 70 - 65,90 \\ &= 4,1 \end{aligned}$$

Jadi untuk mencapai nilai minimal pada target akhir periode RPJMD tahun 2021, masih tersisa 4,1.



Adapun faktor-faktor pendorong pencapaian AKIP melebihi target antara lain :

- a. Adanya perubahan tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran berikut target capaiannya disesuaikan dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing;
- b. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi *outcome* dan dibuat secara berjenjang (*casecading*) sampai ke eselon terendah dan *re-focussing* program;
- c. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan *baseline* data dan cara penghitungannya;
- d. Komitmen seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja.

### 5. Persentase Penggunaan *E-Procurement* terhadap Belanja Pengadaan

Nilai realisasi Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan diperoleh dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah Pagu Pengadaan Melalui SPSE}}{\text{Jumlah Pagu RUP Pengadaan Melalui Penyedia}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Jumlah Pagu Pengadaan yang dilakukan melalui SPSE Tahun 2019 sebesar Rp 327.832.121.386,91. Sementara untuk Jumlah Pagu RUP Pengadaan melalui Penyedia Tahun 2019 sebesar Rp. 348.180.379.797.

Atas dasar data tersebut, maka dapat dihitung realisasi persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Rp.327.832.121.386,91}}{\text{Rp.348.180.379.797,00}} \times 100\% \\ &= 94,15\% \end{aligned}$$

Realisasi tersebut melebihi target untuk tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 87% atau apabila dipersentasekan maka capaian terhadap target kinerja Tahun 2019 sebesar 108,22% yang diperoleh dengan hitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94,15}{87} \times 100\%$$

$$= 108,22\%$$

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap**  
**Belanja Pengadaan Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan/<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| 2018  | 85     | 85,73     | 100,86  | 0,73                       |
| 2019  | 87     | 94,15     | 108,22  | 7,15                       |

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 terdapat percepatan sebesar 7,15% dibanding pada 2018 yang hanya sebesar 0,73%. Demikian pula bila dilihat dari capaian juga terdapat kenaikan sebesar 7,36%, yaitu selisih antara capaian tahun 2019 dikurangi capaian tahun 2018. Kenaikan atau percepatan ini diakibatkan bahwa semua anggaran di seluruh OPD diwajibkan untuk dientri ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah APBD/DPA disahkan.

Dalam akhir periode RPJMD tahun 2021, indikator sasaran Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan memiliki target sebesar 90%. Dengan melihat realisasi capaian saat ini sebesar 94,15%, maka target akhir periode RPJMD sudah mencapai melebihi target. Namun demikian indikator sasaran Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan akan tetap dipertahankan bahkan diupayakan terus untuk ditingkatkan.

Pencapaian kinerja yang melebihi target ini dikarenakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan upaya-upaya yang sistematis dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pemantapan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya sebagai berikut :
  - a. Diskusi Penggunaan Aplikasi SPSE sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/425 -Barjas/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Hal: Diskusi Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3 dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Sosialisasi dan Arahan terkait Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 027/1715-Barjas/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 Hal: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019;
  - c. Arahan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 1955 -Barjas/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Hal : Pelaksanaan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing Tahun Anggaran 2019;

- d. Arahan Percepatan Input Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 2412-Barjas/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Hal: Percepatan Input SiRUP APBD Perubahan 2019.
- 2) Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement). Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
  4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
  5. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
  6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

Selanjutnya apabila dilihat dari jumlah paket pekerjaan baik Tender/Seleksi melalui SPSE yang diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 adalah sejumlah 147 paket yang terdiri dari Pengadaan Barang sebanyak 22 paket, Pengadaan Jasa Konstruksi sebanyak 118 paket, Pengadaan Jasa Konsultansi sebanyak 7 paket, dan untuk Pengadaan Jasa Lainnya tidak ada paket yang diajukan ke UKPBJ. Sementara itu untuk paket pekerjaan pengadaan langsung yang menggunakan SPSE terdiri dari Pengadaan Barang sebanyak 124 paket, Pengadaan Jasa Konstruksi sebanyak 196 paket, Pengadaan Jasa Konsultansi sebanyak 359 paket dan Pengadaan Jasa Lainnya sebanyak 18 paket.

**Tabel 3.20**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2**  
**Birokrasi yang Efektif dan Efisien**

| INDIKATOR SASARAN             |                                              | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                              |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Indeks Profesionalitas ASN<br>(1 s/d 100)    | Skor   | 60         | 58,65     | 96,97%              |
| 2                             | Tingkat Kematangan E-Government<br>(0 s/d 5) | Indeks | 2          | 2,32      | 116                 |
| 3                             | Indeks Reformasi Birokrasi                   | Indeks | 45         | 51,60     | 114,67              |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                              |        |            |           | 109,21              |



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Birokrasi yang efektif dan efisien** memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan rincian : 2 (dua) indikator sasaran tercapai melebihi target, dan 1 (satu) indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 109,21% dikategorikan Baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

### **1. Indeks Profesionalitas ASN**

Dasar penghitungan Indeks Profesionalitas ASN adalah Permenpan No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Ada sedikit perubahan dalam penilaian skor Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun 2019, dimana BKN menetapkan bahwa penilaian skor Indeks Profesionalitas ASN didasarkan pada empat komponen utama yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Pada tahun 2019 penilaian skor Indeks Profesionalitas ASN dilakukan terhadap seluruh ASN sedangkan pada tahun sebelumnya hanya berlaku untuk pejabat struktural saja, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

Untuk pengukuran skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran dibutuhkan data-data berupa Data Kualifikasi, Kompetensi, penilaian Kinerja, dan data Disiplin aparatur dari seluruh ASN Kabupaten Pangandaran, dan hal ini telah dimintakan ke tiap-tiap Kepala Perangkat Daerah melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 800/1635/BKPSDM.2/2019 tanggal 5 Oktober 2019 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Namun sampai saat ini masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum mengirimkan data tersebut sehingga mempengaruhi penghitungan akhir dari skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran. Perhitungan Skor Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan secara elektronik melalui input data pada aplikasi kepegawaian SAPK. Dan hasil penghitungan secara manual nilainya akan disandingkan dengan hasil updating data pada SAPK melalui portal <http://ip-jasn.bkn.go.id>.

Metode penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi, dengan cara menghitung gap antara kondisi ideal pendidikan, pelatihan, pengalaman dan administrasi dari setiap aparatur dengan kondisi eksisting.
- b. Kualifikasi, dengan cara menghitung gap antara kondisi ideal pendidikan dari setiap aparatur dengan jabatan yang diduduki oleh aparatur.
- c. Kinerja, dengan cara menghitung nilai SKP dari seluruh aparatur.
- d. Disiplin, dengan cara menghitung jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur dibandingkan dengan jumlah aparatur yang ada, besar kecilnya nilai tergantung pada tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan .

Berdasarkan metode penilaian di atas, maka penghitungan nilai Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Pangandaran terdiri dari empat unsur yaitu :

- a. Kualifikasi ➔ Riwayat pendidikan formal terakhir dengan bobot nilai maksimal sebesar 25% sesuai tingkat pendidikan;

- b. Kompetensi → Riwayat pengembangan kompetensi melalui diklat kepemimpinan (struktural), diklat fungsional (JFT), diklat teknis 20 JP dalam satu tahun, serta seminar/workshop/sejenisnya. Bobot maksimal unsur kompetensi sebesar 40%;
- c. Kinerja → Riwayat hasil penilaian kinerja, terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai dengan masing-masing bobot nilai sebesar 15%, maksimal bobot unsur kinerja yaitu 30% sesuai dengan pencapaian nilai Prestasi Kerja PNS.
- d. Disiplin → Riwayat hukuman disiplin, bobot penilaian unsur disiplin sebesar 5%, bersifat mengurangi IP dari setiap tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN.

Formulasi untuk penghitungan skor indeks Profesionalitas ASN bagi tiap-tiap Daerah sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$IP = IP_1+IP_2+IP_3+IP_4$$

IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi

IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompensasi

Berdasarkan formulasi di atas, capaian skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran untuk Tahun 2019 dapat dihitung secara manual yaitu dengan mengakumulasi nilai Indeks Profesionalisme dari dimensi Kompetensi, Kinerja, Disiplin dan Kompensasi. Gambaran capaian Skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**  
**Skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| JENIS       | JUMLAH PNS  | KUALIFIKASI | KOMPETENSI | KINERJA | DISIPLIN | TOTAL |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------|----------|-------|
| Keseluruhan | 3.043 Orang | 13.35       | 14.29      | 25.54   | 5        | 58.18 |

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran untuk Tahun 2019 adalah sebesar 58.18 dimana skor tersebut tidak memenuhi target skor yaitu 60. Untuk menghitung capaian **Indeks Profesionalitas ASN** digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indeks Profesionalitas ASN} &= \frac{\text{Realisasi Indeks Profesionalitas ASN}}{\text{Target Indeks Profesionalitas ASN}} \times 100\% \\ &= \frac{58,18}{60} \times 100\% = 96,97\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan/<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|----------------------------|
| 2018  | 55     | 58,65     | 3,65                       |
| 2019  | 60     | 58.18     | 1,82                       |

Pada tahun 2018, realisasi telah mencapai melebihi target bahkan terjadi percepatan sebesar 3,65. Namun pada tahun 2019, malah terjadi sebaliknya, yaitu realisasi tidak mencapai target dengan perlambatan sebesar 1,82. Hal ini terjadi akibat perubahan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun 2019, dimana BKN menetapkan bahwa penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilakukan terhadap seluruh ASN sedangkan pada tahun sebelumnya hanya berlaku untuk pejabat struktural saja, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN.

Di akhir periode RPJMD, target Indeks Profesionalitas ASN adalah sebesar 70, maka dengan membandingkan realisasi capaian saat ini sebesar 58,18, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih perlu berupaya keras untuk mencapai sisa target Indeks Profesionalitas ASN yaitu sebesar 11,82 lagi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap ketidaktercapaian Indeks Profesionalitas ASN yaitu :

1. Gap kompetensi masih sangat tinggi dikarenakan selisih rata-rata ASN yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dan yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan masih terbilang tinggi;
2. Gap kualifikasi masih cukup tinggi dimana masih adanya selisih rata-rata ASN yang memiliki latar pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dipegangnya;
3. Data pelaporan terkait dengan empat komponen utama Indeks Profesionalitas ASN dari tiap Perangkat Daerah belum lengkap, artinya masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum melaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian akhir skor Indeks Profesionalitas Kabupaten Pangandaran;
4. Selain itu, pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran menitikberatkan kepada 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata. Jadi Profesionalitas ASN belum termasuk ke dalam program Prioritas Daerah.

Meskipun belum tercapai, namun masih terdapat beberapa faktor yang dapat ditingkatkan sebagai solusi dan upaya untuk mencapai target Indeks Profesionalitas ASN di tahun berikutnya yaitu :

- a. Komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja dan kompensasi terhadap pegawai melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. Komitmen dari seluruh ASN untuk memiliki kinerja dan disiplin yang baik sehingga capaian indeks profesionalitas ASN khususnya komponen kinerja dan disiplin dapat memenuhi target.
- c. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2020;
- d. Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaporkan data terkait dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin aparatur secara lengkap;
- e. Menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar skor komponen kualifikasi dapat ditingkatkan.

2. Indeks E-Government Nasional/SPBE

Nilai realisasi capaian Indeks E-Government Nasional di tingkat Provinsi Jawa Barat biasanya dirilis pada setiap bulan Maret oleh Kemenpan-RB. Dengan demikian, angka 2,32 merupakan hasil pengukuran maturitas (pengukuran diri sendiri) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara itu data yang digunakan adalah data sekunder yaitu hasil maturitas.

Nilai Indeks E-Government/SPBE dapat dihitung sebagai berikut :

Indeks SPBE = Indeks Domain 1 Kebijakan Internal SPBE ditambah Indeks Domain 2 Tata Kelola SPBE ditambah Indeks Domain 3 Layanan SPBE

= (4x17%) + (1,57x28%) + (2,18x55%)

= 0,68 + 0,44 + 1,20

= 2,32

Berdasarkan hasil realisasi Indeks SPBE telah tercapai melebihi target dengan hasil capaian yaitu sebesar 116% yang diperoleh dengan formula :

Capaian Indeks SPBE =  $\frac{2,32}{2} \times 100\% = 116\%$

Tabel 3.23  
Perbandingan Realisasi Indeks SPBE Dengan Tahun Lalu

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan/<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| 2018  | 1      | 0,85      | 85%     | 0,15                       |
| 2019  | 2      | 2,32      | 116%    | 0,32                       |

Indikator Indeks SPBE tahun 2018 mengalami perlambatan sebesar 0,15 dan capaiannya hanya 85%. Namun pada tahun 2019, Indikator Indeks SPBE mengalami percepatan sebesar 0,32 atau capainnya 116%. Hal ini diakibatkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Sistem Elektronik Lingkup Kabupaten Pangandaran. Di dalam Peraturan bupati tersebut, terdapat regulasi dari mulai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sampai Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE.

Di akhir periode RPJMD, target indeks SPBE adalah sebesar 3 poin, maka dengan membandingkan realisasi capaian saat ini sebesar 2,32 poin, maka masih perlu upaya keras untuk mencapai sisa target yaitu sebesar 0,68 poin.

Beberapa faktor pendukung tercapainya capaian indeks SBPE antara lain :

1. Adanya kebijakan di tingkat pusat dan merupakan tuntutan perubahan yang mendorong Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Sistem Elektronik.
2. Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Sistem Elektronik Lingkup Kabupaten Pangandaran. didalam Perbub tersebut, terdapat regulasi dari mulai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sampai Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE.

Banyak hal masih perlu diupayakan untuk memperbaiki Indkes SPBE yaitu memperbaiki kebijakan dalam hal pemanfaatan aplikasi umum. Untuk itu meskipun telah

- mencapai melebihi target, namun masih terdapat indikator yang belum maksimal dan masih dapat ditingkatkan yang disebabkan oleh :
- a. Lemahnya dalam hal tata kelola SPBE di Kabupaten Pangandaran diantaranya :
    1. Kabupaten Pangandaran belum terdapat dokumen tentang inovasi proses bisnis;
    2. Rencana Induk belum diundangkan atau belum diperbubkan;
    3. Kabupaten Pangandaran belum terdapat layanan pusat data (data center) karena masih menyewa ke pihak ke 3;
    4. Pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai belum optimal;
  - b. Aplikasi yang ada baru sebatas mengalihkan dari yang konvensional ke komputerisasi belum memenuhi kriteria sebagai SPBE, diantaranya belum adanya :
    1. Kabupaten Pangandaran belum memiliki aplikasi layanan naskah dinas;
    2. Kabupaten Pangandaran sudah memiliki sistem Layanan Pengaduan Publik tetapi belum berjalan efektif.
    3. Kabupaten Pangandaran belum terdapat Layanan *Whistle Blowing Sistem* (WBS);
    4. Kabupaten Pangandaran belum terdapat sistem pelayanan publik, sistem yang ada baru aplikasi milik pusat.

Berikut disampaikan hasil pengukuran maturitas (pengukuran diri sendiri) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik :

**Tabel 3.24**  
**Pengukuran Indeks SPBE**

| Domain, Aspek, Indikator |                                                                   | Nilai Indikator | Indeks | Keterangan                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain 1                 | Kebijakan Internal SPBE                                           |                 | 4      | $(4 \times (7\% / 17\%)) = 1,65 + (4 \times (10\% / 17\%)) = 2,35$                                                                   |
| Aspek 1                  | Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE                               |                 | 4      | Jumlah nilai indikator 1 s.d 7 $(4+4+4+4+4+4+4=28)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 1 maka nilai aspek 1 diperoleh $28/7=4$       |
| Indikator 1              | Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah          | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 2              | Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi             | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 3              | Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah         | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 4              | Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK                       | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 5              | Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data                       | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 6              | Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi                      | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 7              | Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagai Pakai        | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Aspek 2                  | Kebijakan Internal Layanan SPBE                                   |                 | 4      | Jumlah nilai indikator 8 s.d 17 $(4+4+4+4+4+4+4+4+4=40)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 2 maka nilai aspek 2 diperoleh $40/10=4$ |
| Indikator 8              | Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas                           | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 9              | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian                  | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 10             | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 11             | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan                     | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 12             | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja                      | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 13             | Kebijakan Internal Layanan Pengadaan                              | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 14             | Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik                       | 4               |        |                                                                                                                                      |
| Indikator 15             | Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum        | 4               |        |                                                                                                                                      |

| Domain, Aspek, Indikator |                                                       | Nilai Indikator | Indeks | Keterangan                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator 16             | Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System     | 4               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 17             | Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah | 4               |        |                                                                                                                                       |
| Domain 2                 | Tata Kelola SPBE                                      |                 | 1,57   | $(0,50 \times (8\%/28\%) = 0,14) + (2 \times (8\%/28\%) = 0,57) + (2 \times (12\%/28\%) = 0,86) = 1,57$                               |
| Aspek 3                  | Kelembagaan                                           |                 | 0,50   | Jumlah nilai indikator 18 s.d 19 $(1+0=1)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 3 maka nilai aspek 3 diperoleh $1/2=0,5$                |
| Indikator 18             | Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah                 | 1               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 19             | Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi                    | 0               |        |                                                                                                                                       |
| Aspek 4                  | Strategi dan Perencanaan                              |                 | 2      | Jumlah nilai indikator 20 s.d 21 $(2+2=4)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 4 maka nilai aspek diperoleh $4/2=2$                    |
| Indikator 20             | Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah                | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 21             | Anggaran dan Belanja TIK                              | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Aspek 5                  | Teknologi Informasi dan Komunikasi                    |                 | 2      | Jumlah nilai indikator 22 s.d 24 $(2+2+2=6)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 4 maka nilai aspek 4 diperoleh $6/3=2$                |
| Indikator 22             | Pengoperasian Pusat Data                              | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 23             | Integrasi Sistem Aplikasi                             | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 24             | Penggunaan Apikasi Umum Berbagai Pakai                | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Domain 3                 | Layanan SPBE                                          |                 | 2,18   | $(2,28 \times (35\%/55\%) = 1,45) + (2 \times (20\%/55\%) = 0,73) = 2,18$                                                             |
| Aspek 6                  | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |                 | 2,28   | Jumlah nilai indikator 25 s.d 31 $(0+2+3+2+2+3+4)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 6 maka nilai aspek 6 diperoleh $16/7=2,28$      |
| Indikator 25             | Layanan Naskah Dinas                                  | 0               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 26             | Layanan Manajemen Kepegawaian                         | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 27             | Layanan Manajemen Perencanaan                         | 3               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 28             | Layanan Manajemen Penganggaran                        | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 29             | Layanan Manajemen Keuangan                            | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 30             | Layanan Manajemen Kinerja                             | 3               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 31             | Layanan Pengadaan                                     | 4               |        |                                                                                                                                       |
| Aspek 7                  | Layanan Publik Berbasis Elektronik                    |                 | 2      | Jumlah nilai indikator 32 s.d 35-3 $(0+2+3+2+2+3+4=16)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 6 maka nilai aspek 6 diperoleh $16/7=2,28$ |
| Indikator 32             | Layanan Pengaduan Publik                              | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 33             | Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum               | 4               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 34             | Layanan Whistle Blowing System                        | 0               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 35-1           | Layanan Publik Instansi Pemerintah                    | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 35-2           | Layanan Publik Instansi Pemerintah                    | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indikator 35-3           | Layanan Publik Instansi Pemerintah                    | 2               |        |                                                                                                                                       |
| Indeks SPBE              |                                                       |                 | 2,32   | $(4 \times 17\%) + (1,57 \times 28\%) + (2,18 \times 55\%) = 2,32$                                                                    |

Masing-masing domain dan aspek diberi bobot, bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda sebagaimana digambarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.25  
Pembagian Bobot Penilaian Indeks SPBE

| Domain dan Aspek Penilaian                    | Jumlah Indikator | Total Bobot |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE            | 17               | 17 %        |
| Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 7                | 7 %         |
| Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE     | 10               | 10 %        |
| Domain 2 – Tata Kelola SPBE                   | 7                | 28 %        |
| Aspek 3 – Kelembagaan                         | 2                | 8 %         |
| Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan            | 2                | 8 %         |
| Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi  | 3                | 12 %        |

|                                                                 |    |      |
|-----------------------------------------------------------------|----|------|
| Domain 3 – Layanan SPBE                                         | 11 | 55 % |
| Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektornik | 7  | 35 % |
| Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | 4  | 20 % |

Sedangkan nilai bobot setiap indikator pada sebuah aspek dapat dihitung dari nilai bobot aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut. Masing-masing indikator memiliki rentang penilaian dari level 0 sampai dengan level 5 (ada 6 tingkatan) dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Level Nilai Indikator Indeks SPBE**

| Level Indikator | Keterangan/Arti                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0               | Tidak Ada/terdapat                                                                                                      |
| 1               | Terdapat konsep                                                                                                         |
| 2               | Telah ditetapkan dan mendukung sebagian kebutuhan dari sistem pelayanan publik                                          |
| 3               | Telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan publik                                                          |
| 4               | Mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar Instansi / terintegrasi                                          |
| 5               | Dapat dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi |

Ket : Penerapan level indikator berdasarkan pemenuhan kondisi eksisting terhadap indikator

Dari **Tabel Pengukuran Indeks SPBE** diatas dapat digambarkan uraian penilaian SPBE untuk Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Untuk Domain 1 Kebijakan Internal SPBE terdiri dari 2 Aspek dan 17 Indikator dengan rincian nilai sebagai berikut :  
 Domain 1 memperoleh nilai 4 yang diperoleh dari nilai Aspek 1 dan Aspek 2. Cara menghitung Aspek 1 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada aspek 1. Sedangkan menghitung Aspek 2 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator aspek 2. Jumlah Aspek 1 ( $4 \times (7\% / 17\%) = 1,65$ ) + jumlah aspek 2 ( $4 \times (10\% / 17\%) = 2,35$ ) diperoleh hasil indeks domain 1 Kebijakan Internal SPBE sebesar 4.
2. Untuk Domain 2 Tata Kelola SPBE terdiri dari 3 Aspek dan 7 indikator dengan rincian nilai sebagai berikut :  
 Domain 2 memperoleh nilai 1,57 yang diperoleh dari nilai Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5. Cara menghitung Aspek 3 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 3. Menghitung Aspek 4 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 4. Menghitung aspek 5 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 5. Jumlah Aspek 3 ( $0,50\% \times (8\% / 28\%) = 0,14$ ) + Jumlah Aspek 4 ( $2 \times (8\% / 28\%) = 0,57$ ) + Jumlah Aspek 5 ( $2 \times (12\% / 28\%) = 0,86$ ), diperoleh hasil indeks Domain 2 Tata Kelola SPBE sebesar 1,57.
3. Untuk Domain 3 Layanan SPBE teridi dari 2 Aspek dan 13 indikator dengan rincian nilai sebagai berikut :  
 Domain 3 memperoleh nilai 2,18 yang diperoleh dari nilai Aspek 6 dan Aspek 7. Cara menghitung Aspek 6 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 6. Menghitung Aspek 7 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indiaktor pada Aspek 7. Jumlah Aspek 6 ( $2,28 \times (35\% / 55\%) = 1,45$ ) + Jumlah Aspek 7 ( $2 \times (20\% / 55\%) = 0,73$ ), diperoleh hasil indeks Domain 3 Layanan SPBE sebesar 2,18.



3. Indeks Reformasi Birokrasi

Realisasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kemenpan RB dapat diakses melalui situs <http://pmprb.menpan.go.id>. Dan pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai melaksanakan pengolahan data untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di 6 (enam) Perangkat Daerah diantaranya :

- 1. Sekretariat Daerah
- 2. Inspektorat
- 3. BKPSDM
- 4. Diskominfo
- 5. Bappeda
- 6. Kecamatan Cijulang

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 51,60. Hasil ini telah melebihi target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2019 dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yaitu sebesar 45. Dengan demikian maka capaiannya dapat diketahui melalui perhitungan dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{51,60}{45} \times 100\% \\ &= 114,67\% \end{aligned}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 didapat dari hasil Kemenpan RB sesuai Surat Sekretaris Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/492/RB.06/2019 Hal Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019, bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah 51,60 dengan kategori “CC”, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

**Tabel 3.27**  
**Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| KOMPONEN PENILAIAN        |                     |                                           | Bobot | Nilai 2019 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------|------------|
| A.                        | KOMPONEN PENGUNGKIT |                                           |       |            |
|                           | I.                  | MANAJEMEN PERUBAHAN (5)                   | 5.00  | 1,87       |
|                           | II.                 | PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) | 5.00  | 1,34       |
|                           | III.                | PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)     | 6.00  | 1.45       |
|                           | IV.                 | PENATAAN TATALAKSANA (5)                  | 5.00  | 2.13       |
|                           | V.                  | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)        | 15.00 | 4,36       |
|                           | VI.                 | PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)               | 6.00  | 1,65       |
|                           | VII.                | PENGUATAN PENGAWASAN (12)                 | 12.00 | 5,39       |
|                           | VIII.               | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) | 6.00  | 2,70       |
| TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT |                     |                                           | 60    | 20.89      |
| B.                        | KOMPONENE HASIL     |                                           |       |            |

|                            |                                                      |        |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| I.                         | Nilai Akuntabilitas Kinerja                          | 14,00  | 8,51  |
| II.                        | Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)         | 6,00   | 4,23  |
| III.                       | Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)            | 7,00   | 6,42  |
| IV.                        | Opini BPK (3)                                        | 3,00   | 3,00  |
| V.                         | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | 10,00  | 8,55  |
| TOTAL KOMPONEN HASIL       |                                                      | 40,00  | 30,71 |
| INDEKS REFORMASI BIROKRASI |                                                      | 100,00 | 51,60 |

Sumber : KemenpanRB, 2019.

Untuk mengetahui perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi antara tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.28**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan/<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| 2018  | 40     | 41,56     | 103,9%  | 1,56                       |
| 2019  | 45     | 51,60     | 114,67% | 6,6                        |

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2018 mengalami percepatan meskipun nilainya tidak terlalu besar yaitu sebesar 1,56 dengan capaian sebesar 103,9%. Namun pada tahun 2019 terjadi percepatan yang luar biasa yaitu sebesar 6,6 dengan capaian sebesar 114,67%. Hal ini terlihat dari hampir seluruh unsur penilaian Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan, terutama penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik. Hanya untuk unsur penataan sistem manajemen SDM terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya, untuk mencapai target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 60, masih diperlukan sebesar 8,4 yang berdasarkan realisasi tahun 2019.

Keberhasilan atas pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, antara lain :

1. Penataan organisasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Evaluasi tata laksana melalui penataan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good government* melalui Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
3. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 060/Kpts.110-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
4. Peningkatan pengawasan yang sejalan dengan pelaksanaan Zona Integrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan pada tahun 2019;
5. Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2019 melaksanakan pengolahan data untuk penilaian Zona Integritas (ZI) di 4 (empat) Perangkat Daerah, diantaranya :

- a. DISDUKCAPIL
- b. DPMPTSP
- c. Puskesmas Legokjawa
- d. Puskesmas Pangandaran

**Tabel 3.29**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3**  
**Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas**

| INDIKATOR SASARAN             |                                               | SATUAN   | TAHUN 2019   |              | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------|
|                               |                                               |          | TARGET       | REALISASI    |                     |
| 1                             | Persentase Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10) | Persen   | 7,4          | 7,4          | 100%                |
| 2                             | Survey Kepuasan Masyarakat                    | Predikat | (76,61) Baik | (81,18) Baik | 105,97 %            |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                               |          |              |              | 102,99%             |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas** memiliki 2 indikator kinerja sasaran dengan rincian : 1 (satu) indikator sasaran mencapai target dan 1 (satu) indikator sasaran tercapai melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 102,99% dikategorikan sangat baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase Zona Integritas Daerah:**

Indikator sasaran strategis Persentase Zona Integritas Daerah pada tahun 2019 realisasinya sebanyak 7,4% dengan target 7,4% sehingga target tercapai. Adapun capaian tersebut di dapat dari rumus :

$$\frac{Jumlah\ SKPD\ yang\ melaksanakan\ Pembangunan\ ZI\ menuju\ WBK/WBBM}{Jumlah\ SKPD\ yang\ ditetapkan\ sebagai\ \frac{ZI}{WBK}/WBBM} \times 100$$

Sehingga didapat capaian  $\frac{2}{27} \times 100=7,4\%$ . Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2019 oleh Inspektorat dilakukan dengan melakukan Penilaian Zona Integritas terhadap 2 (dua) Unit Kerja yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai Evaluasi 67,65 dan Puskesmas Pangandaran dengan nilai Evaluasi 65,64. Capain ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2018 karena pada tahun 2018 indikator sasaran strategis Persentase Zona Integritas Daerah belum memiliki atau menetapkan target. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur yang ada.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD indikator sasaran strategis Cakupan Zona Integritas Daerah pada tahun 2019 realisasinya sebanyak 25% dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 29,6% sehingga target belum tercapai dengan kekurangan 22,2%. Sedangkan indikator sasaran strategis Persentase Zona Integritas Daerah tidak bisa dibandingkan dengan Kota Banjar karena perbedaan indikator sasaran.

Faktor keberhasilan Indikator sasaran strategis Persentase Zona Integritas Daerah pada tahun 2019 telah dilaksanakannya kegiatan pelaksanaan Zona Integritas pada tahun 2019, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencanangan Zona Integritas;
- 2) Melakukan pembangunan Zona Integritas;
- 3) Melakukan pengusulan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal;
- 4) Reviu oleh Tim Penilai Nasional;
- 5) Melakukan Penetapan WBK/WBBM oleh Menpan RB.

## 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM ) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 (sembilan) unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu Penyelesaian** adalah jangka waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya / Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan di terima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Selanjutnya untuk mengetahui nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, kinerja unit pelayanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 3.30**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,**  
**Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan**

| Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1,00 – 2,5996      | 25,00 – 64,99               | D              | Tidak Baik             |
| 2,60 – 3,064       | 65,00 – 76,60               | C              | Kurang Baik            |
| 65,00 – 76,60      | 76,61 – 88,30               | B              | Baik                   |
| 3,5324 – 4,00      | 88,31 – 100,00              | A              | Sangat Baik            |

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan diperoleh data dengan menggunakan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$$

**Tabel. 3.31**  
**Rekapitulasi Hasil Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat**  
**Dengan Berbagai Metode**

| IKM 2019 |                                                         |           | IKM 2018 |                                                         |           | IKM 2017 |                                        |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|-----------|
| NO       | PERANGKAT DAERAH                                        | NILAI SKM | NO       | PERANGKAT DAERAH                                        | NILAI SKM | NO       | PERANGKAT DAERAH                       | NILAI SKM |
| 1        | Sekretariat Daerah Bagian Hukum                         | 89.92     | 1        | Sekretariat Daerah Bagian Hukum                         | 80.05     |          |                                        |           |
| 2        | Sekretariat Daerah Bagian Umum                          | 84.26     | 2        | Sekretariat Daerah Bagian Umum                          | 73.79     |          |                                        |           |
| 3        | Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan rakyat          | 84.37     | 3        | Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan rakyat          | 73.25     |          |                                        |           |
| 4        | Sekretariat Daerah Bagian Barang Dan Jasa               | 86.24     | 4        | Sekretariat Daerah Bagian Barang Dan Jasa               | 78        |          |                                        |           |
| 5        | Sekretariat Daerah Bagian Organisasi                    | 85.25     | 5        | Sekretariat Daerah Bagian Organisasi                    | 81.27     |          |                                        |           |
| 6        | Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan                   | 83.61     | 6        | Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan                   | 71.75     |          |                                        |           |
| 7        | Sekretariat Daerah Bagian Humas                         | 82.68     | 7        | Sekretariat Daerah Bagian Humas                         | 70.25     |          |                                        |           |
| 8        | Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan                  | 93.77     | 8        | Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan                  | 77.3      |          |                                        |           |
| 9        | Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian                  | 84.42     | 9        | Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian                  | 73        |          |                                        |           |
| 10       | Dinas Tenaga Kerja, Industri Dan Transmigrasi           | 95.56     | 10       | Dinas Tenaga Kerja, Industri Dan Transmigrasi           | 94        | 1        | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 81.03     |
| 11       | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan                         | 81.81     | 11       | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan                         | 87.18     |          |                                        |           |
| 12       | Badan Pengelola Keuangan Daerah                         | 82.31     | 12       | Badan Pengelola Keuangan Daerah                         | 87.18     |          |                                        |           |
| 13       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa          | 81.49     | 13       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa          | 87        |          |                                        |           |
| 14       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | 88.06     | 14       | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | 86.71     |          |                                        |           |
| 15       | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | 88.11     | 15       | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | 85.25     |          |                                        |           |
| 16       | Satuan Polisi Pamong Praja                              | 78.43     | 16       | Satuan Polisi Pamong Praja                              | 83.5      |          |                                        |           |

| IKM 2019 |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NO       | PERANGKAT DAERAH                                                         | NILAI SKM |
| 17       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                     | 93.78     |
| 18       | Dinas Pedidikan Pemuda Dan Olahraga                                      | 89.96     |
| 19       | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                  | 82.44     |
| 20       | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                      | 87.19     |
| 21       | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu                      | 84.53     |
| 22       | Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan                           | 83.97     |
| 23       | Kesatuan Bangsa Dan Politik                                              | 85.83     |
| 24       | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 86.58     |
| 25       | Inspektorat                                                              | 86.69     |
| 26       | Dinas Kesehatan                                                          | 78        |
| 27       | Dinas Pertanian                                                          | 77.04     |
| 28       | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak   | 81.04     |
| 29       | Sekretariat DPRD                                                         | 83.02     |
| 30       | Dinas Perhubungan                                                        | 77.88     |
| 31       | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                         | 82.2      |
| 32       | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan                                    | 76.52     |
| 33       | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                     | 78,92     |
| 34       | Kecamatan Cimerak                                                        | 84.01     |
| 35       | Kecamatan Mangunjaya                                                     | 84        |
| 36       | Kecamatan Sidamulih                                                      | 82        |
| 37       | Kecamatan Kalipucang                                                     | 84.17     |
| 38       | Kecamatan Pangandaran                                                    | 89.98     |
| 39       | Kecamatan Cijulang                                                       | 89.18     |
| 40       | Kecamatan Padaherang                                                     | 82.41     |
| 41       | Kecamatan Cigugur                                                        | 82.84     |
| 42       | Kecamatan Parigi                                                         | 82.2      |
| 43       | Kecamatan Langkaplancar                                                  | 76.93     |
| 44       | Puskesmas Legokjawa                                                      | 87.23     |
| 45       | Puskesmas Cigugur                                                        | 79        |
| 46       | Puskesmas Mangunjaya                                                     | 83        |
| 47       | LAB KESDA                                                                | 85        |
| 48       | Puskesmas Jadikarya                                                      | 86.51     |
| 49       | Puskesmas Selasari                                                       | 80        |
| 50       | Puskesmas Sindangwangi                                                   | 81.32     |

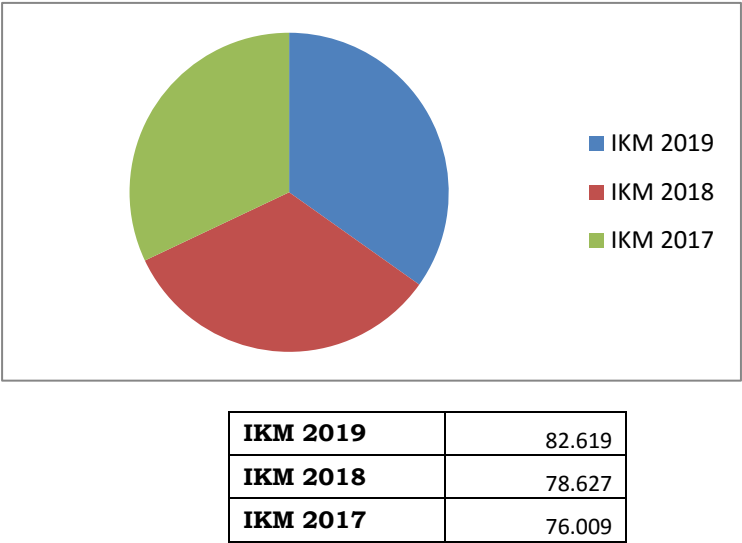
| IKM 2018 |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NO       | PERANGKAT DAERAH                                                                   | NILAI SKM |
| 17       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                               | 81.98     |
| 18       | Dinas Pedidikan Pemuda Dan Olahraga                                                | 81.76     |
| 19       | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                            | 81.16     |
| 20       | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana                                 | 81.08     |
| 21       | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan | 80.22     |
| 22       | Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan                                     | 80.05     |
| 23       | Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                        | 78.43     |
| 24       | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman           | 78.01     |
| 25       | Inspektorat                                                                        | 78        |
| 26       | Dinas Kesehatan                                                                    | 78        |
| 27       | Dinas Pertanian                                                                    | 75.63     |
| 28       | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak             | 74.05     |
| 29       | Sekretariat DPRD                                                                   | 67.49     |
| 30       | Dinas Perhubungan                                                                  | 66.79     |
| 31       | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                                   | 63.44     |
| 32       | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan                                              | 60.05     |
| 33       | Kecamatan Cimerak                                                                  | 85.6      |
| 34       | Kecamatan Mangunjaya                                                               | 78.91     |
| 35       | Kecamatan Sidamulih                                                                | 77.75     |
| 36       | Kecamatan Kalipucang                                                               | 77.46     |
| 37       | Kecamatan Pangandaran                                                              | 77.46     |
| 38       | Kecamatan Cijulang                                                                 | 77.34     |
| 39       | Kecamatan Padaherang                                                               | 77.01     |
| 40       | Kecamatan Cigugur                                                                  | 76.81     |
| 41       | Kecamatan Parigi                                                                   | 75.29     |
| 42       | Kecamatan Langkaplancar                                                            | 74.76     |
| 43       | PKM Legokjawa                                                                      | 97        |
| 44       | PKM Cigugur                                                                        | 87.83     |
| 45       | PKM Mangunjaya                                                                     | 87        |
| 46       | Labkesda                                                                           | 85        |
| 47       | PKM Jadikarya                                                                      | 83.71     |
| 48       | PKM Selasari                                                                       | 82.22     |
| 49       | PKM Sindangwangi                                                                   | 82.03     |

| IKM 2017 |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| NO       | PERANGKAT DAERAH                                      | NILAI SKM |
| 2        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               | 83.53     |
| 3        | Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Perdagangan dan UMKM | 76.87     |
| 4        | Dinas Perhubungan                                     | 71.87     |
| 5        | Dinas Perpustakaan                                    | 66.87     |
| 6        | Kecamatan Mangunjaya                                  | 73.53     |
| 7        | Kecamatan Padaherang                                  | 76.87     |
| 8        | Kecamatan Kalipucang                                  | 71.87     |
| 9        | Kecamatan Pangandaran                                 | 77.42     |
| 10       | Kecamatan Sidamulih                                   | 73.54     |
| 11       | Kecamatan Parigi                                      | 75.2      |
| 12       | Kecamatan Cijulang                                    | 69.93     |
| 13       | Kecamatan Cimerak                                     | 80.2      |
| 14       | Kecamatan Cigugur                                     | 75.76     |
| 15       | Kecamatan Langkaplancar                               | 66.1      |
| 16       | Puskesmas Mangunjaya                                  | 84.4      |
| 17       | Puskesmas Padaherang                                  | 64.66     |
| 18       | Puskesmas Sindangwangi                                | 81.86     |
| 19       | Puskesmas Kalipucang                                  | 77.42     |
| 20       | Puskesmas Pangandaran                                 | 85.19     |
| 21       | Puskesmas Cikembulan                                  | 73.54     |
| 22       | Puskesmas Sidamulih                                   | 73.54     |

| IKM 2019 |                                                                                                                                            |           | IKM 2018 |                         |           | IKM 2017 |                         |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| NO       | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                           | NILAI SKM | NO       | PERANGKAT DAERAH        | NILAI SKM | NO       | PERANGKAT DAERAH        | NILAI SKM |
| 51       | Puskesmas Cijulang                                                                                                                         | 79.62     | 50       | PKM Cijulang            | 80.88     | 23       | LABKESDA                | 94.07     |
| 52       | Puskesmas Langkaplancar                                                                                                                    | 80.52     | 51       | PKM Langkaplancar       | 80.78     | 24       | Puskesmas Parigi        | 71        |
| 53       | Puskesmas Cikembulan                                                                                                                       | 80.08     | 52       | PKM Cikembulan          | 80.02     | 25       | Puskesmas Selasari      | 72.2      |
| 54       | Puskesmas Parigi                                                                                                                           | 84.52     | 53       | PKM Parigi              | 79.28     | 26       | Puskesmas Cijulang      | 63.83     |
| 55       | Puskesmas Kalipucang                                                                                                                       | 85.06     | 54       | PKM Kalipucang          | 79.03     | 27       | Puskesmas Cimerak       | 71.04     |
| 56       | Puskesmas Pangandaran                                                                                                                      | 83.33     | 55       | PKM Pangandaran         | 79        | 28       | Puskesmas Legokjawa     | 75.76     |
| 57       | Puskesmas Sidamulih                                                                                                                        | 81.76     | 56       | PKM Sidamulih           | 79        | 29       | Puskesmas Cigugur       | 87.7      |
| 58       | Puskesmas Padaherang                                                                                                                       | 82.17     | 57       | PKM Padaherang          | 78.67     | 30       | Puskesmas Langkaplancar | 86.86     |
| 59       | Puskesmas Cimerak                                                                                                                          | 87.19     | 58       | PKM Cimerak             | 77.13     | 31       | Puskesmas Jadikarya     | 75.2      |
| 60       | Korwil bid pend Mangunjaya                                                                                                                 | 88.25     | 59       | UPTD Pend Mangunjaya    | 90.45     |          |                         |           |
| 61       | Korwil bid pend Langkaplancar                                                                                                              | 76.36     | 60       | UPTD Pend Langkaplancar | 82.25     |          |                         |           |
| 62       | Korwil bid pend Cigugur                                                                                                                    | 83.49     | 61       | UPTD Pend Cigugur       | 80.38     |          |                         |           |
| 63       | Korwil bid pend Kalipucang                                                                                                                 | 80.91     | 62       | UPTD Pend Kalipucang    | 80.32     |          |                         |           |
| 64       | Korwil bid pend Pangandaran                                                                                                                | 80.5      | 63       | UPTD Pend Pangandaran   | 79.27     |          |                         |           |
| 65       | Korwil bid pend Cimerak                                                                                                                    | 89.89     | 64       | UPTD Pend Cimerak       | 78.83     |          |                         |           |
| 66       | Korwil bid pend Parigi                                                                                                                     | 83        | 65       | UPTD Pend Parigi        | 77.44     |          |                         |           |
| 67       | Korwil bid pend Cijulang                                                                                                                   | 77.89     | 66       | UPTD Pend Cijulang      | 77.41     |          |                         |           |
| 68       | Korwil bid pend Sidamulih                                                                                                                  | 81        | 67       | UPTD Pend Sidamulih     | 77.3      |          |                         |           |
| 69       | Korwil bid pend Padaherang                                                                                                                 | 78.01     | 68       | UPTD Pend Padaherang    | 75.54     |          |                         |           |
| 70       | BPP Mangunjaya                                                                                                                             | 88.13     | 69       | UPTD KB Langkaplancar   | 86.48     |          |                         |           |
| 71       | BPP Parigi                                                                                                                                 | 87        | 70       | UPTD KB Parigi          | 77.65     |          |                         |           |
| 72       | BPP Pangandaran                                                                                                                            | 87        | 71       | UPTD KB Padaherang      | 76.08     |          |                         |           |
| 73       | BPP Kalipucang                                                                                                                             | 87        | 72       | UPTD KB Cijulang        | 74.25     |          |                         |           |
| 74       | BPP Cigugur                                                                                                                                | 87        | 73       | UPTD KB Cigugur         | 73.48     |          |                         |           |
| 75       | BPP Padaherang                                                                                                                             | 83.98     | 74       | UPTD KB Sidamulih       | 73.02     |          |                         |           |
| 76       | BPP Langkaplancar                                                                                                                          | 82.97     | 75       | UPTD KB Kalipucang      | 72.61     |          |                         |           |
| 77       | BPP Sidamulih                                                                                                                              | 82.17     | 76       | UPTD KB Pangandaran     | 71.66     |          |                         |           |
| 78       | BPP Cijulang                                                                                                                               | 81.07     | 77       | UPTD KB Cimerak         | 71.61     |          |                         |           |
| 79       | BPP Cimerak                                                                                                                                | 77        | 78       | UPTD KB Mangunjaya      | 64.25     |          |                         |           |
| 80       | UPTD KB Wilayah Cijulang (Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang)             | 82.75     |          |                         |           |          |                         |           |
| 81       | UPTD KB Wilayah Pangandaran (Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih) | 75.75     |          |                         |           |          |                         |           |
| Jumlah   |                                                                                                                                            | 6692      | Jumlah   |                         | 6132.9    | Jumlah   |                         | 2359      |
| IKM 2019 |                                                                                                                                            | 82.62     | IKM 2018 |                         | 78.627    | IKM 2017 |                         | 76.09     |



Gambar 3.3  
Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran  
Tahun 2017, 2018 dan 2019



Pada indikator Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM “Baik” dari target “Baik” diukur berdasarkan jumlah Perangkat Daerah yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 76,61 ditargetkan sebanyak 81 Perangkat Daerah atau 100% yang memperoleh capaian IKM diatas 76.61, pada Tahun 2019 terdapat 78 Perangkat Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau 96,30% memperoleh nilai IKM lebih dari 76,61, sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 96,30%. Capaian kinerja tersebut turun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 113% dari 58 unit Perangkat Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disurvei terdapat 13 Perangkat Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mencapai Nilai “Baik” atau di atas 76,61, tetapi untuk tahun 2019 secara riil jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh nilai IKM diatas 76,61 bertambah signifikan sebanyak 78 Perangkat Daerah atau meningkat dari 78 Perangkat Daerah pada tahun 2018 menjadi 81 Perangkat Daerah pada tahun 2019.

Capaian kinerja tersebut naik bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 42% dari 31 unit Perangkat Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disurvei terdapat 26 Perangkat Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mencapai Nilai “Baik” atau di atas 76,61, tetapi secara riil jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh nilai IKM diatas 76,61 bertambah signifikan sebanyak 47 Perangkat Daerah atau meningkat dari 31 Perangkat Daerah pada tahun 2017 menjadi 78 Perangkat Daerah pada tahun 2018.

Berdasarkan target di akhir periode RPJMD adalah memperoleh Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik” dengan Nilai Interval Konversi IKM berkisar **88,31 – 100** dan Mutu Pelayanan “**A**”. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, maka tersisa target minimal 5.7, yaitu dengan cara 88.31 dikurangi 82.61. Untuk dapat mencapaian target tersebut salah satunya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Pangandaran yang melebihi target disebabkan beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

- a. adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan public seluruh unit pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Semua perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survey Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayan publik dan menjadikan bagian dari matteri pemeriksaan oleh aparaturng pengawas internal
- d. Meningkatkan standar pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai kententuan yang berlaku
- e. Memperluas persentase zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Tabel 3.32**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4**  
**Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah**

| INDIKATOR SASARAN             |                        | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                        |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 20         | 20,72     | 103,60%             |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                        |        |            |           | 103,60%             |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang tercapai melebihi target, adapun rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 103,60% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran ketaatan terhadap RTRW diuraikan sebagai berikut :

**1. Ketaatan terhadap RTRW**

Nilai realisasi capaian indikator Ketaatan terhadap RTRW diperoleh melalui formula (sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017) sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi\ RTRW}{Rencana\ Peruntukan} \times 100\%$$

- Rencana Peruntukan dihitung berdasarkan banyaknya program utama yang harus dilakukan sebagai bentuk perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan yang tertuang dalam indikasi program RTRW. Perwujudan rencana tata ruang wilayah tersebut merupakan gabungan dari banyaknya program utama dalam perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- Realisasi RTRW dihitung berdasarkan banyaknya program utama yang sudah dilakukan sebagai bentuk perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan yang tertuang dalam indikasi program RTRW.

Atas dasar hal tersebut maka dapat kita peroleh bahwa Rencana Peruntukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran 2018-2038 sebanyak 391 program

utama. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perwujudan rencana tata ruang tahun 2019 diperoleh bahwa program utama dalam indikasi program yang sudah dapat diwujudkan sebanyak 69 terdiri dari 61 program utama perwujudan struktur ruang, 8 program utama perwujudan pola ruang, dan 0 (nol) program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\% \\ &= \frac{81}{391} \times 100\% = 20,72 \, \% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui perbandingan Realisasi Ketaatan terhadap RTRW antara tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.33**  
**Perbandingan Realisasi Ketaatan terhadap RTRW Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan/<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| 2018  | 10     | 17,6      | 176%    | 7,6                        |
| 2019  | 20     | 20,72     | 103,60% | 0,72                       |

Indikator Ketaatan terhadap RTRW tahun 2018 mengalami percepatan yang signifikan yaitu sebesar 7,6 dengan capaian sebesar 176,9%. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan percepatan yaitu sebesar 0,72 dengan capaian hanya sebesar 103,60%. Meskipun terjadi penurunan, namun sebenarnya masih tetap sesuai dengan perencanaan program utama yang ada dalam RTRW Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 40%, masih jauh bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang hanya sebesar 20,72% masih terdapat selisih 19,28%.

Dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Terdapat program utama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, seperti :
  - 1). Bidang Kesehatan : dibangunnya prasarana kesehatan RSUD, Puskesmas
  - 2). Bidang Pendidikan : dibangunnya Perguruan Tinggi UNPAD, Pembangunan sekolah
  - 3). Bidang prasarana lain : pelabuhan Bojongsalawe di Kecamatan Parigi, Bandara Nusawiru di Kecamatan Cijulang;
- b. Kebijakan Pembangunan bidang prasarana lain untuk infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

**Tabel 3.34**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5**  
**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

| INDIKATOR SASARAN             |                                  | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                  |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 62,46      | 61,61     | 98,64%              |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                  |        |            |           | 98,64%              |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** dengan target indikator sasaran tahun 2019 sebesar 62,46 dengan realisasi target sebesar 61,61 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 98,64% yang dikategorikan baik.

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan hitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = \frac{61,61}{62,64} \times 100\% = 98,64\%$$

**Tabel 3.35**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan/<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| 2018  | 61,50  | 60,54     | 96,93%  | 0,96                       |
| 2019  | 62,46  | 61.61     | 98,64%  | 0,85                       |

Baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019, realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak pernah mencapai target. Namun pada tahun 2019, adanya penurunan (bersifat positif) perlambatan sebesar 0,85 bahkan capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,96 dengan capaian hanya 96,93%. Ini diakibatkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga langsung ke sungai sehingga kualitas air berangsur baik.

Untuk mencapai target pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 63,36 memerlukan upaya yang keras, karena masih tersisa target sebesar 1,75 dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2019 sebesar 61,61.

Analisis capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\text{IKLH} = (30\% \times \text{Indeks kualitas Air}) + (30\% \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (40\% \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$$

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

- 1) Terlebih dahulu dilakukan Penentuan status mutu air dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dengan rumus :

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{maksimum}}{2}}$$

- 2)  $L_{ij}$  menyatakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Peruntukan Air (j),  $C_i$  menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang diperoleh dari hasil analisis cuplikan air pada suatu lokasi pengambilan cuplikan dari suatu alur sungai,  $(C_i/L_{ij})_M$  adalah nilai maksimum dari  $C_i/L_{ij}$ , dan  $(C_i/L_{ij})_R$  adalah nilai rata-rata dari  $C_i/L_{ij}$ .

- 3) Evaluasi Terhadap Nilai IP :
- $0 \leq Pl_j \leq 1,0 \rightarrow$  Baik (memenuhi baku mutu)
- $1,0 < Pl_j \leq 5,0 \rightarrow$  cemaran ringan
- $5,0 < Pl_j \leq 10,0 \rightarrow$  cemaran sedang
- $Pl_j > 10,0 \rightarrow$  cemaran berat
- 4) Kriteria baku mutu air diambil untuk Kelas II yaitu air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau jenis peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Dalam hal baku mutu air pada sumber air belum atau tidak ditetapkan, maka berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 5) Pemantauan dilakukan pada 24 titik sampel di Kabupaten Pangandaran dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.36**  
**Pemantauan Titik Sampel Air di Kabupaten Pangandaran**

| No. | Nama Sungai      | Periode/<br>Tanggal | (Ci/Li)<br>R | (Ci/Li)<br>M | (Ci/Li)<br>R2 | (Ci/Li)<br>M2 | Pij  | Status<br>Mutu Air |
|-----|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|--------------------|
| 1   | Cijulang Hulu    | Juni 2019           | 0.49         | 2.56         | 0.24          | 6.53          | 1.84 | ringan             |
| 2   | Cijulang Tengah  | Juni 2019           | 0.38         | 2.22         | 0.14          | 4.93          | 1.59 | ringan             |
| 3   | Cijulang Hilir   | Juni 2019           | 0.56         | 3.97         | 0.31          | 15.75         | 2.83 | ringan             |
| 4   | Cigugur Hulu     | Juni 2019           | 0.42         | 1.99         | 0.17          | 3.97          | 1.44 | ringan             |
| 5   | Cigugur Tengah   | Juni 2019           | 0.56         | 2.86         | 0.32          | 8.21          | 2.06 | ringan             |
| 6   | Cigugur Hilir    | Juni 2019           | 0.62         | 3.49         | 0.38          | 12.21         | 2.51 | ringan             |
| 7   | Citonjong Hulu   | Juni 2019           | 0.29         | 1.77         | 0.09          | 3.14          | 1.27 | ringan             |
| 8   | Citonjong Tengah | Juni 2019           | 0.46         | 3.25         | 0.21          | 10.55         | 2.32 | ringan             |
| 9   | Citonjong Hilir  | Juni 2019           | 0.84         | 4.05         | 0.70          | 16.44         | 2.93 | ringan             |
| 10  | Ciseel Hulu      | Juni 2019           | 0.85         | 4.31         | 0.71          | 18.54         | 3.10 | ringan             |
| 11  | Ciseel Tengah    | Juni 2019           | 0.90         | 4.69         | 0.81          | 21.96         | 3.37 | ringan             |
| 12  | Ciseel Hilir     | Juni 2019           | 1.00         | 4.46         | 0.99          | 19.88         | 3.23 | ringan             |
| 13  | Cijulang Hulu    | Nov 2019            | 0.46         | 3.39         | 0.21          | 11.46         | 2.42 | ringan             |
| 14  | Cijulang Tengah  | Nov 2019            | 0.29         | 1.46         | 0.08          | 2.14          | 1.05 | ringan             |
| 15  | Cijulang Hilir   | Nov 2019            | 1.29         | 6.10         | 1.67          | 37.17         | 4.41 | ringan             |
| 16  | Cigugur Hulu     | Nov 2019            | 0.61         | 4.77         | 0.37          | 22.72         | 3.40 | ringan             |
| 17  | Cigugur Tengah   | Nov 2019            | 0.34         | 2.04         | 0.11          | 4.17          | 1.46 | ringan             |
| 18  | Cigugur Hilir    | Nov 2019            | 0.50         | 3.93         | 0.25          | 15.44         | 2.80 | ringan             |
| 19  | Citonjong Hulu   | Nov 2019            | 0.44         | 3.50         | 0.19          | 12.26         | 2.49 | ringan             |
| 20  | Citonjong Tengah | Nov 2019            | 0.39         | 3.02         | 0.15          | 9.15          | 2.16 | ringan             |
| 21  | Citonjong Hilir  | Nov 2019            | 0.88         | 6.14         | 0.77          | 37.72         | 4.39 | ringan             |
| 22  | Ciseel Hulu      | Nov 2019            | 0.54         | 3.55         | 0.29          | 12.62         | 2.54 | ringan             |
| 23  | Ciseel Tengah    | Nov 2019            | 0.84         | 5.59         | 0.70          | 31.22         | 4.00 | ringan             |
| 24  | Ciseel Hilir     | Nov 2019            | 0.62         | 4.33         | 0.38          | 18.77         | 3.09 | ringan             |

6) Menghitung Indeks Kualitas Air :

**Tabel 3.37**  
**Penghitungan Indeks Kualitas Air**

| Status                     | Jumlah | Persen | Koefisien | Nilai     |
|----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| Memenuhi                   | 0      | 0%     | 70        | 0         |
| Ringan                     | 24     | 100%   | 50        | 50        |
| Sedang                     | 0      | 0%     | 30        | 0         |
| Berat                      | 0      | 0%     | 10        | 0         |
| <b>Indeks Kualitas Air</b> |        |        |           | <b>50</b> |

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pengambilan sampel udara dilakukan dengan metode Passive Sampler

- 1) Metode Passive Sampler dilakukan selama 2 (dua) kali pengambilan sampel (bulan Mei dan Oktober) di area Industri PT. PECU, Area Permukiman Desa Cijulang, Area Perkantoran Setda Kabupaten Pangandaran, Area Transportasi Bundaran Ikan Marlin, masing masing pengambilan sample dilakukan 14 hari untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>.

1) Hasil metode passive sampler sebagai berikut :

**. Tabel 3.38**  
**Hasil Pengambilan Sample Udara Dengan Metode Passive Sampler**

| No | Lokasi sampling | Tahap I<br>Kadar SO <sub>2</sub> | Tahap II<br>Kadar SO <sub>2</sub> | Tahap I<br>Kadar NO <sub>2</sub> | Tahap II<br>Kadar NO <sub>2</sub> | Rerata<br>SO <sub>2</sub> | Rerata<br>NO <sub>2</sub> | Ieu    | IKU Kab/<br>Kota |
|----|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|------------------|
|    |                 | µg/Nm <sup>3</sup>               | µg/Nm <sup>3</sup>                | µg/Nm <sup>3</sup>               | µg/Nm <sup>3</sup>                | µg/Nm <sup>3</sup>        | µg/Nm <sup>3</sup>        | Indeks | Indeks           |
| 1  | Pemukiman       | 9,00                             | 13,00                             | 2,00                             | 5,00                              | 11,63                     | 5,38                      | 0.36   | <b>85,68</b>     |
|    | Transportasi    | 8,00                             | 13,00                             | 8,00                             | 6,00                              |                           |                           |        |                  |
|    | Industri        | 14,00                            | 11,00                             | 6,00                             | 5,00                              |                           |                           |        |                  |
|    | Perkantoran     | 4,00                             | 21,00                             | 5,00                             | 6,00                              |                           |                           |        |                  |

Rumus Perhitugan :

Indeks Kualitas Udara (Index annual model EU-Ieu) =  $100-(50/0,9*(Ieu-0,1))$   
=  $100-(50/0,9*(0,36-0,1))$   
= **85,68**

2) Pengambilan sample Udara dilakukan dengan metode Passive sampler.

- a. Metode Passive sampler dilakukan selama 2 kali pengambilan sample ( bulan Mei dan Oktober) di area Industri PT PECU, Area Permukiman Desa Cijulang, Area Perkantoran SETDA Kabupaten Pangandaran, Area Transportasi Bundaran patung ikan marlin, masing masing pengambilan sample dilakukan 14 hari untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>,
- b. Hasil metode passive sampler sebagai berikut

**Tabel 3.39**  
**Pengambilan Sample Udara Dengan Metode Passive sampler**

| No | Lokasi sampling | Tahap I<br>Kadar SO <sub>2</sub> | Tahap II<br>Kadar SO <sub>2</sub> | Tahap I<br>Kadar NO <sub>2</sub> | Tahap II<br>Kadar NO <sub>2</sub> | Rerata<br>SO2      | Rerata<br>NO2      | Ieu    | IKU Kab/<br>Kota |
|----|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|------------------|
|    |                 | µg/Nm <sup>3</sup>               | µg/Nm <sup>3</sup>                | µg/Nm3                           | µg/Nm3                            | µg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Indeks | Indeks           |
| 1  | Pemukiman       | 9,00                             | 13,00                             | 2,00                             | 5,00                              | 11,63              | 5,38               | 0.36   | <b>85,68</b>     |
|    | Transportasi    | 8,00                             | 13,00                             | 8,00                             | 6,00                              |                    |                    |        |                  |
|    | Industri        | 14,00                            | 11,00                             | 6,00                             | 5,00                              |                    |                    |        |                  |
|    | Perkantoran     | 4,00                             | 21,00                             | 5,00                             | 6,00                              |                    |                    |        |                  |

Rumus Perhitugan :

Indeks Kualitas Udara (Index annual model EU-Ieu) = 100-(50/0,9\*(Ieu-0,1))

= 100-(50/0,9\*(0,36-0,1))

**= 85,68**

- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
- Luas Wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 1684,44 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari Luas Pantai 673,4 Km<sup>2</sup> dan luas daratan **1.011,04** Km<sup>2</sup>, luas daratan dipergunakan untuk :
- 1) Sawah : 164,26 Km<sup>2</sup>
  - 2) Hutan : 277,64 Km<sup>2</sup>
  - 3) Lahan Kering Lainnya : 569,14 Km<sup>2</sup>
- Data dari Dinas Kehutanan Berdasarkan Status Hutan, Luas Hutan di Kabupaten Pangandaran **32.838,42** Km<sup>2</sup>.

Sehingga diperoleh

Tutupan Hutan (TH) =  $\frac{Luas\ Hutan}{Luas\ Wilayah\ (Daratan)}$

=  $\frac{32.838,42}{1.011,04} \times 100\%$

**= 32,48 %**

Perhitungannya **IKTL** sebagai berikut :

$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100) \times \frac{50}{54,3}$

$IKTL = 100 - ((84,3 - (32,48 \times 100) \times \frac{50}{54,3}$

**IKTL = 52,28**

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

**IKLH** = (30% x Indeks kualitas Air)+ (30% x Indeks Kualitas Udara) + (40% x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)

= (30% x 50)+ (30% x 85,68) + (40% x 52.28)

= 15,00 + 25,70 + 20,91

**= 61,61**

Target sasaran tidak tercapai disebabkan beberapa hal sebagai berikut :



- 1) Hasil kualitas air rata-rata keseluruhan adalah cemar ringan dimungkinkan terjadi karena pembuangan limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke badan air tanpa diolah terlebih dahulu;
- 2) Penanaman lahan kritis belum maksimal sehingga mempengaruhi kualitas air dan kualitas udara;
- 3) Masih ada masyarakat yang membuang sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga langsung ke sungai sehingga menurunkan kualitas air;
- 4) Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sebagai PPNS dalam penegakkan aturan melalui penindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Adapun solusi yang harus dilakukan antara lain :

- a. Pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan air limbah cair;
- b. Dilaksanakan penanaman lahan kritis terutama di wilayah hulu sungai;

Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mulai dari hulu sungai sampai dengan hilir sungai, mengadakan program pengelolaan sampah di sumber sampah dan mengadakan pembangunan TPST 3 R di tiap Desa.

**Tabel 3.40**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6**  
**Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualias**

| INDIKATOR SASARAN             |                                                  | SATUAN                              | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                                  |                                     | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Persentase jalan dalam kondisi mantap            | Persen                              | 70         | 83,38     | 119,11              |
| 2                             | Tingkat kecelakaan lalu lintas                   | Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun | 0,032      | 0,003     | 133,3               |
| 3                             | Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik | Rasio                               | 60         | 0         | 0                   |
| 4                             | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum   | Persen                              | 55         | 63,67     | 115,76              |
| 5                             | Indeks Resiko Sanitasi                           | Indeks                              | 38         | 38,27     | 99,29               |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                  |                                     |            |           | 93,49               |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas** memiliki 5 indikator kinerja sasaran dengan rincian : 5 (lima) indikator sasaran tercapai melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 125,83% dikategorikan sangat baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase jalan dalam kondisi mantap**

Nilai realisasi capaian Persentase jalan dalam kondisi mantap diperoleh melalui formula :

$$\frac{Jumlah\ Jalan\ Kabupaten\ dalam\ kondisi\ mantap}{panjang\ total} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dengan pesifikasi menggunakan cor beton (rigid) dan lapen (baik). Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

- a. Jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap = 420,590 km, jumlah tersebut berasal dari jumlah jalan dalam kondisi baik sebesar 401,520 km ditambah jumlah jalan dalam kondisi sedang sebesar 19,070 km, jumlah ruas Jalan tersebut bersumber dari data ruas jalan Dinas PUTRPRKP Kab. Pangandaran.
- b. Spesifikasi jalan dalam kondisi mantap menggunakan cor beton (*rigid*) sepanjang 138,979 km, dan lapen (baik) sepanjang 279.791 km. Sisanya spesifikasi jalan dalam kondisi tidak mantap menggunakan Telford/kerikil sepanjang 82,140 km dan Tanah/Belum Tembus sepanjang 3,400 km.
- c. Total panjang jalan kabupaten adalah 504,31 km berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 620/kpts.225-Huk/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Pangandaran.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)}}{\text{Panjang total}} \times 100\% \\
 &= \frac{420,590 \text{ km}}{504,31 \text{ km}} \times 100\% \\
 &= 83,38\%
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja dari indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap adalah sebesar 119,11%. Angka tersebut merupakan hasil pembagian antara target dalam RPJMD sebesar 70% dan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 83,38%. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{83,38}{70} \times 100\% \\
 &= 119,11 \text{ \%}
 \end{aligned}$$

Dengan nilai tersebut artinya capaian indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap sudah mencapai melebihi target.

**Tabel 3.41**  
**Perbandingan Realisasi Persentase jalan dalam kondisi mantap Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan/<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| 2018  | 55     | 60        | 109,09% | 5                          |
| 2019  | 70     | 83,38     | 119,11% | 13,38                      |

Pada tahun 2018 terjadi percepatan 5% dari target dengan capaian 109,09%. Dan pada tahun 2019 terjadi percepatan yang lonjakannya luar biasa sebesar 13,38% atau dengan capaian 119,11%. Lonjakan percepatan ini dipengaruhi oleh kebijakan Kepala Daerah yang menginginkan penyelesaian target infrastruktur jalan dan jembatan dipercepat sebelum akhir periode RPJMD. Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Pangandaran fokus kepada 4 (empat) prioritas bidang pembangunan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pariwisata.

Dengan capaian pada tahun 2019 indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 83,38%, maka sisa terget dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 95% adalah tinggal sebesar 11,62% lagi.

Keberhasilan dalam pencapaian pencapaian melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bidang infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata;
- b. Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalokasikan biaya untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang cukup besar mengingat kondisi saat sebelum pemekaran daerah, jalan-jalan kabupaten sebagian besar sangat rusak.
- c. Spesifikasi untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan diwajibkan menggunakan hotmix atau cor beton/rigid sehingga diharapkan memiliki ketahanan/umur jalan yang lama.
- d. Ketepatan waktu pekerjaan akibat adanya pengawasan yang ketat dari Dinas PUTRPRKP dalam hal pelaporan (Pengecekan Mutu/Mutual Check) dan Progres pekerjaan atau *termyn*.

2. Tingkat kecelakaan lalu lintas,

Nilai realisasi capaian Tingkat kecelakaan lalu lintas diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan} \times 10^6}{\text{LHR} \times \text{Panjang Jalan Kabupaten} \times 365 \text{ hari}}$$

Dimana Lalu Lintas Harian (LHR) adalah banyaknya kendaraan yang melewati jalan kabupaten per hari rata-rata sebanyak 12.625 kendaraan per hari. Perhitungan tersebut dilakukan pada tahun 2019 menggunakan teknik penghitungan lalu lintas/traffic counting, yang dilaksanakan di beberapa ruas jalan Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah kejadian kecelakaan yaitu sebanyak 8 kejadian sepanjang tahun 2019. (*sumber: Polres Ciamis*).

Panjang Jalan Kabupaten = 504,31 km. (*sumber : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 620/kpts.225-Huk/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Pangandaran*)

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{8 \times 1.000.000}{12.652 \times 504,31 \times 365} = 0,003 \text{ Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun}$$

Capaian kinerja tingkat kecelakaan lalu lintas tercapai melampaui target 0,032 yaitu tercapai 0,003 orang/sejuta Km kendaraan per tahun atau 133,3% dari target. Semakin rendah persentase capaian kinerja dan angka kecelakaan /tingkat kecelakaan lalu lintas maka semakin tinggi capaian kinerja tersebut.

**Tabel 3.42**  
**Perbandingan Realisasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan |
|-------|--------|-----------|------------|
| 2018  | 0,033  | 0,005     | 18,65      |
| 2019  | 0,032  | 0,003     | 15,44      |

Dibandingkan dengan tahun 2018, Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 semakin rendah. Artinya terdapat percepatan sebesar 3,21 pada tahun 2019. Hal ini diakibatkan adanya pengendalian, pengaturan, dan pengamanan lalu lintas secara rutin oleh petugas pengatur lalu lintas dari Dinas Perhubungan termasuk juga dengan dari Pihak Kepolisian.

Untuk mencapai target sesuai akhir periode RPJMD sebesar 0,029, maka masih perlu upaya keras untuk merealisasikannya. Karena dapat diprediksi, setiap tahun jumlah kendaraan dan pengguna kendaraan semakin meningkat. Hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya resiko kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Pangandaran apabila tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan dari sekarang.

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kondisi jalan di Kabupaten Pangandaran semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Beberapa ruas jalan di Kabupaten Pangandaran telah dilengkapi dengan penerangan yang cukup dan rambu-rambu lalu lintas yang memadai (Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya).
- c. Volume kendaraan di ruas jalan kabupaten masih relatif sedikit, sehingga angka kecelakaan lalu lintas tidak terlalu tinggi.
- d. Kecelakaan lalu lintas terjadi kebanyakan di ruas jalan nasional dikarenakan volume kendaraan di ruas jalan nasional cukup tinggi dan mobilitas lalu lintas di Kabupaten Pangandaran lebih banyak di ruas jalan nasional.

### 3. Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik

Nilai realisasi capaian Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{Jumlah Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik (m)}}{\text{Total Jaringan Irigasi teknis (m)}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh total Jaringan Irigasi Teknis seluruh Kabupaten Pangandaran adalah 18.429,16 m (berdasarkan data tahun 2015). Namun berdasarkan hasil pendataan ulang yang dituangkan dalam Permen PU tentang Penetapan Daerah Irigasi, bahwa di Kabupaten Pangandaran panjang saluran irigasi teknis sepanjang 23.709 m, sehingga terdapat perbedaan data dasar yang digunakan dalam perhitungan tahun 2018 dengan tahun 2019.

Selanjutnya, pada tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran terdapat pembangunan irigasi sepanjang 10.320 m. Namun pembangunan tersebut dilaksanakan pada irigasi semi teknis. Sehingga realisasi pembangunan irigasi pada irigasi teknis untuk tahun 2019 tidak ada.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{jaringan irigasi teknis}}{\text{dalam kondisi baik (m)}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{total jaringan}}{\text{irigasi teknis (m)}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{23.709} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Realisasi dari indikator Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik adalah sebesar 0%, artinya belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 60%. Dengan demikian rehabilitasi jaringan irigasi menjadi kurang optimal dalam menambah suplai air menuju titik yang ditentukan yaitu petak sawah.

**Tabel 3.43**  
**Perbandingan Realisasi Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan / Perlambatan |
|-------|--------|-----------|--------------------------|
| 2018  | 55%    | 56%       | 1%                       |
| 2019  | 60%    | 0%        | 60%                      |

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik mengalami perlambatan yang signifikan sebesar 60%. Ketidakterhasilan ini akibat dari rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan pada jaringan irigasi semi teknis sehingga tidak diakui sebagai realisasi atas pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis.

Atas kondisi tersebut, untuk mencapai target akhir periode RPJMD masih sebesar 14% lagi dari target sebesar 70%, sehingga sejak sekarang sudah dipersiapkan strategi antara lain dengan mendata dan memetakan jaringan irigasi teknis yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan yang disesuaikan dengan kebijakan baru berdasarkan Permen PU tersebut.

Ketidakterhasilan dalam pencapaian yang target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan/perbedaan data dasar antara data sebelumnya (Tahun 2015) bahwa jaringan Irigasi Teknis seluruh Kabupaten Pangandaran adalah 18.429,16 m. Namun berdasarkan hasil pendataan ulang yang dituangkan dalam Permen PU tentang Penetapan Daerah Irigasi, bahwa di Kabupaten Pangandaran panjang saluran irigasi teknis menjadi sepanjang 23.709 m (pembagiannya menjadi lebih besar);
- b. Meskipun menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan produksi bidang pertanian namun rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan pada jaringan irigasi semi teknis sehingga tidak diakui sebagai realisasi atas pelaksanaan Rehabilitasi pada Jaringan Irigasi Teknis.

**4. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum**

Nilai realisasi capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum diperoleh melalui formula :

$$\frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Berakses\ Air\ Minum}{Jumlah\ Total\ Rumah\ Tangga} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

- Jumlah Rumah tangga berakses air minum = 95.532 kk  
Jumlah tersebut merupakan jumlah rumah tangga berakses air minum seluruh Kabupaten Pangandaran, data bersumber dari akumulasi program RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) dan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat) Kabupaten Pangandaran.
- Jumlah total Rumah tangga di Kabupaten Pangandaran =150.047 kk  
Jumlah tersebut merupkan jumlah total rumah tangga yang membutuhkan akses air minum di Kabupaten Pangandaran. Data bersumber dari Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ berakses\ air\ minum\ (kk)}{Jumlah\ Total\ Rumah\ Tangga\ (kk)} \times 100 \\ &= \frac{95.532}{150.047} \times 100 \\ &= 63,67\% \end{aligned}$$

Capaian Kinerja dari indikator Persentase rumah tangga berakses air minum adalah sebesar 119%, Angka tersebut didapat berdasarkan perhitungan dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% \\ &= \frac{63,67}{55} \times 100\% \\ &= 115,76\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.44**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan / Perlambatan |
|-------|--------|-----------|--------------------------|
| 2018  | 50%    | 62%       | 12%                      |
| 2019  | 55%    | 63,67%    | 8,67%                    |

Meskipun dapat mencapai melebihi target, dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi persentase rumah tangga berakses air minum mengalami perlambat sebesar 3,33%, yaitu selisih percepatan antara tahun 2018 dengan percepatan tahun 2019. Perlambatan ini diakibatkan oleh adanya pengurangan jumlah unit dalam program PAMSIMAS di Kabupaten Pangandaran.

Untuk mencapai target sesuai akhir periode RPJMD sebesar 75%, masih perlu upaya keras untuk merealisasikan persentase rumah tangga berakses air minum yang masih tersisa yaitu sebesar 11,33%. Melihat masih besarnya tingkat capaian persentase rumah tangga berakses air minum yang harus dicapai, maka akan dilakukan langkah-langkah antara lain :

1. Pendataan dan survey lokasi untuk menentukan prioritas terhadap pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar cakupan pemanfaatan sambungan rumah lebih besar;
2. Penambahan jumlah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) disesuaikan dengan target di RPJMD;
3. Penambahan jumlah anggaran guna mendukung capaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy berupa pemberian air baku untuk beberapa daerah.
2. Pelaksanaan kinerja ini juga didukung oleh keberhasilan output-output pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat melalui pemanfaatan sambungan rumah, yaitu diantaranya adalah Pembangunan SPAM Desa Banjarharja sebanyak 110 unit, Desa Bojongsari 75 Unit, Desa Bunisari 63 Unit, Desa Sindangsari 110 Unit, Desa Kertaharja 85 Unit, Desa Mekarsari 65 Unit dan PAMSIMAS sebanyak 575 Unit di Kabupaten Pangandaran.

### 5. Indeks Resiko Sanitasi

Nilai realisasi Indeks Risiko Sanitasi datanya diperoleh berdasarkan pendataan terhadap rumah tangga bersanitasi di wilayah Kabupaten Pangandaran yang berasal dari 3 (tiga) instansi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan data tersebut diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 3.45**  
**Nilai IRS-Input Instrument BPS**

| Nama Kecamatan       | Genangan Air |           | Persampahan |           | PHBS      |           | Air Limbah Domestik |           | Sumber Air Rumah Tangga |           | IRS          |              |
|----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
|                      | 2018         | 2019      | 2018        | 2019      | 2018      | 2019      | 2018                | 2019      | 2018                    | 2019      | 2018         | 2019         |
| CIMERAK              | 4            | 4         | 45          | 45        | 37        | 36        | 59                  | 59        | 32                      | 31        | 35           | 35           |
| CIJULANG             | 8            | 8         | 65          | 65        | 30        | 30        | 57                  | 57        | 29                      | 29        | 38           | 38           |
| CIGUGUR              | 6            | 6         | 43          | 43        | 38        | 37        | 63                  | 63        | 40                      | 38        | 38           | 37           |
| LANGKAPLANCAR        | 8            | 8         | 88          | 88        | 40        | 40        | 63                  | 63        | 27                      | 26        | 45           | 45           |
| PARIGI               | 18           | 18        | 67          | 67        | 32        | 32        | 47                  | 47        | 27                      | 27        | 38           | 38           |
| SIDAMULIH            | 12           | 12        | 43          | 43        | 28        | 28        | 44                  | 44        | 20                      | 17        | 29           | 29           |
| PANGANDARAN          | 24           | 9         | 94          | 50        | 37        | 36        | 38                  | 36        | 32                      | 32        | 45           | 33           |
| KALIPUCANG           | 28           | 28        | 66          | 66        | 36        | 36        | 51                  | 51        | 32                      | 32        | 42           | 42           |
| PADAHERANG           | 16           | 16        | 96          | 96        | 33        | 33        | 46                  | 46        | 32                      | 32        | 45           | 45           |
| MANGUNJAYA           | 13           | 13        | 71          | 71        | 34        | 34        | 65                  | 65        | 20                      | 20        | 41           | 41           |
| <b>IRS KABUPATEN</b> | <b>14</b>    | <b>12</b> | <b>68</b>   | <b>63</b> | <b>34</b> | <b>34</b> | <b>53</b>           | <b>53</b> | <b>29</b>               | <b>28</b> | <b>39,72</b> | <b>38,27</b> |

Indeks Risiko Sanitasi diukur melalui kajian EHRA yaitu :

- a. Risiko Air Bersih, tersusun atas 3 sub-variabel, yaitu :
  - Penggunaan sumber air terlindungi;



- Penggunaan sumber air yang tidak terlindungi;
  - Kelangkaan air
- b. Risiko Air Limbah Domestik, tersusun atas 3 sub-variabel, yaitu :
- Tanki septik suspek aman;
  - Pencemaran karena pembuangan isi tanki septik;
  - Pencemaran karena SPAL.
- c. Risiko Persampahan, tersusun atas 4 sub-variabel, yaitu:
- Pengelolaan sampah;
  - Frekuensi pembuangan sampah;
  - Ketepatan waktu pembuangan sampah;
  - Pengolahan sampah setempat.
- d. Risiko Genangan Air, tersusun atas 1 sub-variabel yaitu genangan air.
- e. Risiko Perilaku Higiene dan Sanitasi tersusun atas 7 sub-variabel, yaitu:
- Cuci Tangan Pakai Sabun di lima waktu penting;
  - Kebersihan lantai dan dinding jamban;
  - Keberadaan kecoa dan lalat dalam jamban;
  - Keberfungsian penggelontor;
  - Ketersediaan sabun dalam jamban;
  - Pencemaran pada wadah penyimpan air dan penanganan air;
  - Perilaku Buang Air Besar yang berisiko pada kesehatan.

Berdasarkan data hasil kajian EHRA (*Environmental Health Risk Assessment*) tahun 2019 maka diperoleh data Indeks Risiko Sanitasi (IRS) sebesar 38,27.

Pengukuran Indikator Indeks Risiko Sanitasi menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Untuk menghitung capaian realisasi Indeks Risiko Sanitasi digunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{38,27}{38} \times 100\% \\
 &= 99,29\%
 \end{aligned}$$

Artinya capaian dari indikator Indeks risiko sanitasi belum mencapai target namun kategorinya Baik.

**Tabel 3.46**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Resiko Sanitasi**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2018  | 40     | 40%       | 0                           |
| 2019  | 38     | 38,27%    | 0,27                        |

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi persentase rumah tangga berakses air minum mengalami perlambat sebesar 0,27, yaitu selisih percepatan antara tahun 2018 dengan percepatan tahun 2019. Perlambatan ini diakibatkan program-program yang ada dalam *Environment Healt List Risk Asessment* (EHRA) tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Untuk mencapai target sesuai akhir periode RPJMD sebesar 34%, masih perlu upaya keras untuk merealisasikan persentase rumah tangga berakses air minum yang masih tersisa yaitu sebesar 4,27%.

Memperhatikan ketidakberhasilan dalam pencapaian target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya penanganan terpadu dalam pembangunan permukiman (keterpaduan dalam penanganan kawasan kumuh dan sanitasi) yaitu pembangunan RUTILAHU yang dilengkapi dengan akses rumah tangga bersanitasi, data bersumber dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran.
2. Perlu meningkatkan peran masyarakat yang ikut aktif dalam pemanfaatan limbah organik untuk mengurangi pencemaran lingkungan setempat.
3. Penambahan anggaran untuk pembuatan drainase guna mengurangi risiko genangan air.

**Tabel 3.47**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7**  
**Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana**

| INDIKATOR SASARAN             |                       | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                       |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 150,6      | 146.13 *  | 103,05              |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                       |        |            |           | 103,05              |

\*Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) sebanyak dua kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Pebruari dan Desember di Tahun berjalan.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Indeks Risiko Bencana memiliki 1 indikator kinerja sasaran dengan indikator sasaran dengan mencapai melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 103,05% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks Risiko Bencana**

Penghitungan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dilakukan setiap tahun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui pengkajian untuk setiap daerah dengan memperhatikan beberapa parameter yaitu tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas daerah dalam rangka mengurangi risiko bencana.

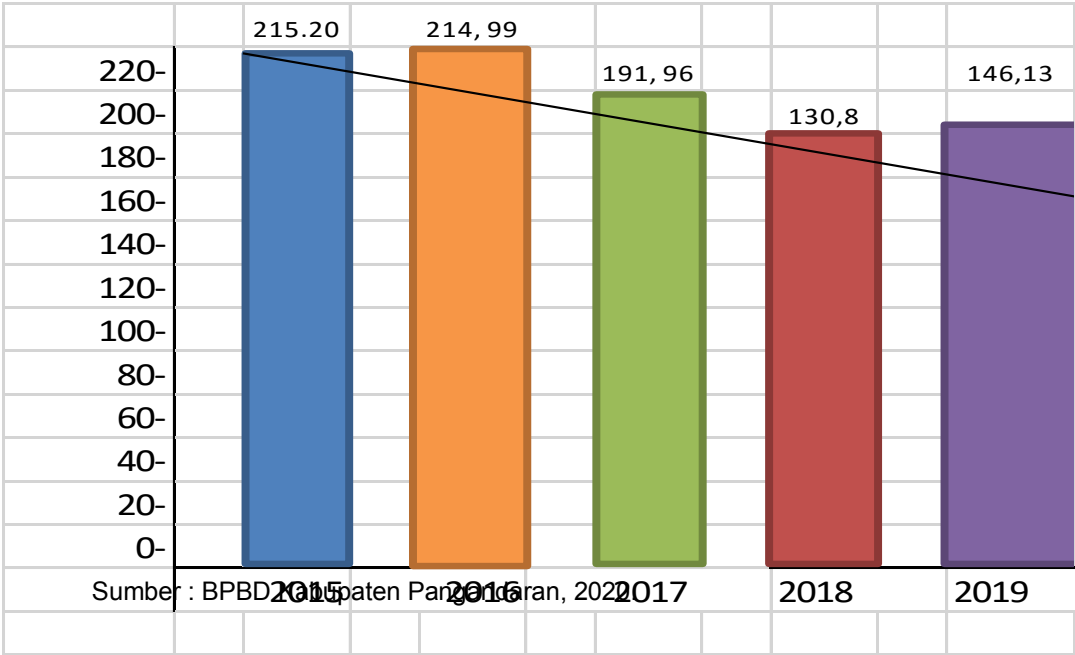
Untuk pengukuran Indikator Indeks Resiko Bencana Indonesia menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Pada tahun 2019 nilai Indeks

Resiko Bencana Kabupaten Pangandaran sebesar 146,13. Capaian kinerja dari indikator Indeks Resiko Bencana adalah sebesar 103,05%. Angka tersebut didapat berdasarkan perhitungan dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 150,6, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{150,6}{146,13} \times 100\% \\ &= \frac{150,6}{146,13} \times 100\% \\ &= 103,05\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data IRBI, sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran selalu terdapat penurunan tiap tahunnya. Pencapaian penurunan indeks risiko bencana ini menandakan adanya : peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan daerah.

**Gambar 3.4**  
**Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran**



Jika dibandingkan dengan tahun 2018, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran dengan tahun lalu seperti tergambar dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 48**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan / Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|--------------------------|
| 2018  | 155    | 130,8     | 118,5%  | 24,2                     |
| 2019  | 150,6  | 146,13    | 103,05% | 4,47                     |

Meskipun secara capaian telah mencapai melebihi target, namun pada tahun 2019 terdapat penurunan percepatan sebesar 19,73 (24,2 dikurangi 4,47) bila dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini akibat adanya penurunan dalam efektivitas mitigasi bencana yang dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan semua unit *early warning system* di

beberapa titik guna memberikan kepastian bahwa setiap upaya mitigasi berbasis teknologi telah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut terdapat beberapa peralatan *early warning system* yang kurang atau bahkan tidak berfungsi dan memerlukan perbaikan sampai dengan penggantian alat.

Selanjutnya apabila capaian tahun 2019 sebesar 146,13 dibandingkan dengan target akhir sebesar 140, masih terdapat selisih sebesar 6,13 lagi. Maka diperlukan strategi yang tepat guna menurunkan nilai indeks risiko bencana sesuai dengan target akhir periode RPJMD.

Gambaran Indeks Risiko Bencana di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 3.49**  
**INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019**

| KABUPATEN/KOTA   | IRBI   |
|------------------|--------|
| Cirebon          | 160,90 |
| Kota Bandung     | 150,80 |
| Ciamis           | 150,72 |
| Pangandaran      | 146,13 |
| Cianjur          | 144,99 |
| Tasikmalaya      | 142,11 |
| Sukabumi         | 133,52 |
| Garut            | 131,65 |
| Subang           | 122,64 |
| Karawang         | 122,64 |
| Kota Cirebon     | 120,93 |
| Indramayu        | 117,05 |
| Majalengka       | 115,20 |
| Sumedang         | 113,40 |
| Bandung Barat    | 111,33 |
| Kuningan         | 107,80 |
| Kota Banjar      | 106,96 |
| Purwakarta       | 96,60  |
| Bogor            | 95,82  |
| Bekasi           | 93,12  |
| Kota Bekasi      | 92,12  |
| Kota Cimahi      | 84,28  |
| Bandung          | 83,82  |
| Kota Tasikmalaya | 83,44  |
| Kota Sukabumi    | 80,08  |
| Kota Depok       | 60,06  |
| Kota Bogor       | 53,03  |

Sumber : BPBD Kabupaten Pangandaran, 2020

Berdasarkan data dari tabel Indeks Risiko Bencana kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 146,13 Hal ini menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu kabupaten yang memiliki Indeks Risiko Bencana dengan kategori sedang. Dapat diketahui pula bahwa Kabupaten Pangandaran menduduki urutan ke 4 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran termasuk kabupaten di Jawa Barat yang memiliki risiko bencana sedang.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019 menargetkan penurunan indeks risiko bencana di setiap daerah sebesar 30%. Pada Tahun 2018, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran ada di angka 168,4, hal ini berarti harus ada penurunan sekitar 50,52 guna mencapai target BNPB sebesar 30% tersebut. Pada Tahun 2019, Indeks risiko bencana Kabupaten Pangandaran telah mengalami penurunan sebesar 22,27 atau 13,22% sehingga angka Indeks Risiko Kabupaten pangandaran Tahun 2019 menjadi sebesar 146,13.

Dari pemaparan diatas, maka pencapaian kinerja Kabupaten Pangandaran untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan membandingkan target nasional tahun 2019, target kinerja kabupaten pangandaran 150,6 dan target nasional BNPB 118,6 dengan persentasi yaitu mencapai 126,98%.

Beberapa faktor yang mendukung terhadap pencapaian melebihi target dalam penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;

Kabupaten Pangandaran telah melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan berbasis masyarakat melalui kegiatan pembentukan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) Menuju Desa Tangguh Bencana sebanyak 18 FKDM.

b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;

Dalam hal ini, dokumen kajian risiko bencana di Kabupaten Pangandaran telah disusun dan diterapkan untuk berbagai keperluan perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu.

c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;

Dalam mengembangkan akses layanan sistem informasi yang terpadu, telah berdiri Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) di Kabupaten Pangandaran dengan mengintegrasikan berbagai software dan website guna penyebaran informasi secara cepat dan aktual.

d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;

Kawasan di pesisir Kabupaten Pangandaran merupakan daerah rawan bencana gelombang tsunami, oleh karena itu telah dilakukan pembuatan dan pemasangan beberapa unit Early Warning Sistem (EWS), jalur evakuasi beserta rambu-rambu evakuasi sebagai bentuk peringatan dini menghadapi bencana gelombang tsunami.

e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

Peningkatan efektivitas mitigasi bencana dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan semua unit early warning sistem di beberapa titik guna memberikan kepastian bahwa setiap upaya mitigasi berbasis teknologi telah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

f. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Hal ini telah dilakukan melalui kegiatan latihan gabungan relawan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran. Kegiatan ini merupakan sarana untuk berbagai ilmu mengenai kesiapsiagaan dan penanganan ketika bencana terjadi sewaktu-waktu sehingga masyarakat dengan dibantu oleh relawan telah siap siaga menghadapi

kemungkinan risiko bencana yang akan terjadi.

g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Upaya untuk memulihkan daerah terdampak bencana di Kabupaten Pangandaran telah dilakukan melalui kegiatan koordinasi antara berbagai stakeholder, dari mulai kegiatan pemulihan trauma korban terdampak bencana sampai pemulihan prasarana permukiman dan atau bantuan logistik bagi korban bencana.

**Tabel 3.50**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8**  
**Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan**

| INDIKATOR SASARAN             |                                                                   | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                                                   |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi | Persen | 18         | 0         | 0                   |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                                   |        |            |           | 0                   |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan belum ada realisasi, dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 0% (tidak ada realisasi) atau dikategorikan **kurang**. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun}}{\text{Jumlah Kebutuhan gedung kantor}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh data sampai dengan tahun 2018, jumlah gedung kantor yang dibangun adalah 3 gedung dan jumlah kebutuhan gedung kantor adalah 35 gedung. Selanjutnya pada tahun 2019 belum ada gedung yang dibangun, namun baru melakukan penganggaran untuk pembuatan DED sehingga belum dapat dihitung sebagai relaisasi dan capaian.

**Tabel 3.51**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Dan Prasarana Pusat Pemerintahan Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan / Perlambatan |
|-------|--------|-----------|--------------------------|
| 2018  | 5      | 8,57      | 3,57%                    |
| 2019  | 18     | 0         | 18%                      |

Pada tahun 2018 telah terjadi percepatan sebesar 3,57%. Namun pada tahun 2019 malah sebaliknya terjadi perlambatan sebesar 18% karena tidak ada realisasi pembangunan gedung pusat pemerintahan. Hal ini diakibatkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum

berencana untuk memenuhi sarana dan prasarana pusat pemerintahan pada tahun 2019, namun baru menyusun DED-nya. Sedangkan untuk pembangunan tersebut, baru direncanakan dibangun di tahun 2020 yaitu untuk pembangunan gedung Setda dan Bappeda.

Berdasarkan target akhir periode RPJMD, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 80%. Melihat total capaian saat ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, capaiannya masih jauh. Berdasarkan data kebutuhan gedung kantor pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa jumlah kebutuhan gedung kantor yaitu sebanyak 35 unit, sedangkan gedung kantor yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3 unit. Artinya masih terdapat 32 unit yang belum dibangun. 3 unit bangunan berarti capaiannya sama dengan sebelumnya yaitu baru 8,57%, yang dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{35} \times 100\% \\ &= 8,57\% \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja sasaran untuk sarana dan prasarana pusat pemerintahan memang belum mencapai target dikarenakan :

- a. Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat melalui 4 (empat) bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur jalan dan jembatan dan Pariwisata. Sehingga untuk pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan dibangun bertahap dengan pembuatan *Detail Engineering Design* (DED);
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan baru akan dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2021 sesuai dengan rencana Pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu akhir periode RPJMD tahun 2021.

**Tabel 3.52**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9**  
**Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan**

| INDIKATOR SASARAN             |                                                               | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                                               |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal                          | Persen | 35         | 50        | 142,86              |
| 2                             | Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik | Persen | 75         | 83        | 110,66              |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                               |        |            |           | 126,76              |

tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan** memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan capaian yang melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 126,76% atau dikategorikan sangat baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :



## 1. Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal

Nilai realisasi capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{Jumlah Obyek Kebudayaan Yang Ditangani/Dimajukan}}{\text{Jumlah Seluruh Obyek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran bahwa Objek pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi:

1. Tradisi lisan
2. Manuskrip
3. Adat istiadat
4. Permainan rakyat
5. Olah raga tradisional
6. Pengetahuan tradisional
7. Teknologi tradisional
8. Seni
9. Bahasa
10. Ritus

Dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut di atas, pada tahun 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran baru berhasil mengembangkan dan menangani 5 objek pemajuan kebudayaan atau sekitar 50%. Lima objek pemajuan kebudayaan tersebut meliputi :

- a. Ritus seperti proses karasemen adat pada kegiatan Hajat Laut yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Muhharam;
- b. Seni seperti tarian Ronggeng yang dipentaskan pada acara Karnaval Seni Budaya dan Kegiatan di Ruang Publik;
- c. Tradisi Lisan seperti cerita tentang Nyai Rengganis yang dilakukan sebelum pementasan tari ronggeng dimulai (dalam penyampaian sinopsis);
- d. Pengetahuan Tradisional seperti ketika Karnaval Budaya ada pagelaran busana;
- e. Permainan Tradisional seperti Permainan Layang-layang ketika event Kite Festival dan pengenalan permainan tradisional kepada Finalis Mojang Jajaka (MOKA) Kabupaten Pangandaran untuk disosialisasikan kepada anak-anak sekolah ketika mereka melakukan kegiatan MOKA Goes to School.

Dengan demikian maka :

- a. Jumlah obyek kebudayaan Yang ditangani/dimajukan sebanyak 5 obyek.
- b. Jumlah seluruh obyek pemajuan kebudayaan yaitu sebanyak 10 obyek.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{5}{10} \times 100 \% = 50\%$$

Capaian Realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar 142,86%. Dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 35%, maka perhitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisas}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{50}{35} \times 100\% \\ &= 142,86\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.53**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2018  | 25%    | 50%       | 25%                         |
| 2019  | 35%    | 50%       | 15%                         |

Pada tahun 2019 Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal mengalami perlambatan 10% dibandingkan dengan tahun 2018. Perlambatan ini diakibatkan masih terbatasnya anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk menggarap obyek pemajuan kebudayaan lokal yang lainnya.

Apabila ditinjau dari target akhir RPJMD sebesar 80%, masih tetap optimis dengan sisa target 30% dan masih terdapat 2 (dua) tahun lagi untuk mencapai target akhir tersebut.

Meskipun secara capaian target telah melebihi, namun masih terdapat hal-hal yang menjadi kendala dan permasalahan utama dalam pencapaian kinerja pemajuan kebudayaan adalah :

1. Budaya yang dimiliki Kabupaten Pangandaran hasil inventarisasi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhitung banyak namun keterbatasan sumber daya yang dimiliki membuat pengembangan budaya di Kabupaten Pangandaran belum optimal.
2. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kekayaan budaya Kabupaten Pangandaran sehingga representasi budaya di luar daerah dan apresiasi terhadap kebudayaan lokal Pangandaran masih terbatas. Pada umumnya masyarakat Kabupaten Pangandaran hanya mengenal Ronggeng Gunung dan makanan khas pindang gunung, padahal masih banyak kekayaan budaya yang dimiliki..
3. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan lokal Kabupaten Pangandaran, terbukti dengan belum adanya kajian-kajian ilmiah terhadap produk budaya yang ada seperti pengklasifikasian budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran ke dalam 10 objek pemanjuan kebuayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas guna peningkatan capaian kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pengembangan 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran seperti melakukan sosialisasi, workshop dan bimtek untuk masyarakat untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kekayaan budaya sehingga representasi budaya di luar daerah dan apresiasi terhadap kebudayaan lokal Pangandaran meningkat budaya yang ada di Pangandaran dan melakukan dialog kebudayaan dengan para pelaku budaya meningkat;
2. Meningkatkan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya sehingga pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran akan lebih optimal. Pemanfaatan promosi budaya Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan berbagai media, baik regional, nasional maupun internasional.
3. Mengembangkan kajian-kajian kebudayaan yang melibatkan para ahli dan praktisi akademisi sehingga hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan lokal Pangandaran dapat mendukung dalam pemajuan Kebudayaan kabupaten Pangandaran;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana budaya sehingga masyarakat akan lebih memiliki kecintaan pada budaya lokal dan seni dan karya budaya lokal tidak terpinggirkan. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana budaya diharapkan dapat memicu kreatifitas para pelaku budaya.
5. Mengembangkan dan memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual sehingga warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain akan diminimalisir. Selain itu juga membangun museum budaya untuk mengkoleksi warisan budaya berwujud benda sehingga kelestariannya dapat terjamin.
6. Memformulasikan regulasi khusus mengenai kebudayaan dan proses pemajuannya sebagai tindak lanjut dari UU No. 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah dan mengembangkan kemitraan kebudayaan dalam kerja sama antar pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan terhadap capaian yang melebihi target antara lain :

1. Visi Kabupaten Pangandaran yang memfokuskan pada pariwisata telah mendorong masyarakat untuk menggali dan membangkitkan kembali seni dan budaya tradisional untuk dilestarikan bahkan dijual kepada pengunjung obyek wisata;
2. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupaya meningkatkan fasilitasi dan koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah dan mengembangkan kemitraan kebudayaan dalam kerja sama antar pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat serta berupaya mempromosikan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran.

- Masih banyak masyarakat Kabupaten Pangandaran yang masih memegang teguh tradisi maupun seni budaya tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terutama para generasi terdahulu;
- Para pelaku budaya tradisional di Kabupaten Pangandaran banyak yang masih hidup sehingga masih dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya;
- Kalangan generasi muda mulai banyak yang peduli dan menggali serta mau mempelajari seni dan budaya tradisional di Kabupaten Pangandaran. Mereka secara perlahan dapat mengapresiasi seni dan kreatifitas Karya Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pangandaran.

**2. Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik**

Nilai realisasi capaian Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik diperoleh melalui formulasi sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ peserta\ didik\ yang\ berkepribadian\ baik}{Jumlah\ Seluruh\ peserta\ didik} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

Data diambil dari Laporan Pendidikan (raport) peserta didik dari setiap sekolah yang ada di lingkup wilayah Kabupaten Pangndaran. Pengumpulan data dilakukan oleh koordinator wilayah kecamatan masing-masing untuk SD, sedangkan untuk SMP pengumpulan data dilakukan oleh kepala sekolah masing–masing dengan cara mengirimkan data Nilai Sikap Peserta Didik yang berkepribadian Baik ke Disdikpora dalam periode setiap akhir semester.

**Tabel 3.54**  
**Rekap Data Nilai Sikap Peserta Didik**

| NO     | Kecamatan     | Jumlah Siswa |        | Nilai Sikap |        |       |       |       |       |
|--------|---------------|--------------|--------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|        |               | SD           | SMP    | SD          |        |       | SMP   |       |       |
|        |               |              |        | A           | B      | C     | A     | B     | C     |
| 1      | PARIGI        | 3.614        | 2.023  | 759         | 2.302  | 553   | 119   | 1226  | 678   |
| 2      | CIJULANG      | 2.285        | 558    | 203         | 1.862  | 220   | 11    | 350   | 197   |
| 3      | CIMERAK       | 3.843        | 1.135  | 798         | 2.037  | 1.008 | 109   | 782   | 244   |
| 4      | CIGUGUR       | 1.397        | 364    | 386         | 887    | 124   | 56    | 199   | 109   |
| 5      | LANGKAPLANCAR | 3.997        | 1.419  | 809         | 2.921  | 267   | 109   | 862   | 448   |
| 6      | MANGUNJAYA    | 1.970        | 951    | 823         | 949    | 198   | 122   | 599   | 230   |
| 7      | PADAHERANG    | 5.252        | 2.770  | 1.019       | 3.268  | 965   | 232   | 2089  | 449   |
| 8      | KALIPUCANG    | 3.216        | 1.231  | 978         | 1.926  | 312   | 112   | 918   | 201   |
| 9      | PANGANDARAN   | 4.568        | 1.906  | 1.165       | 2.936  | 467   | 124   | 1221  | 561   |
| 10     | SIDAMULIH     | 2.381        | 1.058  | 417         | 1.678  | 286   | 55    | 798   | 205   |
| JUMLAH |               | 32.523       | 13.415 | 7.357       | 20.766 | 4.400 | 1.049 | 9.044 | 3.322 |

Ket: A: sangat Baik, B: Baik, C: Cukup Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa

Jumlah peserta didik yang berkepribadian sangat baik dan baik = 38.216

Jumlah seluruh peserta didik = 45.938

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentase Nilai Sikap berkepribadian baik} &= \frac{\text{Jumlah peserta didik yang berkepribadian baik}}{\text{Jumlah Seluruh peserta didik}} \times 100\% \\ &= \frac{38.216}{45.938} \times 100\% \\ &= 83,19\% = 83\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas maka realisasi sasaran kinerja telah mencapai melebihi target yaitu 83% dari target RPJMD tahun 2019 sebesar 75%. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung capaiannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{83}{75} \times 100\% \\ &= 110,66\% \end{aligned}$$

Sehingga tingkat capain Tahun 2019 yaitu sebesar 110,66%

**Tabel 3.55**  
**Perbandingan Realisasi Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2018  | 70     | 82        | 12                          |
| 2019  | 75     | 83        | 8                           |

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 meskipun terdapat percepatan sebesar 8% namun apabila dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi perlambatan sebesar 4%. Perlambatan ini terjadi akibat adanya perubahan metode pada kegiatan Ajengan Masuk Sekolah dalam Program Pangandaran Madani di subkegiatan Pesantren Ramadhan, pada tahun anggaran 2019 santri pesantren Ramadhan tidak Mondok di Lokasi kegiatan seperti tahun sebelumnya sehingga terdapat sedikit kesulitan dalam menilai sikap peserta didik.

Apabila Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Target Periode akhir RPJMD terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.56**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD**

| No | Sasaran                                                                   | Indiaor Kinerja Utama                                         | Target | Realisasi Kinerja 2019 | Target Periode akhir RPJMD | Capaian Kinerja Terhadap Akhir RPJMD (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan | Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik | 75     | 83                     | 90                         | 92,22                                    |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target periode akhir RPJM yaitu 90% maka dengan realisasi kinerja 83% kontribusi terhadap capaian kinerja akhir RPJM yaitu 92,22% sehingga untuk mencapai 100% tersisa 7,78%.

Adapun beberapa faktor yang mendukung terhadap pencapaian melebihi target adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 menetapkan 4 prioritas pembangunan yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Insfrastruktur dan Pariwisata
2. Salah satu aplikasi dari kebijakan prioritas pembangunan di bidang Pendidikan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran, berisi Pogram Pangandaran Madani yang didalamnya terdapat dua kegiatan yaitu : Kegiatan Pangandaran Mengaji dan Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan karakter Peserta Didik.

Meskipun indikator sarana persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik telah mencapai melebihi target, masih terdapat faktor pendukung yang masih dapat ditingkatkan, yaitu pada Program Pangandaran Madani yang berkaitan dengan Pangandaran Mengaji, koordinasi dan evaluasi dari kegiatan tersebut harus ditingkatkan dengan cara membentuk TIM Evaluator dengan Anggaran tersendiri.

### Analisis Efektivitas dan Efisiensi

#### a. Perhitungan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran

Pada sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan denga indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik mempunyai Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.12.957.276.250., realisasi anggaran Tahun 2019 yaitu sebesar Rp.4.482.511.500.,

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{4.482.511.500}{12.957.276.250} \times 100 \\ &= 34,59\% \end{aligned}$$

#### b. Sisa Pagu Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Sisa Pagu Anggaran} &= \text{pagu anggaran} - \text{realisasi} \\ &= \text{Rp.12.957.276.250} - \text{Rp.4.482.511.500} \\ &= \text{Rp.8.474.764.750.}, \end{aligned}$$

#### c. Analisa Efektifitas dan Efisiensi

Pada sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik memiliki sisa anggaran sebesar Rp.8.474.764.750., dikarenakan

Pada Anggaran 2018 pagu anggaran untuk sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp.12.432.907.000., dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.414.480.050

$$\begin{aligned}
\text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\
&= \frac{12.414.480.050}{12.432.907.000} \times 100 \\
&= 99,85\%
\end{aligned}$$

Sehingga memiliki

$$\begin{aligned}
\text{Sisa Pagu Anggaran} &= \text{pagu anggaran} - \text{realisasi} \\
&= \text{Rp. } 12.432.907.000 - \text{Rp. } 12.414.480.050 \\
&= \text{Rp. } 18.426.950.,
\end{aligned}$$

Pada sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik telah mencapai target yaitu 83% dari target 75% dengan capaian kinerja sebesar 110,66% dan memiliki tingkat capaian realisasi anggaran 34,59% dengan Sisa Pagu Anggran Rp.8.474.764.750., maka dari itu dapat dikatakan bahwa sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik yaitu efekti dan effesien.

**Tabel 3.57**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10**  
**Meningkatnya Kesatuan Bangsa**

| INDIKATOR SASARAN             |                                                   | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                                   |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan | Angka  | 11         | 1         | 191                 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                   |        |            |           | 191                 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Kesatuan Bangsa** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran mencapai melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 191% atau dikategorikan sangat baik.

Untuk pengukuran Indikator Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Pangandaran sepanjang tahun 2019 telah terjadi 1 kali konflik yang diakibatkan perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan di wilayah Dusun Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi, yaitu adanya kejadian penulisan terhadap 22 buah Al-Qur'an dengan tulisan bernada menghina organisasi NU (Nahdatul Ulama) ditemukan di Mesjid Al Hidayah Dusun Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi.

Atas dasar kejadian tersebut, realisasi indikator konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan telah mencapai melebihi dari target yang ditetapkan. Maka untuk menghitung capaian Indikator Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan digunakan formula sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

$Capaian = \frac{1 - (1 - 11)}{11} \times 100\% = 191 \%$

Adapun perbandingan kejadian Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.58**  
**Perbandingan Realisasi Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian Realisasi |
|-------|--------|-----------|-------------------|
| 2018  | 12     | 1         | 191,67            |
| 2019  | 11     | 1         | 191               |

Dibandingkan tahun 2018, terjadi percepatan capaian realisasi sebesar 0,67%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kejadian berlatar belakang suku, ras, dan antara golongan dan perkembangan kelompok radikal di kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 tidak lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Percepatan tersebut terjadi akibat masih tingginya sikap toleransi antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dan kecepatan penanganan masalah-masalah oleh pihak Pemerintah setempat (Kecamatan dan Desa) dan tokoh masyarakat apabila terjadi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.



Berdasarkan target akhir RPJMD, indikator konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan adalah sejumlah 8. Dengan melihat pengukurannya menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka realisasi capaian saat ini (tahun 2019), sebesar 1 maka capaian tersebut telah jauh melewati target akhir periode RPJMD. Namun indikator konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan ini



berbeda dibandingkan dengan indikator lainnya, karena apabila tanpa ada upaya untuk meningkatkan atau bahkan mempertahankan realisasi ini, tidak mustahil capaian tersebut dapat menurun kembali.

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Telah dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan bela negara bagi generasi muda di Kabupaten Pangandaran termasuk Ormas, LSM sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan pada masyarakat di Kabupaten Pangandaran
- c. Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Fasilitasi kegiatan KOMINDA.

**Tabel 3.59**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11**  
**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi**

| INDIKATOR SASARAN             |                                                | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                                |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu | Persen | 81         | 82,10     | 101,36              |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                                |        |            |           | 101,36              |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran mencapai melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 101,36% atau dikategorikan baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**

Nilai realisasi indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu diperoleh dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Pangandaran dengan data sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Masyarakat\ Yang\ Menyalurkan\ Hak\ Pilih}{Jumlah\ Seluruh\ Masyarakat\ Yang\ Memiliki\ Hak\ Pilih} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Pangandaran diperoleh data Jumlah masyarakat yang menyalurkan Hak pilih sebanyak 1.331.437 orang sementara jumlah seluruh masyarakat yang memiliki Hak pilih sebanyak 1.621.710 orang.

**Tabel 3.60**  
**Rekapitulasi Perolehan Suara dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

| INDIKATOR SASARAN         |                                                | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|
|                           |                                                |        | TARGET     | REALISASI |                 |
| 1                         | Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu | Persen | 81%        |           |                 |
|                           | • Pemilu Presiden dan Wakil Presiden           | Persen |            | 82,08     |                 |
|                           | • Pemilu Legislatif (DPRD) Kabupaten           | Persen |            | 82,13     |                 |
|                           | • Pemilu DPD                                   | Persen |            | 82,01     |                 |
|                           | • Pemilu DPR RI                                | Persen |            | 82,19     |                 |
|                           | • Pemilu DPRD Provinsi                         | Persen |            | 82,08     |                 |
|                           | Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu | Persen |            | 82,10     |                 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                                                |        |            |           | 101,36%         |

Sumber : KPU Kabupaten Pangandaran, 2019. Diolah

Dari data tersebut diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

*Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu* =  $\frac{1.331.437}{1.621.710} \times 100\% = 82,10 \%$

Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja dari indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yaitu :

Capain Kinerja =  $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

Capaian Kinerja =  $\frac{82,10}{81} \times 100\% = 101,36\%$

Apabila dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.61**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan / Perlambatan |
|-------|--------|-----------|--------------------------|
| 2018  | 80     | 79,04     | 0,96                     |
| 2019  | 81     | 82,10     | 1,1                      |

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat pada tahun 2018 terjadi perlambatan sebesar 0,96%. Hal ini terjadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, ada anggapan masyarakat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur rentangnya jauh terhadap masyarakat secara langsung dibandingkan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini berakibat banyak masyarakat Kabupaten Pangandaran tidak menyalurkan hak pilihnya, terutama yang berdomisili di luar Kabupaten Pangandaran.

Namun berbeda dengan kondisi tahun 2019 yang datanya diambil dari pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR. DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pangandaran. Masyarakat merasa berkepentingan terhadap wakil-wakil mereka dan Presiden/Wakil Presiden yang diharapkan. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat sehingga dapat mencapai melebihi target dan terjadi percepatan sebesar 1,1%.

Berdasarkan target akhir RPJMD, indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu adalah sebesar 82%, Melihat capaian saat ini (tahun 2019), realisasi capaian tersebut telah terlewati, yaitu sebesar 82,10%. Namun indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu ini berbeda dibandingkan dengan indikator lainnya, karena apabila tanpa ada upaya untuk meningkatkan atau bahkan mempertahankan realisasi capaian, tidak mustahil persentase tersebut dapat menurun kembali.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam Pemilu apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga masih lebih tinggi. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.62**  
**Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**

| No | Nama Pemilihan Umum                | Kabupaten Ciamis | Kota Banjar   | Kabupaten Pangandaran |
|----|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 1. | Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | 80,57%           | 81,05%        | 82,19%                |
| 2. | Pemilu DPRD Kab/Kota               | 80,33%           | 80,67%        | 82,01%                |
| 3. | Pemilu DPRD Provinsi               | 80,41%           | 80,80%        | 82,08%                |
| 4. | Pemilu DPR RI                      | 80,41%           | 80,80%        | 82,08%                |
| 5. | Pemilu DPD                         | 80,51%           | 80,91%        | 82,13%                |
|    | <b>Rata-Rata</b>                   | <b>80,44%</b>    | <b>80,84%</b> | <b>82,10%</b>         |

*Sumber Data: KPU Kota Banjar, KPU Kabupaten Ciamis, KPU Kabupaten Pangandaran, 2019*

Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu diantaranya :

1. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak pilih
2. Kinerja pelaksana yang maksimal dari tingkat Kabupaten sampai dengan PPS

Meskipun pada tahun 2019 telah mencapai melebihi target, namun masih tetap diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan cara meningkatkan sosialisasi secara masif terkait pendidikan politik bagi masyarakat.

**Tabel 3.63**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12**  
**Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat**

| INDIKATOR SASARAN                    |                                  | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                                      |                                  |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                                    | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 67,67      | 68,21     | 100,80              |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b> |                                  |        |            |           | 100,80              |

Dari tabel di atas **dapat** diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang tercapai melebihi target kinerja. Dengan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100,80% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai realisasi capaian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis dengan target indikator Tahun 2019 sebesar 67,67 poin dan realisasinya sebesar 68,21 poin dengan capaian kinerja sebesar 100,80% yang diperoleh dari hitungan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{68,21}{67,67} \times 100\% = 100,80\%$$

Realisasi IPM Kabupaten Pangandaran sebesar 68,21, menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia Sedang, yaitu capaian IPM antara 60 – 70.

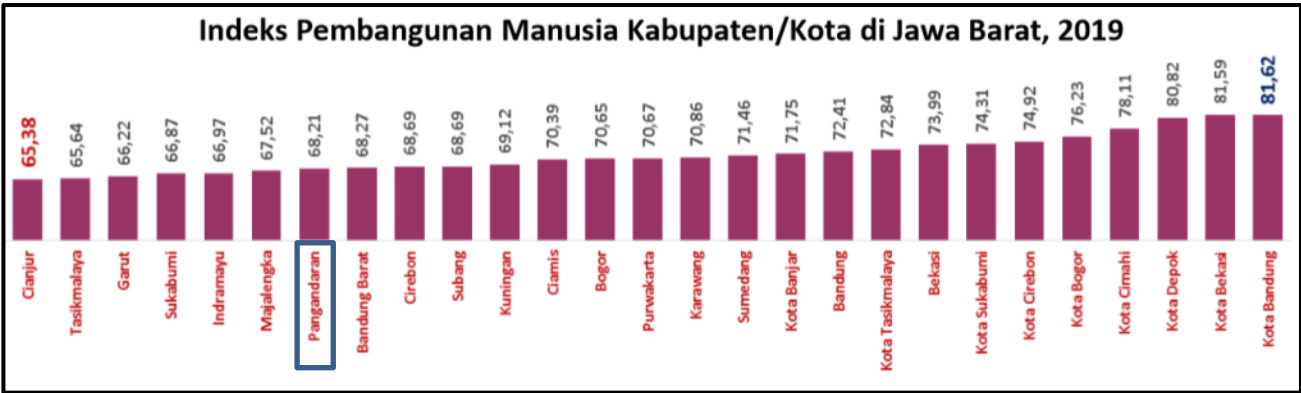
**Tabel 3.64**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2018  | 67,44  | 67,44     | 0                           |
| 2019  | 67,67  | 68,21     | 0,54                        |

Berdasarkan data tersebut maka pada tahun 2019 IPM Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan sebesar 0,77 poin, dan terdapat percepatan sebesar 0,54 poin dibandingkan tahun 2018. Hal inilah yang patut dibanggakan dan dipertahankan, bahkan harus terus ditingkatkan, sehingga Kabupaten Pangandaran mampu sejajar dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Jawa Barat. Adanya percepatan ini disebabkan adanya kebijakan Bupati/Wakil Bupati Pangandaran yang fokus dan menjadikan prioritas terhadap 4 (empat) bidang pembangunan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata. Bidang pembangunan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau percepatan IPM di Kabupaten Pangandaran.

Berikut disajikan perbandingan IPM di lingkup Provinsi Jawa Barat :

**Gambar 3.5**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,03, maka Kabupaten Pangandaran masih berada jauh di bawahnya, bahkan dengan IPM Nasional pun sebesar 71,9, Kabupaten Pangandaran masih di bawah dengan capaian IPM hanya 68,21. Namun meskipun terbilang kabupaten baru, namun masih terdapat 6 kabupaten yang usianya sudah lama masih berada di bawah IPM Kabupaten Pangandaran, yaitu Kabupaten Ciajur, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Indramayu dan Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan target akhir periode RPJMD, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 68,78. Maka untuk mencapai terget tersebut masih terdapat selisih sebesar 0,57, yaitu diperoleh dengan cara target akhir RPJMD dikurangi dengan realisasi saat ini (2019). Meski dilihat secara angka hanya 0,57 lagi, namun dalam prakteknya perlu upaya sungguh-sungguh, terutama meningkatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan IPM, yakni Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat.

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya program “Pangandaran Hebat” berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat, bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggratiskan biaya pendidikan sampai dengan SLTA bagi siswa yang orang tuanya berpenduduk/KTP Kabupaten Pangandaran.
- b. Program pelayanan kesehatan dasar Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018. Seluruh warga yang memiliki KTP Kabupaten Pangandaran gratis berobat di puskesmas dan untuk pengobatan lanjutan Kabupaten Pangandaran dengan menyediakan Jaminan Kesehatan Kertawaluya.
- c. Pembangunan sarana penunjang pendidikan dan kesehatan seperti program pembangunan/rehabilitasi sekolah, pembangunan puskesmas (sebanyak 9 puskesmas) dan sarana/prasarana penunjang lainnya.
- d. Peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan ditandai adanya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Pangandaran.

**Tabel 3.65**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13**  
**Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk**

| INDIKATOR SASARAN             |                                            | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                            |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Persen | 0,57       | 0,528     | 107,37              |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                            |        |            |           | 107,37              |

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2019

Dari tabel di atas dapat **diketahui** bahwa sasaran **Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai melebihi target kinerja, dengan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 107,37% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

- 1. Untuk pengukuran Indikator Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung capaian kinerja sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{0,57 - (0,528 - 0,57)}{0,57} \times 100\% = 107,37\%$$

Dengan membandingkan antara target sebesar 0,57 dan realisasi sebesar 0,528, maka pada tahun 2019 indikator Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Pangandaran dapat mencapai melebihi target dengan capaian sebesar 107,37%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.66**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2018  | 0,57   | 0,529     | 0                           |
| 2019  | 0,57   | 0,528     | 0,042                       |

Berdasarkan data tersebut maka pada tahun 2019 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan (dapat menekan LPP) sebesar 0,001 persen, dan terdapat percepatan sebesar 0,042 persen dibandingkan tahun 2018. Dalam terget RPJMD Kabupaten Pangandaran, setiap tahun fokus untuk mempertahankan LPP agar paling tidak tetap atau bahkan kalau bisa berkurang. Percepatan sebesar 0,042 persen dipengaruhi oleh gencarnya kegiatan program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan melibatkan langsung para petugas dan kader-kader yang ada di setiap desa.

Capaian Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Pangandaran sebesar 0,528 berada jauh di bawah Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat 2018-2019 sebesar sebesar 1,30. Demikian pula bila dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat Nasional sebesar 1,15 masih di atas angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan berdasarkan target akhir periode RPJMD, pada tahun 2021 indikator Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) memiliki target sebesar 0,57. Ini berarti terdapat selisih percepatan sebesar 0,042 bila dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2019.

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Kepala Daerah terhadap Program Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Misi 5 yakni “Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing”;
2. Dukungan sarana prasarana cukup memadai baik dari tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten;
3. Mitra kerja dengan lintas sektoral dan Institusi Masyarakat Pedesaan sangat baik;
4. Partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap Program KB sangat tinggi.

**Tabel 3.67**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14**  
**Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender**

| INDIKATOR SASARAN             |                                  | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                  |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 65,67      | 69,20 *   | 105,38              |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                  |        |            |           | -                   |

\* Data terakhir IDG tahun 2018 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020)

Dari tabel di atas dapat **diketahui** bahwa sasaran **Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai melebihi target kinerja, dengan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 105,38% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Nilai realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) datanya diperoleh dari BPS Kabupaten Ciamis dan data terakhir yang dirilis adalah tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pangandaran sebesar 69,20. Untuk mengetahui capaiannya dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

Capain Kinerja
=
$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Capaian Kinerja
=
$$\frac{69,20}{65,67} \times 100\% = 105,38\%$$

Dengan membandingkan antara target sebesar 65,67 dan realisasi sebesar 69,20, maka pada tahun 2019 indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pangandaran dapat mencapai melebihi target dengan capaian sebesar 105,38%. Dan apabila dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.68**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan / Perlambatan |
|-------|--------|-----------|--------------------------|
| 2018  | 65,45  | 65,45     | 0                        |
| 2019  | 65,67  | 69,20     | 3,53                     |

Berdasarkan data tersebut maka pada tahun 2019 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pangandaran mengalami percepatan sebesar 3,53 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembinaan yang gencar terhadap Organisasi Perempuan (DW, GOW, IKIAD, IWAPI, KPPI) diduga merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap percepatan tersebut dan akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

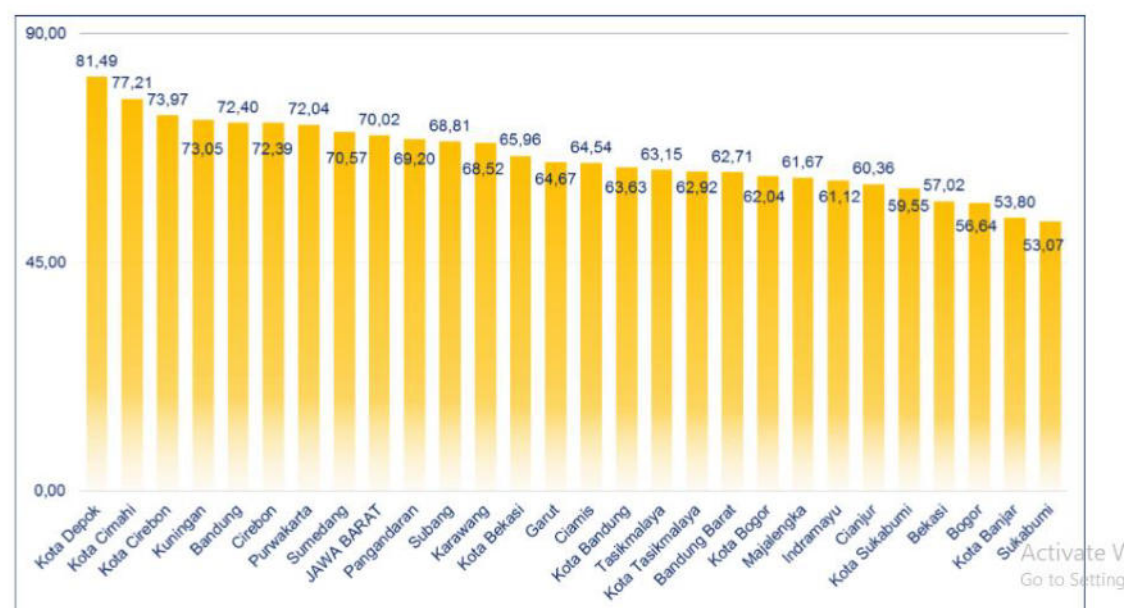
Dalam terget akhir periode RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021, target Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 66,55 telah terlampaui dengan capaian realisasi tahun 2019, sehingga untuk tahun mendatang hanya tinggal mempertahankan dan tetap berupaya untuk ditingkatkan.



Berikut disajikan gambaran capaian Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 berdasarkan data tahun 2018 :

Gambar 3.6

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2018



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Sementara untuk Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pangandaran sebesar 69,20, masih lebih rendah setahap di bawah capaian Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 sebesar 70,20 (data terakhir tahun 2018).

Beberapa faktor yang mendukung terhadap keberhasilan pencapaian target Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pangandaran, antara lain :

- 1. Pembinaan Organisasi Perempuan dalam kualitas dan kuantitasnya agar wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam Lembaga Legislatif sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pekerja perempuan untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional;
- 3. Fasilitasi usaha bagi perempuan agar dapat hidup mandiri dalam kemitraaan usaha melalui pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok usaha.

Tabel 3.69  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15  
Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga

| INDIKATOR SASARAN         |                                 | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA |
|---------------------------|---------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|
|                           |                                 |        | TARGET     | REALISASI |                 |
| 1                         | Indeks Pembangunan Kepemudaan   | Indeks | 0,25       | 0,539     | 215,6%          |
| 2                         | Indeks Pembangunan Keolahragaan | Indeks | 0,75       | 0,75      | 100%            |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                                 |        |            |           | 157,8%          |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga** memiliki 2 indikator kinerja sasaran dengan rincian: 1 (satu) indikator



sasaran mencapai melebihi target dan 1 (satu) indikator sasaran mencapai target dan Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 157,8% dikategorikan sangat baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Indeks Pembangunan Kepemudaan**

##### **1. Perhitungan realisasi capaian kinerja**

Indeks Pembangunan Kepemudaan, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\text{IPP} = 0,34 (\text{Indeks Pendidikan}) + 0,34 (\text{Indeks Kelayakan Hidup}) + 0,2 (\text{Indeks Kesehatan}) + 0,12 (\text{Indeks Partisipasi Pemuda})$$

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran diperoleh informasi sebagai berikut :

Indeks Pendidikan = 59,07 dikonversi dalam skala 1 menjadi 0,59 (merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS)

Indeks Kelayakan Hidup = 0,234

Indeks Kesehatan = 78,65 dikonversi dalam skala 1 menjadi 0,787 (merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS)

Indeks Partisipasi Pemuda = 0,85.

Selanjutnya diperoleh hasil perhitungan IPP sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IPP} &= 0,34 (0,59) + 0,34 (0,236) + 0,2 (0,787) + 0,12 (0,85) \\ &= 0,2 + 0,08 + 0,157 + 0,102 \\ &= 0,539 \text{ dikonversi dalam skala 100 menjadi } 53,9 \end{aligned}$$

Uraian data perhitungan unsur untuk Indeks Pembangunan Keolahragaan, diperoleh sebagai berikut :

##### **a. Indeks Pendidikan**

Data diperoleh dari BPS Kabupaten Ciamis tahun 2019 yaitu sebesar 59,07

##### **b. Indeks Kelayakan Hidup**

Indek Kelayakan Hidup terdiri dari 3 dimensi yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pemuda Miskin.

##### **a) Dimensi Tingkat Pengangguran terbuka Usia Pemuda yaitu 9,09 dikonversi dalam skala 1 = 0,091**

Pengangguran terbuka terdiri dari meraka yang tidak mempunyai pekerjaan atau usaha dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.usaha dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan.usaha dan tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah mempunyai pekerjaan atau usaha, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran terbuka adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kontek ini yaitu tingkat pengangguran terbuka usia pemuda.

Penduduk Pemuda menurut Undang – Undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia dari 16 (enam belas) samapai 30 (tiga

puluh) tahun. Di bawah ini terdapat data pendduk menurut usia bersumber dari Disdukcapil Kabupaten Pangandaran yang menunjukan seberapa banyak penduduk pemuda yang ada di kabupaten Pangandaran.

**Tabel 3.70**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| NO            | KECAMATAN     | PENDUDUK USIA 16 – 30 TAHUN (JIWA) | KETERANGAN |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------|
| 1             | PARIGI        | 9.371                              |            |
| 2             | CIJULANG      | 5.432                              |            |
| 3             | CIMERAK       | 10.066                             |            |
| 4             | CIGUGUR       | 5.063                              |            |
| 5             | LANGKAPLANCAR | 11.881                             |            |
| 6             | MANGUNJAYA    | 7.620                              |            |
| 7             | PADAHERANG    | 15.306                             |            |
| 8             | KALIPUCANG    | 8.706                              |            |
| 9             | PANGANDARAN   | 13.340                             |            |
| 10            | SIDAMULIH     | 5.967                              |            |
| <b>JUMLAH</b> |               | <b>92.752</b>                      |            |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangandaran, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pemuda sebanyak 92.752 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Pemuda =  $\frac{\text{Jumlah Pemuda Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja pemuda}} \times 100$

Jumlah angkatan kerja pemuda

=  $\frac{6.793}{74.663} \times 100$

74.663

= 9,09 dikonversi dalam skala 1 = 0,091

Jumlah Pemuda Pengangguran diperoleh dari angkatan kerja usia pemuda dikurangi pemuda yang bekerja. Data tersebut dapat dilihat pada tabel Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Usia dan tabel Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Usia, sebagai berikut :

**Tabel 3.71**  
**Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Usia**

| Usia          | Penduduk Angkatan Kerja |
|---------------|-------------------------|
| 15-19         | 8.306                   |
| 20-24         | 21.962                  |
| 25-29         | 21.368                  |
| 30-34         | 23.027                  |
| 35-39         | 25.143                  |
| 40-44         | 29.349                  |
| 45-49         | 30.942                  |
| 50-54         | 24.239                  |
| 55-59         | 19.529                  |
| 60-64         | 15.366                  |
| 65+           | 20.944                  |
| <b>Jumlah</b> | <b>240.175</b>          |

Sumber : Buku Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat-BPS, 2018

Dari tabel diatas yang termasuk angkatan kerja usia pemuda yaitu dari usia 15 – 34 tahun, maka dapat diperoleh partisipasi angkatan kerja usia pemuda sebanyak 74.663 orang.

Untuk memperoleh data jumlah penduduk yang bekerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.72**  
**Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Usia**

| Usia          | Penduduk Yang Bekerja |
|---------------|-----------------------|
| 15-19         | 5.000                 |
| 20-24         | 19.648                |
| 25-29         | 20.195                |
| 30-34         | 23.027                |
| 35-39         | 24.210                |
| 40-44         | 28.830                |
| 45-49         | 30.942                |
| 50-54         | 24.239                |
| 55-59         | 19.181                |
| 60-64         | 15.366                |
| 65+           | 20.944                |
| <b>Jumlah</b> | <b>231.582</b>        |

Sumber : Buku Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat-BPS, 2018

Dari tabel diatas yang termasuk penduduk pemuda yang bekerja yaitu dari usia 15 – 34 tahun, maka dapat diperoleh penduduk pemuda yang bekerja sebanyak 67.870 orang.

Setelah diperoleh kedua data yaitu partisipasi angkatan kerja usia pemuda sebanyak 74.663 orang dan jumlah penduduk pemuda yang bekerja sebanyak 67.870 orang, maka dapat dihitung jumlah pemuda pengangguran sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Pemuda Pengangguran} &= \text{angkatan kerja usia pemuda} - \text{pemuda yang bekerja} \\ &= 74.663 - 67.870 \\ &= 6.793 \end{aligned}$$

b) Dimensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia Pemuda yaitu = 80,49 dikonversi dalam skala 1 = 0,8

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah presentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam kontek ini yaitu tingkat pengangguran terbuka usia pemuda.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia Pemuda} &= \frac{\text{jumlah angkatan kerja pemuda}}{\text{Jumlah penduduk usia pemuda}} \times 100 \\ &= \frac{74.663}{92.752} \times 100 \\ &= 80,49 \text{ dikonversi dalam skala } 1 = 0,8 \end{aligned}$$

Jumlah angkatan kerja pemuda dapat dilihat pada tabel Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Usia yaitu sebanyak 74.663 sedangkan Penduduk usia

pemuda dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur yaitu sebanyak 92.752.

c) Dimensi Tingkat Pemuda Miskin yaitu 9,09 dikonversi dalam skala 1 = 0,091

Tingkat Pemuda Miskin diasumsikan pada Tingkat Pengangguran terbuka Usia Pemuda. Sehingga Tingkat Pemuda Miskin sama dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Pemuda

Selanjutnya dihitung Indeks Kelayakan Hidup sebagai berikut :

Indeks Kelayakan Hidup = 0,31 (Tingkat Pengangguran terbuka) + 0,28 (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) + 0,41 (Tingkat Pemuda Miskin)

= 0,31 (0,091) + 0,28 (0,8) + 0,41 (0,091)

= 0,028 + 0,224 + 0,037

= 0,289

c. Indeks Kesehatan

Data diperoleh dari BPS Kabupaten Ciamis tahun 2019 yaitu sebesar 78,65

d. Indeks Partisipasi Pemuda

Indeks Partisipasi Pemuda diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Indeks Partisipasi Pemuda =  $\frac{TPP - Min}{Mak - Min}$

TPP yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda pada Organisasi Kepemudaan / Masyarakat dengan formula :

TPP =  $\frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi}}{\text{Jumlah Penduduk Pemuda}} \times 100$

Untuk memperoleh data jumlah pemuda yang aktif berorganisasi diperoleh data dari KNPI Kabupaten Pangandaran, Karang Taruna Kabupaten Pangandaran, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

**Tabel 3.73**  
**Data Pemuda yang Aktif Berorganisasi**

| NO     | ORGANISASI                          | JUMLAH ORANG |
|--------|-------------------------------------|--------------|
| 1      | KNPI                                | 3.500        |
| 2      | Karang Taruna                       | 27.900       |
| 3      | Forum Remaja Palang Merah Indonesia | 16.350       |
| 4      | Kwartir Cabang Pramuka              | 30.690       |
| JUMLAH |                                     | 78.440       |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah yang aktif berorganisasi sebanyak 78.440 orang.

Untuk memperoleh nilai Jumlah Penduduk Pemuda dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur yaitu sebanyak 92.752

Setelah diperoleh kedua data yaitu jumlah pemuda yang aktif berorganisasi sebanyak 78.440 orang dan jumlah penduduk pemuda sebanyak 92.752 orang, maka dapat dihitung TPP sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TPP} &= \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi}}{\text{Jumlah Penduduk Pemuda}} \times 100 \\ &= \frac{78.440}{92.752} \times 100 \\ &= 84,56\% = 85\% \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat dihitung Indeks Partisipasi Pemuda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Partisipasi Pemuda} &= \frac{\text{TPP} - \text{Min}}{\text{Mak} - \text{Min}} \\ &= \frac{85 - 0}{100 - 0} \\ &= \frac{85}{100} \\ &= 0,85 \end{aligned}$$

Keterangan: nilai Mak yaitu 100 dan min yaitu 0 bersumber dari KEMENPORA

Dari perhitungan diatas maka realisasi sasaran kinerja tercapai yaitu 0,539 dari target 0,25 atau dengan capaian 215,6%

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{0,539}{0,25} \times 100 = 215,6\% \end{aligned}$$

Sehingga tingkat capain Tahun 2019 yaitu sebesar 215,6%

2. Analisa Capaian Kinerja

a. Hasil Perhitungan Capaian Kinerja

Dari pehitungan tingkat capaian kinerja diatas untuk Tahun 2019 dikatakan mencapai melebihi target, dikarenakan memiliki tingkat capain kinerja 215,6%

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

**Tabel 3.74**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|-----------------------------|
| 2018  | 0,24   | 0,509     | 212%    | 0,269                       |
| 2019  | 0,25   | 0,539     | 215,6%  | 0,289                       |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Indeks Pembangunan Kepemudaan Tahun 2019 mengalami percepatan dari Tahun 2018 sebesar 0,269 atau capaian sebesar 212% sedangkan Tahun 2019 sebesar 0,289 atau capaian sebesar 215,6% sehingga terdapat selisih percepatan sebesar 0,02.

c. Faktor Pendukung Percepatan Tingkatan Capaian Kinerja

- 1) Sosialisasi tentang kepemudaan yang lebih menyeluruh ke tiap kecamatan
- 2) Kegiatan kepemudaan dilaksanakan bergantian tempat ke setiap kecamatan tidak monoton selalu di area kota, sebagai contoh dalam kegiatan seleksi Paskibraka dan Pramuka sehingga memunculkan minat pada pelajar untuk mengikuti organisasi

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD

**Tabel 3.75**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD**

| No | Sasaran                                   | Indikator Kinerja Utama       | Target 2019 | Realisasi Kinerja 2019 | Target Periode akhir RPJMD | Capaian Kinerja Terhadap Akhir RPJMD (%) |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga | Indeks Pembanguana Kepemudaan | 0,25        | 0,539                  | 0,27                       | 199,63                                   |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target periode akhir RPJM yaitu 0,27 maka dengan realisasi kinerja 0,539 kontribusi terhadap capaian kinerja akhir RPJM yaitu 199,63% sehingga telah melebihi 100% yaitu sebesar 99,63%.

4. Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal di antaranya :

- a. Adanya kenaikan indeks kesehatan yang dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu lingkungan, prilaku masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan.
  - b. Adanya kenaikan Indeks Pendidikan dengan adanya Program Pangandaran Hebat
  - c. Adanya Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung Indeks Pembangunan Pemuda
  - d. Adanya Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang mendukung Indeks Kelayakan Hidup
5. Hal – hal yang masih perlu ditingkatkan atas pendukung keberhasilan
- Kedepan seyogyanya ada koordinasi denga SKPD lain yang berkaitan erat denga kepemudaaan misalnya dengan Disnakertrans, KB, DISDAGKOPUMKM, Dinas Kesehatan.
6. Efektivitas dan Efisiensi

a. Perhitungan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran

Pada sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda & Olahraga denga indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembanguana Kepemudaan mempunyai Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 468.400.000., realisasi anggaran Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 464.940.500.,

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{464.940.500}{468.400.000} \times 100 \\ &= 99,26\% \end{aligned}$$

b. Sisa Pagu Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Sisa Pagu Anggaran} &= \text{pagu anggaran} - \text{realisasi} \\ &= \text{Rp. 468.400.000} - \text{Rp. 464.940.500} \\ &= \text{Rp.3.459.500} \end{aligned}$$

c. Analisa Efektifitas dan Efesiensi

Pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembanguana Kepemudaan memiliki sisa anggaran sebesar Rp. 3.459.500., dikarenakan

Pada Anggaran 2018 pagu anggaran untuk sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp.520.466.000., dengan realisasi anggaran sebesar Rp.517.407.000

$$\begin{aligned}\text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{517.407.000}{520.466.000} \times 100 \\ &= 99,41\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Sisa Pagu Anggaran} &= \text{pagu anggaran} - \text{realisasi} \\ &= \text{Rp. 520.466.000} - \text{Rp. 517.407.000} \\ &= \text{Rp. 3.059.000.},\end{aligned}$$

Pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembanguana Kepemudaan telah mencapai target yaitu 0,539 dari target 0,25 dengan capaian kinerja sebesar 215,6% dan memiliki tingkat capaian realisasi anggaran 99,26% dengan Sisa Pagu Anggran Rp. 3.459.500., maka dari itu dapat dikatakan bahwa sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembanguana Kepemudaan yaitu efektifitas dan efesiensi dapat dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja mencapai target dengan efesiensi 99,41 maka tahun 2019 capaian kinerja tercapaian dengan efesiensi 99,26 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembanguana Kepemudaan termasuk pada efektifitas dan efesiensi.

**B. Indeks Pembangunan Keolahragaan**

Nilai realisasi capaian Indeks Pembangunan Keolahragaan diperoleh melalui formula :

1. Perhitungan realisasi capaian kinerja

$$\text{IPK} = 0,25 (\text{Indeks Partisipasi Keolahragaan}) + 0,25 (\text{Indeks Ruang Terbuka}) + 0,25 (\text{Indeks Kebugaran}) + 0,25 (\text{Indeks SDM})$$

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

$$\text{Indeks Partisipasi Keolahragaan} = 0,77$$

$$\text{Indeks Ruang Terbuka} = 0,489$$

$$\text{Indeks Kebugaran} = 0,91$$

$$\text{Indeks SDM} = 0,885$$

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$IPK = 0,25 \text{ (Indeks Partisipasi Keolahragaan)} + 0,25 \text{ (Indeks Ruang Terbuka)} + 0,25 \text{ (Indeks Kebugaran)} + 0,25 \text{ (Indeks SDM)}$$

$$IPK = 0,25 (0,77) + 0,25 (0,489) + 0,25 (0,91) + 0,25 (0,885)$$

$$= 0,193 + 0,122 + 0,218 + 0,221$$

$$= 0,75$$

Uraian data perhitungan untuk unsur Indeks Pembangunan Keolahragaan, diperoleh sebagai berikut :

a. Indeks Partisipasi Keolahragaan

Indeks Partisipasi Keolahragaan diperoleh melalui formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Partisipasi Keolahragaan} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Min}}{\text{Mak} - \text{Min}}$$

Nilai Aktual yaitu Jumlah Partisipasi Pemuda yang mengikuti Kegiatan Olahraga dengan formula:

$$\text{Nilai Aktual} = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berolahraga} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk Pemuda}}$$

Untuk memperoleh jumlah pemuda yang aktif berolahraga diperoleh data dari KONI Kabupaten Pangandaran, NPCI Kab. Pangandaran, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

**Table 3.76**  
**Pemuda yang Aktif Berolahraga**

| NO | NAMA CABOR                                    | JUMLAH | KET |
|----|-----------------------------------------------|--------|-----|
| 1  | (National Paralimpyc Committe Indonesia) NPCI | 22     |     |
| 2  | Tarung Drajat                                 | 16     |     |
| 3  | Pencak Silat                                  | 31     |     |
| 4  | Pordasi (Berkuda)                             | 21     |     |
| 5  | Bola Volly Pasir                              | 8      |     |
| 6  | Bulu Tangkis                                  | 15     |     |
| 7  | Catur                                         | 15     |     |
| 8  | Renang                                        | 34     |     |
| 9  | Polo Air                                      | 15     |     |
| 10 | Atletik                                       | 18     |     |
| 11 | Federasi Hockey                               | 25     |     |
| 12 | Tinju Amatir                                  | 10     |     |
| 13 | Dayung                                        | 21     |     |
| 14 | Angkat Berat Dan Binaraga                     | 15     |     |
| 15 | Karate                                        | 6      |     |
| 16 | Bola Basket                                   | 19     |     |
| 17 | Sepak Bola                                    | 38     |     |
| 18 | Selam                                         | 19     |     |
| 19 | Tenis Meja                                    | 19     |     |
| 20 | Sepak Takraw                                  | 14     |     |
| 21 | Sport Speda                                   | 24     |     |
| 22 | Biliar                                        | 13     |     |
| 23 | Taekwondo                                     | 13     |     |
| 24 | Drum Band                                     | 10     |     |
| 25 | Arum Jeram                                    | 14     |     |
| 26 | Wushu                                         | 33     |     |
| 27 | Persatuan Wanita Olahraga                     | 24     |     |
| 28 | Senam                                         | 9      |     |
| 29 | Federasi Air Sport                            | 11     |     |
| 30 | Jujitsu                                       | 13     |     |



| NO                                   | NAMA CABOR | JUMLAH        | KET |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----|
| 31                                   | Pelajar    | 52.730        |     |
| 32                                   | Senam      | 980           |     |
| 33                                   | sepak bola | 7.470         |     |
| 34                                   | Voli       | 8.562         |     |
| 35                                   | Sepeda     | 985           |     |
| <b>Jumlah yang aktif berolahraga</b> |            | <b>71.272</b> |     |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemuda yang aktif berolahraga sebanyak 71.272 orang

Untuk memperoleh nilai Jumlah Penduduk Pemuda dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur yaitu sebanyak 92.752. Setelah diperoleh kedua data yaitu jumlah pemuda yang aktif berolahraga sebanyak 71.272 orang dan jumlah penduduk pemuda sebanyak 92.752 orang, maka dapat dihitung nilai aktual sebagai berikut :

Nilai Aktual
= Jumlah pemuda yang aktif berolahraga x 100

Jumlah Penduduk Pemuda
=  $\frac{71.272}{92.752} \times 100$ 
= 76,84 = 77%

Dengan demikian untuk perhitungan Indeks Partisipasi Keolahragaan sebagai berikut :  
Indeks Partisipasi Keolahragaan = Nilai aktual – Min

Mak – Min

=  $\frac{77 - 0}{100 - 0}$

=  $\frac{77}{100}$

= 0,77

Keterangan : nilai 100 adalah nilai dan nilai 0 adalah nilai minimal yang bersumber dari KEMENPORA

b. Indeks Ruang Terbuka

Yang dimaksud ruang terbuka berdasarkan dari Lakip Kemenpora tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga
- b. Sengaja dirancang untuk kegiatan berolahraga
- c. Dapat diakses olah masyarakat luas

Berdasarkan hal tersebut, maka ruang terbuka di Kabupaten Pangandaran diperoleh data dari KONI Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 1) Jumlah lapang Voli       | 279 |
| 2) Jumlah lapang Sepak Bola | 93  |
| 3) Jumlah gor/gelanggang    | 107 |
| 4) Jumlah ruang Senam       | 10  |
| Total                       | 489 |

Selanjutnya dihitung Indeks Ruang terbuka sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Ruang Terbuka} &= \frac{\text{Jumlah Ruang Terbuka} - \text{minimal}}{\text{Maksimal} - \text{minimal}} \\
 &= \frac{489 - 0}{1000 - 0} \\
 &= 0,489
 \end{aligned}$$

Keterangan : 1000 adalah angka maksimal untuk konversi dalam skala 1

c. Indeks Kebugaran

Indeks kebugaran merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti maka dapat disimpulkan orang yang bugar adalah orang yang selalu aktif dalam berolahraga atau dapat dikatakan partisipasi pemuda yang aktif berolahraga yaitu sebanyak 86.700 (lihat Jumlah pada Tabel Pemuda yang Aktif Berolahraga).

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Kebugaran} &= \frac{\text{jumlah Pemuda yang Aktif Berolahraga} - \text{minimal}}{\text{Maksimal} - \text{minimal}} \\
 &= \frac{90.826 - 0}{100.000 - 0} \\
 &= 0,91
 \end{aligned}$$

d. Indeks SDM

Indeks SDM merujuk pada jumlah pelatih olahraga, guru pendidikan jasmani dan kesehatan dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah kabupaten. Maka diperoleh data (Sumber data : KONI Kabupaten Pangandaran) sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 1) Pelatih olahraga    | 210 |
| 2) Guru penjaskes      | 665 |
| 3) Instruktur olahraga | 10  |
| Jumlah                 | 885 |

Dengan demikian SDM yang ada di Kabupaten Pangandaran sebanyak 885 orang, selanjutnya dihitung Indeks SDM :

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks SDM} &= \frac{\text{jumlah SDM} - \text{minimal}}{\text{Maksimal} - \text{minimal}} \\
 &= \frac{885 - 0}{1000 - 0} \\
 &= 0,885
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas maka realisasi sasaran kinerja tercapai yaitu 0,81 dari target 0,75 atau dengan capaian 108%

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\
 &= \frac{0,75}{0,75} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Sehingga tingkat capain Tahun 2019 yaitu sebesar 100%

2. Analisa Capaian

a. Hasil Perhitungan Capaian Kinerja

Dari pehitungan tingkat capaian kinerja diatas untuk Tahun 2019 dikatakan berhasil, dikarenakan memiliki tingkat capain kinerja 100%

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

**Tabel 3.77**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Keolahragaan (IPK)**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|-----------------------------|
| 2018  | 0,70   | 0,674     | 96,29%  | 0,026                       |
| 2019  | 0,75   | 0,75      | 100%    | 0                           |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Indeks Pembangunan Keolahragaan Tahun 2018 mengalami perlambatan sebesar 0,026 atau capaiannya hanya sebesar 96,29% sedangkan Tahun 2019 juga tidak mengalami percepatan. Hanya bila dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar 0,076 pada tahun 2019.

c. Faktor Pendukung Percepatan Tingkatan Capaian Kinerja

- 1) Sosialisasi tentang Keolahragaan yang lebih menyeluruh ke tiap kecamatan
- 2) Kegiatan keolahragaan dilaksanakan bergantian tempat ke setiap kecamatan, sehingga tidak monoton. Sebagai contoh kegiatan olahraga tradisional yang dilaksanakan bergantian di kecamatan di setiap tahunnya

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD

**Tabel 3.78**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD**

| No | Sasaran                                         | Indiaor Kinerja<br>Utama              | Target | Realisas<br>i Kinerja<br>2019 | Target<br>Periode<br>akhir<br>RPJMD | Capaian<br>Kinerja<br>Terhadap Akhir<br>RPJMD (%) |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Daya<br>Saing Pemuda &<br>Olahraga | Indeks<br>Pembangunan<br>Keolahragaan | 0,75   | 0,75                          | 0,85                                | 88,23                                             |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target periode akhir RPJM yaitu 0,85 maka dengan realisasi kinerja 0,75 kontribusi terhadap capaian kinerja akhir RPJM yaitu 88,23% sehingga untuk mencapai 100% tersisa sebesar 11,77%.

4. Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. SDM yang semakin meningkat
- b. Pendataan lebih maksimal
- c. Masyarakat semakin sadar pentingnya berolahraga
- d. Koordinasi antara SKPD dengan induk – induk organisasi semakin terjalin baik

5. Hal – hal yang masih perlu ditingkatkan atas pendukung keberhasilan

- a. Dari Disdikpora berusaha mengakomodir dari masyarakat olahraga untuk pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan didalam forum Perangkat

Daerah Provinsi, semoga dapat terwujud dan keolahragaan di kabupaten Pangandaran lebih meningkat

6. Efektivitas dan Efisiensi

a. Perhitungan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran

Pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Keolahragaan mempunyai Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.069.452.000., realisasi anggaran Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.028.041.900.,

$$\begin{aligned}\text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{1.028.041.900}{1.069.452.000} \times 100 \\ &= 96,12\%\end{aligned}$$

b. Sisa Pagu Anggaran

$$\begin{aligned}\text{Sisa Pagu Anggaran} &= \text{pagu anggaran} - \text{realisasi} \\ &= \text{Rp. 1.069.452.000} - \text{Rp. 1.028.041.900} \\ &= \text{Rp. 41.410.100}\end{aligned}$$

c. Analisa Efektifitas dan Efisiensi

Pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Kepemudaan memiliki sisa anggaran sebesar Rp. 41.410.100., dikarenakan pada Anggaran 2018 pagu anggaran untuk sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.160.331.000., dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.032.344.000

$$\begin{aligned}\text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{1.032.344.000}{1.160.331.000} \times 100 \\ &= 88,96\%\end{aligned}$$

Sehingga memiliki

$$\begin{aligned}\text{Sisa Pagu Anggaran} &= \text{pagu anggaran} - \text{realisasi} \\ &= \text{Rp. 1.160.331.000} - \text{Rp. 1.032.344.000} \\ &= \text{Rp. 127.987.000.},\end{aligned}$$

Pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Keolahragaan telah mencapai target yaitu 0,81 dari target 0,75 dengan capaian kinerja sebesar 108% dan memiliki tingkat capaian realisasi anggaran 96,12% dengan Sisa Pagu Anggran Rp.41.410.100., maka dari itu dapat dikatakan bahwa sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Keolahragaan yaitu efektif dan efisien.

**Tabel 3.79**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16**  
**Menurunnya angka kemiskinan**

| INDIKATOR SASARAN             |                                       | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                       |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Persentase penurunan angka kemiskinan | Persen | 0,25       | 0,41      | 164                 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                       |        |            |           | 164                 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Menurunnya angka kemiskinan** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang tercapai melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 164% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penurunan angka kemiskinan

Persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Badan Pusat Statisttik (BPS) Kabupaten Ciamis, nilai realisasi capaian diperoleh sebagai berikut :

Angka kemiskinan tahun 2018 = 8,12

Angka kemiskinan tahun 2019 = 7,71

Penurunan angka kemiskinan = 8,12 – 7,71  
= 0,41

Persentase target Penurunan angka kemiskinan RPJMD = 0,25

Berdasarkan data tersebut dihitung capaian kinerja penurunan angka kemiskinan sebagai berikut :

Capain Kinerja
=
 $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

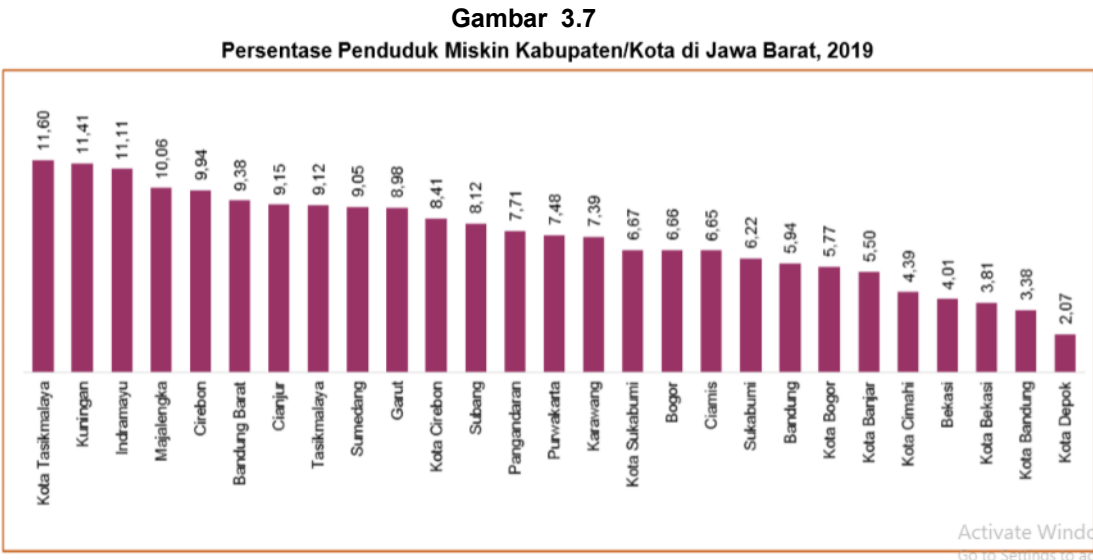
Capaian Kinerja
=
 $\frac{0,41}{0,25} \times 100\% = 164\%$

**Tabel 3.80**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Angka Kemiskinan**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan / Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|--------------------------|
| 2018  | 0,25   | 1,88      | 752%    | 1,63                     |
| 2019  | 0,25   | 0,41      | 164%    | 0,16                     |

Pada tahun 2018, persentase penurunan angka kemiskinan mengalami percepatan (penurunan angka kemiskinan) yang luar biasa sebesar 1,63% atau capaiannya sampai sebesar 752%. Namun pada tahun 2019 meskipun terjadi percepatan dari target sebesar 0,16 atau capaiannya 164%, terjadi perlambatan atau selisih sebesar 1,47 dari percepatan tahun 2018. Hal ini terjadi karena program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran masih menggunakan inovasi tahun sebelumnya, sehingga berimbas terhadap capaian dalam realisasi penurunan angka kemiskinan.

Untuk mengetahui pencapaian indikator penurunan kemiskinan di Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Dari tabel diatas menggambarkan kemiskinan di tingkat provinsi maupun Kabupaten Pangandaran dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan yang berarti baik jumlah maupun persentase kemiskinan semakin menurun yang berarti bersifat positif. Jumlah dan persentase kemiskinan di Kabupaten Pangandaran masih di atas Provinsi Jawa Barat namun jauh di bawah persentase kemiskinan nasional. Jumlah dan persentase kemiskinan di Kabupaten Pangandaran tercatat tahun 2015 (41.970 orang atau 10,76%), tahun 2016 (40.140 orang atau 10,23%), tahun 2017 (39.460 orang atau 10,00%), tahun 2018 (32.190 orang atau 8,12%), dan tahun 2019 (30.730 orang atau 7,71%).

Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 6,82 persen dengan jumlah penduduk miskin 3,38 juta jiwa. Sementara Persentase penduduk miskin secara nasional pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018 dengan Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018.

Target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran adalah sebesar 0,25% setiap tahunnya, sehingga pada akhir periode RPJMD apabila dijumlahkan keseluruhan memiliki target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,75%.

**Tabel 3.81**  
**Angka Kemiskinan Di Kabupaten Pangandaran**  
**(2018 – 2019)**

| 2018  | 2019  | Penurunan | Target RPJMD | Selisih |
|-------|-------|-----------|--------------|---------|
| 8,12% | 7,71% | 0,41%     | 0,75%        | 0,34%   |

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan target akhir periode RPJMD yang masih harus ditempuh adalah menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,34% lagi.

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target ditunjang oleh kebijakan Bupati Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat diantaranya berikut :

- a. Adanya program “Pangandaran Hebat” berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat, bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggratiskan biaya pendidikan sampai dengan SLTA bagi siswa yang orang tuanya berpenduduk/KTP Kabupaten Pangandaran.
- b. Program pelayanan kesehatan dasar Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018. Seluruh warga yang memiliki KTP Kabupaten Pangandaran gratis berobat di puskesmas dan untuk pengobatan lanjutan Kabupaten Pangandaran dengan menyediakan Jaminan Kesehatan Kertawaluya.
- c. Diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa, dimana Pemerintah Desa dapat memberi bantuan kepada masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 3.82**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17**  
**Menurunnya kesenjangan antar wilayah**

| INDIKATOR SASARAN             |             | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|-------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |             |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Indeks Gini | Indeks | 0,30       | 0,345*    | 115                 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |             |        |            |           | 115                 |

\* Data tahun 2018 (angka semetara)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Menurunnya kesenjangan antar wilayah** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang mencapai melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 115% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

**1. Indeks Gini**

Nilai realisasi capaian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2018 adalah sebesar 0,345 (angka sementara), karena data tahun 2019 sampai laporan disusun belum terbit. Nilai tersebut masih masuk dalam kriteria kesenjangan rendah < 0,40. Gini ratio Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 2015-2018 terlihat cenderung stabil masih < 0,40 walaupun tiap tahunnya nilai gini rasionya bervariasi.

Pengukuran Indikator indeks gini menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Artinya semakin besar nilai rasio indeks gini, semakin besar angka kesenjangan atau ketimpangan.

Berdasarkan data tersebut dapat dihitung capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0,345}{0,3} \times 100\% = 115\%$$

**Tabel 3.83**

**Nilai Indeks Gini Ratio Kabupaten Pangandaran**

**Periode Tahun 2016-2018**

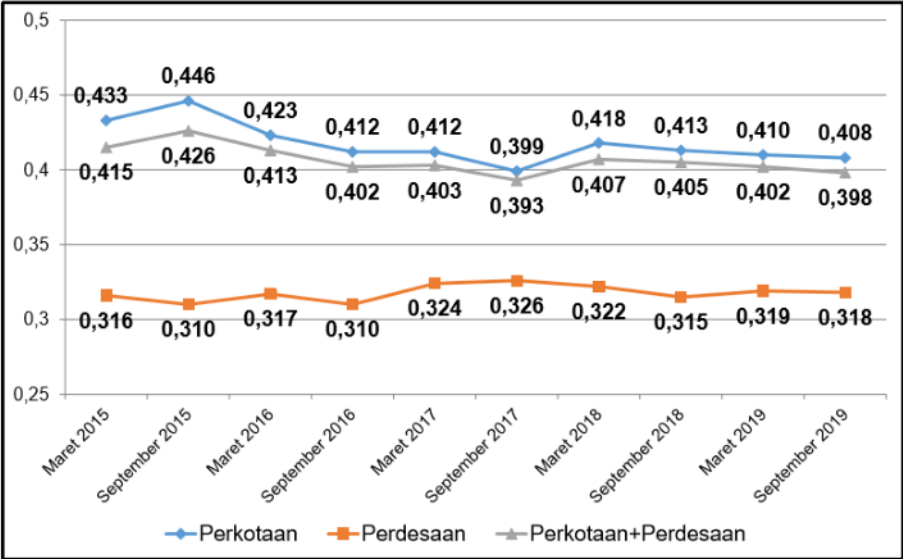
| Uraian            | Periode Tahun |       |       |       |
|-------------------|---------------|-------|-------|-------|
|                   | 2015          | 2016  | 2017  | 2018* |
| (2)               | (3)           | (4)   | (5)   | (6)   |
| Indeks Gini Ratio | 0,358         | 0,337 | 0,352 | 0,345 |

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2018. \*) Angka Sementara

Dibandingkan dengan tahun 2017, Indeks Gini Ratio pada tahun 2018 terjadi penurunan (positif) sebesar 0,007. Dan angka Indeks Gini Ratio pada tahun 2016 merupakan angka terbaik (paling rendah) dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sampai 2018.

**Gambar 3.8**

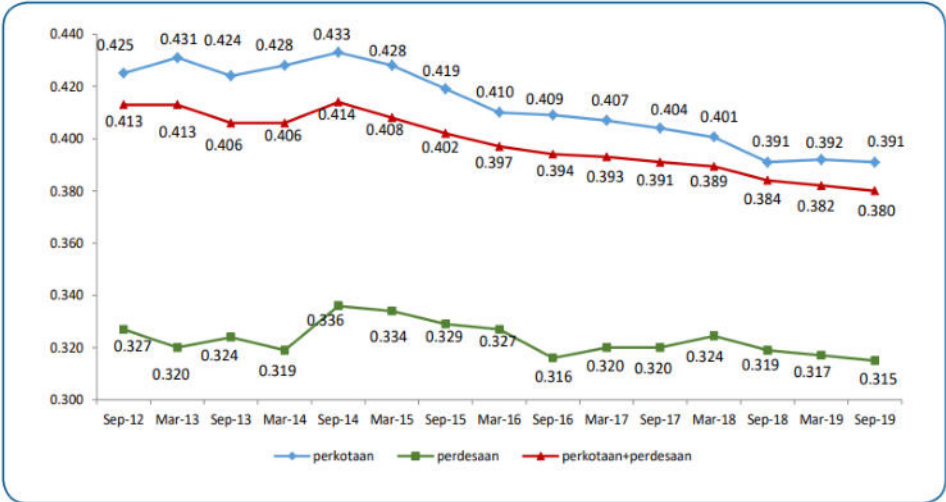
**Perkembangan Gini Rasio Provinsi Jabar, Maret 2015 – September 2019**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

**Gambar 3.9**

**Perkembangan Gini Rasio Nasional, September 2012 - September 2019**



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target capaian akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 0,33, realisasi tahun 2018 sebesar 0,345 masih terdapat selisih 0,015 yang harus diupayakan untuk diturunkan agar angka kesenjangan atau ketimpangan semakin kecil.

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya kinerja sasaran adalah :

1. Sejak adanya pemekaran daerah menjadi Kabupaten Pangandaran, perekonomian daerah mengalami peningkatan dan dengan semakin baiknya infrastruktur jalan telah memudahkan akses transportasi sampai pelosok Kabupaten Pangandaran yang gilirannya dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk secara merata.
2. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta layanan kesehatan dasar gratis serta terjangkau, merata dan berkualitas.
3. Meningkatnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

**Tabel 3.84**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18**  
**Menurunnya Tingkat Pengangguran**

| INDIKATOR SASARAN             |                                         | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                               |                                         |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                             | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | persen | 3,46       | 4,48      | 77,23               |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |                                         |        |            |           | 77,23               |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Menurunnya tingkat pengangguran** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran tidak mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 77,23% dikategorikan baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka  
 Nilai realisasi diperoleh dari Badan Pusat Statisttik (BPS) Kabupaten Ciamis dengan target indikator Tahun 2019 sebesar 3,46 persen dan realisasinya sebesar 4,48 persen.  
 Pengukuran Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Untuk menghitung capaian Indikator tersebut digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\textit{Target}}{\textit{Realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{3,46}{4,48} \times 100\% = 77,23\%$$

**Tabel 3.85**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 2018  | 3,58   | 3,58      | 0                           |
| 2019  | 3,46   | 4,48      | 1,02                        |

Pada tahun 2018, persentase tingkat pengangguran terbuka tidak terjadi percepatan maupun perlambatan karena antara target dan realisasi sama. Namun pada tahun 2019 terjadi perlambatan sebesar 1,02 atau 29,47% dari target. Hal ini terjadi karena banyaknya pendatang ke Kabupaten Pangandaran untuk mengadu nasib mencari pekerjaan. Namun tidak sedikit dari mereka yang justru tidak memperoleh pekerjaan yang berimbas terhadap bertambahnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pangandaran.

Meskipun secara angka terdapat kenaikan, namun realisasi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pangandaran sebesar 4,48%, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 7,99% turun 0,18% dari tahun sebelumnya (2018) yaitu 8,17%. Sedangkan persentase tingkat pengangguran terbuka di tingkat Nasional sebesar 5,3%.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target capaian akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 3,69%, realisasi tahun 2019 sebesar 4,48% masih terdapat selisih 0,79% yang harus diupayakan untuk diturunkan agar tingkat pengangguran semakin kecil. Atau dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus mampu mengatasi pengangguran minimal 0,79%.

Tidak tercapainya target penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Proses pembangunan yang masif di Kabupaten Pangandaran menjadikan daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mencari lapangan kerja sehingga angka pengangguran bertambah sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas dan tidak dapat menampung seluruh pencari kerja;
- b. Program padat karya tunai di desa-desa di wilayah Kabupaten Pangandaran melalui anggaran Dana Desa belum mampu mengurangi angka pengangguran terbuka.

**Tabel 3.86**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19**  
**Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan**

| INDIKATOR SASARAN |                                                                                                         | SATUAN | TAHUN 2019 |           | CAPAIAN KINERJA (%) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
|                   |                                                                                                         |        | TARGET     | REALISASI |                     |
| 1                 | Persentase pertumbuhan PDRB                                                                             | persen | 4,28       | 5,96 **   | 139,25              |
| 2                 | Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM                                                                    | persen | 96         | 96        | 100                 |
| 3                 | Jumlah Koperasi yang sehat                                                                              | Jumlah | 1          | 1         | 100                 |
| 4                 | Pola Pangan Harapan                                                                                     | Poin   | 91         | 93,20     | 102,42              |
| 5                 | Jumlah kunjungan wisata                                                                                 | Jumlah | 5 Juta     | 4.119.987 | 82,34%              |
| 6                 | Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourism Council</i> (GSTC) | Jumlah | 0          | 0         | 0                   |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 121,30 |
|-------------------------------|--------|

\*\* Angka sangat sementara, BPS Kab. Ciamis, 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan** memiliki 6 indikator kinerja sasaran dengan rincian : 2 (dua) indikator sasaran tercapai melebihi target, 2 (dua) indikator sasaran mencapai target dan 1 (satu) indikator sasaran tidak mencapai target serta 1 (satu) indikator sasaran pada tahun 2019 yang belum memiliki target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 121,30% dikategorikan baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase pertumbuhan PDRB**

Nilai realisasi capaian indikator Persentase pertumbuhan PDRB diperoleh dari Badan Pusat Statisttik (BPS) Kabupaten Ciamis berupa proyeksi angka sangat sementara sebesar 5,96 dari target 4,28% atau dengan capaian kinerja 139,25%.

Angka capian kinerja diperoleh dengan formula :

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5,96}{4,28} \times 100\% = 139,25\%$$

**Tabel 3.87**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|-----------------------------|
| 2018  | 4,22   | 4,02      | 95,26%  | 0,2                         |
| 2019  | 4,28   | 5,96      | 139,25% | 1,68                        |

Jika dilihat dari PDRB perkapita Kabupaten Pangandaran tahun 2019 ada peningkatan (bersifat positif) yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,68% dibandingkan tahun 2018. Bahkan pada tahun 2018, PDRB perkapita yang ditargetkan 4,22 hanya teralisasi sebesar 4,02 atau capaiannya sebesar 95,26% yang berarti terjadi perlambatan sebesar 4,74%. Adanya percepatan di tahun 2019, merupakan indikasi gambaran peningkatan dari daya beli masyarakat. Pembangunan yang masif di Kabupaten Pangandaran merupakan pemicu terhadap meningkatnya daya beli masyarakat selain kebijakan Bupati/Wakil Bupati yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 5,07% masih di bawah Kabupaten Pangandaran, sedangkan pertumbuhan PDRB di tingkat Nasional sebesar 5%.

Gambar 3.10



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Selanjutnya, realisasi persentase pertumbuhan PDRB pada target capaian akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 4,40%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 5,96% maka terdapat selisih 1,56% target telah terlampaui.

Pertumbuhan PDRB mencapai melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Adanya peningkatan kontribusi dari beberapa sektor yang nilainya cukup besar, yaitu sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi, dan makan minum;
- Iklim usaha yang sudah mulai kondusif;
- Manajemen pemasaran yang sudah baik sehingga memiliki daya saing kompetitif.

Meskipun secara capaian sudah melebihi, namun masih ada beberapa sektor yang masih dapat ditingkatkan, yaitu :

- Sektor konstruksi masih perlu didorong seiring dengan kebutuhan Kabupaten Pangandaran yang cukup tinggi akan pembangunan konstruksi.
- Sektor jasa pendidikan cukup besar kontribusinya terhadap nilai PDRB
- Sektor Industri pengolahan masih banyak yang berskala rumah tangga sehingga masih bisa ditingkatkan statusnya.

## 2. Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Kecil}}{\text{Seluruh UMKM}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran diperoleh hasil pendataan Pada tahun 2019 ada penambahan Usaha Mikro yang diperoleh dari Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yaitu sebanyak 537 Usaha Mikro, sehingga pada tahun 2019 terdapat 10.908 unit Usaha Mikro. Sedangkan Usaha kecil menjadi 492 unit, sehingga jumlah UMKM menjadi 11.360 unit diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah Usaha Mikro : 10.908 unit

Jumlah UMKM : 11.360 Unit

$$\text{Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = \frac{10.908}{11.360} \times 100\%$$

$$\text{Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = 96,00\%$$

Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM mencapai 96,00% dari yang ditargetkan 96,00% atau capaian 100% dengan kriteria baik.

**Tabel 3.88**  
**Perbandingan Realisasi Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|-----------------------------|
| 2018  | 85%    | 95,30%    | 112,12% | 10,3%                       |
| 2019  | 96%    | 96%       | 100%    | 0                           |

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan capaian sebesar 12,12% atau ada perlambatan sebesar 10,3% apabila dibandingkan antara target dan realisasi tahun 2018 dan tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh pada Tahun 2018 ada Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru yang merupakan Program Unggulan Provinsi Jawa Barat sedangkan pada Tahun 2019 program unggulan provinsi berubah menjadi Program UMKM Naik Kelas yang fokus pada kenaikan kelas usaha.

Namun demikian apabila dilihat dari tahun 2018 terdapat pertumbuhan atau penambahan pelaku Usaha Mikro dan UMKM. Secara jumlah adanya penambahan usaha mikro yang merupakan wirausaha baru sejumlah 511 atau jika dipersentasikan naik sebesar 4,93% dari tahun 2018 begitu juga dengan jumlah pelaku UMKM pada Tahun 2019 naik sejumlah 511 atau jika dipersentasikan naik 4,14%, hal ini disebabkan oleh bertambahnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.89**  
**Perbandingan Usaha Mikro Baru terhadap UMKM Dengan Tahun Lalu**

| Tahun             | Usaha Mikro | UMKM   |
|-------------------|-------------|--------|
| 2018              | 10.371      | 10.908 |
| 2019              | 10.882      | 11.360 |
| <b>Penambahan</b> | 511         | 452    |
| <b>Persentase</b> | 4,93%       | 4,14%  |

Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM memiliki target capaian pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 96%, maka terdapat selisih 2% yang masih harus dicapai agar Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM dapat mencapai target pada akhir periode RPJMD Tahun 2021.

Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya pendataan usaha mikro kecil dan menengah
- b. Peningkatan pemahaman untuk mengembangkan wirausaha baru melalui kegiatan pembentukan wirausaha baru
- c. Prospek pemasaran yang semakin luas dengan adanya kemitraan dengan perusahaan yang menampung produk Usaha Mikro
- d. Kemudahan legalitas perizinan untuk usaha mikro melalui kebijakan Bupati dengan cara pendelegasian izin Usaha Mikro ke Kecamatan



- e. Lebih banyaknya inovatif usaha mikro
- f. Adananya sarana pemasaran termasuk relokasi PKL

3. Jumlah Koperasi yang sehat,

Nilai realisasi capaian indikator Jumlah Koperasi yang sehat diperoleh melalui formula :

$$\frac{Jumlah\ Koperasi\ sehat}{Seluruh\ Koperasi} \times 100\%$$

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran di targetkan untuk mencetak Koperasi Sehat. Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka di Kabupaten Pangandaran di Kabupaten Pangandaran terdapat 1 (satu) unit Koperasi Sehat yaitu KPRI Segar Jl. Raya Kalipucang no. 365 dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.90  
Hasil Pengukuran Kesehatan Koperasi

| NO                                                                                                                                                                                                            | ASPEK PENILAIAN                                                                  | RASIO / NILAI | SKOR  | Jumlah | Kategori    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-------------|
| A                                                                                                                                                                                                             | PERMODALAN:                                                                      |               |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset                                        | 31,14%        | 3,00  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko                  | 280,94%       | 6,00  | 12,00  | SEHAT       |
|                                                                                                                                                                                                               | 3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) | 45,00%        | 3,00  |        |             |
| B                                                                                                                                                                                                             | KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF:                                                       |               |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 1 Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap total/volume pinjaman diberikan    | 99,95%        | 10,00 |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan                   | 0,58%         | 4,00  | 24,00  | SEHAT       |
|                                                                                                                                                                                                               | 3 Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah                      | 1532,47%      | 5,00  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 4 Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan                  | 13,12%        | 5,00  |        |             |
| C                                                                                                                                                                                                             | MANAJAMEN:                                                                       |               |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 1 Manajemen Umum                                                                 | 2,50          | 2,50  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 2 Manajemen Kelembagaan                                                          | 2,00          | 2,00  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 3 Manajemen Permodalan                                                           | 3,00          | 3,00  | 12,30  | SEHAT       |
|                                                                                                                                                                                                               | 4 Manajemen Aktiva                                                               | 1,80          | 1,80  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 5 Manajemen Likuiditas                                                           | 3,00          | 3,00  |        |             |
| D                                                                                                                                                                                                             | EFISIENSI                                                                        |               |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto                         | 87,16%        | 4,00  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 2 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor                                           | 79,78%        | 2,00  | 8,00   | SLEHAT      |
|                                                                                                                                                                                                               | 3 Rasio Efisiensi Pelayanan                                                      | 0,46%         | 2,00  |        |             |
| E                                                                                                                                                                                                             | LIKUIDITAS                                                                       |               |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 1 Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar                                   | 16,62%        | 5,00  | 10,00  | CUKUP SEHAT |
|                                                                                                                                                                                                               | 2 Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima                      | 89,08%        | 5,00  |        |             |
| F                                                                                                                                                                                                             | KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN                                                      |               |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 1 Rasio Rentabilitas Aset                                                        | 3,22%         | 0,75  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri                                               | 6,72%         | 3,00  | 7,75   | SLEHAT      |
|                                                                                                                                                                                                               | 3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan                                        | 114,73%       | 4,00  |        |             |
| G                                                                                                                                                                                                             | JATI DIRI KOPERASI                                                               |               |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                               | 1 Rasio Partisipasi Bruto                                                        | 100,00%       | 7,00  | 10,00  | SEHAT       |
|                                                                                                                                                                                                               | 2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota                                                  | 11,37%        | 3,00  |        |             |
| TOTAL SKOR PENILAIAN KESEHATAN                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 84,05         |       |        |             |
| KATEGORI PENILAIAN KESEHATAN                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | SEHAT         |       |        |             |
| ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Cukup Baik dan perlu ditingkatkan dengan menambah sumber-sumber modal sendiri seperti memperbesar jumlah SHU sehingga mampu meningkatkan SHU yang belum               |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan Berisiko Sangat Baik karena itu perlu dipertahankan dengan menjaga keseimbangan jumlah pembiayaan yg dibiayai dari internal koperasi dengan menjaga nilai     |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio Kecukupan Modal Sendiri Sangat Baik sehingga perlu dipertahankan jumlah keseimbangan modal tertimbang dengan ATMR dengan nilai rasio lebih besar dari 8 persen                                          |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan sudah sangat baik sehingga perlu dipertahankan dengan tetap menjaga keseimbangan nilai rasio lebih besar dari 75%                       |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan rendah sehingga perlu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyalurkan pinjaman hingga rasio sebesar 0%                               |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan tinggi sehingga perlu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyalurkan pinjaman dengan batasan nilai rasio sebesar 90% sampai 100%    |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio Pinjaman berisiko terhadap Pinjaman diberikan rendah sehingga perlu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyalurkan pinjaman dengan tetap mempertahankan nilai rasio ini dalam kisaran kurang    |                                                                                  |               |       |        |             |
| Manajemen Umum Koperasi sudah sangat baik pengurus dan pengelola untuk mempertahankan manajemen umum koperasi dengan melanjutkan rencana kerja jangka panjang, mempertahankan komitmen dan tat                |                                                                                  |               |       |        |             |
| Manajemen Kelembagaan Koperasi cukup baik perlu pembenahan dari pengurus dan pengelola untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kelembagaan koperasi dengan standar operasional manajemen dan prose             |                                                                                  |               |       |        |             |
| Manajemen Permodalan Koperasi sudah sangat baik pengurus dan pengelola untuk mempertahankan manajemen Permodalan koperasi dengan mempertahankan pertumbuhan modal sendiri, penyisihan cadangan 5              |                                                                                  |               |       |        |             |
| Manajemen Aktiva Koperasi cukup baik pengurus dan pengelola untuk meningkatkan kapasitas manajemen Aktiva koperasi dengan memperbesar pinjaman dengan kolektibilitas lancar, dukungan agunan dan cad          |                                                                                  |               |       |        |             |
| Manajemen Likuiditas Koperasi sudah sangat baik pengurus dan pengelola untuk mempertahankan manajemen Likuiditas koperasi dengan menjaga sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan             |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto sangat baik sehingga perlu mempertahankan efisiensi dengan menurunkan biaya operasional pelayanan atau meningkatkan partisipasi bruto dengan kategori opti |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio beban usaha terhadap SHU cukup baik namun masih perlu melakukan perbaikan dengan menurunkan biaya usaha atau peningkatan SHU sampai mendekati kategori optimal 40 persen                                |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio efisiensi pelayanan sangat baik sehingga perlu mempertahankan efisiensi dengan memperhatikan keseimbangan biaya karyawan dengan volume pinjaman yang diberikan sampai kategori optimal kurang dan       |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar cukup baik namun sebaiknya masih dilakukan pembenahan dengan memperhatikan porsi kas dan bank serta kewajiban lancar sampai pada kategori optimal 10 sam         |                                                                                  |               |       |        |             |
| Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima baik perlu mempertahankan porsi pinjaman yang diberikan dan dana yang diterima pada kategori optimal sebesar 80 sampai 90 persen                          |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio rentabilitas aset kurang baik ini menunjukkan bahwa porsi SHU sebelum pajak masih begitu rendah dibandingkan dengan total aset perlu peningkatan nilai SHU sebelum pajak sehingga rasio mencapai kate   |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio rentabilitas ekuitas sangat baik ini menunjukkan bahwa porsi SHU bagian anggota dibandingkan dengan modal sendiri sangat mendukung perlu upaya mempertahankan SHU bagian anggota pada kategori e        |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio kemandirian operasional sangat baik ini menunjukkan bahwa porsi partisipasi netto dibandingkan dengan beban usaha dan beban perkoperasian sangat mendukung dan perlu dipertahankan                      |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio partisipasi bruto sangat baik sehingga perlu mempertahankan nilai partisipasi bruto dan pendapatan pada kategori optimal 75 persen atau lebih                                                           |                                                                                  |               |       |        |             |
| Rasio promosi ekonomi anggota sangat baik sehingga perlu mempertahankan promosi ekonomi anggota pada kategori optimal sebesar 10 persen atau lebih                                                            |                                                                                  |               |       |        |             |

Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Pangandaran sebanyak 72 Koperasi dan Koperasi yang bisa di nilai tingkat Kesehatan Koperasi adalah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 32 Koperasi. Adapun Koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya adalah Koperasi Simpan Pinjam Atau Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam sebanyak 30 (tiga puluh) Koperasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Nomot 800/391/DISDAGKOP tentang Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi dinilai dari 7 (tujuh aspek) yaitu :

- a) Permodalan,
- b) Kualitas Aktiva Produktif,
- c) Manajemen,
- d) Efisiensi,
- e) Likuiditas,
- f) Kemandirian dan pertumbuhan,
- g) Jati diri Koperasi.

Adapun Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| SKOR              | PREDIKAT                | JUMLAH KOPERASI |
|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 80,00 <x < 100    | SEHAT                   | 1               |
| 66,00 < x < 80,00 | CUKUP SEHAT             | 15              |
| 51,00 < x< 66,00  | DALAM PENGAWASAN        | 12              |
| 0 < x < 51,00     | DALAM PENGAWASAN KHUSUS | 0               |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Koperasi yang dikategorikan “sehat” sebanyak 1 (satu) Koperasi sesuai dengan target RPJMD, Koperasi yang dikategorikan “cukup sehat” sebanyak 15 (lima belas) Koperasi, Koperasi yang dikategorikan dalam pengawasan sebanyak 12 (dua belas Koperasi) dan tidak ada yang dikategorikan “dalam pengawasan khusus”. Sedangkan Koperasi yang tidak bisa dinilai kesehatannya sebanyak 2 (dua) Koperasi dikarenakan penyajian laporan keuangan belum sesuai.

Selanjutnya, bahwa indikator Jumlah Koperasi Sehat pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 memiliki target capaian pada sebesar 2. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 1, maka harus diupayakan tambahan sebanyak 1 buah Koperasi Sehat pada akhir periode RPJMD Tahun 2021.

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap koperasi secara berkala oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
- b. Meningkatnya kemampuan SDM Koperasi dengan mengikutsertkan bmtk perkoperasian
- c. Sosialisasi pemahaman perkoperasian sehat
- d. Kriteria koperasi sehat yang sudah dipenuhi

4. Pola Pangan Harapan (PPH)

Nilai realisasi capaian Pola Pangan Harapan diperoleh melalui formula :

PPH = % Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.91  
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

| No     | Unsur Jenis Pangan  | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) |   |       |   |          |
|--------|---------------------|--------------------------------------------|---|-------|---|----------|
|        |                     | Persen AKE                                 |   | Bobot |   | Skor PPH |
| 1      | Padi- padian        | 62,4                                       | X | 0,5   | = | 25,0     |
| 2      | Umbi-umbian         | 3,3                                        | X | 0,5   | = | 1,6      |
| 3      | Pangan Hewani       | 12,2                                       | X | 2,0   | = | 24,0     |
| 4      | Minyak dan lemak    | 13,9                                       | X | 0,5   | = | 5,0      |
| 5      | Buah biji berminyak | 1,1                                        | X | 0,5   | = | 0,5      |
| 6      | Kacang-kacangan     | 2,6                                        | X | 2,0   | = | 5,1      |
| 7      | Gula                | 3,8                                        | X | 0,5   | = | 1,9      |
| 8      | Sayuran dan Buah    | 9,2                                        | X | 5,0   | = | 30,0     |
| 9      | Lain-lain           | 2,5                                        | X | 0,0   | = | 0,0      |
| JUMLAH |                     |                                            |   |       |   | 93,2     |

Sumber : Diolah dari buku Analisis Pola Konsumsi Pangan DKPKP Tahun 2019

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan = **93,2**. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 102,42% dengan predikat Sangat Baik.

Perolehan capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan dihitung dengan formula sebagai berikut :

Capain Kinerja =  $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

Capaian Kinerja =  $\frac{93,20}{91} \times 100\% = 102,42\%$

Tabel 3.92  
Perbandingan Realisasi Skor Pola Pangan Harapan  
Dengan Tahun Lalu

|       |        |           |         |                             |
|-------|--------|-----------|---------|-----------------------------|
| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|--------|-----------|---------|-----------------------------|

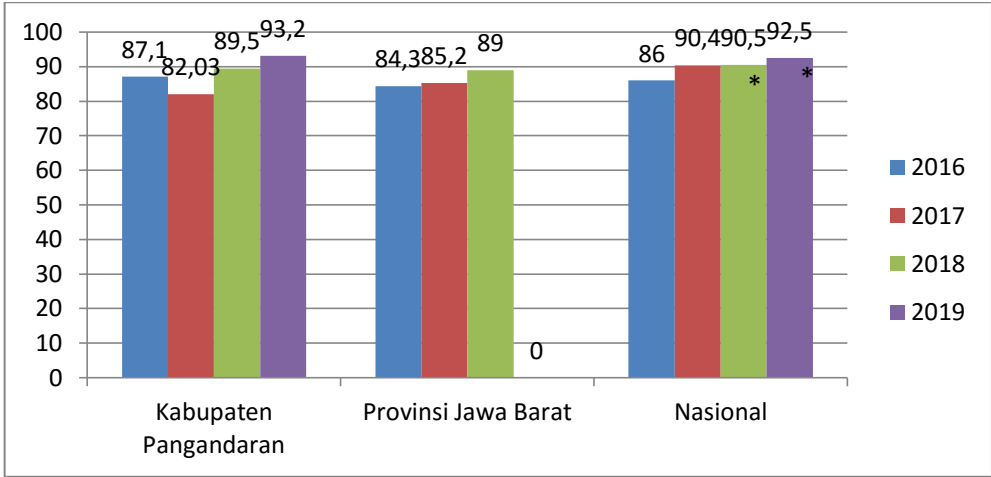


|      |    |       |         |     |
|------|----|-------|---------|-----|
| 2018 | 82 | 89,6  | 109,27% | 7,6 |
| 2019 | 91 | 93,20 | 102,42% | 2,2 |

Pada tahun 2018 terjadi percepatan sebesar 7,6 poin dibandingkan dari taget atau capaian realisasinya sebesar 109,27%. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan poin percepatan sebesar 5,4 poin karena percepatannya hanya 2,2 poin. Penurunan poin ini terjadi karena adanya penurunan dalam ketersediaan jenis pangan minyak dan lemak, buah biji berminyak, dan paling berpengaruh menurunnya ketersediaan jenis pangan kacang-kacangan.

Sebagai bahan perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pangandaran dengan Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Gambar 3.11**  
**Time Series Skor Pola Pangan Harapan**  
**Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dan Nasional**



Ket : 0 = data belum tersedia ; \*\* = angka target

Berdasarkan data dalam grafik tahun 2019, skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pangandaran berada diatas target skor PPH tingkat Nasional. Namun untuk skor PPH Provinsi Jawa Barat belum tersedia data sehingga belum dapat dibandingkan.

**Tabel 3.93**  
**Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016 s.d 2019**

| No | Skor PPH    | Poin  |       |         |         |
|----|-------------|-------|-------|---------|---------|
|    |             | 2016  | 2017  | 2018    | 2019    |
| 1  | Pangandaran | 87,10 | 82,03 | 89,6    | 93,20   |
| 2  | Jawa Barat  | 84,30 | 85,20 | 89,00   | 0       |
| 3  | Nasional    | 86,00 | 90,40 | 90,50** | 92,50** |

Ket : 0 = data belum tersedia ; \*\* = angka target

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu dengan mencantumkan angka skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang tercantum dalam Buku Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten Pangandaran yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran setiap tahun.

Hasil evaluasi menunjukan target skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2019 sebesar 91 point dan terealisasi 93,20 point sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,42%.

Pada akhir periode RPJMD Tahun 2021, indikator skor Pola Pangan Harapan memiliki target capaian sebesar 97. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 93,20, maka terdapat selisih 3,8 yang masih harus dicapai pada akhir periode RPJMD Tahun 2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
2. Tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi

Hambatan/masalah :

1. Masih tingginya konsumsi karbohidrat yang bersumber dari beras dan terigu sementara dari sumber lain seperti jagung dan kentang masih rendah;
2. Masih tingginya konsumsi lemak, terutama dari jenis minyak lainnya (sawit dan lain-lain) yang tidak diproduksi di dalam daerah;
3. Masih rendahnya asupan protein dari kelompok kacang-kacangan.
4. Masih terdapat daerah rawan pangan

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Digalakkannya program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui sosialisasi konsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
2. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan;
3. Menjaga ketersediaan pangan pokok dan memperbaiki tataniaga pangan pokok dengan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
4. Intervensi kegiatan berupa bantuan paket bahan pangan untuk warga desa rawan pangan
5. Intervensi program kegiatan untuk peningkatan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga dengan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan
6. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk penanganan gizi kurang dan stunting pada balita
7. Pembinaan pada kelompok penerima manfaat program ketahanan pangan agar berperan aktif mengantisipasi dan menangani kondisi rawan pangan di daerahnya.

## **5. Jumlah kunjungan wisata**

Nilai realisasi kunjungan wisata diambil dari data 12 (dua belas) objek wisata yang ada, baru lima 5 (lima) objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dari 5 (lima) objek wisata yang dikelola pemerintah daerah masih ada 1 (satu) objek wisata

yang masih kurang diminati oleh wisman yaitu objek wisata Karapyak, sehingga kedepan perlu penataan yang lebih diprioritaskan. Jumlah kunjungan dimaksud, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.94**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata**  
**Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2019**

| No     | Objek Wisata                     | 2018      |           | 2019      |           |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                  | Wisman    | Wisnus    | Wisman    | Wisnus    |
| 1      | OW Pangandaran                   | 2.138     | 2.787.767 | 1.231     | 2.663.980 |
| 2      | OW Taman Wisata Alam Pangandaran | -         | -         | 68        | 258.459   |
| 3      | OW Batu Hiu                      | 113       | 217.963   | 188       | 180.316   |
| 4      | OW Citumang                      | -         | -         | 242       | 26.379    |
| 5      | OW Green Canyon                  | 3.320     | 162.576   | 2.880     | 136.750   |
| 6      | OW Santirah                      | -         | -         | -         | 7.991     |
| 7      | OW Curug Bojong                  | -         | -         | -         | 268       |
| 8      | OW Ciwayang                      | -         | -         | -         | 3.254     |
| 9      | OW Batu Karas                    | 2.265     | 592.980   | 1.456     | 519.468   |
| 10     | OW Pantai Madasari               | -         | -         | -         | 44.964    |
| 11     | OW Karapyak                      | -         | 276.582   | 15        | 268.989   |
| 12     | OW Pantai Karangnini             | -         | -         | 41        | 9.169     |
| Jumlah |                                  | 7.836     | 4.037.868 | 6.121     | 4.119.987 |
| TOTAL  |                                  | 4.045.704 |           | 4.126.108 |           |

Sumber: Disparbud Kab. Pangandaran, 2019

Untuk menghitung capaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisata dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{4.119.987}{5.000.000} \times 100\% = 82,34\%$$

**Tabel 3.95**  
**Perbandingan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisata**  
**Dengan Tahun Lalu**

| Tahun | Target    | Realisasi | Capaian | Percepatan /<br>Perlambatan |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|
| 2018  | 4.500.000 | 4.044.204 | 89,87%  | 455.796                     |
| 2019  | 5.000.000 | 4.119.987 | 82,34%  | 880.013                     |

Jika dilihat dari tabel di atas menggambarkan jumlah kunjungan wisatawan ke Objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 terjadi peningkatan atau percepatan sebesar 880.013, lebih besar dari percepatan yang terjadi di tahun 2018 yang hanya sebesar 455.796 orang. Namun bila dilihat dari capaian, memang terjadi penurunan dengan selisih sebesar 7,53% dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini salah satunya diakibatkan terjadinya tsunami di Anyer pada akhir tahun 2018 sehingga banyak

tamu/pengunjung yang membatalkan rencana kunjungannya ke Pangandaran akibat kekhawatiran. Kondisi ini terus berlangsung sampai beberapa bulan di awal tahun 2019.

Selanjutnya, pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 indikator jumlah kunjungan wisata memiliki target capaian sebesar 6 juta pengunjung. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 4.119.987 pengunjung, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus mampu menarik atau mendatangkan wisatawan sejumlah 1.880.013 orang/pengunjung agar target pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 dapat tercapai..

Banyak hal yang mempengaruhi ketidaktercapaian kinerja jumlah kunjungan wisata tahun 2019 tersebut, diantaranya :

- a. Wisatawan sebagian besar mengetahui Pangandaran sebagai destinasi wisata yang mengandalkan daya tarik wisata pantai dan bahari, sehingga masyarakat enggan berkunjung akibat kejadian tsunami di Anyer akhir tahun 2018. Padahal ada banyak daya tarik wisata lainnya seperti kebudayaan masyarakat, kuliner, wisata petualang, wisata gua dan lain sebagainya.
- b. Terbatasnya aksesibilitas, seperti sarana dan prasarana atau pilihan moda transportasi menuju Kabupaten Pangandaran dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan event-event wisata yang menarik wisatawan;
- d. Banyaknya informasi isu-isu bencana dan berita hoax yang belum optimal dalam penanganannya, ditambah lagi dengan kondisi alam yang tidak menentu mempengaruhi psikologi wisatawan dalam memutuskan untuk berkunjung ke Kabupaten Pangandaran.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas guna peningkatan capaian kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, dengan cara menciptakan dan meningkatkan kualitas produk, pelayanan kepariwisataan, kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata (pilihan dan sistem transportasi) dan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- c. Menciptakan destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan PAD dan ekonomi masyarakat;
- d. Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan karena ketika wisatawan puas dengan destinasi wisata yang kita tawarkan, maka besar kemungkinan wisatawan akan berkunjung kembali dan mereka akan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain.
- e. Mengembangkan penyelenggaraan event-event yang dapat menarik wisatawan untuk datang dengan melihat pangsa pasar melalui strategi . Selain itu juga melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengelola destinasi wisata pada musim ramai kunjungan sehingga wisatawan yang datang merasa puas akan pelayanan kepariwisataan yang

diberikan dan pada akhirnya ingin berkunjung kembali dengan mengajak teman dan saudaranya.

- f. Mengembangkan sistem informasi terpadu dimana setiap orang akan lebih mudah mengakses informasi seputar kepariwisataan Pangandaran sehingga isu-isu negative dan informasi yang tidak benar (berita hoax) dapat diminimalisir. Selain itu juga mengembangkan sistem respon cepat pemberian informasi dan klarifikasi akan suatu pemberitaan yang merugikan sehingga semua orang mengetahui hal yang sebenarnya tanpa termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan merugikan semua pihak.

## **6. Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari *Global Sustainable Tourist Council (GSTC)***

Nilai realisasi capaian GSTC diperoleh dari pemenuhan beberapa indikator pendukung Destinasi Wisata yang memenuhi GSTC.

Agar mencapai target 1 destinasi wisata berkelas dunia yang diakui oleh GSTC-D pada tahun 2021 maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama pendukungan lintas sektor. Salah satu strategi yang dapat mempercepat pemenuhan kriteria-kriteria dimaksud adalah dengan membentuk tim koordinasi lintas sektor yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menjadikan destinasi wisata Pantai Pangandaran berkelas dunia merujuk pada indikator GSTC-D. Dari 41 kriteria yang dievaluasi Kawasan Wisata Pangandaran memperoleh nilai sebagai berikut :

- a. Terdapat 4 indikator yang tidak dievaluasi dikarenakan tidak cukup data untuk dievaluasi yaitu :
  - 1) Akuisisi Properti;
  - 2) Promosi;
  - 3) Pelindungan Warisan Budaya;
  - 4) Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- b. 17 indikator yang dinilai sudah baik yaitu :
  - 1) Manajemen Organisasi (DMO);
  - 2) Pengelolaan Pariwisata Musiman;
  - 3) Inventarisasi Aset dan Atraksi Pariwisata;
  - 4) Keselamatan dan Keamanan;
  - 5) Manajemen krisis dan Kedaruratan;
  - 6) Peluang Kerja untuk Masyarakat Lokal;
  - 7) Partisipasi Masyarakat;
  - 8) Opini Masyarakat Lokal;
  - 9) Akses Bagi Masyarakat Lokal;
  - 10) Pencegahan Eksploitasi;
  - 11) Dukungan Untuk Masyarakat;
  - 12) Mendukung Pengusaha Lokal dan Perdagangan Yang Adil;

- 13) Pelindungan Atraksi Wisata;
  - 14) Perilaku Pengunjung;
  - 15) Pelindungan Lingkungan Sensitif;
  - 16) Pelindungan Alam Liar (Flora dan Fauna);
  - 17) Polusi Cahaya dan Suara.
- c. 11 indikator dimana perencanaan sudah ada tapi implementasi belum maksimal yaitu:
- 1) Strategi Destinasi Berkelanjutan;
  - 2) Pengaturan Perencanaan;
  - 3) Akses Untuk Semua;
  - 4) Kepuasan Pengunjung;
  - 5) Pemantauan Ekonomi;
  - 6) Fungsi Edukasi Sadar Wisata;
  - 7) Pengelolaan Pengunjung;
  - 8) Interpretasi Tapak;
  - 9) Konservasi Energi;
  - 10) Pengelolaan Air;
  - 11) Keamanan Air.
- d. 9 indikator yang belum ada dan belum dikembangkan yaitu:
- 1) Monitoring;
  - 2) Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim;
  - 3) Standar Keberlanjutan;
  - 4) Resiko Lingkungan;
  - 5) Emisi Gas Rumah Kaca;
  - 6) Kualitas Air;
  - 7) Limbah Cair;
  - 8) Mengurangi Limbah Padat;
  - 9) Transportasi Ramah Lingkungan.

Dari hasil analisa di atas maka Prosentase pemenuhan indikator GSTC-D yang dicapai sampai Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia sebesar 41,46 % dimana Dari 41 kriteria GSTC-D yang dievaluasi Kabupaten Pangandaran memperoleh 17 kriteria GSTC-D yang dianggap baik. Hal itu diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{17}{41} \times 100\% = 41,46 \%$$

Pada Tahun 2018 tidak terdapat kegiatan yang secara langsung mendukung pengembangan destinasi wisata untuk memenuhi kriteria dan memperoleh pengakuan GSTC-D, tetapi bukan berarti kegiatan yang dilakukan tidak memberikan kontribusi, ada beberapa kegiatan yang cukup memberikan pendudukan yaitu kegiatan STD yang diinisiasi oleh Kemenpar RI saat itu. Kegiatan STD tersebut dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018.

Pada saat itu Kemenpar mengembangkan *Sustainable Tourism Development* (STD) dengan membentuk *Sustainable Tourism Observatory* (STO), program tersebut memberikan pendamping kepada destinasi wisata, sehingga pariwisata memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Pendampingan ini diharapkan agar kemanfaatan itu bisa terus berlangsung dan dijaga. Dengan adanya program STD maka pemenuhan indikator GSTC-D sedikit meningkat. Setidaknya pada tahun 2018 ada 7 indikator GSTC-D yang dinilai mandiri berusaha untuk dipenuhi dan diharapkan masuk ke dalam kategori baik meliputi :

- a. Promosi;
- b. Pelindungan Warisan Budaya;
- c. Strategi Destinasi Berkelanjutan;
- d. Kepuasan Pengunjung;
- e. Fungsi Edukasi Sadar Wisata
- f. Monitoring;
- g. Pengaturan Perencanaan.

Sehingga ketercapaian pemenuhan indikator GSTC-D diharapkan menjadi 24 indikator atau sebesar 58,53% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 ada penambahan indikator yang dinilai mandiri yang diharapkan dapat memenuhi indikator yang berwarna hijau atau masuk kriteria baik yaitu:

- a. Akses Untuk Semua;
- b. Pengelolaan Pengunjung.

Jadi apabila dilakukan penjumlahan dari tahun 2016 sampai 2019 menjadi 26 indikator atau sebesar 63,41%.

Agar mencapai target 1 destinasi wisata berkelas dunia yang diakui oleh GSTC-D pada tahun 2021 maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama pendudukan lintas sektor. Salah satu strategi yang dapat mempercepat pemenuhan kriteria dimaksud adalah dengan membentuk tim koordinasi lintas sektor yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menjadikan destinasi wisata Pantai Pangandaran berkelas dunia merujuk pada indikator GSTC-D.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.578.720.267.222 (Satu Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi - strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;

2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan / anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : alokasi, distribusi dan stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;

Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

### 3.3.1

#### *Pengelolaan Pendapatan Daerah*

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016 - 2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber - sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;
- b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito;
- c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- d. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya - upaya efektif dalam penggalian sumber - sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Pangandaran lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber - sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah,



Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.96**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Tahun Anggaran 2019**

| No                              | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |                                           | Target (Rp.)                                                              | Realisasi (Rp.)   | Pencapaian Target % |        |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| (1)                             | (2)                          |                                           | (3)                                                                       | (4)               | (5)                 |        |
| PENDAPATAN DAERAH               |                              |                                           | 1.526.268.476.016                                                         | 1.467.933.718.866 | 96,18               |        |
|                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH       |                                           | 144.448.832.624                                                           | 114.815.713.231   | 79,49               |        |
| 1                               | Pajak Daerah                 |                                           | 67.005.982.400                                                            | 53.923.967.341    | 80,48               |        |
|                                 | a.                           | Pajak Hotel                               | 17.552.256.274                                                            | 11.107.545.475    | 63,28               |        |
|                                 | b.                           | Pajak Restoran                            | 5.420.851.750                                                             | 5.021.564.810     | 92,63               |        |
|                                 | c.                           | Pajak Hiburan                             | 61.237.000                                                                | 188.522.736       | 307,86              |        |
|                                 | d.                           | Pajak Reklame                             | 2.131.504.000                                                             | 1.363.554.410     | 63,97               |        |
|                                 | e.                           | Pajak Penerangan Jalan                    | 18.774.181.376                                                            | 13.905.309.828    | 74,07               |        |
|                                 | f.                           | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan      | -                                                                         | -                 | -                   |        |
|                                 | g.                           | Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C     | 48.492.000                                                                | 64.836.000        | 133,70              |        |
|                                 | h.                           | Pajak Parkir                              | 20.860.000                                                                | 40.924.930        | 196,19              |        |
|                                 | i.                           | Pajak Air Bawah Tanah                     | 308.600.000                                                               | 158.878.950       | 51,48               |        |
|                                 | j.                           | Pajak Sarang Burung Walet                 | -                                                                         | -                 | -                   |        |
|                                 | k.                           | Pajak Bumi dan Bangunan                   | 16.688.000.000                                                            | 16.052.953.800    | 96,19               |        |
|                                 | l.                           | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 6.000.000.000                                                             | 6.019.876.402     | 100,33              |        |
|                                 | 2                            | Retribusi Daerah                          |                                                                           | 47.066.192.000    | 35.887.478.953      | 76,25  |
| a. Retribusi Jasa Umum          |                              | 10.675.024.000                            | 10.598.877.331                                                            | 99,29             |                     |        |
|                                 |                              | 1                                         | Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas                                 | 7.394.780.000     | 6.998.868.231       | 94,65  |
|                                 |                              | 2                                         | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan                              | 2.631.599.000     | 2.933.514.500       | 111,47 |
|                                 |                              | 3                                         | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                             | 208.600.000       | 180.563.000         | 86,56  |
|                                 |                              | 4                                         | Retribusi Pelayanan Pasar - Kios                                          | 440.045.000       | 485.931.600         | 110,43 |
|                                 |                              | 5                                         | Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                       | -                 | -                   | -      |
| b. Retribusi Jasa Usaha         |                              | 32.926.159.000                            | 23.377.038.947                                                            | 71,00             |                     |        |
|                                 |                              | 1                                         | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan          | -                 | -                   | -      |
|                                 |                              | 2                                         | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium                        | -                 | -                   | -      |
|                                 |                              | 3                                         | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Alat Berat                     | 411.464.000       | 70.065.000          | 17,03  |
|                                 |                              | 4                                         | Retribusi Tempat Pelelangan Ikan                                          | 2.610.409.000     | 2.739.599.947       | 104,95 |
|                                 |                              | 5                                         | Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum | 82.710.000        | 74.955.000          | 90,62  |
|                                 |                              | 6                                         | Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha                                | -                 | -                   | -      |
|                                 |                              | 7                                         | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                            | 2.316.100.000     | 2.015.286.000       | 87,01  |
|                                 |                              | 8                                         | Retribusi Tempat Pariwisata                                               | 27.500.000.000    | 18.472.858.000      | 67,17  |
|                                 |                              | 9                                         | Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus                          | 5.476.000         | 4.275.000           | 78,07  |
| c. Retribusi Perizinan Tertentu |                              | 3.465.009.000                             | 1.911.562.675                                                             | 55,17             |                     |        |
|                                 |                              | 1                                         | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                                        | 3.096.100.000     | 1.562.565.835       | 50,47  |
|                                 |                              | 2                                         | Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi        | -                 | -                   | -      |

| No       | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                     |                                                                 | Target (Rp.)          | Realisasi (Rp.)       | Pencapaian Target % |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| (1)      | (2)                                              |                                                                 | (3)                   | (4)                   | (5)                 |
|          | 3                                                | Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi            | 3.859.000             | 3.700.000             | 95,88               |
|          | 4                                                | Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan                        | -                     | -                     | -                   |
|          | 5                                                | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi                    | 365.050.000           | 345.296.840           | 94,59               |
| <b>3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b> |                                                                 | <b>30.376.658.224</b> | <b>24.976.589.257</b> | <b>82,22</b>        |
|          | <b>a.</b>                                        | <b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>        | -                     | 1.215.000             | -                   |
|          | 1                                                | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua                              | -                     | -                     | -                   |
|          | 2                                                | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat                            | -                     | -                     | -                   |
|          | 3                                                | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan                            | -                     | 1.215.000             | -                   |
|          | 4                                                | Penjualan Hasil Perikanan                                       | -                     | -                     | -                   |
|          | <b>b.</b>                                        | <b>Penerimaan Jasa Giro</b>                                     | <b>5.050.000.000</b>  | <b>3.274.626.542</b>  | <b>64,84</b>        |
|          | 1                                                | Jasa Giro Kas Daerah                                            | 5.000.000.000         | 3.184.695.704         | 63,69               |
|          | 2                                                | Jasa Giro Pemegang Kas                                          | 50.000.000            | 89.930.838            | 179,86              |
|          | <b>c.</b>                                        | <b>Penerimaan Bunga Deposito</b>                                | <b>5.000.000.000</b>  | <b>2.079.745.772</b>  | <b>41,59</b>        |
|          | 1                                                | Rekening Deposito pada Bank                                     | 5.000.000.000         | 2.079.745.772         | 41,59               |
|          | <b>d.</b>                                        | <b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)</b>                     | <b>30.000.000</b>     | <b>60.875.000</b>     | <b>202,92</b>       |
|          | 1                                                | Kerugian Uang                                                   | 30.000.000            | 60.875.000            | 202,92              |
|          | <b>e.</b>                                        | <b>Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>     | -                     | <b>1.528.384</b>      | -                   |
|          | 1                                                | Bidang Pertanian                                                | -                     | 1.528.384             | -                   |
|          | 2                                                | Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil                           | -                     | -                     | -                   |
|          | <b>f.</b>                                        | <b>Pendapatan dari Denda Pajak</b>                              | <b>122.641.824</b>    | <b>229.551.156</b>    | <b>187,17</b>       |
|          | 1                                                | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                    | 85.000.000            | 110.634.182           | 130,16              |
|          | 2                                                | Pendapatan Denda Pajak Restoran                                 | 12.000.000            | 21.603.849            | 180,03              |
|          | 3                                                | Pendapatan Denda Pajak Hiburan                                  | 300.000               | 381.267               | 127,09              |
|          | 4                                                | Pendapatan Denda Pajak Reklame                                  | 160.000               | 216.626               | 135,39              |
|          | 5                                                | Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C      | -                     | 501.550               | -                   |
|          | 6                                                | Pendapatan Denda Pajak Parkir                                   | 51.824                | 18.378                | 35,46               |
|          | 7                                                | Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah                          | 130.000               | 822.385               | 632,60              |
|          | 8                                                | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 25.000.000            | 95.372.919            | 381,49              |
|          | <b>g.</b>                                        | <b>Pendapatan dari Denda Retribusi</b>                          | -                     | -                     | -                   |
|          | 1                                                | Pendapatan Denda Retribusi Pel Kesehatan                        | -                     | -                     | -                   |
|          | 2                                                | Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan                        | -                     | -                     | -                   |
|          | <b>h.</b>                                        | <b>Pendapatan dari Pengembalian</b>                             | <b>1.499.712.000</b>  | <b>3.250.446.834</b>  | <b>216,74</b>       |
|          | 1                                                | Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21         | -                     | -                     | -                   |
|          | 2                                                | Pendapatan Dari Pengembalian atas Temuan Hasil Audit            | 1.499.712.000         | 3.250.446.834         | 216,74              |
|          | 3                                                | Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka                          | -                     | -                     | -                   |
|          | <b>i.</b>                                        | <b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>                      | <b>35.540.000</b>     | <b>39.975.500</b>     | <b>112,48</b>       |
|          | 1                                                | Fasilitas Umum                                                  | 35.540.000            | 39.975.500            | 112,48              |
|          | <b>j.</b>                                        | <b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>                           | <b>53.465.400</b>     | <b>84.583.255</b>     | <b>158,20</b>       |
|          | 1                                                | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya                                  | 53.465.400            | 84.583.255            | 158,20              |
|          | <b>k.</b>                                        | <b>Pendapatan Pelayanan Kesehatan - JKN Kapitasi</b>            | <b>18.585.299.000</b> | <b>15.981.719.494</b> | <b>85,99</b>        |
|          | 1                                                | Pendapatan Pelayanan Kesehatan - JKN Kapitasi                   | 18.585.299.000        | 15.981.719.494        | 85,99               |
|          | <b>l.</b>                                        | <b>Dana Kapitasi JN pada FKTP</b>                               | -                     | -                     | -                   |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 mencapai sebesar Rp.114.815.713.231,00 (Seratus Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 7,82%.

a. Dana Perimbangan

Adapun untuk Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.886.087.588.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan pada akhir Tahun Anggaran 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp.857.227.877.345,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus

| No                             | Dana Perimbangan                                |                                                                                                                             | Anggaran (Rp.)            | Realisasi (Rp.)           | Pencapaian Target % |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| (1)                            | (2)                                             |                                                                                                                             | (3)                       | (4)                       | (5)                 |
|                                | <b>Dana Perimbangan</b>                         |                                                                                                                             | <b>886.087.588.000</b>    | <b>857.227.877.345,00</b> | <b>96,74</b>        |
| <b>1</b>                       | <b>Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak</b> |                                                                                                                             | <b>64.617.248.000,00</b>  | <b>51.784.034.581,00</b>  | <b>80,14</b>        |
|                                | <b>a.</b>                                       | <b>Bagi Hasil Pajak</b>                                                                                                     | <b>36.459.939.000,00</b>  | <b>27.446.832.673,00</b>  | <b>75,28</b>        |
|                                | 1)                                              | Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                                                         | 7.074.925.000,00          | 5.936.360.248,00          | 83,91               |
|                                | 2)                                              | Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 | 24.511.499.000,00         | 16.632.992.103,00         | 67,86               |
|                                | 3)                                              | Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan                                                                      | -                         | -                         | -                   |
|                                | 4)                                              | Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan                                                                        | -                         | -                         | -                   |
|                                | 5)                                              | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau                                                                                             | 4.873.515.000,00          | 4.877.480.322,00          | 100,08              |
|                                | <b>b.</b>                                       | <b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>                                                                              | <b>28.157.309.000,00</b>  | <b>24.337.201.908,00</b>  | <b>86,43</b>        |
|                                | 1)                                              | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan                                                                                   | 404.558.000,00            | 242.734.800,00            | 60,00               |
|                                | 2)                                              | Bagi Hasil Iuran tetap (Land-Rent)                                                                                          |                           |                           |                     |
|                                | 3)                                              | Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)                                                                 |                           |                           |                     |
|                                | 4)                                              | Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan                                                                                   |                           |                           |                     |
|                                | 5)                                              | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan                                                                                    | 983.593.000,00            | 590.155.800,00            | 60,00               |
|                                | 6)                                              | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi                                                                                    | 8.721.856.000,00          | 4.797.020.800,00          | 55,00               |
|                                | 7)                                              | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam / Bumi                                                                                | 8.168.034.000,00          | 6.116.790.610,00          | 74,89               |
|                                | 8)                                              | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi                                                                                     | 9.477.846.000,00          | 12.309.504.498,00         | 129,88              |
|                                | 9)                                              | Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara                                                                                       | 401.422.000,00            | 280.995.400,00            | 70,00               |
| <b>2</b>                       | <b>Dana Alokasi Umum</b>                        |                                                                                                                             | <b>561.229.468.000,00</b> | <b>561.229.468.000,00</b> | <b>100,00</b>       |
|                                | a.                                              | Dana Alokasi Umum                                                                                                           | 561.229.468.000,00        | 561.229.468.000,00        | 100,00              |
| <b>3</b>                       | <b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>                |                                                                                                                             | <b>260.240.872.000,00</b> | <b>244.214.374.764,00</b> | <b>93,84</b>        |
|                                | a                                               | Dana Alokasi Khusus ( Fisik )                                                                                               | 135.997.496.000,00        | 130.734.050.655,00        | 96,13               |
|                                | b                                               | Dana Alokasi Khusus (Non Fisik )                                                                                            | 124.243.376.000,00        | 113.480.324.109,00        | 91,34               |
| <b>Jumlah Dana Perimbangan</b> |                                                 |                                                                                                                             | <b>886.087.588.000,00</b> | <b>857.227.877.345,00</b> | <b>96,74</b>        |

Empat Puluh Lima Rupiah) atau 96,74% dari target anggaran. Rincian dari masing-masing jenis Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel 3.63 berikut ini :

**Tabel 3.97**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019**

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Kontribusi Realisasi Dana Perimbangan terhadap total realisasi pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 mencapai sebesar Rp.857.227.877.345,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sekitar 58,40%.

**b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 495.732.055.392,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.495.890.128.290,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 100,03%. Rincian dari masing-masing jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada berikut ini :

**Tabel 3.98**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2019**

| No  | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                                     |                                                                   | Anggaran (Rp.)            | Realisasi (Rp.)           | Pencapaian Target% |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| (1) | (2)                                                                      |                                                                   | (3)                       | (4)                       | (5)                |
| 1   | <b>Pendapatan Hibah</b>                                                  |                                                                   | -                         | -                         | -                  |
|     | a.                                                                       | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya                   | -                         | -                         | -                  |
|     | 1)                                                                       | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya                   | -                         | -                         | -                  |
| 2   | <b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b> |                                                                   | <b>45.473.848.748,00</b>  | <b>44.720.429.740,00</b>  | <b>98,34</b>       |
|     | a.                                                                       | <b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>                        | <b>45.473.848.748,00</b>  | <b>44.720.429.740,00</b>  | <b>98,34</b>       |
|     | 1)                                                                       | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor                          | 8.467.094.370,00          | 8.398.967.970,00          | 99,20              |
|     | 2)                                                                       | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                 | 4.816.461.600,00          | 4.816.461.600,00          | 100,00             |
|     | 3)                                                                       | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor              | 15.563.353.722,00         | 14.648.934.517,00         | 94,12              |
|     | 4)                                                                       | Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah | -                         | -                         | -                  |
|     | 5)                                                                       | Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan   | 3.932.450,00              | 3.932.450,00              | 100,00             |
|     | 6)                                                                       | Bagi Hasil dari Pajak Rokok                                       | 16.623.006.606,00         | 16.852.133.203,00         | 101,38             |
|     | b.                                                                       | <b>Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi</b>                    | -                         | -                         | -                  |
| 3   | <b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>     |                                                                   | <b>288.132.868.644,00</b> | <b>284.339.049.156,00</b> | <b>98,68</b>       |
|     | a.                                                                       | Bantuan Keuangan dari Provinsi                                    | 288.132.868.644,00        | 284.339.049.156,00        | 98,68              |
|     | 1)                                                                       | Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa barat                         | 288.132.868.644,00        | 284.339.049.156,00        | 98,68              |

| No                                                 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah |                             | Anggaran (Rp.)            | Realisasi (Rp.)           | Pencapaian Target% |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| (1)                                                | (2)                                  |                             | (3)                       | (4)                       | (5)                |
| 4                                                  | <b>Alokasi Dana Desa dari APBN</b>   |                             | <b>89.358.559.000,00</b>  | <b>89.358.559.000,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|                                                    | 1)                                   | Alokasi Dana Desa dari APBN | 89.358.559.000,00         | 89.358.559.000,00         | 100,00             |
| 5                                                  | <b>Dana BOS</b>                      |                             | <b>38.036.200.000,00</b>  | <b>42.741.511.394,00</b>  | <b>112,37</b>      |
|                                                    | 1)                                   | Dana BOS SD                 | 26.491.200.000,00         | 29.456.084.318,00         | 111,19             |
|                                                    | 2)                                   | Dana BOS SMP                | 11.545.000.000,00         | 13.285.427.076,00         | 115,08             |
| 6                                                  | <b>Dana Insentif Daerah</b>          |                             | <b>34.730.579.000,00</b>  | <b>34.730.579.000,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|                                                    | 1)                                   | Dana Insentif Daerah        | 34.730.579.000,00         | 34.730.579.000,00         | 100,00             |
| <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b> |                                      |                             | <b>495.732.055.392,00</b> | <b>495.890.128.290,00</b> | <b>100,03</b>      |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Kontribusi realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2019 baru mencapai sebesar Rp. 495.890.128.290,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sebesar 33,78%.

1. Permasalahan

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Faktor alam yang selalu berubah dan tidak menentu menyebabkan produksi ikan hasil tangkapan tidak terprediksi;
- 2) Masih terjadi transaksi jual beli ikan tangkapan diluar Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- 3) Belum optimalnya operasional armada penangkapan ikan ukuran >5GT;
- 4) Masih banyaknya perusahaan pemilik reklame yang sampai saat ini masih belum mengurus/menempuh perizinannya;
- 5) Terjadinya bencana alam gempa bumi yang diisukan berpotensi tsunami, sehingga mengurangi jumlah wisatawan.

b. Dana Perimbangan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- 1) Kurangnya SDM (Juru Tagih, Juru Sita, Petugas Lapangan, Petugas Penagihan).
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Masih banyak kendaraan bermotor yang belum Bea Balik Nama (BBN)
- 2) Masih banyak para pemilik kendaraan bermotor terutama roda dua yang tidak membayar pajak.

2. Solusi

a. Pendapatan Asli Daerah Daerah

- 1) Peningkatan pengawasan penjualan ikan hasil tangkapan terhadap nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya;
- 2) Dilakukan edukasi ke perusahaan yang akan mendirikan reklame agar terlebih dahulu melapor ke dinas terkait yang berhak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);

- 3) Adanya sanksi tegas dari Pemerintah Daerah bagi pemilik reklame yang dengan sengaja mengabaikan perizinan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);
- 4) Memberikan *counter* beritan negative dan menginformasikan bahwa kabupaten Pangandaran aman untuk dikunjungi.

**b. Dana Perimbangan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas. Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- 1) Perlunya penambahan petugas.
- 2) Perlunya penambahan Printer Printonik.

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- 1) Koordinasi dengan Samsat dalam penertiban pemilik kendaraan bermotor.
- 2) Kerjasama dengan pihak terkait terutama Kepolisian dalam penertiban pajak kendaraan bermotor.
- 3) Sosialisasi secara rutin/berkala kepada para wajib pajak.

### **3.1. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

#### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Pengelolaan kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada:

- a. Porsi urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar minimal;
- c. Mengoptimalkan belanja daerah menurut urusan pilihan diupayakan penanganannya dengan memanfaatkan potensi lokal dan karakteristik daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) perekonomian daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- d. Meningkatkan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah maka belanja daerah dikelompokkan dalam klasifikasi menurut fungsinya mencakup pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja;

- f. Meminimalisasi tingkat kebocoran dalam pelaksanaan pengelolaan belanja.

2. Target dan Realisasi Belanja

Dalam Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.578.720.267.222,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.454.698.924.435,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 92,14%.

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.687.153.208.946,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.663.983.924.443,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar 96,63%. Realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Dianggarkan sebesar Rp.432.632.287.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.419.091.076.759,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau sekitar 96,87%. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel 3.65 berikut ini :

Tabel 3.99  
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai  
Tahun Anggaran 2019

| No                     | Belanja Pegawai | Anggaran<br>(Rp.)  | Realisasi<br>(Rp.) | Penyerapan<br>Anggaran<br>% |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1                      | Belanja Pegawai | 257.050.631.026,00 | 250.821.818.961,00 | 97,58                       |
| Jumlah Belanja Pegawai |                 | 257.050.631.026,00 | 250.821.818.961,00 | 97,58                       |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

2) Belanja Subsidi

Dianggarkan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau 0,00%. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.100**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi**  
**Tahun Anggaran 2018**

| No                            | Belanja Subsidi | Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi<br>(Rp.) | Penyerapan<br>Anggaran<br>% |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1                             | Belanja Subsidi | 0,00              | 0,00               | 0,00%                       |
| <b>Jumlah Belanja Subsidi</b> |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>                |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

**3) Belanja Hibah**

Dianggarkan sebesar Rp. 37.427.255.171,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.37.321.751.171,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau 99,72%. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.101**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**  
**Tahun Anggaran 2019**

| No                                                          | Belanja Hibah                                 | Anggaran<br>(Rp.)        | Realisasi<br>(Rp.)       | Penyerapan<br>Anggaran<br>% |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1                                                           | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 37.427.255.171,00        | 37.321.751.171,00        | 99,72                       |
| <b>Jumlah Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b> |                                               | <b>37.427.255.171,00</b> | <b>37.321.751.171,00</b> | <b>99,72</b>                |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

**4) Belanja Bantuan Sosial**

Dianggarkan sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.948.175.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 94,00%. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.102**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**  
**Tahun Anggaran 2019**

| No | Belanja Bantuan Sosial                                         | Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi<br>(Rp.) | Penyerapan<br>Anggaran<br>% |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1  | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 4.200.000.000,00  | 3.948.175.000,00   | 94,00                       |



|                                                                              |                         |                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b> | <b>4.200.000.000,00</b> | <b>3.948.175.000,00</b> | <b>94,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI

5) **Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa**

Dianggarkan sebesar Rp.7.017.936.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.135.250.000,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar 30,43% sebagai Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.103**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019**

| No | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa               | Anggaran (Rp.)          | Realisasi (Rp.)         | Penyerapan Anggaran % |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1  | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa               | 7.017.936.000,00        | 2.135.250.000,00        | 30,43                 |
|    | <b>Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b> | <b>7.017.936.000,00</b> | <b>2.135.250.000,00</b> | <b>30,43</b>          |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI

6) **Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa**

Dianggarkan sebesar Rp.4.019.132.500,00 (Empat Milyar Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.765.577.382,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau sekitar 93,63, sebagai Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.104**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA. 2019**

| No | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa               | Anggaran (Rp.)          | Realisasi (Rp.)         | Penyerapan Anggaran % |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1  | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                   | 4.019.132.500,00        | 3.765.577.382,00        | 93,69                 |
|    | <b>Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b> | <b>4.019.132.500,00</b> | <b>3.765.577.382,00</b> | <b>93,69</b>          |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI

7) **Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa**

Dianggarkan sebesar Rp.188.133.707.600,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dan target tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.187.595.457.600,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus

Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sekitar 99,71%. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.105**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan**  
**Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019**

| No                                                 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | Anggaran (Rp.)            | Realisasi (Rp.)           | Penyerapan Anggaran % |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1                                                  | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 188.133.707.600,00        | 187.595.457.600,00        | 99,71                 |
| <b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b> |                                      | <b>188.133.707.600,00</b> | <b>187.595.457.600,00</b> | <b>99,71</b>          |

*Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI*

**8) Belanja Bantuan Kepada Partai Politik**

Dianggarkan sebesar Rp.500.850.168,00 (Lima Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.484.636.531,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau 96,76%. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.106**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2019**

| No                                                  | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik | Anggaran (Rp.)        | Realisasi (Rp.)       | Penyerapan Anggaran % |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                   | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik | 500.850.168,00        | 484.636.531,00        | 96,76                 |
| <b>Jumlah Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b> |                                       | <b>500.850.168,00</b> | <b>484.636.531,00</b> | <b>96,76</b>          |

*Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI*

**9) Belanja Tidak Terduga**

Dianggarkan sebesar Rp. 3.580.040.507,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp.0 (Nol Rupiah) atau 0% dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.107**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga**  
**Tahun Anggaran 2019**

| No                                  | Belanja Tidak Terduga | Anggaran (Rp.)          | Realisasi (Rp.) | Penyerapan Anggaran % |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1                                   | Belanja Tidak Terduga | 3.580.040.507,00        | 0,00            | 0,00                  |
| <b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b> |                       | <b>3.580.040.507,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |

*Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI*

**b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.891.567.058.276,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan dapat

direalisasikan sebesar Rp.790.714.999.992,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 88,69%. Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2019 terdiri dari :

**1) Belanja Pegawai**

Dianggarkan sebesar Rp.29.072.921.500,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.28.192.798.770,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 96,97%, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.108**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019**

| No | Belanja Pegawai                                              | Anggaran (Rp.)           | Realisasi (Rp.)          | Penyerapan Anggaran % |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Belanja Pegawai                                              | 29.072.921.500,00        | 28.192.798.770,00        | 96,97                 |
|    | Honorarium PNS                                               | 13.375.508.000,00        | 12.839.368.270,00        | 95,99                 |
|    | Honorarium Non PNS                                           | 5.135.022.000,00         | 5.058.432.000,00         | 98,51                 |
|    | Uang Lembur                                                  | 1.135.745.000,00         | 1.070.005.250,00         | 94,21                 |
|    | Uang Saku Peserta                                            | 7.868.645.000,00         | 7.837.426.000,00         | 99,60                 |
|    | Uang Transport Peserta                                       | 1.235.046.500,00         | 1.191.063.500,00         | 96,44                 |
|    | Jasa Pengawasan dan Pengamanan Kepala Daerah (PATWAL POLRES) | -                        | -                        | -                     |
|    | Belanja Honorarium Non Pegawai                               | 322.955.000,00           | 196.503.750,00           | 60,85                 |
|    | Belanja Pegawai BOS                                          |                          | -                        | -                     |
|    | <b>Belanja Pegawai</b>                                       | <b>29.072.921.500,00</b> | <b>28.192.798.770,00</b> | <b>96,97</b>          |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI

**2) Belanja Barang dan Jasa**

Dianggarkan sebesar Rp.299.709.452.794,45 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Lima Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.263.467.681.155,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau 87,91%, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.109**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019**

| No | Belanja Barang Jasa        | Anggaran (Rp.)            | Realisasi (Rp.)           | Penyerapan Anggaran % |
|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1  | Belanja Barang Jasa        | 299.709.452.794,00        | 263.467.681.155,00        | 87,91                 |
|    | <b>Belanja Barang Jasa</b> | <b>299.709.452.794,00</b> | <b>263.467.681.155,00</b> | <b>87,91</b>          |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI

**3) Belanja Modal**

Dianggarkan sebesar Rp.562.784.683.982,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh

Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.499.054.520.067,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau 88,68%, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.110**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019**

| No                   | Belanja Modal | Anggaran (Rp.)            | Realisasi (Rp.)           | Penyerapan Anggaran % |
|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1                    | Belanja Modal | 562.784.683.982,00        | 499.054.520.067,00        | 88,68                 |
| <b>Belanja Modal</b> |               | <b>562.784.683.982,00</b> | <b>499.054.520.067,00</b> | <b>88,68</b>          |

*Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI*

**3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan**

**a. Permasalahan**

1. Masih ada SKPD yang merubah DPA kegiatannya pada perubahan anggaran, sehingga penyerapannya kurang maksimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan.
2. Hasil Perencanaan (Konsultan Perencana) pelaksanaan pembangunan fisik kontruksi yang selesainya pada akhir tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik kontruksi tidak bisa dilaksanakan;
3. Ada sebagian pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga yang gagal lelang.

**b. Upaya Pemecahan**

1. Disosialisasikan dalam penyusunan RKA/DPA agar benar-benar direncanakan dengan baik;
2. Perencanaan pelaksanaan pekerjaan fisik kontruksi dilaksanakan pada awal tahun atau tahun sebelumnya;
3. Pelaksanaan pelelangan dilaksanakan sesuai jadwal pelelangan.

**3.2. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih besar daripada Anggaran Belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih kecil daripada Anggaran Belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan.

Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.58.451.791.206,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.3.734.597.937,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 6,39%, yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 3.111  
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2019

| No                                  | Penerimaan Pembiayaan Daerah                              | Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi (Rp.)  | Penyerapan Anggaran % |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1                                   | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan                    | 0                                | 0                | 0                     |
| 2                                   | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya              | 0                                | 0                | 0                     |
| 3                                   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 3.734.597.937,00                 | 3.734.597.937,00 | 100,00                |
| 4                                   | Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank     | 54.717.193.269,00                | 0                | 0                     |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah |                                                           | 58.451.791.206,00                | 3.734.597.937,00 | 6,39                  |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI

Tabel 3.112  
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2018 dan 2019

| No                                  | Penerimaan Pembiayaan Daerah                              | Realisasi Tahun Anggaran 2018 (Rp.) | Realisasi Tahun Anggaran 2019 (Rp.) | Peningkatan/ Penurunan (%) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1                                   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 28.954.110.718,14                   | 3.734.597.937,00                    | 12,90                      |
| 2                                   | Pembentukan Dana Cadangan                                 | 0                                   | 0                                   | 0                          |
| 4                                   | Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank     | 0                                   | 0                                   | 0                          |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah |                                                           | 28.954.110.718,14                   | 3.734.597.937,00                    | 12,90                      |

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebelum audit BPK RI

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Daerah sampai dengan saat ini dianggarkan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp.999.998.500,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar 16,67%.

Asas efektifitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, *performance budgeting* menekankan pada suatu manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja pengelolaan anggaran harus mampu menampakkan dan menerapkan asas efektivitas dan efisiensi, sehingga setiap Rp. 1,00 uang negara yang dikeluarkan harus dapat mendorong tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Penggunaan anggaran dikatakan efektif, apabila persentase capaian target kinerja lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

Berikut ini ditampilkan tabel yang memuat efektifitas penggunaan anggaran Tahun 2019 dalam pencapaian sasaran strategis pada misi pertama RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani**”. Apabila dilihat pada tabel dibawah efektifitas anggaran dalam pencapaian misi kesatu bisa dikatakan **efektif** karena dari total pagu sebesar Rp. 112.710.612.354,05 terealisasi sebesar Rp. 106.613.027.351,00 atau apabila dipersentasekan sebesar 94,35% sementara rata-rata capaian kinerjanya hanya sebesar 104%. jadi persentase realisasi anggaran masih lebih besar daripada persentase capaian kinerja.

**Tabel 3.113**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-1 RPJMD Tahun 2019**

| No.                                                                              | Sasaran                                                   | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Indikator Sasaran                         | Anggaran           |                    |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
|                                                                                  |                                                           |                   |                                                           | Pagu               | Realisasi          | %                 |       |
| Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani |                                                           |                   |                                                           |                    |                    |                   |       |
|                                                                                  |                                                           |                   | 104,00                                                    | 112.710.612.354,05 | 106.613.027.351,00 | 94,35             |       |
|                                                                                  |                                                           |                   | 91,64                                                     | 71.090.558.556,05  | 67.144.663.494,00  | 96,77             |       |
| 1                                                                                | Birokrasi yang bersih dan akuntabel                       | 1                 | Opini BPK terhadap LKPD                                   | -                  | 8.772.138.551,00   | 8.139.549.145,00  | 92,79 |
|                                                                                  |                                                           | 2                 | Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)                       | 100,00             | 428.895.000,00     | 425.874.674,00    | 99,30 |
|                                                                                  |                                                           | 3                 | Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5)           | 150,00             | 299.435.000,00     | 294.825.645,00    | 98,46 |
|                                                                                  |                                                           | 4                 | Nilai AKIP                                                | 100,00             | 61.266.690.005,05  | 57.965.228.172,00 | 94,61 |
|                                                                                  |                                                           | 5                 | Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan | 108,22             | 323.400.000,00     | 319.185.858,00    | 98,70 |
| 2                                                                                | Birokrasi yang efektif dan efisien                        | 1                 | Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)                    | 97,75              | 7.443.027.698,00   | 7.133.648.985,00  | 95,84 |
|                                                                                  |                                                           | 2                 | Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)                 | 116,00             | 6.074.444.000,00   | 5.590.988.570,00  | 92,04 |
|                                                                                  |                                                           | 3                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                | 11467              | 15.797.082.900,00  | 14.591.608.014,00 | 92,37 |
| 3                                                                                | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas | 1                 | Persentase Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10)             | 100,00             | 105.437.500,00     | 91.606.910,00     | 86,88 |
|                                                                                  |                                                           | 2                 | Survey Kepuasan Masyarakat                                | 109,97             | 12.200.061.700,00  | 12.060.511.378,00 | 98,86 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa efektifitas anggaran dalam pencapaian sasaran strategis kesatu yaitu “**Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**” secara umum dikatakan **belum dikatakan efektif** karena rata-rata capaian kinerja masih lebih rendah dari penyerapan anggaran. Apabila

dirata-ratakan untuk sasaran strategis kesatu, capaian kinerjanya sebesar 91,64% sementara itu pagu anggarannya sebesar Rp. 71.090.558.556,05 dan terealisasi sebesar Rp. 67.144.663.494,00 atau sebesar 96,77%. Hal ini disebabkan oleh indikator **“Opini BPK terhadap LKPD”** yang belum ada data capaian kinerjanya karena pada saat laporan ini disusun audit BPK Tahun 2019 belum selesai dilaksanakan, akan tetapi dari sisi realisasi anggaran tetap dihitung yaitu sebesar 92,79% sementara dari capaian kinerjanya belum dapat dihitung.

Sasaran strategis **“Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”**, memiliki 5 (lima) indikator sasaran, masing-masing indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator **“Opini BPK terhadap LKPD”** yang belum ada data capaian kinerjanya karena pada saat laporan ini disusun audit BPK Tahun 2019 belum selesai dilaksanakan, akan tetapi dari sisi realisasi anggaran tetap dihitung yaitu sebesar 92,79% sementara dari capaian kinerjanya belum dapat dihitung.
2. Indikator selanjutnya yaitu **“Tingkat Kapabilitas APIP”** dari pagu anggaran sebesar Rp. 428.895.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 425.874.674,00 atau 99,30% sementara capaian kinerjanya sebesar 100%, maka dapat dikatakan **efektif**.
3. Indikator **“Tingkat Kematangan Implementasi SPIP”** dari pagu anggaran sebesar Rp. 299.435.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 294.825.645,00 apabila dipersentasekan sebesar 98,46% sementara capaian kinerjanya sebesar 150% maka penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja **“Tingkat Kematangan SPIP”** dapat dikatakan **efektif**.
4. Selanjutnya untuk indikator **“Nilai AKIP”** memiliki capaian kinerja sebesar 100%, sementara itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp. 61.266.690.005,05 dengan realisasi sebesar Rp. 57.965.228.172,00 sehingga apabila dipersentasekan sebesar 94,61%, maka dapat dikatakan **efektif** karena capaian kinerja lebih besar dari penyerapan anggaran.
5. Indikator selanjutnya yaitu **“Persentase Penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan”** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 323.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 319.185.858,00 atau 98,70% sementara itu capaian kinerjanya lebih tinggi yaitu sebesar 108,22% sehingga dapat dikatakan **efektif**.

Sasaran strategis yang kedua pada **Misi Pertama** yaitu **“Birokrasi yang Efektif dan Efisien”** dengan 3 (tiga) indikator utama yaitu **“Indeks Profesionalitas ASN”**, **“Tingkat Kematangan e-Government”** dan **“Indeks Reformasi Birokrasi”**. Secara rata-rata capaian kinerja masing-masing indikator untuk sasaran strategis kedua yaitu sebesar 105,38% sementara penyerapan anggarannya dari total pagu anggaran sebesar Rp. **29.314.554.598,00** terealisasi sebesar Rp. **27.316.245.569,00** atau 93,42% sehingga dapat dikatakan **efektif** karena persentase capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran. Untuk efektifitas masing-masing indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.443.027.698,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.133.648.985,00 atau apabila dipersentasekan sebesar 95,84% sementara itu capaian target kinerjanya sebesar 97,75% sehingga dapat dikatakan **efektif**.

2. Tingkat Kematangan e-Government memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 6.074.444.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.590.988.570,00 atau apabila dipersentasekan sebesar 92,04 % sementara itu capaian target kinerjanya 116,00% sehingga dapat dikatakan **efektif** karena persentase capaian kinerjanya lebih besar dari persentase realisasi anggaran.
3. Indeks Reformasi Birokrasi memiliki pagu anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 15.797.082.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.591.608.014,00 atau 92,37% sementara capaian target kinerjanya cukup tinggi yaitu sebesar 114,67 %. Sehingga penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi dapat dikatakan **efektif**.

Sasaran strategis ketiga pada misi kesatu yaitu **“Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas”** dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu “Persentase

Integritas Daerah” dan “Survey Kepuasan Masyarakat”. Secara rata-rata penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini dapat dikatakan efektif karena rata-rata capaian kinerja indikator sasaran 104,99% sementara penyerapan anggaran sebesar 92,87% (pagu anggaran sebesar Rp. 12.305.499.200,00 sementara realisasi sebesar Rp. 12.152.118.288,00). Untuk efektifitas masing-masing indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator “Persentase Zona Integritas Daerah” dilihat dari tingkat penyerapan anggarannya sebesar Rp. 91.606.910,00 dari pagu sebesar Rp. 105.437.500,00 atau 86,88%. Dengan melihat capaian kinerjanya yaitu sebesar 100,00% maka dapat dikatakan **efektif**.
2. Sementara itu untuk indikator selanjutnya yaitu Survey Kepuasan Masyarakat dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.200.061.700,00 terealisasi sebesar Rp. 12.060.511.378,00 atau 98,86% sementara itu capaian target kinerjanya cukup tinggi yaitu sebesar 109,97% sehingga dapat dikatakan **efektif**.

Selanjutnya untuk **Misi Kedua** RPJMD yaitu **“Mewujudkan Penataan Ruang yang Harmonis dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan”** dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.114**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-2 RPJMD Tahun 2019**

| No<br>.                                                                                                       | Sasaran                                                                 | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Indikator Indikator Sasaran | Anggaran |                  |                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------|------------------|------------------|-------|
|                                                                                                               |                                                                         |                   |                                             | Pagu     | Realisasi        | %                |       |
| Misi 2 :Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan |                                                                         |                   |                                             |          |                  |                  |       |
|                                                                                                               |                                                                         |                   |                                             | 118,32   | 2.595.362.450,00 | 2.302.648.692,00 | 73,39 |
| 1                                                                                                             | Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 1                 | Ketaatan terhadap RTRW                      | 138,00   | 465.840.000,00   | 230.453.592,00   | 49,47 |
| 2                                                                                                             | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                  | 2                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup            | 98,64    | 2.129.522.450,00 | 2.072.195.100,00 | 97,31 |



Pada misi kedua RPJMD terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya Kesesuaian Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah”** dengan 2 (dua) yaitu indikator **“Ketaatan terhadap RTRW”** dan **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”** dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk misi kedua RPJMD ini pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.595.362.450,00 sementara realisasinya sebesar Rp. 2.302.648.692,00 apabila dipersentasekan sebesar 73,39% sementara itu rata-rata capaian kinerjanya sebesar 118,32% sehingga dapat dikatakan **efektif**. Apabila diuraikan masing-masing indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.Ketaatan terhadap RTRW memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 465.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 230.453.592,00 atau 49,47% sementara capaian target kinerjanya sangat tinggi yaitu sebesar 138% sehingga dapat dikatakan **efektif**.
- 2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.129.522.450,00 terealisasi sebesar 97,31% atau Rp. 2.072.195.100,00, sementara capaian target indikatornya sebesar 98,64% sehingga dapat diberi predikat **efektif**.

**Misi ketiga** RPJMD Kabupaten Pangandaran mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 244.847.685.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 192.135.183.902,00 atau 74,76% sementara itu rata-rata capaian kinerjanya sebesar Rp. 37,96% sehingga **tidak dapat dikatakan efektif**, karena nilai capaiannya lebih kecil dari realisasi penyerapan anggaran. Hal ini terjadi akibat belum adanya nilai untuk indikator **Indeks Risiko Bencana (IRB)**, sehubungan dengan belum diterbitkannya angka IRB oleh BNPB. Selain itu, rendahnya capaian kinerja Misi Ketiga juga diakibatkan **belum diperhitungkan** adanya capaian kinerja dalam indikator **Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi**, karena anggaran yang ada hanya untuk pembuatan DED, sedangkan yang diperhitungkan dalam capaian ini adalah pembangunan fisiknya.

**Tabel 3.115**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-3 RPJMD Tahun 2019**

| No.                                                               | Sasaran                                                  | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Indikator Sasaran                | Anggaran           |                    |                    |       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|                                                                   |                                                          |                   |                                                  | Pagu (Rp.)         | Realisasi (Rp.)    | %                  |       |
| Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas |                                                          |                   |                                                  |                    |                    |                    |       |
|                                                                   |                                                          |                   | 37,96                                            | 244.847.685.250,00 | 192.135.183.902,00 | 74,76              |       |
|                                                                   |                                                          |                   | 113,88                                           | 240.337.040.560,00 | 189.846.654.866,00 | 87,19              |       |
| 1                                                                 | Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas | 1                 | Persentase jalan dalam kondisi mantap            | 104,29             | 166.392.242.579,00 | 126.337.917.540,00 | 75,93 |
|                                                                   |                                                          | 2                 | Tingkat kecelakaan lalu lintas                   | 133,33             | 967.671.000,00     | 961.274.200,00     | 99,34 |
|                                                                   |                                                          | 3                 | Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik | 108,33             | 44.243.297.802,00  | 41.910.131.484,00  | 94,73 |
|                                                                   |                                                          | 4                 | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum   | 118,18             | 3.278.174.000,00   | 3.193.348.000,00   | 97,41 |
|                                                                   |                                                          | 5                 | Indeks Resiko Sanitasi                           | 105,26             | 25.455.655.179,00  | 17.443.983.642,00  | 68,53 |

|   |                                                   |   |                                                                   |   |                  |                  |       |
|---|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|-------|
| 2 | Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana | 1 | Indeks Risiko Bencana                                             | - | 967.948.436,00   | 965.580.036,00   | 99,76 |
| 3 | Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan  | 1 | Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi | - | 3.542.696.254,00 | 1.322.949.000,00 | 37,34 |

Berdasarkan tabel di atas, akan diuraikan efektifitas capaian kinerja menurut masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Sasaran strategis **“Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas”** mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp. 240.337.040.560,00 dengan realisasi sebesar Rp. 189.846.654.866,00 apabila dipersentasekan sebesar 87,19% sementara itu rata-rata capaian kinerjanya sebesar 113,88% sehingga dapat dikatakan **efektif**. Adapun analisis efektifitas untuk masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :
  - a. Indikator kinerja pertama yaitu **“Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap”** yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 166.392.242.579,00 dan terealisasi sebesar Rp. 126.337.917.540,00 atau 75,93% sementara itu capaian kinerjanya sebesar 104,29%, jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sudah **efektif**.
  - b. Indikator kinerja kedua yaitu **“Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas”** dengan pagu anggaran Rp. 967.671.000,00 dan jumlah anggaran yang diserap sebesar Rp. 961.274.200,00 atau secara persentase sebesar 99,34% sementara itu capaian kinerjanya sangat tinggi yaitu sebesar 133,33% sehingga dapat dikatakan **efektif** dalam penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
  - c. Indikator kinerja ketiga yaitu **“Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam Kondisi Baik”** yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 44.243.297.802,00 dan terelisasi sebesar Rp. 41.910.131.484,00 sehingga apabila dipersentasekan realisasinya sebesar 94,73% sementara itu capaian kinerjanya mencapai 108,33%, maka dapat dikatakan **efektif**.
  - d. Indikator kinerja keempat yaitu **“Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum”** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.278.174.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.193.348.000,00 atau 97,41% adapun capaian kinerjanya sangat tinggi yaitu sebesar 118,18% sehingga dapat dikatakan **efektif**.
  - e. Indikator kinerja kelima yaitu **“Indeks Risiko Sanitasi”** yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.278.174.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.193.348.000,00 atau 97,41% adapun capaian kinerjanya mencapai 118,18% sehingga dapat dikatakan **efektif**.
2. Selanjutnya yaitu sasaran strategis **“Menurunnya Risiko Bencana di Daerah Rawan Bencana”** dengan indikator kinerja sasarannya hanya satu yaitu **“Indeks Risiko Bencana”**. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan pagu anggaran sebesar Rp. 967.948.436,00 dengan realisasi sebesar Rp. 965.580.036,00 atau 99,76%.. Sementara itu capaian kinerja untuk indikator Indeks Risiko Bencana datanya belum diterbitkan

- sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja dan **tidak dapat dikatakan efektif** karena realisasi capaiannya belum ada namun anggaran tetap terserap.
3. Selanjutnya sasaran strategis ketiga pada misi ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemenuhan Bangunan Pusat Pemerintahan”** dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni **“Persentase Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan yang Terpenuhi”**. Pada tahun 2019 tidak ada anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana pusat pemerintahan, tetapi yang ada adalah anggaran untuk pembuatan DED sebesar Rp. 3.542.696.254,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.322.949.000,00 atau 37,34%, sehingga belum dapat diperhitungkan sebagai capaian indikator kinerja. Namun demikian penyerapan anggarannya tetap diperhitungkan sehingga mengakibatkan rendahnya capaian kinerja dan **tidak dapat dikatakan efektif**.
- Misi Keempat** RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu **“Memperkuat Ketahanan Nilai-nilai Kearifan Lokal”** mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama.

Tabel 3.116

Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-4 RPJMD Tahun 2019

| No.                                                      | Sasaran                                                                   | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Indikator Sasaran                             | Anggaran          |                   |                  |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
|                                                          |                                                                           |                   |                                                               | Pagu (Rp.)        | Realisasi (Rp.)   | %                |       |
| Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal |                                                                           |                   |                                                               |                   |                   |                  |       |
|                                                          |                                                                           |                   | 149,23                                                        | 14.382.101.250,00 | 5.847.431.982,00  | 82,17            |       |
|                                                          |                                                                           |                   | 155,33                                                        | 13.746.228.250,00 | 5.269.177.900,00  | 67,15            |       |
| 1                                                        | Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan | 1                 | Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal                          | 200,00            | 788.952.000,00    | 786.666.400,00   | 99,71 |
|                                                          |                                                                           | 2                 | Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik | 110,67            | 12.957.276.250,00 | 4.482.511.500,00 | 34,59 |
| 2                                                        | Meningkatnya Kesatuan Bangsa                                              | 1                 | Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan             | 191,00            | 480.641.500,00    | 442.854.500,00   | 92,14 |
| 3                                                        | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi    | 1                 | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu                | 101,36            | 155.231.500,00    | 135.399.582,00   | 87,22 |

Dilihat pada tabel diatas, pagu anggaran untuk mewujudkan sasaran strategis pada misi keempat yaitu sebesar Rp. 14.382.101.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.847.431.982,00 atau 82,17% sementara rata-rata capaian kinerja indikator utama sasaran pada misi keempat sebesar 149,23% sehingga penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pada misi keempat RPJMD dapat dikatakan **efektif**. Untuk melihat sejauh mana efektifitas pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran strategis pertama yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Berkepribadian dalam Kebudayaan dan Keagamaan”** memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 13.746.228.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.269.177.900,00 apabila dipersentasekan mencapai 67,15 % sementara rata-rata capaian kinerjanya cukup tinggi mencapai 155,33 %, sehingga efektifitas anggaran pada sasaran strategis pertama misi keempat dapat dikatakan **efektif**. Selanjutnya diuraikan menurut masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
  - Indikator pertama yaitu **“Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal”** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 788.952.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 786.666.400,00 atau 99,71%. Sementara itu capaian target kinerja untuk indikator tersebut cukup besar yakni 200% sehingga persentase capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran maka dapat dikatakan **efektif**.
  - Indikator kedua yaitu **“Persentase Skala Sikap Peserta Didik yang Berkepribadian Baik”** memiliki pagu anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 12.957.276.250,00 sementara realisasinya sebesar Rp. 4.482.511.500,00 atau 34,59% sementara capaian kinerjanya mencapai 110,67% sehingga dapat dikatakan **efektif**.
- Sasaran strategis kedua **“Meningkatnya Kesatuan Bangsa”** hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan”. Adapun anggarannya yaitu sebesar Rp. 480.641.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 442.854.500,00 atau 92,14% sementara capaian kinerjanya cukup tinggi mencapai 191% sehingga persentase capaian kinerja lebih besar daripada persentase realisasi anggaran maka dapat dikatakan **efektif** dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja indikator sasaran.
- Sasaran strategis ketiga **“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik dan Berorganisasi”** hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu **“Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu”**. Adapun pagu anggarannya sebesar Rp. 155.231.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 135.399.582,00 atau 87,22% sementara itu capaian kinerja indikator sasarannya sebesar 101,36% sehingga persentase capaian kinerja lebih besar daripada persentase realisasi anggaran maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis ketiga **telah efektif**.

Selanjutnya **Misi Kelima** RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu **“Membangun Sumberdaya Manusia yang Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing”** terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama.

**Tabel 3.117**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-5 RPJMD Tahun 2019**

| No.                                                                              | Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Indikator Sasaran | Anggaran           |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
|                                                                                  |         |                   |                                   | Pagu (Rp.)         | Realisasi (Rp.)    | %     |
| Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing |         |                   |                                   |                    |                    |       |
|                                                                                  |         |                   | 105,99                            | 200.389.092.830,00 | 188.933.644.287,00 | 92,42 |

|   |                                                                     |   |                                            |               |                         |                         |              |
|---|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)           | 100,80        | 182.363.691.830,00      | 171.430.048.684,00      | 94,00        |
| 2 | Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk                              | 1 | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 107,37        | 4.372.530.000,00        | 4.295.758.782,00        | 98,24        |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender                     | 1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)           | -             | 627.966.500,00          | 466.174.053,00          | 74,24        |
|   |                                                                     |   |                                            | <b>157,80</b> | <b>1.537.852.000,00</b> | <b>1.492.982.400,00</b> | <b>97,69</b> |
| 4 | Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga                           | 1 | Indeks Pembangunan Kepemudaan              | 215,60        | 468.400.000,00          | 464.940.500,00          | 99,26        |
|   |                                                                     | 2 | Indeks Pembangunan Keolahragaan            | 100,00        | 1.069.452.000,00        | 1.028.041.900,00        | 96,13        |
| 5 | Menurunnya angka kemiskinan                                         | 1 | Persentase penurunan angka kemiskinan      | 164,00        | 11.487.052.500,00       | 11.248.680.368,00       | 97,92        |

Dilihat pada tabel di atas, rata-rata capaian kinerja masing-masing indikator pada misi kelima RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu mencapai 105,99% sementara realisasi anggarannya dari pagu sebesar Rp. 200.389.092.830,00 terealisasi sebesar Rp. 188.933.644.287,00 atau mencapai 92,42% sehingga secara rata-rata, penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada misi kelima RPJMD Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan **efektif**. Untuk melihat efektifitas masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran strategis kesatu “**Meningkatkan Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli Masyarakat**” mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu “**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**”. Pagu anggaran untuk sasaran strategis kesatu sebesar Rp. 182.363.691.830,00 sementara realisasinya mencapai Rp. 171.430.048.684,00 atau sebesar 94,00%. Adapun Capaian kinerja untuk indikator IPM sebesar 100,80% sehingga persentase capaian indikator kinerja lebih besar daripada persentase realisasi anggaran, maka termasuk ke dalam kategori **efektif**.
- Sasaran strategis kedua “**Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk**” dengan indikator kinerja “**Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**” mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 4.372.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.295.758.782,00 atau secara persentase mencapai 98,24%. Sementara itu capaian kinerja untuk indikator LPP sebesar 107,37% sehingga termasuk ke dalam kategori **efektif**.
- Sasaran strategis ketiga “**Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender**” dengan indikator kinerja “**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**” mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 627.966.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 466.174.053,00 apabila dipersentasekan mencapai 74,24%, sementara itu capaian kinerja untuk indikator IDG **belum tersedia data** (data bersumber dari BPS) sehingga termasuk ke dalam kategori **belum efektif**.
- Sasaran strategis keempat yaitu “**Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga**” memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.537.852.000,00 dari jumlah itu terealisasi sebesar 97,69% atau Rp. 1.492.982.400,00. Sementara itu rata-rata capaian kinerjanya cukup tinggi berada di angka 157,80% sehingga dapat diberi predikat **efektif**. Selanjutnya uraian untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Indikator yang pertama yaitu “**Indeks Pembangunan Kepemudaan**” memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 468.400.000,00 dengan realisasi mencapai 99,26% atau Rp. 464.940.500,00 sementara itu capaian kinerjanya cukup tinggi mencapai angka 215,60% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**.
  - b. Indikator yang kedua yaitu “**Indeks Pembangunan Keolahragaan**” memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.069.452.000,00 dengan realisasi mencapai 96,13% atau Rp. 1.028.041.900,00 sementara itu capaian kinerjanya mencapai 100% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**.
5. Sasaran strategis kelima “**Menurunnya Angka Kemiskinan**” hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “**Persentase Penurunan Angka Kemiskinan**”, adapun pagu anggarannya sebesar Rp. 11.487.052.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.248.680.368,00 atau 97,92%. Sementara itu capaian target indikator kinerja penurunan angka kemiskinan cukup besar yakni sebesar 164% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**. Hasil yang sangat signifikan ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan populis dan *pro poor* dari Bupati/Wakil Bupati Pangandaran.

Kemudian yang terakhir adalah **Misi Keenam** yaitu “**Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan**” terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama.

**Tabel 3.118**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-6 RPJMD Tahun 2019**

| No.                                                                               | Sasaran                                               | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Indikator Sasaran                                                                | Anggaran   |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                                                                   |                                                       |                   |                                                                                                  | Pagu (Rp.) | Realisasi (Rp.)   | %                 |       |
| Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan |                                                       |                   |                                                                                                  |            |                   |                   |       |
|                                                                                   |                                                       |                   |                                                                                                  | 71,89      | 68.947.130.141,00 | 65.014.422.355,00 | 90,08 |
| 1                                                                                 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah                  | 1                 | Indek Gini                                                                                       | -          | 378.932.500,00    | 306.542.413,00    | 80,90 |
| 2                                                                                 | Menurunnya tingkat pengangguran                       | 1                 | Persentase Tingkat pengangguran terbuka                                                          | 129,48     | 392.450.000,00    | 386.014.910,00    | 98,36 |
|                                                                                   |                                                       |                   |                                                                                                  | 86,20      | 68.175.747.641,00 | 64.321.865.032,00 | 90,98 |
| 3                                                                                 | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan | 1                 | Persentase pertumbuhan PDRB                                                                      | 139,25     | 14.871.259.157,00 | 14.042.734.931,00 | 94,43 |
|                                                                                   |                                                       | 2                 | Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM                                                             | 100,00     | 711.367.646,00    | 681.727.183,00    | 95,83 |
|                                                                                   |                                                       | 3                 | Jumlah Koperasi yang sehat                                                                       | 100,00     | 701.425.000,00    | 441.414.375,00    | 62,93 |
|                                                                                   |                                                       | 4                 | Pola Pangan Harapan                                                                              | 102,42     | 771.450.000,00    | 764.427.900,00    | 99,09 |
|                                                                                   |                                                       | 5                 | Jumlah kunjungan wisata                                                                          | 75,51      | 48.774.040.958,00 | 46.065.031.163,00 | 94,45 |
|                                                                                   |                                                       | 6                 | Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC) | -          | 2.346.204.880,00  | 2.326.529.480,00  | 99,16 |

Dilihat pada tabel di atas, pagu anggaran untuk pencapaian seluruh sasaran strategis pada misi keenam adalah sebesar Rp. 68.947.130.141,00 dengan realisasi anggaran

mencapai 90,08% atau sebesar Rp. 65.014.422.355,00. Sementara itu rata-rata capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis pada misi keenam RPJMD Kabupaten Pangandaran sebesar 54,48% sehingga secara rata-rata, penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada misi keenam RPJMD Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan **belum efektif**.

Hal ini terjadi karena terdapat 2 (dua) indikator sasaran belum ada capaiannya. Untuk indikator "**Indek Gini**" datanya bersumber dari BPS yang sampai dengan laporan ini disusun datanya belum tersedia, disisi lain penyerapan anggarannya tetap diperhitungkan. Sementara indikator sasaran "**Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari *Global Sustainable Tourist Council (GSTC)***", pada tahun 2019 belum memiliki target, baru pada tahun 2021 target capainnyanya diperhitungkan. Namun secara indikator pemenuhan persyaratan pengakuan dari GSTC tetap berlangsung dan penyerapan anggaran tetap diperhitungkan yang berakibat mengurangi terhadap persentase capaian indikator.

Untuk melihat efektifitas masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis kesatu yaitu "**Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah**" hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu "**Indeks Gini (Gini Ratio)**" dengan pagu anggaran sebesar Rp. 378.932.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 306.542.413,00 atau mencapai 80,90%. Sementara itu, capaian kinerja untuk indikator Indeks Gini sampai laporan ini disusun belum tersedia dari BPS. Maka capaian indikator kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran maka termasuk ke dalam kategori **belum efektif**.
2. Sasaran strategis kedua yaitu "**Menurunnya Tingkat Pengangguran**" mempunyai indikator kinerja sasaran yaitu "**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka**" dengan pagu anggaran sebesar Rp. 392.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 386.014.910,00 atau 98,36%. Sementara itu capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 77,23% sehingga persentase capaian indikator kinerja lebih kecil daripada persentase realisasi anggaran maka termasuk ke dalam kategori **tidak efektif**.
3. Sasaran strategis ketiga yaitu "**Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan**" memiliki 6 (enam) indikator kinerja utama dengan pagu total sebesar Rp. 68.175.747.641,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.321.865.032,00 atau mencapai 90,98% sementara rata-rata capaian kinerjanya sebesar 86,20% sehingga dapat dikatakan **belum efektif**. Hal ini akibat indikator sasaran "**Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari *Global Sustainable Tourist Council (GSTC)***", pada tahun 2019 belum memiliki target, baru pada tahun 2021 target capainnyanya diperhitungkan. Namun secara indikator pemenuhan persyaratan pengakuan dari GSTC tetap berlangsung dan penyerapan anggaran tetap diperhitungkan yang berakibat mengurangi terhadap persentase capaian indikator.

Untuk penjelasan capaian kinerja masing-masing indikator sebagai berikut :



- a. Indikator kinerja yang pertama **“Persentase Pertumbuhan PDRB”** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.871.259.157,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.042.734.931,00 atau 94,43% sementara itu capaian kinerjanya cukup tinggi yaitu sebesar 139,25% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**.
- b. Indikator kinerja yang kedua **“Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM”** memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 711.367.646,00 dengan realisasi anggaran mencapai 95,83% atau Rp. 681.727.183,00. Sementara itu capaian kinerjanya sebesar 100% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**.
- c. Indikator kinerja yang ketiga **“Jumlah Koperasi yang Sehat”** memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 701.425.000,00 dengan realisasi anggaran mencapai 62,93% atau Rp. 441.414.375,00. Sementara itu capaian kinerjanya yakni sebesar 100% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**.
- d. Indikator kinerja yang keempat **“Pola Pangan Harapan”** memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 771.450.000,00 dengan realisasi mencapai 99,09% atau Rp. 764.427.900,00. Sementara itu capaian kinerjanya mencapai 102,42% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**.
- e. Indikator kinerja yang kelima **“Jumlah Kunjungan Wisatawan”** memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 48.774.040.958,00 dengan realisasi mencapai 94,45% atau Rp. 46.065.031.163,00. Sementara itu capaian kinerjanya sebesar 75,51% sehingga termasuk kedalam kategori **kurang efektif**.
- f. Indikator kinerja yang keenam **“Jumlah Destinasi Wisata yang Memperoleh Pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)”**, indikator ini belum memiliki target capaian pada tahun 2018 sehingga **belum dapat dihitung efektifitasnya**.

Selain menganalisis efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran, juga dianalisis terkait dengan efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran. Efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian kinerja yang maksimum dengan penggunaan sumberdaya dan dana yang paling minimum. Pada tabel di bawah ini tergambarakan bahwa masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dapat dikatakan efisien apabila capaian indikator kinerjanya ≥100%.

**Tabel 3.119**  
**Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis**  
**RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| No.                                                                              | Sasaran                             | Indikator Kinerja |                                     | Capaian Kinerja Indikator Sasaran | Persentase Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                  |                                     |                   |                                     | 95,88                             | 84,53                         | 11,35             |
| Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani |                                     |                   |                                     |                                   |                               |                   |
|                                                                                  |                                     |                   |                                     | 102,03                            | 94,35                         | 7,68              |
|                                                                                  |                                     |                   |                                     | 91,64                             | 96,77                         | - 5,13            |
| 1                                                                                | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1                 | Opini BPK terhadap LKPD             | -                                 | 92,79                         | - 92,79           |
|                                                                                  |                                     | 2                 | Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5) | 100,00                            | 99,30                         | 0,70              |



|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   |               |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                       |                                                                           | 3 | Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5)                   | 150,00        | 98,46        | 51,54          |
|                                                                                                                       |                                                                           | 4 | Nilai AKIP                                                        | 100,00        | 94,61        | 5,39           |
|                                                                                                                       |                                                                           | 5 | Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan         | 108,22        | 98,70        | 9,52           |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>109,47</b> | <b>93,42</b> | <b>16,05</b>   |
| 2                                                                                                                     | Birokrasi yang efektif dan efisien                                        | 1 | Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)                            | 97,75         | 95,84        | 1,91           |
|                                                                                                                       |                                                                           | 2 | Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)                         | 116,00        | 92,04        | 23,96          |
|                                                                                                                       |                                                                           | 3 | Indeks Reformasi Birokrasi                                        | 114,67        | 92,37        | 22,30          |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>104,99</b> | <b>92,87</b> | <b>12,12</b>   |
| 3                                                                                                                     | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas                 | 1 | Persentase Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10)                     | 100,00        | 86,88        | 13,12          |
|                                                                                                                       |                                                                           | 2 | Survey Kepuasan Masyarakat                                        | 109,97        | 98,86        | 11,11          |
| <b>Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan</b> |                                                                           |   |                                                                   |               |              |                |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>118,32</b> | <b>73,39</b> | <b>44,93</b>   |
| 1                                                                                                                     | Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah   | 1 | Ketaatan terhadap RTRW                                            | 138,00        | 49,47        | 88,53          |
| 2                                                                                                                     | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                    | 2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                  | 98,64         | 97,31        | 1,33           |
| <b>Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas</b>                                              |                                                                           |   |                                                                   |               |              |                |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>43,26</b>  | <b>74,76</b> | <b>- 31,51</b> |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>113,88</b> | <b>87,19</b> | <b>26,69</b>   |
| 1                                                                                                                     | Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas                  | 1 | Persentase jalan dalam kondisi mantap                             | 104,29        | 75,93        | 28,36          |
|                                                                                                                       |                                                                           | 2 | Tingkat kecelakaan lalu lintas                                    | 133,33        | 99,34        | 33,99          |
|                                                                                                                       |                                                                           | 3 | Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik                  | 108,33        | 94,73        | 13,61          |
|                                                                                                                       |                                                                           | 4 | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum                    | 118,18        | 97,41        | 20,77          |
|                                                                                                                       |                                                                           | 5 | Indeks Resiko Sanitasi                                            | 105,26        | 68,53        | 36,74          |
| 2                                                                                                                     | Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana                         | 1 | Indeks Risiko Bencana                                             | -             | 99,76        | - 99,76        |
| 3                                                                                                                     | Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan                          | 1 | Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi | 15,89         | 37,34        | - 21,45        |
| <b>Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal</b>                                                       |                                                                           |   |                                                                   |               |              |                |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>149,23</b> | <b>82,17</b> | <b>67,06</b>   |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>155,33</b> | <b>67,15</b> | <b>88,18</b>   |
| 1                                                                                                                     | Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan | 1 | Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal                              | 200,00        | 99,71        | 100,29         |
|                                                                                                                       |                                                                           | 2 | Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik     | 110,67        | 34,59        | 76,07          |
| 2                                                                                                                     | Meningkatnya Kesatuan Bangsa                                              | 1 | Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan                 | 191,00        | 92,14        | 98,86          |
| 3                                                                                                                     | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi    | 1 | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu                    | 101,36        | 87,22        | 14,13          |
| <b>Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing</b>                               |                                                                           |   |                                                                   |               |              |                |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>105,99</b> | <b>92,42</b> | <b>13,57</b>   |
| 1                                                                                                                     | Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat       | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                  | 100,80        | 94,00        | <b>6,79</b>    |
| 2                                                                                                                     | Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk                                    | 1 | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                        | 107,37        | 98,24        | 9,13           |
| 3                                                                                                                     | Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender                           | 1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)                                  | -             | 74,24        | - 74,24        |
|                                                                                                                       |                                                                           |   |                                                                   | <b>157,80</b> | <b>97,69</b> | <b>60,11</b>   |

|                                                                                          |                                                       |   |                                                                                                  |              |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 4                                                                                        | Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga             | 1 | Indeks Pembangunan Kepemudaan                                                                    | 215,60       | 99,26        | 116,34         |
|                                                                                          |                                                       | 2 | Indeks Pembangunan Keolahragaan                                                                  | 100,00       | 96,13        | 3,87           |
| 5                                                                                        | Menurunnya angka kemiskinan                           | 1 | Persentase penurunan angka kemiskinan                                                            | 164,00       | 97,92        | 66,08          |
| <b>Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan</b> |                                                       |   |                                                                                                  |              |              |                |
|                                                                                          |                                                       |   |                                                                                                  | <b>54,48</b> | <b>90,08</b> | <b>- 35,60</b> |
| 1                                                                                        | Menurunnya kesenjangan antar wilayah                  | 1 | Indek Gini                                                                                       | -            | 80,90        | - 80,90        |
| 2                                                                                        | Menurunnya tingkat pengangguran                       | 1 | Persentase Tingkat pengangguran terbuka                                                          | 77,23        | 98,36        | - 21,13        |
|                                                                                          |                                                       |   |                                                                                                  | <b>86,20</b> | <b>90,98</b> | <b>- 4,79</b>  |
| 3                                                                                        | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan | 1 | Persentase pertumbuhan PDRB                                                                      | 139,25       | 94,43        | 44,82          |
|                                                                                          |                                                       | 2 | Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM                                                             | 100,00       | 95,83        | 4,17           |
|                                                                                          |                                                       | 3 | Jumlah Koperasi yang sehat                                                                       | 100,00       | 62,93        | 37,07          |
|                                                                                          |                                                       | 4 | Pola Pangan Harapan                                                                              | 104,2        | 99,09        | 3,33           |
|                                                                                          |                                                       | 5 | Jumlah kunjungan wisata                                                                          | 75,51        | 94,45        | - 18,94        |
|                                                                                          |                                                       | 6 | Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC) | -            | 99,16        | - 99,16        |

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa secara rata-rata tingkat efisiensi terhadap capaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2019 sebesar 11,35%. Penjelasan atas efisiensi masing-masing indikator sasaran per misi adalah sebagai berikut :

1. Pada **Misi Kesatu** dari total 10 (sepuluh) indikator sasaran strategis, terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran strategis yang efisien dalam pencapaian target indikator kinerjanya yaitu Tingkat Kapabilitas APIP dengan tingkat efisiensi sebesar 0,70%; Tingkat Kematangan SPIP dengan tingkat efisiensi sebesar 51,54%; Nilai AKIP dengan tingkat efisiensi sebesar 5,39%; Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan dengan tingkat efisiensi sebesar 9,52%; Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,91%; Tingkat Kematangan E-Goverment dengan tingkat efisiensi sebesar 23,96%; Indeks Reformasi Birokrasi dengan tingkat efisiensi sebesar 22,30%; Persentase Zona Integritas Daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 13,12% dan Survey Kepuasan Masyarakat dengan tingkat efisiensi sebesar 112,11%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi kesatu sebesar 9,65%.
2. Pada **Misi Kedua** dari total 2 (dua) indikator sasaran strategis, terdapat 1 (satu) indikator sasaran strategis yang efisien dalam pencapaian target indikator kinerjanya yaitu Ketaatan terhadap RTRW dengan tingkat efisiensi sebesar 82,94%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi kedua sebesar 41,47%.
3. Pada **Misi Ketiga** dari total 7 (tujuh) indikator sasaran strategis, terdapat 6 (enam) indikator sasaran strategis yang efisien dalam pencapaian target indikator kinerjanya yaitu Persentase jalan dalam kondisi mantap dengan tingkat efisiensi sebesar 28,36%; Tingkat kecelakaan lalu lintas dengan tingkat efisiensi sebesar 33,99%; Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik dengan tingkat efisiensi sebesar 13,61%; Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum dengan tingkat efisiensi sebesar 20,77%; dan Indeks Risiko Sanitasi dengan tingkat efisiensi sebesar 36,74%. Apabila dirata-

ratakan tingkat efisiensi pada misi ketiga sebesar negatif 31,43%. Hal ini disebabkan Indeks Risiko Bencana dengan tingkat efisiensi sebesar negatif 99,76% (data belum tersedia sedangkan serapan sudah diperhitungkan); dan Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi dengan tingkat efisiensi sebesar negatif 21,45% (karena capaiannya lebih kecil dari realisasi penyerapan anggaran).

4. Pada **Misi Keempat** dari total 4 (empat) indikator sasaran strategis, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang efisien dalam pencapaian target indikator kinerjanya yaitu Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal dengan tingkat efisiensinya luar biasa yaitu sebesar 100,29%; Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik dengan tingkat efisiensi sebesar 76,07%; Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dengan tingkat efisiensi sebesar 98,86%, serta Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan tingkat efisiensi sebesar 14,13%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi keempat sebesar 67,06%.
5. Pada **Misi Kelima** dari total 6 (enam) indikator sasaran strategis, terdapat 4 (empat) indikator sasaran strategis yang efisien dalam pencapaian target indikator kinerjanya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat efisiensi sebesar 6,79%; Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan tingkat efisiensi sebesar 9,13%; Indeks Pembangunan Kepemudaan dengan tingkat efisiensi sebesar 116,34%; Indeks Pembangunan Keolahragaan dengan tingkat efisiensi sebesar 3,87%; dan Persentase penurunan angka kemiskinan dengan tingkat efisiensi sebesar 66,08%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi kelima sebesar 13,57%.
6. Pada **Misi Keenam** dari total 8 (delapan) indikator sasaran strategis, terdapat 5 (lima) indikator sasaran strategis yang efisien dalam pencapaian target indikator kinerjanya yaitu Persentase pertumbuhan PDRB dengan tingkat efisiensi sebesar 44,82%; Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM dengan tingkat efisiensi sebesar 4,17%; Jumlah Koperasi yang Sehat dengan tingkat efisiensi sebesar 37,07%; dan Pola Pangan Harapan dengan tingkat efisiensi sebesar 3,33%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi keenam sebesar negatif 35,60%. Rendahnya tingkat efisiensi pada misi kelima disebabkan terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu Indeks Gini dan indikator Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari *Global Sustainable Tourist Council* (GSTC) belum ada datanya sehingga capaiannya 0 tetapi realisasi anggarannya tetap diperhitungkan. Sementara 2 (dua) indikator sasaran yaitu Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah kunjungan wisata memang tidak efisien karena capaiannya lebih kecil dari pada realisasi anggaran.



Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, diketahui bahwa **23 indikator sasaran** atau 67,65% bermakna **Baik Sekali**, **10 indikator sasaran** atau 29,41% bermakna **Baik**, **1 indikator sasaran** atau 2,94% bermakna **Kurang**, **2 indikator sasaran** atau 5,88% **belum tersedia data**, dan **1 indikator sasaran** atau 2,94% **belum memiliki target**. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 110,87%. dikategorikan **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 bermakna **Baik Sekali**.

Berdasarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategis secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran berada pada angka 99,25% sementara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 87,11% sehingga terdapat efisiensi sebesar 12,15%. Maka Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Analisis Efektifitas dan Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

| No.                                                                                                           | Sasaran                                                                 | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja Sasaran                         | Persentase Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi | Keterangan |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
|                                                                                                               |                                                                         |                   | (Indikator Kinerja yang ≥100%)                            |                               |                   |            |                     |
| Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani                              |                                                                         |                   |                                                           |                               |                   |            |                     |
| 1                                                                                                             | Birokrasi yang bersih dan akuntabel                                     | 1                 | Opini BPK terhadap LKPD                                   | -                             | 92,79             | -          | Data Belum Tersedia |
|                                                                                                               |                                                                         | 2                 | Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)                       | 100,00                        | 99,30             | 0,70       | Efektif & Efisien   |
|                                                                                                               |                                                                         | 3                 | Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5)           | 150,00                        | 98,46             | 51,54      | Efektif & Efisien   |
|                                                                                                               |                                                                         | 4                 | Nilai AKIP                                                | 100,00                        | 94,61             | 5,39       | Efektif & Efisien   |
|                                                                                                               |                                                                         | 5                 | Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan | 108,22                        | 98,70             | 9,52       | Efektif & Efisien   |
| 2                                                                                                             | Birokrasi yang efektif dan efisien                                      | 1                 | Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)                    | 97,75                         | 95,84             | -          | Efektif & Efisien   |
|                                                                                                               |                                                                         | 2                 | Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)                 | 116,00                        | 92,04             | 23,96      | Efektif & Efisien   |
|                                                                                                               |                                                                         | 3                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                | 132,38                        | 92,37             | 40,01      | Efektif & Efisien   |
| 3                                                                                                             | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas               | 1                 | Cakupan Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10)                | 100,00                        | 86,88             | 13,12      | Efektif & Efisien   |
|                                                                                                               |                                                                         | 2                 | Survey Kepuasan Masyarakat                                | 109,97                        | 98,86             | 11,11      | Efektif & Efisien   |
| Misi 2 :Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan |                                                                         |                   |                                                           |                               |                   |            |                     |
| 1                                                                                                             | Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah | 1                 | Ketaatan terhadap RTRW                                    | 103,60                        | 49,47             | 54,13      | Efektif & Efisien   |
| 2                                                                                                             | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                  | 2                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                          | 98,64                         | 97,31             | -          | Efektif & Efisien   |

| Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas                 |                                                                           |   |                                                                                                  |        |       |        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------|
| 1                                                                                 | Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas                  | 1 | Persentase jalan dalam kondisi mantap                                                            | 119,11 | 75,93 | 43,19  | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 2 | Tingkat kecelakaan lalu lintas                                                                   | 133,33 | 99,34 | 33,99  | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 3 | Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik                                                 | -      | 94,73 | -      | Kurang Efektif & Efisien |
|                                                                                   |                                                                           | 4 | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum                                                   | 115,76 | 97,41 | 18,35  | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 5 | Indeks Resiko Sanitasi                                                                           | 99,29  | 68,53 | -      | Efektif & Efisien        |
| 2                                                                                 | Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana                         | 1 | Indeks Risiko Bencana                                                                            | 103,06 | 99,76 | 3,30   | Efektif & Efisien        |
| 3                                                                                 | Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan                          | 1 | Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi                                | -      | 37,34 | -      | Kurang Efektif & Efisien |
| Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal                          |                                                                           |   |                                                                                                  |        |       |        |                          |
| 1                                                                                 | Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan | 1 | Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal                                                             | 200,00 | 99,71 | 100,29 | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 2 | Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik                                    | 110,67 | 34,59 | 76,07  | Efektif & Efisien        |
| 2                                                                                 | Meningkatnya Kesatuan Bangsa                                              | 1 | Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan                                                | 191,00 | 92,14 | 98,86  | Efektif & Efisien        |
| 3                                                                                 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi    | 1 | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu                                                   | 101,36 | 87,22 | 14,13  | Efektif & Efisien        |
| Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing  |                                                                           |   |                                                                                                  |        |       |        |                          |
| 1                                                                                 | Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat       | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                                 | 100,80 | 94,00 | 6,79   | Efektif & Efisien        |
| 2                                                                                 | Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk                                    | 1 | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                                       | 107,37 | 98,24 | 9,13   | Efektif & Efisien        |
| 3                                                                                 | Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender                           | 1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)                                                                 | -      | 74,24 | -      | Kurang Efektif & Efisien |
| 4                                                                                 | Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga                                 | 1 | Indeks Pembangunan Kepemudaan                                                                    | 215,60 | 99,26 | 116,34 | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 2 | Indeks Pembangunan Keolahragaan                                                                  | 100,00 | 96,13 | 3,87   | Efektif & Efisien        |
| 5                                                                                 | Menurunnya angka kemiskinan                                               | 1 | Persentase penurunan angka kemiskinan                                                            | 164,00 | 97,92 | 66,08  | Efektif & Efisien        |
| Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan |                                                                           |   |                                                                                                  |        |       |        |                          |
| 1                                                                                 | Menurunnya kesenjangan antar wilayah                                      | 1 | Indek Gini                                                                                       | -      | 80,90 | -      | Data Belum Tersedia      |
| 2                                                                                 | Menurunnya tingkat pengangguran                                           | 1 | Persentase Tingkat pengangguran terbuka                                                          | 77,23  | 98,36 | -      | Efektif & Efisien        |
| 3                                                                                 | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan                     | 1 | Persentase pertumbuhan PDRB                                                                      | 139,25 | 94,43 | 44,82  | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 2 | Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM                                                             | 100,00 | 95,83 | 4,17   | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 3 | Jumlah Koperasi yang sehat                                                                       | 100,00 | 62,93 | 37,07  | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 4 | Pola Pangan Harapan                                                                              | 102,42 | 99,09 | 3,33   | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 5 | Jumlah kunjungan wisata                                                                          | 75,51  | 94,45 | -      | Efektif & Efisien        |
|                                                                                   |                                                                           | 6 | Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC) | -      | 99,16 | -      | Kurang Efektif & Efisien |
| RATA-RATA                                                                         |                                                                           |   |                                                                                                  | 99,25  | 87,11 | 12,15  |                          |

Sedangkan untuk analisis efektifitas dan efisiensi per misi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Analisis Efektifitas dan Efisiensi Per Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran**  
**Tahun 2019**

| No.       | Sasaran | Capaian Kinerja Indikator Sasaran | Anggaran             |                      |       | Keterangan               |
|-----------|---------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------|--------------------------|
|           |         |                                   | Pagu (Rp.)           | Realisasi (Rp.)      | %     |                          |
| 1         | Kesatu  | 104,00                            | 112.710.612.354,05   | 106.613.027.351,00   | 94,35 | Efektif & Efisien        |
| 2         | Kedua   | 101,12                            | 2.595.362.450,00     | 2.302.648.692,00     | 73,39 | Efektif & Efisien        |
| 3         | Ketiga  | 65,52                             | 244.847.685.250,00   | 192.135.183.902,00   | 74,76 | Kurang Efektif & Efisien |
| 4         | Keempat | 149,23                            | 14.382.101.250,00    | 5.847.431.982,00     | 82,17 | Efektif & Efisien        |
| 5         | Kelima  | 105,99                            | 200.389.092.830,00   | 188.933.644.287,00   | 92,42 | Efektif & Efisien        |
| 6         | Keenam  | 54,48                             | 68.947.130.141,00    | 65.014.422.355,00    | 90,08 | Kurang Efektif & Efisien |
| RATA-RATA |         | 99,25                             | 1.540.450.278.445,05 | 1.315.478.733.842,00 | 87,11 | Efektif &Efisien         |

Meskipun secara umum berada pada kategori **Baik Sekali** serta **Efektif dan Efisien**, namun masih perlu upaya-upaya untuk meningkatkan capaian 6 (enam) indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu :

1. Indeks Profesionalisme ASN, dengan cara :
  - a. Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja dan kompensasi terhadap pegawai melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  - b. Adanya Komitmen dari seluruh ASN untuk memiliki kinerja dan disiplin yang baik sehingga capaian indeks profesionalitas ASN khususnya komponen kinerja dan disiplin dapat memenuhi target.
  - c. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2020;
  - d. Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaporkan data terkait dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin aparatur secara lengkap;
  - e. Menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar skor komponen kualifikasi dapat ditingkatkan.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan cara :
  - a. Pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan air limbah cair;
  - b. Dilaksanakan penanaman lahan kritis terutama di wilayah hulu sungai;
  - c. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mulai dari hulu sungai sampai dengan hilir sungai, mengadakan program pengelolaan sampah di sumber sampah dan mengadakan pembangunan TPST 3 R di tiap Desa.
3. Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik, dengan cara :
  - a. Merubah dan menyesuaikan dengan data dasar terbaru sebagaimana dituangkan dalam Permen PU tentang Penetapan Daerah Irigasi;
  - b. Merubah dan menyesuaikan kembali perencanaan rehabilitasi jaringan pada Jaringan Irigasi Teknis sesuai data terbaru.
4. Indeks Risiko Sanitasi, dengan cara :
  - a. Penanganan terpadu dalam pembangunan permukiman (keterpaduan dalam penanganan kawasan kumuh dan sanitasi) yaitu pembangunan RUTILAHU yang dilengkapi dengan akses rumah tangga bersanitasi.
  - b. Meningkatkan peran masyarakat yang ikut aktif dalam pemanfaatan limbah organik untuk mengurangi pencemaran lingkungan setempat.
  - c. Penambahan anggaran untuk pembuatan drainase guna mengurangi risiko genangan air
5. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan cara :
  - a. Menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran berkurang agar pencari kerja dapat tertampung;

- b. Mengefektifkan program padat karya tunai di desa-desa di wilayah Kabupaten Pangandaran yang dibiayai dari anggaran Dana Desa agar mampu mengurangi angka pengangguran terbuka.
6. Jumlah kunjungan wisata, dengan cara :
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, dengan cara menciptakan dan meningkatkan kualitas produk, pelayanan kepariwisataan, kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata (pilihan dan sistem transportasi) dan pembangunan sarana dan prasarana;
  - b. Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
  - c. Menciptakan destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan PAD dan ekonomi masyarakat;
  - d. Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan sehingga kemungkinan besar wisatawan akan berkunjung kembali dan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain.
  - e. Mengembangkan penyelenggaraan event-event yang dapat menarik wisatawan untuk datang dengan berbagai strategi .
  - f. Mengembangkan sistem informasi terpadu agar memudahkan dalam mengakses informasi seputar kepariwisataan Pangandaran sehingga sehingga dapat menangkal isu-isu negative dan informasi yang tidak benar (berita hoax)

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.



## PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KABUPATEN PANGANDARAN

### A. TINGKAT NASIONAL

1. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) terbaik dari 18 Kabupaten/Kota dan Provinsi Yang Dimekarkan.



2. Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Keberhasilan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2017, dari Kementerian Keuangan republik Indonesia.



### B. TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT

- 1.
2. Peringkat 1 Pemerintah Daerah terbaik dalam Kategori Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 tingkat Provinsi Jawa Barat;
3. Akreditasi Puskesmas
  - a. Puskesmas Pangandaran merupakan Puskesmas yang pertama mendapatkan predikat **akreditasi Paripurna** di wilayah Priangan Timur.
  - b. Puskesmas Langkaplancar merupakan Puskesmas yang pertama mendapatkan predikat **Akreditasi Utama** di Wilayah Priangan Timur
  - c. Puskesmas Kalipucang merupakan Puskesmas Rawat Inap yang pertama mendapatkan predikat **Akreditasi Utama** di Wilayah Priangan Timur
  - d. Puskesmas Legokjawa mendapatkan predikat **akreditasi utama** di Priangan Timur.
  - e. Puskesmas Cimerak dan Puskesmas Mangunjaya mendapatkan predikat **akreditasi Madya** di Priangan Timur
4. Juara II lomba desa tingkat provinsi diraih oleh Desa Kertayasa kecamatan Cijulang
5. Penghargaan Raksa Persada Kategori Kabupaten/Kota Penyusun terbaik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2017 Tingkat Provinsi Jawa Bara

| NO | EVENT | MATA LOMBA | NAMA PESERTA | PRESTASI |
|----|-------|------------|--------------|----------|
|----|-------|------------|--------------|----------|



| NO | EVENT                                                                                          | MATA LOMBA                                                                  | NAMA PESERTA                          | PRESTASI             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1  | PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) XII JAWA BARAT TAHUN 2018                                | Bola Voli Pasir                                                             | IPNUL MAULANA<br>FAZAR MAULANA MANSIZ | JUARA II (PERAK)     |
|    |                                                                                                | Tinju                                                                       | TRISNO SUTRISNO                       | JUARA III (PERUNGGU) |
| 2  | INVITASI OLAHRAGA TRADISIONAL BAGI PELAJAR SD/SEDERAJAT TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 |                                                                             | KABUPATEN PANGANDARAN                 | JUARA UMUM           |
|    |                                                                                                | Dagongan                                                                    | Kec. Cigugur                          | JUARA I (EMAS)       |
|    |                                                                                                | Egrang                                                                      | Kec. Sidamulih                        | JUARA II (PERAK)     |
|    |                                                                                                | Sumpitan                                                                    | Kec. Langkaplancar                    | JUARA III (PERUNGGU) |
|    |                                                                                                | HADANG                                                                      | Kec. Parigi                           | JUARA IV (HARAPAN I) |
| 3  | PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH (PORPEMDA) XIV JAWA BARAT TAHUN 2018                          | Egrang                                                                      | KABUPATEN PANGANDARAN                 | JUARA III (PERUNGGU) |
|    |                                                                                                | Tarumpah Panjang                                                            | KABUPATEN PANGANDARAN                 | JUARA III (PERUNGGU) |
| 4  | PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR DAERAH PERBATASAN (PORSENITAS) VII BKAD KUNCI BERSAMA TAHUN 2018 | Tenis Meja Eksekutif                                                        | KABUPATEN PANGANDARAN                 | JUARA I (EMAS)       |
|    |                                                                                                | Tarumpah Panjang PUTERI                                                     | KABUPATEN PANGANDARAN                 | JUARA III (PERUNGGU) |
| 5  | LOMBA APRESIASI GTK PAUD DIKMAS BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI                                   | GURU KB/TPA/SPS (Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis) | Siti Hodijah, S.Pd                    | juara harapan 2      |
| 6  | LOMBA APRESIASI GTK PAUD DIKMAS BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI                                   | Penilik                                                                     | Samaudin, S.Pd                        | juara harapan 2      |
| 7  | FLS2N TINGKAT PROVINSI                                                                         | Menyanyi Solo                                                               | Rasya Rahma Insani                    | Juara Harapan 3      |
| 8  | O2SN TINGKAT PROVINSI                                                                          | cabor Atletik                                                               | Yulia Setiawati                       | Juara 3              |
| 9  | GSI TINGKAT PROVINSI                                                                           | SEPAK BOLA                                                                  | Jangilus FC                           | Juara 3              |

#### a. Prestasi

- Juara II lomba desa tingkat provinsi diraih oleh Desa Kertayasa kecamatan Cijulang
- Juara Harapan I BUMDES Gua Bau Tingkat Provinsi Jawa Barat diraih oleh Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang.

Penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- Kepala Dusun Terbaik Penggerak P2WKSS tingkat Provinsi, diraih oleh Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak.
- Kepala Desa terbaik dalam Pengelola Program P2WKSS tingkat Provinsi yaitu Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak.
- Juara I Kategori PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) tingkat Provinsi Jawa Barat diraih oleh Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran.
- Juara III pengelola program P2WKSS kategori Kabupaten diraih oleh Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak.
- Juara operator SIGA ( Sistem Informasi Gender dan Anak) terbaik tahun 2018.
- Juara III kreativitas tutup botol oleh kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) diraih oleh Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak.

Pada Tahun 2018 Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan berhasil mendapat penghargaan sebagai juara 1 (satu) Lomba Cipta Menu (LCM) Kategori Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

t.

Adapun penghargaan dan apresiasi yang didapat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penghargaan dari Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia (POSSI) Provinsi Jawa Barat atas nama Fadia Haaya Nuraini sebagai Juara I, 3.000 meter Finswimming Putri Kategori Umum A pada Tahun 2018.
- 2) Penghargaan dari Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia (POSSI) Provinsi Jawa Barat atas nama Fadia Haaya Nuraini sebagai Juara I, 5.000 meter Finswimming Putri Kategori Umum A pada Tahun 2018.

- 1) Juara 1 Capaian UPSUS SIWAB (IB, Bunting dan Lahir) Tingkat Provinsi Jawa Barat
- 2) Juara 3 Lomba Kambing PE (Kategori Kambing PE Ratu Bibit Gigi 1-2 Pasang dalam Kategori Kontes Ternak tingkat Provinsi Jawa Barat
- 3) Juara 2 dalam rangka Unjuk Tangkas Inseminasi Buata (IB) tingkat Provinsi Jawa Barat

Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif, dan Kreatif (Baik) Kategori Otonomi Daerah Baru Terinspirasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.